



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LBMN AUDITED

Tahun Anggaran
2021



www.djkn.kemenkeu.go.id



halodjkn@kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN mempunyai hubungan yang sangat jelas dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara, sehingga keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN). LBMN Tahun 2021 (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 yang disampaikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang yang telah didahului dengan proses rekonsiliasi baik rekonsiliasi di tingkat internal Kementerian/Lembaga, maupun rekonsiliasi antar Pengguna Barang dengan Pengelola Barang. Secara umum, LBMN Tahun 2021 (*Audited*) memuat Perkiraan Neraca, Ikhtisar atas LBMN termasuk Ikhtisar BMN eks BMN *Idle* yang telah diserahkan ke DJKN dan Catatan Atas LBMN serta dilampiri dengan LBMN Per Kementerian/Lembaga (K/L).

Sehubungan dengan penyusunan LBMN Tahun 2021 (*Audited*), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

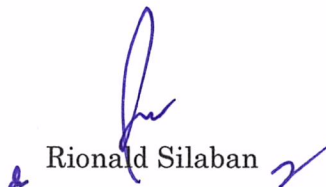
1. LBMN berdasarkan Perkiraan Neraca menyajikan informasi tentang aset dalam bentuk BMN yang terdiri atas: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Konsesi Jasa. LBMN ini juga menyajikan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya berupa Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Konsesi Jasa.
2. Nilai buku BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.652,51 triliun terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp6.650,93 triliun dan BMN ekstrakomptabel

sebesar Rp1,58 triliun. Nilai buku BMN intrakomptabel sebesar Rp6.650,93 triliun berasal dari nilai perolehan sebesar Rp7.750,12 triliun dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi sebesar Rp1.099,19 triliun. Nilai buku ekstrakomptabel sebesar Rp1,58 triliun berasal dari nilai perolehan sebesar Rp3,51 triliun dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1,93 triliun.

Catatan atas LBMN dimaksudkan agar pengguna LBMN dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam LBMN yang meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos LBMN, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LBMN serta Ikhtisar LBMN yang antara lain meliputi nilai BMN per 31 Desember 2021, perkembangan nilai BMN sampai dengan 31 Desember 2021, nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud, nilai BMN yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (999.08), nilai BMN *Idle* per 31 Desember 2021, dan nilai BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN.

Perbaikan dan pengembangan yang berkesinambungan akan terus kami lakukan dalam rangka penyempurnaan LBMN. Kritik, tanggapan, saran, dan masukan yang membangun dari stakeholders sangat kami butuhkan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

a. n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara


Rionald Silaban

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR IKHTISAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
EXECUTIVE SUMMARY	ix
1. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021 <i>AUDITED</i>	
1. Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Akun Neraca Per 31 Desember 2021.....	1
2. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021 <i>AUDITED</i>	
1. Pendahuluan	2
2. Dasar Hukum	3
3. Ruang Lingkup Laporan	4
4. Struktur Laporan	6
5. Kebijakan Umum Penatausahaan Barang Milik Negara	6
5.1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang ...	9
5.2. Penyajian BMN Sesuai Bagan Akun Standar (BAS)	9
5.3. Kebijakan Kapitalisasi BMN	11
5.4. Rekonsiliasi Nilai BMN.....	11
5.5. Kebijakan Penyusutan BMN	13
5.6. Kebijakan Amortisasi BMN	17
6. Pendekatan Umum Penyusunan Laporan	21
7. Nilai BMN Per 31 Desember 2021	21
7.1. Mutasi BMN Periode Tahun 2021	22
7.2. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara	26
7.3. Nilai BMN Per Akun Neraca	27

	Halaman
7.4. Nilai BMN Per Kementerian/Lembaga.....	29
7.5. Nilai BMN Berupa Aset Tak Berwujud	34
7.6. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap	36
7.7. Pelaksanaan Amortisasi Aset Tak Berwujud	38
7.8. Perbandingan Nilai BMN pada LBMN dan LKPP.....	40
7.9. Penggunaan BMN dalam Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sampai dengan 31 Desember 2021	42
8. BMN dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08)	43
9. BMN <i>Idle</i>	44
10. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2021	48
11. Penyelesaian Anomali Data	49
12. Implementasi Aplikasi SIMAK-BMN dan E-REKON & LK .	52
13. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	52
14. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah	54

DAFTAR IKHTISAR

	Halaman
1. Ikhtisar No. 01A Mutasi BMN Per K/L Intrakomptabel	1
2. Ikhtisar No. 01B Mutasi BMN Per K/L Ekstrakomptabel	5
3. Ikhtisar No. 01C Mutasi BMN Per K/L Gabungan	9
4. Ikhtisar No. 02A Nilai BMN Intrakomptabel Berdasarkan Akun Neraca Per K/L	12
5. Ikhtisar No. 02B Nilai BMN Ekstrakomptabel Berdasarkan Akun Neraca Per K/L.....	18
6. Ikhtisar No. 02C Nilai BMN Gabungan Berdasarkan Akun Neraca Per K/L.....	23
7. Ikhtisar No. 03A Nilai Penyusutan BMN Intrakomptabel Dan Amortisasi ATB Per K/L	28
8. Ikhtisar No. 03B Nilai Penyusutan BMN Ekstrakomptabel Per K/L ..	30
9. Ikhtisar No. 03C Nilai Penyusutan BMN Gabungan Dan Amortisasi ATB Per K/L	32
10. Ikhtisar No. 04 Rekap Perbandingan Nilai BMN Pada LBMN dan LKPP.....	34
11. Ikhtisar No. 05 Resume Penggunaan BMN Sebagai <i>Underlying Asset</i> Penerbitan SBSN	37
12. Ikhtisar No. 06 Perkembangan Nilai Barang Milik Negara Menurut Kementerian Negara/Lembaga	39
13. Ikhtisar No. 07 Nilai Aset Tak Berwujud Per Akun Neraca Menurut Per Kementerian Negara/Lembaga	45
14. Ikhtisar No. 08a Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud Per Akun Neraca Menurut Kementerian/Lembaga	48
15. Ikhtisar No. 08b Rincian Nilai Amortisasi ATB Menurut Kementerian/Lembaga	51
16. Ikhtisar No. 09 Rekapitulasi Penyampaian Laporan Barang Pengguna Per Kementerian/Lembaga	53
17. Ikhtisar No. 10 BMN <i>Idle</i> Yang Telah Diserahkan Ke DJKN	58
18. Ikhtisar No. 11a Data Anomali BMN Intrakomptabel	59
19. Ikhtisar No. 11b Total Dampak Aplikasi Ke Laporan Keuangan	63
20. Ikhtisar No. 11c Identifikasi Anomali	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat	L / 1
2. 002 Dewan Perwakilan Rakyat	L / 6
3. 004 Badan Pemeriksa Keuangan	L / 15
4. 005 Mahkamah Agung	L / 25
5. 006 Kejaksaan Agung	L / 37
6. 007 Kementerian Sekretariat Negara	L / 49
7. 010 Kementerian Dalam Negeri	L / 59
8. 011 Kementerian Luar Negeri	L / 71
9. 012 Kementerian Pertahanan	L / 81
10. 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	L / 102
11. 015 Kementerian Keuangan	L / 117
12. 018 Kementerian Pertanian	L / 132
13. 019 Kementerian Perindustrian	L / 150
14. 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	L / 163
15. 022 Kementerian Perhubungan	L / 177
16. 023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	L / 199
17. 024 Kementerian Kesehatan	L / 217
18. 025 Kementerian Agama	L / 235
19. 026 Kementerian Ketenagakerjaan	L / 251
20. 027 Kementerian Sosial	L / 264
21. 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	L / 279
22. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan	L / 296
23. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	L / 314
24. 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	L / 333
25. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	L / 338
26. 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	L / 343
27. 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	L / 348
28. 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara	L / 358
29. 042 Badan Riset dan Inovasi Nasional	L / 365
30. 044 Kementerian Koperasi dan UKM	L / 377

	Halaman
31. 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	L / 386
32. 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.....	L / 391
33. 050 Badan Intelijen Negara	L / 398
34. 051 Lembaga Sandi Negara	L / 405
35. 052 Dewan Ketahanan Nasional	L / 412
36. 054 Badan Pusat Statistik	L / 417
37. 055 Kementerian PPN / BAPPENAS	L / 425
38. 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.....	L / 432
39. 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	L / 445
40. 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika	L / 452
41. 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia	L / 464
42. 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan	L / 480
43. 064 Lembaga Ketahanan Nasional	L / 490
44. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal	L / 497
45. 066 Badan Narkotika Nasional	L / 502
46. 067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	L / 512
47. 068 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	L / 526
48. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	L / 536
49. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	L / 541
50. 076 Komisi Pemilihan Umum	L / 553
51. 077 Mahkamah Konstitusi RI	L / 566
52. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	L / 573
53. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	L / 578
54. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional	L / 592
55. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	L / 602
56. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	L / 614
57. 083 Badan Informasi Geospasial	L / 626
58. 084 Badan Standarisasi Nasional	L / 633
59. 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir	L / 638
60. 086 Lembaga Administrasi Negara	L / 645
61. 087 Arsip Nasional Republik Indonesia	L / 652

	Halaman
62. 088 Badan Kepegawaian Negara	L / 659
63. 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	L / 666
64. 090 Kementerian Perdagangan	L / 676
65. 092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga	L / 688
66. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi	L / 698
67. 095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	L / 706
68. 100 Komisi Yudisial	L / 710
69. 103 Badan Nasional Penanganan Bencana	L / 715
70. 104 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	L / 722
71. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	L / 729
72. 107 Badan SAR Nasional	L / 734
73. 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	L / 746
74. 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	L / 751
75. 110 Ombudsman Republik Indonesia	L / 758
76. 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan	L / 763
77. 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	L / 770
78. 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	L / 782
79. 114 Sekretariat Kabinet	L / 789
80. 115 Badan Pengawasan Pemilihan Umum	L / 794
81. 116 Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia	L / 801
82. 117 Lembaga Penyiaran Publik - TVRI	L / 811
83. 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	L / 823
84. 119 Badan Keamanan Laut	L / 930
85. 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	L / 837
86. 122 Badan Pembina Ideologi Pancasila	L / 842
87. 123 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	L / 847
88. 199 Otorita Asahan	L / 852
89. 999 BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain	L / 855

EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) ditetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang diharuskan secara periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) berupa Laporan Barang Milik Negara Semesteran (LBMNS) dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan (LBMNT). LBMN tersebut terdiri dari Neraca, LBMN berdasarkan Kelompok Barang, dan Catatan atas LBMN. Disamping itu LBMN juga dilampiri dengan Ikhtisar LBMN dan LBMN Per Kementerian/Lembaga.

LBMN Tahun 2021 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat.

LBMN Tahun 2021 *Audited* disusun berdasarkan data Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2021 (*Audited*) yang disampaikan oleh 89 (delapan puluh sembilan) Pengguna Barang, yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif sebagaimana dapat diakses pada Aplikasi e-Rekon&LK serta 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L (BA 999).

1. NERACA BMN

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, dalam hal ini neraca yang disajikan merupakan neraca BMN yang terdiri atas Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, serta Akumulasi Penyusutannya.

Nilai BMN per 31 Desember 2021 pada LBMN Tahun 2021 *Audited* setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp 6.652.513.589,96 juta

Ringkasan Neraca atas BMN per 31 Desember 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)
Aset Lancar – Persediaan	160.054.138.891.513	198.733.886.994.432
Aset Tetap	6.794.206.425.372.170	6.983.267.759.577.110
Akumulasi Penyusutan AT	(825.728.103.451.653)	(1.030.382.274.039.890)
Aset Lainnya	520.067.468.065.482	571.626.668.359.496
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi ATB	(60.740.527.144.842)	(70.732.450.934.858)
TOTAL	6.587.859.401.732.670	6.652.513.589.956.290

2. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang (CRB) menguraikan secara rinci atas nilai BMN per perkiraan neraca, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan.

Dalam CRB ini diungkapkan pula kejadian penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN

PER AKUN NERACA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) DAN PER 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)			Tahun Anggaran 2020 (<i>Audited</i>)		
		Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
	Aset Lancar						
1171	Persediaan	198.733.886.994.432	-	198.733.886.994.432	160.054.138.891.513	-	160.054.138.891.513
	Jumlah Aset Lancar	198.733.886.994.432	-	198.733.886.994.432	160.054.138.891.513	-	160.054.138.891.513
	Aset Tetap						
1311	Tanah	4.542.539.585.905.160	-	4.542.539.585.905.160	4.539.890.522.112.000	-	4.539.890.522.112.000
1321	Peralatan dan Mesin	786.168.507.687.969	2.540.930.764.303	788.709.438.452.272	703.452.481.172.684	3.211.065.536.373	706.663.546.709.057
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(522.296.439.646.785)	(1.757.603.588.141)	(524.054.043.234.926)	(448.951.047.050.043)	(1.643.632.779.505)	(450.594.679.829.548)
1331	Gedung dan Bangunan	421.510.091.994.010	285.123.309.648	421.795.215.303.658	395.527.872.963.172	245.317.900.279	395.773.190.863.451
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(67.432.338.017.356)	(52.375.393.811)	(67.484.713.411.167)	(44.462.886.786.373)	(47.757.334.371)	(44.510.644.120.744)
1341	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.011.791.857.058.460	225.000	1.011.791.857.283.460	940.889.570.406.002	225.000	940.889.570.631.002
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(417.107.139.859.446)	(56.250)	(417.107.139.915.696)	(322.739.514.854.960)	19.704.691	(322.739.495.150.269)
1351	Aset Tetap Lainnya	65.100.816.075.779	465.145.558.065	65.565.961.633.844	54.370.285.972.898	446.708.083.858	54.816.994.056.756
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(21.736.100.363.558)	(277.114.547)	(21.736.377.478.105)	(7.882.993.693.794)	(290.657.298)	(7.883.284.351.092)
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	152.865.700.998.719	-	152.865.700.998.719	156.172.600.999.902	-	156.172.600.999.902
	Jumlah Aset Tetap	5.951.404.541.832.950	1.480.943.704.267	5.952.885.485.537.220	5.966.266.891.241.490	2.211.430.679.027	5.968.478.321.920.520
	Aset Lainnya						
1611	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	457.235.657.503.091	791.824.176	457.236.449.327.267	402.415.771.649.117	641.116.556	402.416.412.765.673
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(9.722.557.334.587)	(362.750.464)	(9.722.920.085.051)	(5.603.370.280.892)	(254.175.231)	(5.603.624.456.123)
1621	Aset Tak Berwujud (ATB)	50.348.215.428.650	-	50.348.215.428.650	43.415.800.524.174	-	43.415.800.524.174
	<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	(23.455.850.615.326)	-	(23.455.850.615.326)	(17.557.912.521.097)	-	(17.557.912.521.097)
1623	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	701.646.092.016	-	701.646.092.016	585.797.800.950	-	585.797.800.950
1661	Aset Lain-Lain **)						
	Aset Tetap dan ATB yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	63.122.312.806.758	218.044.704.805	63.340.357.511.563	73.423.246.520.178	226.210.454.507	73.649.456.974.685
	<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi</i>	(37.439.574.237.568)	(114.105.996.913)	(37.553.680.234.481)	(37.439.158.270.990)	(139.831.896.632)	(37.578.990.167.622)
	Jumlah Aset Lainnya	500.789.849.643.034	104.367.781.604	500.894.217.424.638	459.240.175.421.440	86.765.499.200	459.326.940.920.640
	TOTAL	6.650.928.278.470.420	1.585.311.485.871	6.652.513.589.956.290	6.585.561.205.554.440	2.298.196.178.227	6.587.859.401.732.670

Catatan :

*) Aset Tanah sudah dikurangi nilai aset yang tercatat ganda oleh BPS dan Kemhan sebesar Rp 104.278.709.000,00, oleh TVRI dan Setneg sebesar Rp 5.701.893.036.000,00, oleh Kemhan dan Bank Indonesia sebesar Rp 42.259.875.000, oleh Kemenhub dan Kemhan sebesar Rp 26.177.969.000,00, dan oleh Kemhan dengan Kemdikbudristek sebesar Rp 11.675.220.000,00

**) Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah

CATATAN **ATAS LAPORAN BMN**



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2021 *AUDITED*

1. PENDAHULUAN

Keakuratan dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara (BMN) dalam Neraca Pemerintah Pusat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan prasyarat dalam pengelolaan BMN yang baik. Untuk mendukung hal tersebut, seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan, Pemerintah telah menerbitkan paket perundangan yang mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sebagai peraturan pelaksanaan terkait pengelolaan BMN atas Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang telah menyusun berbagai Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan dan Perdirjen Kekayaan Negara terkait penatausahaan BMN, tata cara rekonsiliasi data BMN, penggolongan dan kodefikasi BMN, penyusutan BMN berupa aset tetap dan amortisasi ATB pada entitas Pemerintah Pusat.

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus yang lebih rinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana telah diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004. Siklus pengelolaan BMN tersebut juga didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Dalam PP dimaksud diatur bahwa Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang. Mengingat besarnya kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam melakukan pengelolaan BMN, maka di Kementerian Keuangan telah

dibentuk DJKN, unit eselon I yang salah satu tugas dan fungsinya menangani pengelolaan kekayaan negara termasuk BMN.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN, PP Nomor 27 Tahun 2014 menetapkan bahwa Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang diharuskan secara periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara Semesteran (LBMNS) dan Laporan Barang Milik Negara Tahunan (LBMNT). Laporan BMN merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang dalam Laporan Barang Pengguna (LBP).

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Tahun 2021 *Audited* adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013;
- 14) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- 17) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
- 18) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 19) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014.

3. RUANG LINGKUP LAPORAN

Pasal 88 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelola Barang harus menyusun LBMN berdasarkan hasil penghimpunan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari Pengguna Barang. Selanjutnya, LBMN dimaksud digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Pusat dalam LKPP.

LBMN Tahun 2021 *Audited* disusun berdasarkan data BMN yang dihimpun dari LBP pada 89 (delapan puluh sembilan) Pengguna Barang, yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang memiliki bagian anggaran definitif, dan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L, yaitu BA 999.08.

Dalam rangka implementasi Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan dalam penyusunan LBP dan LKKL, telah dilaksanakan integrasi Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan sejak penyusunan LBP Tahun 2017 secara bertahap. LBP yang disusun oleh Pengguna Barang saat ini dihasilkan oleh melalui Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan.

LBMN Tahun 2021 *Audited* ini disusun dari LBP yang dihasilkan melalui Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan. Sampai dengan posisi per 31 Desember 2021, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang telah menggunakan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan sebagai alat bantu dalam melakukan pembukuan dan pelaporan BMN, sedangkan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L, yaitu Otorita Asahan tidak menggunakan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan.

LBMN Tahun 2021 *Audited* menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN serta akun Neraca. Penyajian BMN berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN disusun dengan klasifikasi golongan, bidang, dan kelompok BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 216/KM.6/2021 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Sedangkan penyajian BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Sementara itu, terhadap BMN yang tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi disajikan sebagai BMN ekstrakomptabel. Penyajian BMN pada Neraca didasarkan pada klasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Menindaklanjuti temuan BPK terkait amortisasi pada Aset Tak Berwujud (ATB), telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat dan perubahannya Nomor 81/KM.6/2018, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. STRUKTUR LAPORAN

LBMN Tahun 2021 *Audited* ini disajikan dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Kata Pengantar
- 2) *Executive Summary*
- 3) Laporan Barang Milik Negara Tahun 2021 *Audited*
- 4) Catatan Atas LBMN Tahun 2021 *Audited*
- 5) Ikhtisar
 - a. Mutasi BMN per K/L (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
 - b. Nilai BMN Berdasarkan Akun Neraca per K/L (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
 - c. Nilai Penyusutan dan Amortisasi BMN per K/L (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
 - d. Perbandingan nilai BMN pada LBMN dan LKPP;
 - e. Penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2021;
 - f. Perkembangan nilai BMN per K/L 8 tahun terakhir (Tahun Anggaran 2013 s.d. Tahun Anggaran 2021);
 - g. Rekapitulasi Nilai ATB per K/L;
 - h. Rekapitulasi Amortisasi ATB per K/L;
 - i. Rekapitulasi Penyampaian Laporan Barang Pengguna per K/L;
 - j. BMN *Idle* Yang Telah Diserahkan Ke DJKN;
 - k. Rekapitulasi Data Anomali.
- 6) Lampiran

5. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

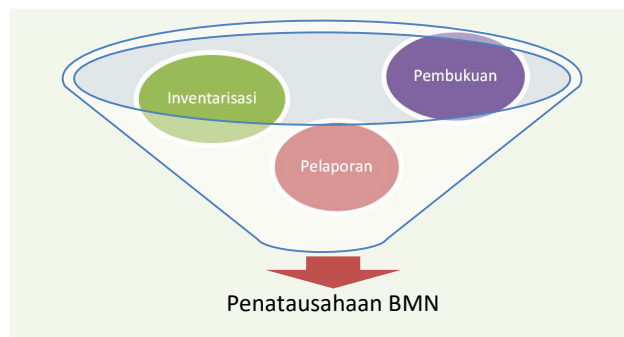
- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Gambar 1
Penatausahaan BMN

Mengacu pada Pasal 1 butir 24 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBMN sebagai *output* utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Pengelola Barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan di masa depan (*prediction value*) terkait BMN. LBMN juga merupakan bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah yang menjadi bagian dari LKPP. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi BMN mengacu pada Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar LBMN dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu:

a. Relevan

Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*); memiliki manfaat prediktif (*predictive value*); disajikan tepat waktu; dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur; serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga tercermin pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

d. Dapat dipahami

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBMN sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang
- 2) Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
- 3) Kebijakan kapitalisasi BMN
- 4) Rekonsiliasi nilai BMN
- 5) Kebijakan penyusutan dan amortisasi BMN

5. 1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pembukuan, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap Kuasa Pengguna/Pengguna dan Pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam LBMN dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan, yaitu K/L sebagai Pengguna Barang. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi BMN juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan BMN.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 diatur pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi masing-masing BMN. Selain itu, dalam rangka harmonisasi penyajian nilai BMN dalam penyusunan Neraca BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kodefikasi BMN diselaraskan dengan Bagan Akun Standar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi Dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang.

Pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja) disajikan sampai dengan sub-sub kelompok. Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah dan Eselon I disajikan sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pusat K/L laporan disajikan sampai dengan kelompok barang.

5. 2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Salah satu tujuan penyusunan LBMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan Neraca Pemerintah Pusat dalam LKPP. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan Neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010.

Penggolongan dan kodefikasi BMN disesuaikan dengan akun Neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos Neraca yaitu:

a. Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri dari (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan (e) Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan/pembuatan Aset Tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan pada aset tersebut selesai dan siap digunakan.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam LBMN hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam LKPP dan LKKL, yang meliputi penyajian BMN dari non BMN, aset yang dibatasi penggunaannya (*restricted assets*), dan lain sebagainya.

5. 3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau lebih;
- b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian yang nilainya Rp1 (satu rupiah) atau lebih.

Sesuai LBP yang disampaikan oleh Pengguna Barang, masih terdapat BMN dengan nilai di atas minimum kapitalisasi yang disajikan sebagai ekstrakomptabel dan BMN dengan nilai di bawah minimum kapitalisasi yang disajikan sebagai intrakomptabel. Berdasarkan hasil penelusuran oleh pemerintah, hal ini merupakan BMN hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP), serta adanya perubahan kodefikasi BMN.

Selanjutnya terkait dengan perubahan kodefikasi BMN telah diterbitkan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang Kodefikasi BMN. Baik surat Direktur APK maupun PMK No.29/PMK.06/2010 pada intinya menyatakan bahwa BMN yang semula dikategorikan sebagai Intrakomptabel dengan adanya IP tetap dikategorikan sebagai Intrakomptabel dan BMN yang semula dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel dengan adanya IP maupun perubahan kodefikasi tetap dikategorikan sebagai Ekstrakomptabel. Kebijakan ini telah menjadi dasar pelaporan LBMN dan LKPP sejak tahun 2008.

5. 4. Rekonsiliasi Nilai BMN

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan

diungkapkan dalam Laporan BMN secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari:

1. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Pengguna Barang
Kementerian/Lembaga melakukan rekonsiliasi secara internal antara unit akuntansi barang dan unit akuntansi keuangan, yaitu antara UAKPB dan UAKPA; dan antara UAPB dan UAPA. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data BMN pada periode yang sama di periode berjalan.
2. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang.
Rekonsiliasi dilakukan antara UAPB dan Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMN.
3. Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Bendahara Umum Negara.
Rekonsiliasi data BMN pada Bendahara Umum Negara dilakukan antara DJKN selaku penyusun LBMN dan DJPB selaku penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat pada setiap periode pelaporan.

Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2478/KN/2017 tanggal 19 Desember 2017, hal Implementasi Integrasi Aplikasi SIMAK BMN dalam Penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017, ketentuan terkait dengan Rekonsiliasi Data BMN untuk penyusunan LBP dan LKKL adalah sebagai berikut.

- 1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) tetap melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada satker yang bersangkutan melalui Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan.
- 2) UAKPB tetap melakukan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) tidak melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN, namun demikian UAPPB-W wajib melakukan pemantauan untuk memastikan satker di lingkup wilayah kerjanya telah melaksanakan Penatausahaan dan Pelaporan BMN sesuai ketentuan perundang-undangan.

- 4) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) tetap melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pusat DJKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rekonsiliasi saat ini masih terbatas pada proses pemutakhiran (updating) data BMN antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang di tingkat pusat yang dilakukan secara Semesteran/Tahunan.

5. 5. Kebijakan Penyusutan BMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran I Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrua Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, menetapkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Guna menjaga kualitas dan kehandalan laporan barang milik negara serta dalam rangka menindaklanjuti amanat peraturan yang telah diundangkan, Pemerintah mulai menerapkan kebijakan penyusutan BMN yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penerapan penyusutan BMN tersebut mulai diterapkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013 seluruh entitas pemerintah pusat. Penyusutan BMN dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan, termasuk atas BMN berupa aset tetap yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Beberapa produk hukum dalam rangka penerapan penyusutan, yaitu:

- a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

- c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat yang telah diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Peraturan-peraturan tersebut di atas menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutan atas BMN yang dikategorikan sebagai objek penyusutan, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, optimal, dan terintegrasi.

Tujuan dilakukannya penyusutan BMN (aset tetap) sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan-kebijakan tersebut di atas adalah:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Namun demikian, beberapa BMN dengan kriteria tertentu tidak dilakukan penyusutan, yaitu:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Penyusutan pertama kali
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012.
- b) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.

c) Penyusutan yang dilakukan secara periodik

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

5.5.1. Pokok-pokok pengaturan terkait Kebijakan Penyusutan BMN

a. Obyek penyusutan

BMN yang menjadi objek dalam penerapan kebijakan penyusutan adalah sebagai berikut:

- 1) Gedung dan bangunan;
- 2) Peralatan mesin;
- 3) Jalan, irigasi dan jaringan;
- 4) Aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi (selain tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.
- 5) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan, Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (selain tanah) dan Aset *Idle* yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan.

Terhadap seluruh objek penyusutan di atas dilakukan penyusutan baik untuk yang kapitalisasinya intrakomptabel maupun ektrakomptabel.

b. Metode penyusutan

Metode yang digunakan saat ini dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap adalah Garis Lurus. Formula metode Garis Lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

c. Nilai yang dapat disusutkan

Nilai yang dapat disusutkan berdasarkan peraturan ini dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- 1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012;
- 2) Untuk BMN yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, digunakan nilai perolehan. Namun demikian dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

d. Penetapan umur ekonomis/masa manfaat

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap. Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

e. *Cut-off-date* penerapan penyusutan

Penerapan penyusutan Aset Tetap dimulai pada pelaporan Semester I Tahun 2013.

f. Penyajian dan Pengungkapan

Penyusutan setiap semester disajikan sebagai:

- 1) Beban Penyusutan dalam LO Entitas Akuntansi/Pelaporan;
- 2) Akumulasi Penyusutan dalam Neraca Entitas Akuntansi/Pelaporan.

Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan:

- 1) semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian pada Beban Penyusutan dalam LO dan Akumulasi Penyusutan dalam Neraca;
- 2) periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Penyusutan dalam Neraca dan akun Ekuitas dalam LPE;
- 3) semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dalam LO, akun Akumulasi Penyusutan dalam Neraca, dan akun Ekuitas dalam LPE.

5.5.2. Masa Manfaat Dalam Penyusutan Barang Milik Negara

Masa manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap. Terdapat 2 (dua) Tabel Masa Manfaat yang digunakan dalam perhitungan penyusutan BMN, yaitu:

- a. Tabel Masa Manfaat I: merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru.
- b. Tabel Masa Manfaat II: merupakan tabel Masa Manfaat atas Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Perbaikan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan *overhaul*.

5. 6. Kebijakan Amortisasi BMN

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 membatasi ruang lingkup BMN yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, Peraturan Pemerintah ini juga melingkupi BMN yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok selain tanah dan/atau bangunan. Pasal 49 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dilakukan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI mengatur bahwa penetapan nilai BMN, termasuk Aset Tak Berwujud, mempunyai masa manfaat ekonomi atau potensi jasa terbatas, sehingga perlu dilakukan amortisasi untuk menyesuaikan nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu Aset Tak Berwujud.

Dalam menerapkan PSAP tersebut, Komite Standar Akuntansi Indonesia membuat Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI untuk memberikan pedoman akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Aset Tak Berwujud dalam laporan keuangan. Pedoman ini juga menjelaskan perlakuan khusus atas Aset Tak Berwujud, terkait amortisasi, penghentian dan penghapusannya.

Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, Pemerintah telah menerbitkan regulasi amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas pemerintah pusat, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sesuai Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015, penerapan atas amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

5.6.1. Kebijakan Pokok Terkait Amortisasi BMN

a. Objek amortisasi

Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:

- 1) Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- 2) Lisensi;
- 3) Waralaba (*Franchise*);
- 4) Hak Cipta (*Copyright*).
- 5) Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.

b. Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi

- 1) Nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa nilai residu.
- 2) Nilai yang dapat dilakukan amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan.

c. Masa Manfaat

- 1) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada prinsipnya tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali dalam keadaan sebagai berikut:
 - a) terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b) terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.
- 2) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.

d. Metode amortisasi

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Formula amortisasi Aset Tak Berwujud dengan metode garis lurus digambarkan sebagaimana ilustrasi sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Diamortisasi}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Berdasarkan metode garis lurus, amortisasi nilai Aset Tak Berwujud dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Amortisasi setiap semester disajikan sebagai:

- 1) Beban Amortisasi dalam Laporan Operasional Entitas Akuntansi/Pelaporan;

2) Akumulasi Amortisasi dalam Neraca Entitas Akuntansi/Pelaporan.

Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan:

- 1) semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap Beban Amortisasi dalam Laporan Operasional dan Akumulasi Amortisasi dalam Neraca;
- 2) periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Amortisasi dalam Neraca dan akun Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas;
- 3) semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Amortisasi dalam Laporan Operasional, akun Akumulasi Amortisasi dalam Neraca, dan akun Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

f. *Cut-off-date* penerapan amortisasi

Penerapan amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

5.6.2. Masa Manfaat Dalam Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan public, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kelompok Aset Tak Berwujud. Masa manfaat Aset Tak Berwujud tersebut berlaku untuk amortisasi Aset Tak Berwujud perolehan baru dan untuk tahun pertama diterapkannya amortisasi, yang selanjutnya disebut Masa Manfaat I.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud tersebut dapat dilakukan perubahan apabila terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah masa manfaat atau kapasitas. Pengembangan masa manfaat ATB ini selanjutnya disebut Masa Manfaat II.

6. PENDEKATAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN

LBMN disusun berdasarkan data BMN yang dihimpun dari Laporan Barang Pengguna (LBP) seluruh K/L. Untuk penyusunan LBMN Tahun 2021 *Audited*, dan dengan memperhatikan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-89/KN/KN.2/2022 tanggal 27 April 2022 hal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 *Audited* maka batas waktu penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 *Audited* kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai berikut: bagi K/L Non Signifikan paling akhir tanggal 10 Mei 2022 dan bagi K/L Signifikan paling akhir tanggal 16 Mei 2022.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian LBP Tahun 2021 *Audited* dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang terdapat 81 (delapan puluh satu) K/L atau 91% yang menyampaikan LBP Tahun 2021 *Audited* secara tepat waktu, 7 (tujuh) K/L atau 8% terlambat menyampaikan, dan 1 (satu) K/L atau 1% tidak menyampaikan LBP kepada Pengelola Barang.

Rincian penyampaian LBP Tahun 2021 *Audited* oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dapat dilihat pada Ikhtisar 09.

7. NILAI BMN PER 31 DESEMBER 2021

Nilai BMN per 31 Desember 2021 (*Audited*) merupakan penjumlahan nilai BMN per 1 Januari 2021 (saldo awal) dan nilai mutasi BMN selama kurun waktu 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nilai BMN per 31 Desember 2021 (*Audited*) adalah sebesar Rp6.652.513.589,96 juta terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp6.650.928.278,47 juta dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp1.585.311,49 juta. BMN Intrakomptabel disajikan pada LKPP sebagai Persediaan, Aset Tetap, dan sebagian dari Aset Lainnya. BMN Ekstrakomptabel tidak disajikan pada neraca melainkan diungkapkan pada Catatan atas LBMN dan Catatan atas Laporan Keuangan pada LKPP.

Apabila dibandingkan dengan LBMN Tahun 2020 (*Audited*), Nilai BMN yang disajikan pada LBMN Tahun 2021 (*Audited*) mengalami kenaikan sebesar Rp64.805.517,05 juta atau 0,98%, yaitu dari Rp6.593.594.357,72 juta menjadi Rp6.658.399.874,77 juta.

Apabila perbandingan di atas tidak memperhitungkan nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi, Nilai BMN yang disajikan pada LBMN Tahun 2021 (*Audited*) mengalami kenaikan sebesar Rp279.451.611,43 juta atau 3,74%, yaitu dari Rp7.480.062.988,31 juta menjadi Rp7.759.514.599,74 juta. Kenaikan nilai BMN dimaksud antara lain karena:

- 1) Penambahan BMN karena transaksi keuangan, yaitu penambahan BMN yang berasal dari realisasi belanja modal maupun non-belanja modal selama Tahun 2021; dan
- 2) Penambahan BMN karena transaksi non-keuangan, yaitu penambahan BMN yang antara lain berasal dari transaksi: saldo awal, transfer masuk, reklasifikasi masuk, koreksi atas perubahan nilai/kuantitas, hibah masuk, dan lainnya.

7. 1. Mutasi BMN Periode Tahun 2021

Selama periode Tahun 2021 terdapat mutasi netto sebesar Rp264.259.255,26 juta yang terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp1.477.280.146,99 juta dan mutasi kurang sebesar Rp1.213.020.891.73 juta, sehingga nilai BMN sebelum dikurangi akumulasi penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.759.514.599,74 juta.

Nilai mutasi netto BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) sebesar Rp264.259.255,26 juta tersebut, merupakan nilai bersih dari seluruh transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang. Penambahan nilai BMN antara lain disebabkan oleh:

- a) perolehan BMN sebelum tahun anggaran berjalan yang baru dicatat pada 1 Januari 2021 sampai dengan periode 31 Desember 2021 (saldo awal);
- b) perolehan BMN yang berasal dari pembelian dengan menggunakan dana APBN selama periode Tahun 2021 (pembelian);
- c) perolehan BMN dari hasil transfer masuk dari UAKPB yang lain di lingkungan pemerintah pusat RI (transfer masuk);
- d) perolehan BMN dari hasil penerimaan dari pihak lain di luar lingkungan pemerintah pusat RI (hibah masuk);
- e) perolehan BMN dari hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan (rampasan);
- f) perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan berupa bangunan/gedung dan BMN lainnya yang telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima, juga merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (penyelesaian pembangunan);
- g) perolehan BMN yang berasal dari hasil pembatalan penghapusan yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan (pembatalan penghapusan);
- h) transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang lain (reklasifikasi masuk);

- i) penambahan nilai BMN sebagai akibat pengembangan yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi (pengembangan langsung);
- j) koreksi tambah pencatatan atas nilai/kuantitas BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan pada periode sebelumnya (koreksi perubahan nilai/kuantitas);
- k) perolehan BMN yang berasal dari renovasi yang dilakukan pihak lain (penerimaan Aset Tetap Renovasi).

Sedangkan mutasi kurang antara lain disebabkan oleh :

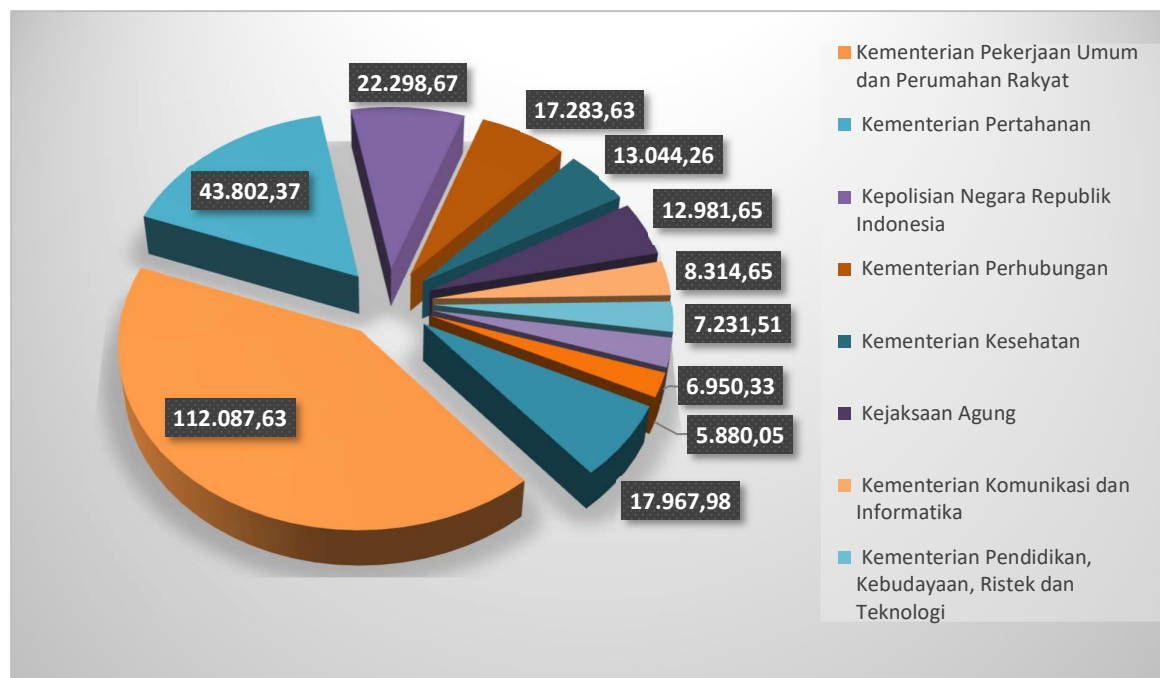
- a) penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang (penghapusan);
- b) penyerahan BMN kepada satker (UAKPB) lain di dalam lingkungan pemerintah pusat RI (transfer keluar);
- c) penyerahan BMN kepada pihak ketiga di luar lingkungan pemerintah pusat RI (hibah keluar);
- d) perubahan atas suatu klasifikasi BMN kedalam klasifikasi lain (reklasifikasi keluar);
- e) penghapusan atas suatu BMN yang terjadi karena kesalahan pencatatan BMN yang telah dilakukan/dilaporkan sebelumnya (koreksi pencatatan);
- f) pengurangan atas kuantitas suatu BMN yang menggunakan satuan luas atau satuan lain yang pengurangannya tidak menyebabkan keseluruhan BMN hapus (pengurangan);
- g) pengurangan atas suatu kuantitas/nilai yang terjadi sebagai akibat perubahan kuantitas/nilai BMN yang telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya (koreksi perubahan nilai/kuantitas);
- h) pengurangan BMN yang diserahterimakan untuk digunakan sementara oleh BUMN melalui BPYBDS;
- i) usulan BMN kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah (usulan barang hilang ke Pengelola);
- j) usulan BMN kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN dalam kondisi rusak berat dan/atau usang (usulan barang rusak berat ke Pengelola).

Mutasi BMN per K/L yang terjadi selama Tahunan Tahun 2021 terdiri atas mutasi netto positif pada 71 (tujuh puluh satu) K/L, mutasi netto negatif yang terjadi pada 17 (tujuh belas) K/L dan tidak terdapat mutasi pada satu K/L yaitu Otorita Asahan. Sebaran mutasi netto nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada K/L berdasarkan urutan nilai terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Nilai BMN dengan Mutasi Netto Positif per K/L (Gabungan)

BA	K/L	Mutasi Netto	% Kenaikan
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp112.087.625.186.439	5,05%
012	Kementerian Pertahanan	Rp43.802.365.091.933	2,28%
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp22.298.669.689.122	5,46%
022	Kementerian Perhubungan	Rp17.283.628.220.069	2,82%
024	Kementerian Kesehatan	Rp13.044.264.545.513	9,13%
006	Kejaksaan Agung	Rp12.981.653.920.312	43,32%
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp8.314.647.534.752	92,81%
023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	Rp7.231.512.073.533	1,60%
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Rp6.950.334.117.479	20,34%
025	Kementerian Agama	Rp5.880.046.792.567	4,78%
	K/L Lainnya	Rp17.967.980.753.025	6,71%
Jumlah		Rp267.842.727.924.744	

Grafik 1
Nilai BMN dengan Mutasi Netto Positif per K/L (Gabungan)
 (dalam milyar rupiah)

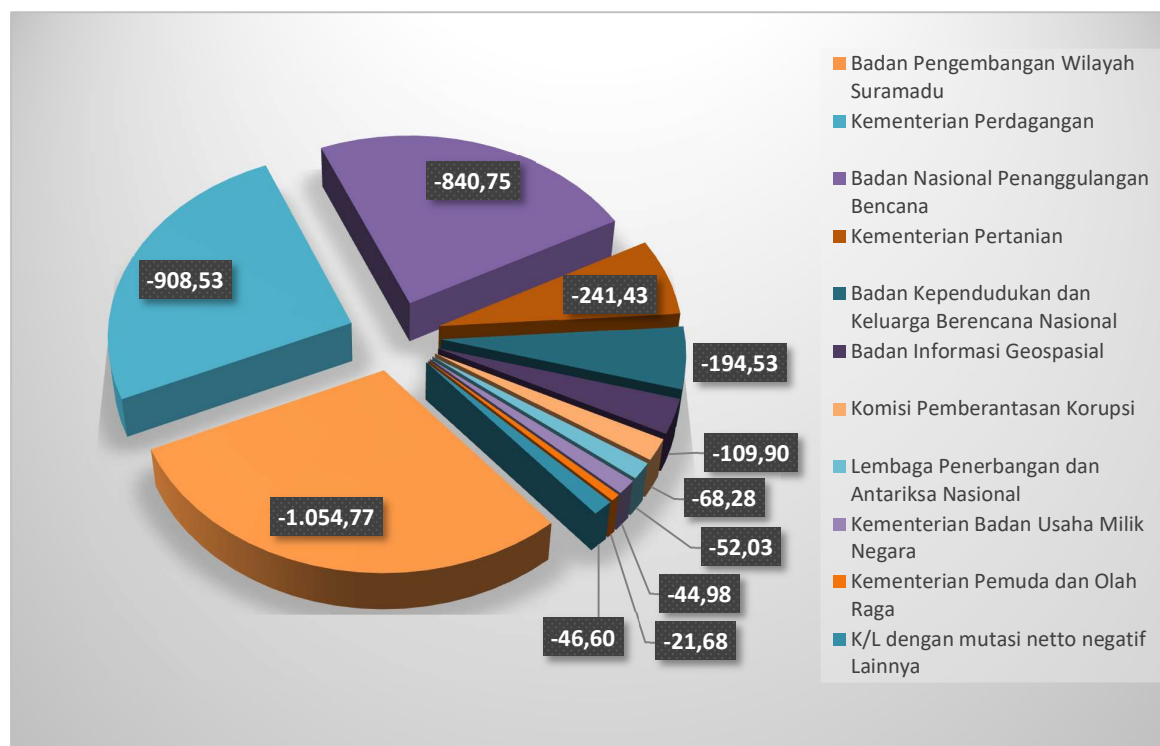


Sementara sebaran mutasi netto negatif nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada K/L adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai BMN dengan Mutasi Netto Negatif per K/L (Gabungan)

BA	K/L	Mutasi Netto	% Penurunan
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-Rp1.054.768.658.698	-85,62%
090	Kementerian Perdagangan	-Rp908.526.758.128	-11,90%
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-Rp840.752.158.749	-21,35%
018	Kementerian Pertanian	-Rp241.425.855.015	-0,28%
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-Rp194.528.533.296	-5,24%
083	Badan Informasi Geospasial	-Rp109.901.412.296	-2,38%
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-Rp68.279.538.070	-1,65%
057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	-Rp52.025.352.641	-1,38%
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-Rp44.981.487.531	-1,65%
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	-Rp21.680.547.456	-1,02%
109	Lainnya	-Rp46.602.357.406	-1,32%
Jumlah		-Rp3.583.472.659.286	

Grafik 2
K/L dengan Mutasi Netto Negatif BMN Gabungan
(dalam milyar rupiah)



Rincian mutasi BMN pada 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif dan 1 (satu)

Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L dapat dilihat pada Ikhtisar 01.

7. 2. Perkembangan Nilai Barang Milik Negara

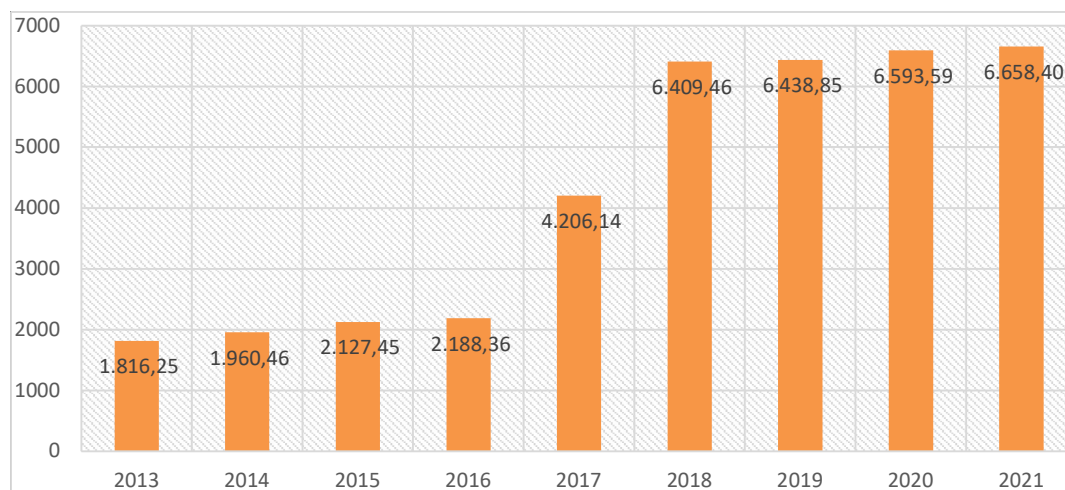
Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 10 (sepuluh) tahun terakhir (dari TA 2013 s.d. TA 2020), dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3
Perkembangan Nilai BMN
(31 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2021)

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	%
1	31 Desember 2013 (<i>Audited</i>)	1.816.246.527.921.150	(196.426.781.133.456)	(9,76%)
2	31 Desember 2014 (<i>Audited</i>)	1.960.460.213.675.730	144.213.685.754.580	7,94%
3	31 Desember 2015 (<i>Audited</i>)	2.127.449.070.827.830	166.988.857.152.100	8,52%
4	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)	2.188.359.011.696.640	60.909.940.868.810	2,86%
5	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	4.206.141.666.061.620	2.017.782.654.364.980	92,21%
6	31 Desember 2018 (<i>Audited</i>)	6.409.461.145.829.280	2.203.319.479.767.660	52,38%
7	31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)	6.424.434.366.173.720	14.973.220.344.440	0,23%
8	31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	6.593.594.357.716.900	169.159.991.543.180	2,63%
9	31 Desember 2021 (<i>Audited</i>)	6.658.399.874.765.290	64.805.517.048.392	0,98%

* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

Grafik 3
Perkembangan Nilai BMN TA 2012 s.d. TA 2021
(Nilai Dalam Triliun Rupiah)



* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

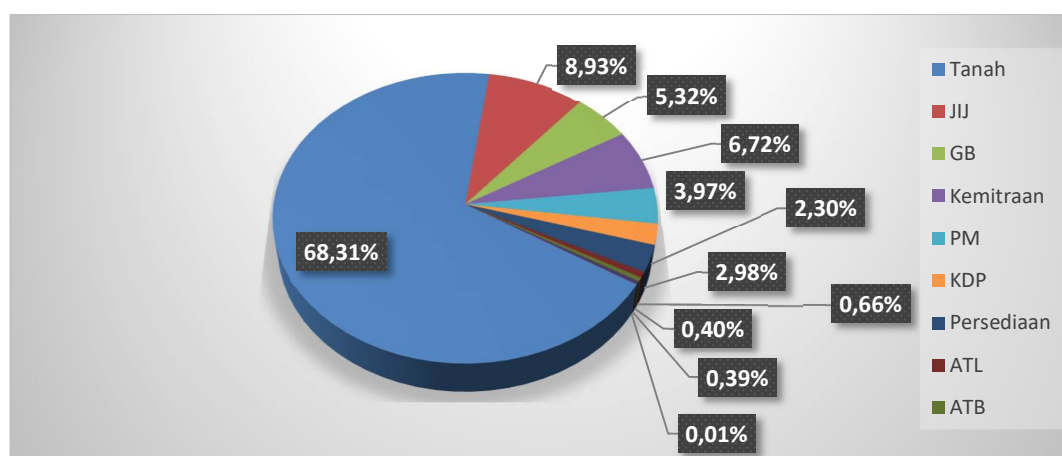
Rincian perkembangan nilai BMN per K/L pada 89 (delapan puluh sembilan) Pengguna Barang, yang terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif serta 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L dapat dilihat pada Ikhtisar 06.

7. 3. Nilai BMN per Akun Neraca

Sebaran nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada periode 31 Desember 2021 jika diklasifikasikan ke dalam pos-pos perkiraan Neraca Pemerintah Pusat/Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagian besar berada pada Tanah sebesar Rp4.548.425.870,71 juta (68,31%), Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp594.684.717,37 juta (8,93%), Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp447.513.529,24 juta (6,72%), Gedung dan Bangunan sebesar Rp354.310.501,89 juta (5,32%), Peralatan dan Mesin Rp264.655.395,22 juta (3,97%), Persediaan sebesar Rp198.733.886,99 juta (2,98%), Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp152.865.700,99 juta (2,30%). Selebihnya tersebar pada Aset Tetap yang dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah, Aset Tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.

Grafik dan tabel sebaran nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) berdasarkan pos perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

Grafik 4
Komposisi Nilai BMN per Perkiraan Neraca (Gabungan)



Tabel 4
Nilai BMN Per Perkiraan Neraca

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021 (<i>Audited</i>)					
		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Aset Lancar						
1	Persediaan	198.733.886.994.432	2,99%	-	0,00%	198.733.886.994.432	2,98%
	Jumlah Aset Lancar	198.733.886.994.432		-		198.733.886.994.432	
	Aset Tetap						
1	Tanah	4.548.425.870.714.160	68,33%	-	0,00%	4.548.425.870.714.160	68,31%
2	Peralatan dan Mesin	786.168.507.687.969	3,96%	2.540.930.764.303	49,41%	788.709.438.452.272	3,97%
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(522.296.439.646.785)		(1.757.603.588.141)		524.054.043.234.926)	
3	Gedung dan Bangunan	421.510.091.994.010	5,32%	285.123.309.648	14,68%	421.795.215.303.658	5,32%
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(67.432.338.017.356)		(52.375.393.811)		(67.484.713.411.167)	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.011.791.857.058.460	8,93%	225.000	0,00%	1.011.791.857.283.460	8,93%
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(417.107.139.859.446)		(56.250)		(417.107.139.915.696)	
5	Aset Tetap Lainnya	65.100.816.075.779	0,65%	465.145.558.065	29,32%	65.565.961.633.844	0,66%
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(21.736.100.363.558)		(277.114.547)		(21.736.377.478.105)	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	152.865.700.998.719	2,30%	-	0,00%	152.865.700.998.719	2,30%
	Jumlah Aset Tetap	5.957.290.826.641.950		1.480.943.704.267		5.958.771.770.346.220	
	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Pihak Ketiga	457.235.657.503.091	6,72%	791.824.176	0,03%	457.236.449.327.267	6,72%
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(9.722.557.334.587)		(362.750.464)		(9.722.920.085.051)	
2	Aset Tak Berwujud	50.348.215.428.650	0,40%	-	0,00%	50.348.215.428.650	0,40%
	<i>Amortisasi</i>	(23.455.850.615.326)		-		(23.455.850.615.326)	
4	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	701.646.092.016	0,01%	-	0,00%	701.646.092.016	0,01%
5	Aset Tetap dan ATB yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah	63.122.312.806.758	0,39%	218.044.704.805	6,56%	63.340.357.511.563	0,39%
	<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi</i>	(37.439.574.237.568)		(114.105.996.913)		(37.553.680.234.481)	
	Jumlah Aset Lainnya	500.789.849.643.034		104.367.781.604		500.894.217.424.638	
	TOTAL	6.656.814.563.279.420		1.585.311.485.871		6.658.399.874.765.290	

Rincian nilai BMN per akun Neraca dapat dilihat pada Ikhtisar 02. Nilai BMN berupa Tanah pada Ikhtisar 02 belum ditambah nilai aset hasil pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada

Kementerian PUPR Rp1,609,869,457,773,00 dan dikurangi nilai aset yang tercatat ganda oleh BPS dan Kemhan sebesar Rp 104.278.709.000,00, oleh TVRI dan Setneg sebesar Rp 5.701.893.036.000,00, oleh Polri dan Kemsetneg sebesar Rp 1.496.393.822.000,00, dan oleh Kemhan dan BI sebesar Rp 42.259.875.000,00.

7. 4. Nilai BMN Per Kementerian/Lembaga

BMN pada Neraca terdiri dari kelompok Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai BMN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.658.399.874,76 juta terdiri dari nilai BMN Intrakomptabel sebesar Rp6.656.814.563,28 juta dan BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp 1.585.311,48 juta.

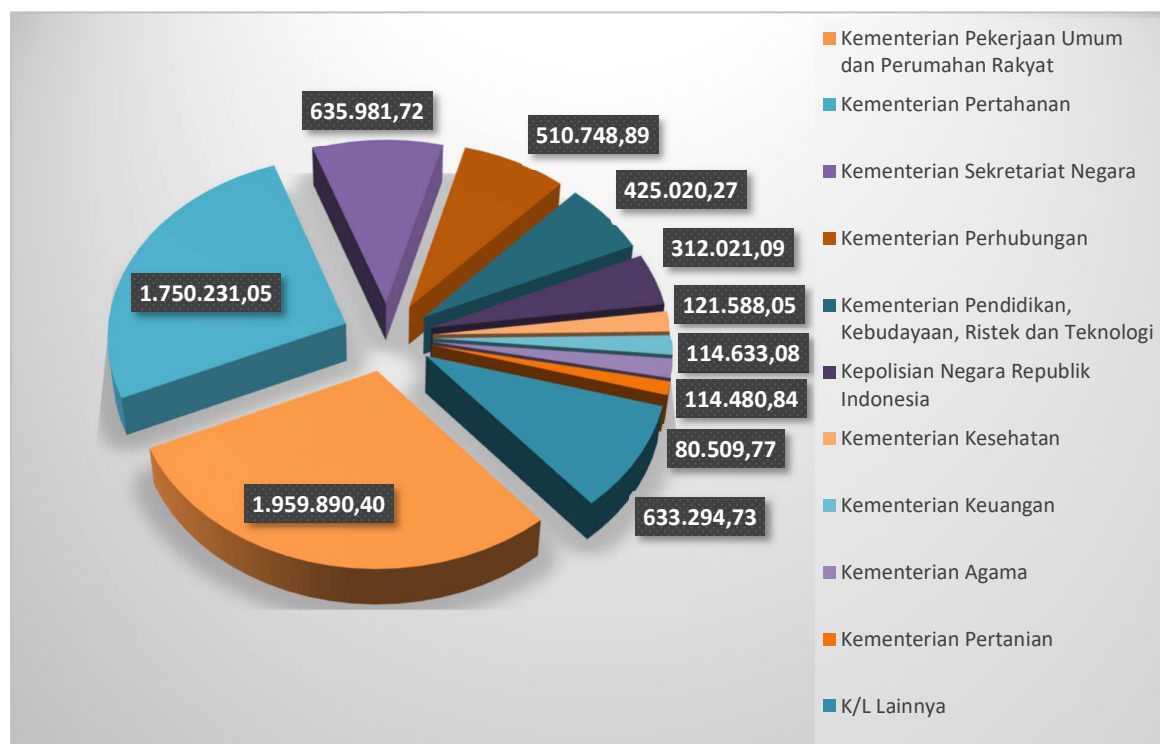
Sebaran nilai BMN secara total (Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya) pada masing-masing K/L per 31 Desember 2021 dengan nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dari yang terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Nilai BMN di Neraca per K/L (Gabungan)

No	BA	Kementerian/Lembaga	Nilai (Rp)	%
1	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.959.890.397.748.410	29,43%
2	012	Kementerian Pertahanan	1.750.231.054.461.380	26,29%
3	007	Kementerian Sekretariat Negara	635.981.716.429.960	9,55%
4	022	Kementerian Perhubungan	510.748.887.862.872	7,67%
5	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	425.020.267.908.656	6,38%
6	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	312.021.087.679.805	4,69%
7	024	Kementerian Kesehatan	121.588.045.073.177	1,83%
8	015	Kementerian Keuangan	114.633.078.846.977	1,72%
9	025	Kementerian Agama	114.480.843.089.201	1,72%
10	018	Kementerian Pertanian	80.509.765.149.504	1,21%
	---	Lainnya	633.294.730.519.268	9,51%
Total			6.658.399.874.765.290	

* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

Grafik 5
Nilai BMN di Neraca per K/L (Gabungan)
(dalam milyar rupiah)



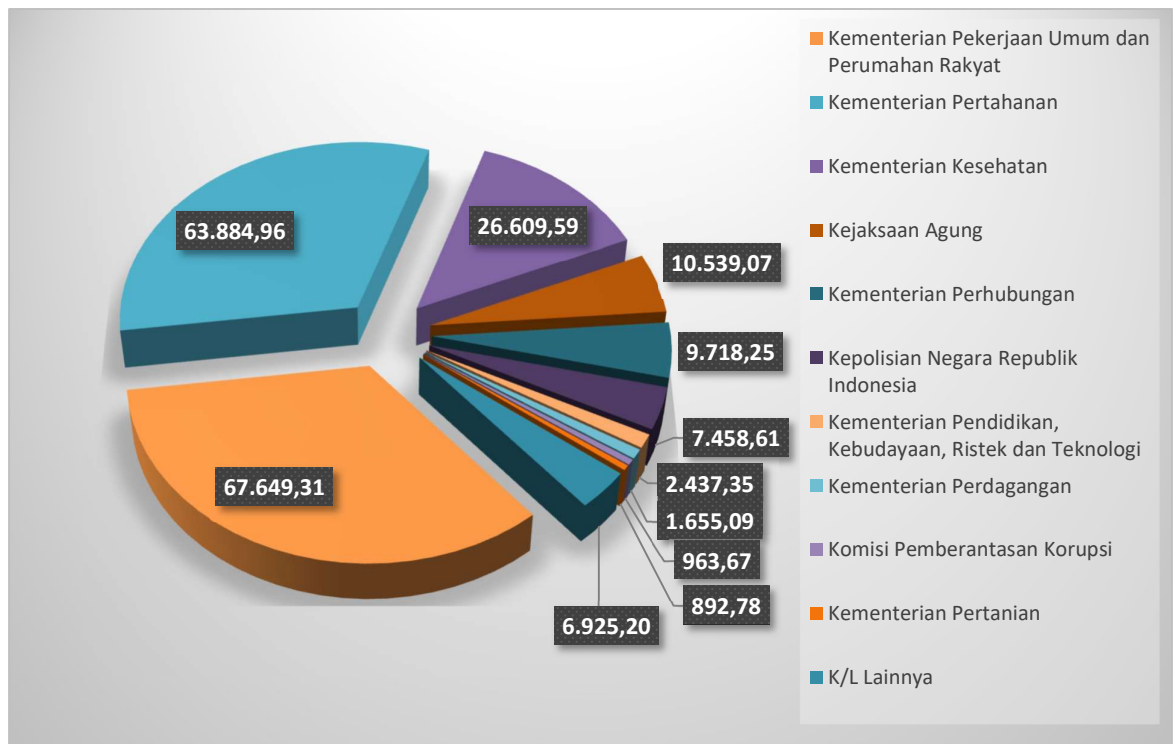
* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

Sebaran nilai BMN berupa Aset Lancar (Persediaan) pada masing-masing K/L per 31 Desember 2021 dari yang terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Nilai BMN Berupa Aset Lancar (Persediaan) di Neraca per K/L

No	BA	Kementerian/Lembaga	Rp	%
1	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	67.649.313.937.161	34,04%
2	012	Kementerian Pertahanan	63.884.963.195.524	32,15%
3	024	Kementerian Kesehatan	26.609.591.637.166	13,39%
4	006	Kejaksaan Agung	10.539.069.818.723	5,30%
5	022	Kementerian Perhubungan	9.718.253.417.892	4,89%
6	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.458.607.415.578	3,75%
7	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	2.437.351.905.483	1,23%
8	090	Kementerian Perdagangan	1.655.085.212.532	0,83%
9	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	963.674.594.121	0,48%
10	018	Kementerian Pertanian	892.779.249.159	0,45%
		K/L Lainnya	6.925.196.611.093	3,48%
Total			198.733.886.994.432	100,00%

Grafik 6
Nilai BMN Berupa Aset Lancar (Persediaan) di Neraca per K/L
(dalam milyar rupiah)



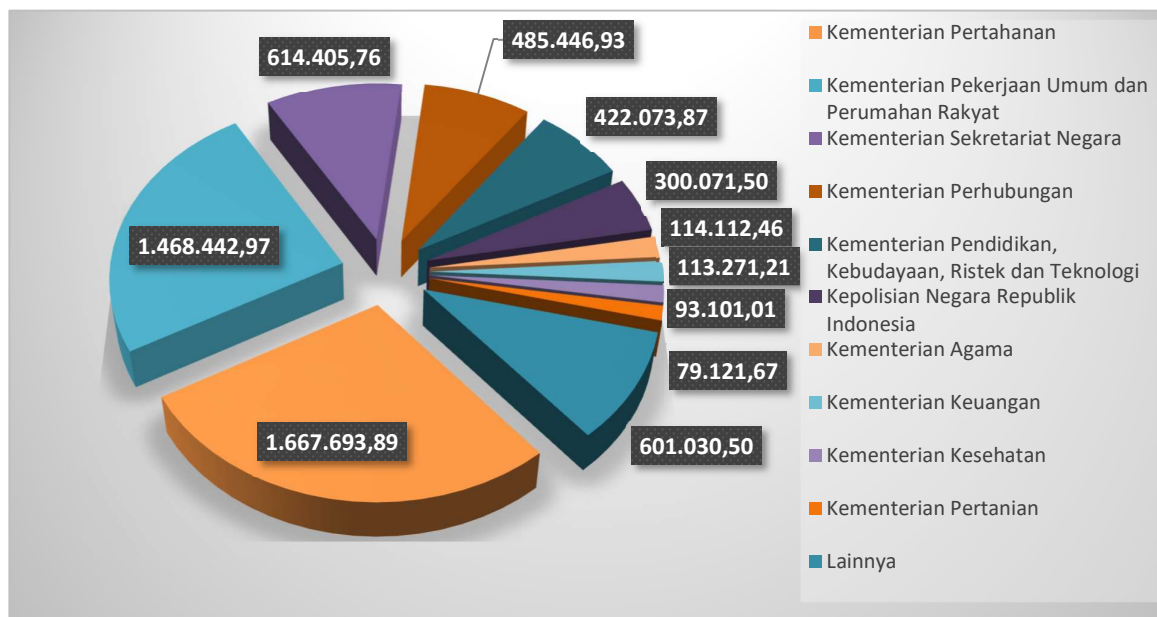
BMN berupa Aset Tetap pada Neraca terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sebaran nilai BMN berupa Aset Tetap pada masing-masing K/L per 31 Desember 2021 dengan nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dari yang terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Nilai BMN Berupa Aset Tetap di Neraca per K/L (Gabungan)

No	BA	Kementerian/Lembaga	Rp	%
1	012	Kementerian Pertahanan	1.667.693.894.663.770	27,99%
2	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.468.442.967.854.140	24,64%
3	007	Kementerian Sekretariat Negara	614.405.756.711.649	10,31%
4	022	Kementerian Perhubungan	485.446.925.934.066	8,15%
5	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	422.073.865.116.039	7,08%
6	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	300.071.499.417.232	5,04%
7	025	Kementerian Agama	114.112.462.709.871	1,92%
8	015	Kementerian Keuangan	113.271.207.312.894	1,90%
9	024	Kementerian Kesehatan	93.101.013.964.966	1,56%
10	018	Kementerian Pertanian	79.121.672.686.126	1,33%
	---	Lainnya	601.030.503.975.475	10,09%
Total			5.958.771.770.346.220	

* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan

Grafik 7
Nilai BMN Berupa Aset Tetap di Neraca per K/L (Gabungan)
(dalam milyar rupiah)



Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

BMN berupa Aset Lainnya pada Neraca terdiri dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain (Yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Sebaran nilai BMN berupa Aset Lainnya pada masing-masing K/L per 31 Desember

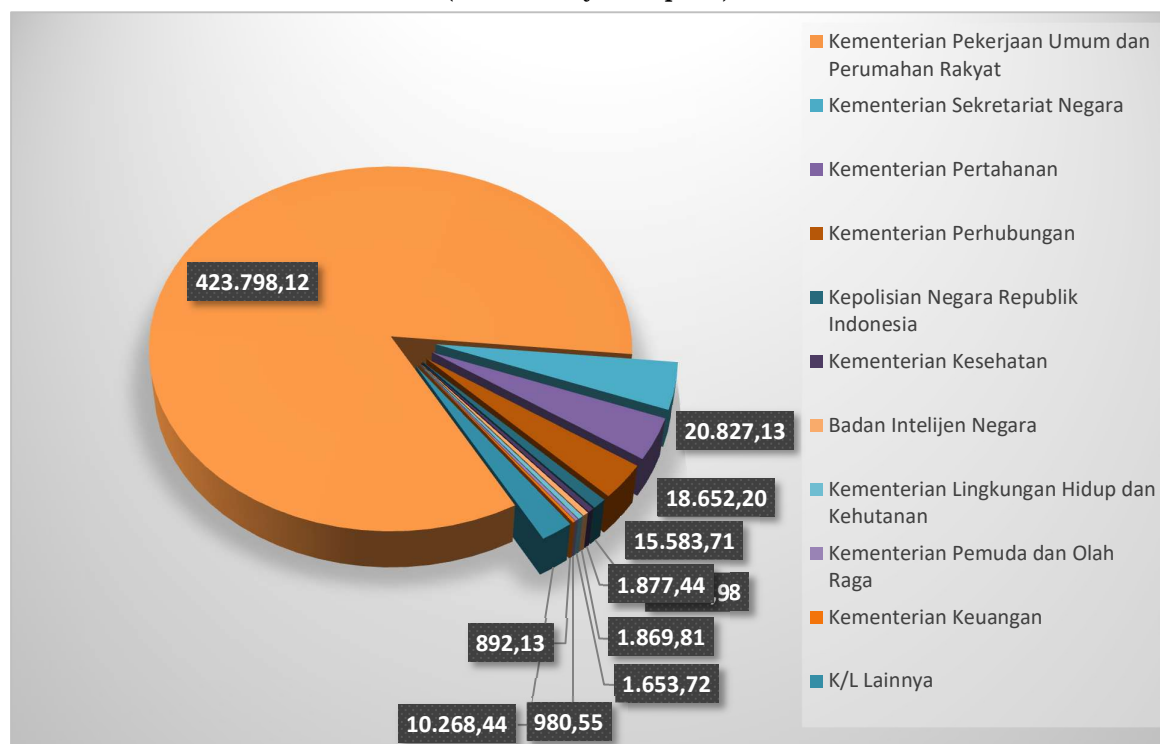
2021 dengan nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) dari yang terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Nilai BMN Berupa Aset Lainnya di Neraca per K/L (Gabungan)

No	BA	Kementerian/Lembaga	Rp	%
1	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	423.798.115.957.110	84,61%
2	007	Kementerian Sekretariat Negara	20.827.131.659.576	4,16%
3	012	Kementerian Pertahanan	18.652.196.602.089	3,72%
4	022	Kementerian Perhubungan	15.583.708.510.914	3,11%
5	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.490.980.846.995	0,90%
6	024	Kementerian Kesehatan	1.877.439.471.045	0,37%
7	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.869.808.543.982	0,37%
8	050	Badan Intelijen Negara	1.653.716.015.597	0,33%
9	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	980.550.010.784	0,20%
10	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	892.133.257.587	0,18%
	---	K/L Lainnya	10.268.436.548.959	2,05%
Total			500.894.217.424.638	

* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

Grafik 8
Nilai Aset Lainnya BMN di Neraca per K/L
(dalam milyar rupiah)



* Nilai BMN sudah termasuk akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi

Rincian nilai BMN per akun Neraca pada 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif, dan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L dapat dilihat pada Ikhtisar 02.

7. 5. Nilai BMN Berupa Aset Tak Berwujud

BMN berupa Aset Tak Berwujud meliputi Hak Cipta, Paten, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya. Berdasarkan LBP Tahun 2021 dari masing-masing K/L, diketahui bahwa nilai Aset Tak Berwujud sebelum akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.660.083,12 juta. Nilai Aset Tak Berwujud tersebut sudah termasuk Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp701.646,09 juta dan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan sebesar Rp4.610.455,03 juta. Sebaran BMN berupa Aset Tak Berwujud berdasarkan jenisnya adalah *Software* sebesar Rp27.874.948,83 juta, Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp9.028.184,88 juta, Hasil Kajian/Penelitian sebesar Rp7.595.488,24 juta, dan sisanya tersebar di beberapa jenis Aset Tak Berwujud lainnya sebesar Rp5.849.360,04 juta

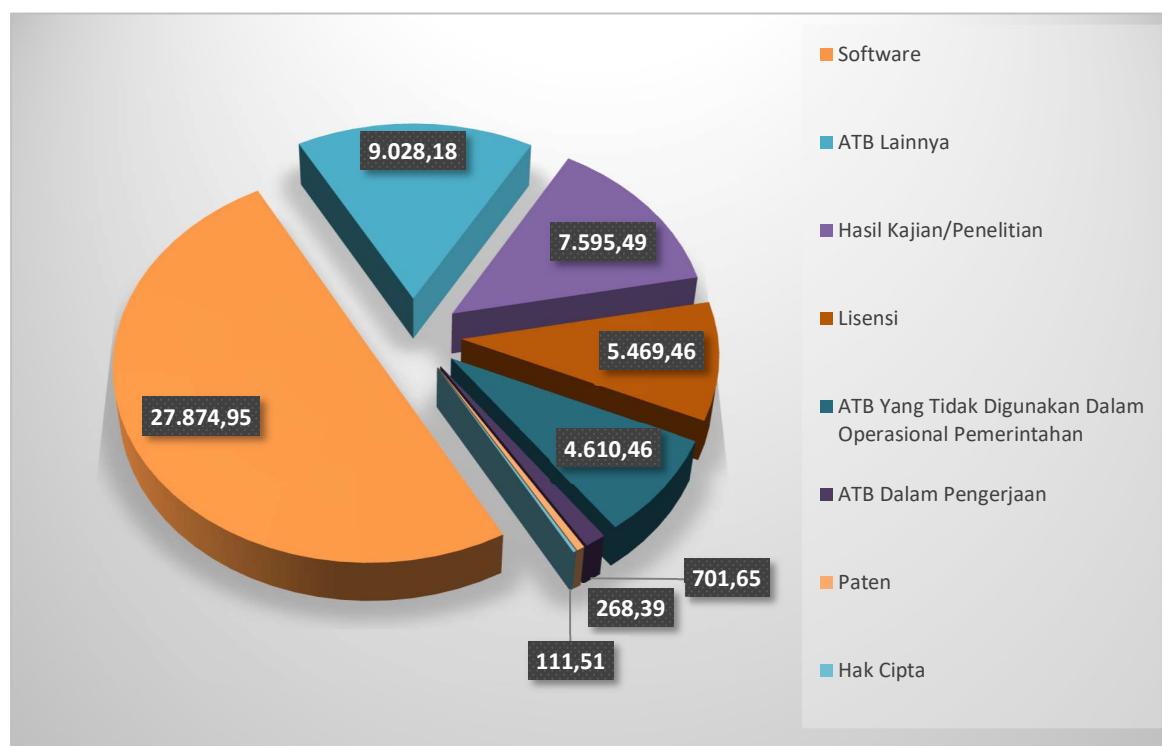
Adapun rincian BMN berupa Aset Tak Berwujud sebelum akumulasi amortisasi per 31 Desember 2021 berdasarkan jenis dan nilainya adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Komposisi Nilai BMN Berupa ATB per Jenis Aset Tak Berwujud

No	Jenis ATB	Nilai (Rp)	%
1	<i>Software</i>	27.874.948.831.752	50,08%
2	ATB Lainnya	9.028.184.881.998	16,22%
3	Hasil Kajian/Penelitian	7.595.488.240.614	13,65%
4	Lisensi	5.469.463.856.797	9,83%
5	ATB Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	4.610.455.034.939	8,28%
6	ATB Dalam Pengerjaan	701.646.092.016	1,26%
7	Paten	268.386.057.114	0,48%
8	Hak Cipta	111.510.121.475	0,20%
Jumlah		55.660.083.116.705	

* Nilai BMN belum termasuk akumulasi amortisasi

Grafik 9
Komposisi Nilai BMN Berupa Aset Tak Berwujud per Jenis Aset Tak Berwujud
 (dalam milyar rupiah)

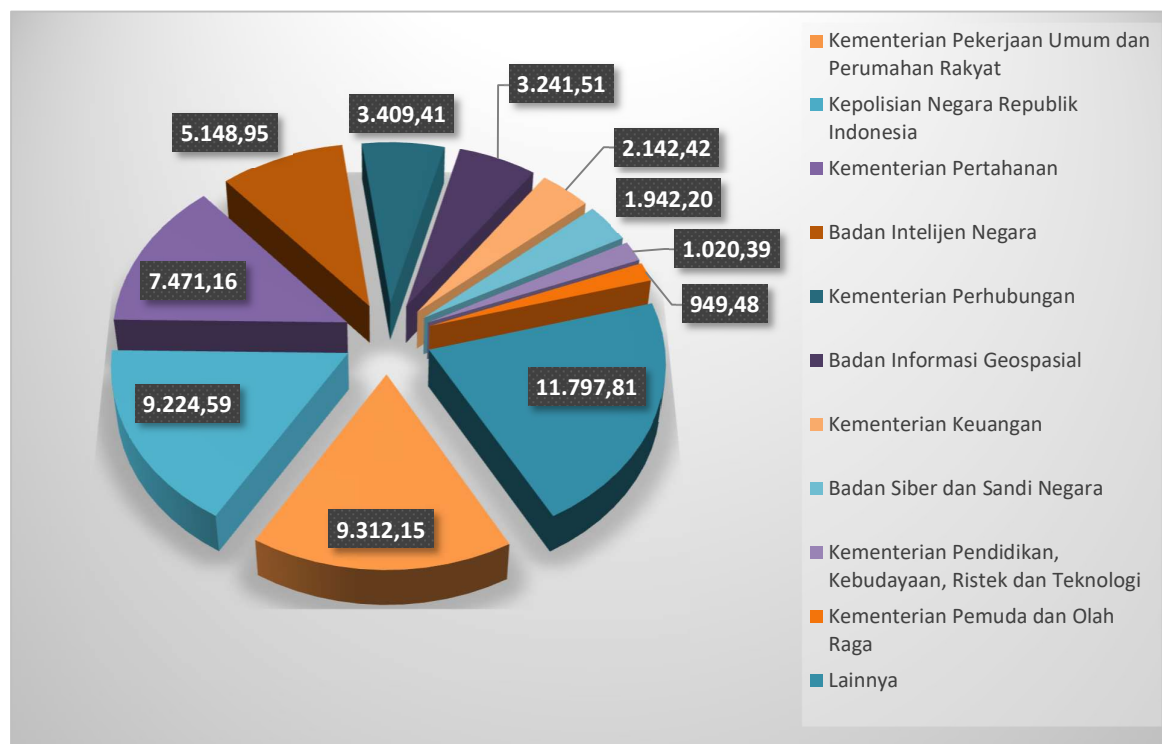


* Nilai BMN belum termasuk akumulasi amortisasi

Tabel 10
Sebaran BMN Berupa Aset Tak Berwujud per KL

BA	K/L	Nilai ATB	%
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9.312.151.770.350	16,73%
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.224.591.879.378	16,57%
012	Kementerian Pertahanan	7.471.161.647.131	13,42%
050	Badan Intelijen Negara	5.148.954.719.622	9,25%
022	Kementerian Perhubungan	3.409.406.184.936	6,13%
083	Badan Informasi Geospasial	3.241.506.308.733	5,82%
015	Kementerian Keuangan	2.142.421.265.497	3,85%
051	Badan Siber dan Sandi Negara	1.942.204.050.064	3,49%
023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	1.020.392.722.021	1,83%
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	949.478.856.668	1,71%
	Lainnya	11.797.813.712.305	21,20%
Jumlah		55.660.083.116.705	

* Nilai BMN belum termasuk akumulasi amortisasi

Grafik 10**Sebaran BMN Berupa Aset Tak Berwujud per KL
(dalam milyar rupiah)**

* BMN berupa ATB belum termasuk akumulasi amortisasi

Rincian nilai BMN berupa Aset Tak Berwujud pada masing-masing Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Ikhtisar 07.

7. 6. Pelaksanaan Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan LBP Tahun 2021, dari masing-masing K/L, diketahui bahwa nilai akumulasi penyusutan aset tetap BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) adalah sebesar Rp1.081.865.677,16 juta yang terdiri dari penyusutan aset tetap BMN Intrakomptabel sebesar Rp1.079.926.109,39 juta dan penyusutan aset tetap BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp1.939.567,76 juta. Penyusutan nilai BMN tersebut merupakan penjumlahan atas akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2021, Beban Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021, koreksi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021, dan penyesuaian penyusutan ke Neraca Tahun 2021. Rincian akumulasi penyusutan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 11
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap BMN

No	Uraian	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
1	Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2021	888.507.737.603.746	1.831.749.954.346	890.339.487.558.092
2	Beban Penyusutan	197.089.000.090.777	301.024.212.879	197.390.024.303.656
3	Koreksi Penyusutan	17.749.343.053.803	(208.049.267.099)	17.541.293.786.704
4	Penyesuaian ke Neraca	(4.156.080.673.700)	0	(4.156.080.673.700)
	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	1.099.190.000.074.630	1.924.724.900.126	1.101.114.724.974.750

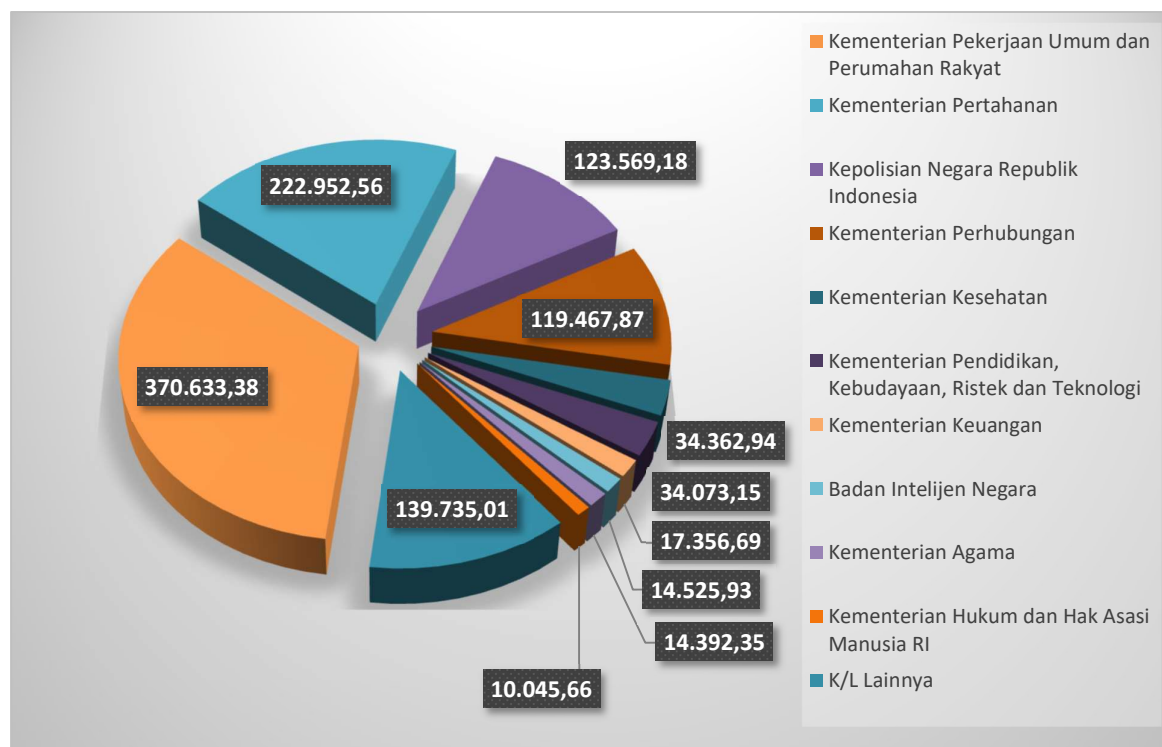
Sebaran nilai akumulasi penyusutan aset tetap BMN gabungan, pada K/L berdasarkan urutan nilai terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per K/L (Gabungan)*

BA	K/L	Akum. Penyusutan	%
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	370.633.380.736.807	33,66%
012	Kementerian Pertahanan	222.952.556.194.488	20,25%
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	123.569.180.663.688	11,22%
022	Kementerian Perhubungan	119.467.865.642.423	10,85%
024	Kementerian Kesehatan	34.362.943.124.525	3,12%
023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	34.073.149.046.981	3,09%
015	Kementerian Keuangan	17.356.686.968.152	1,58%
050	Badan Intelijen Negara	14.525.933.495.900	1,32%
025	Kementerian Agama	14.392.351.630.482	1,31%
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	10.045.663.955.384	0,91%
	K/L Lainnya	139.735.013.515.922	12,69%
	Jumlah	1.101.114.724.974.750	

* Akum. Penyusutan Aset Tetap Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

Grafik 11
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per K/L (Gabungan)
(dalam milyar rupiah)



Rincian penyusutan aset tetap BMN pada 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif dan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L dapat dilihat pada Ikhtisar 03.

7. 7. Pelaksanaan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan LBP Tahun 2021 dari masing-masing K/L, diketahui bahwa nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud adalah sebesar Rp25.412.777,15 juta. Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut merupakan penjumlahan atas Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 1 Januari 2021 sebesar Rp18.600.680,08 juta, Beban Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.796.891,58 juta, Koreksi Amortisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.993.512,28 juta, dan Penyesuaian Amortisasi ke Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.693,21 juta. Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 13
Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

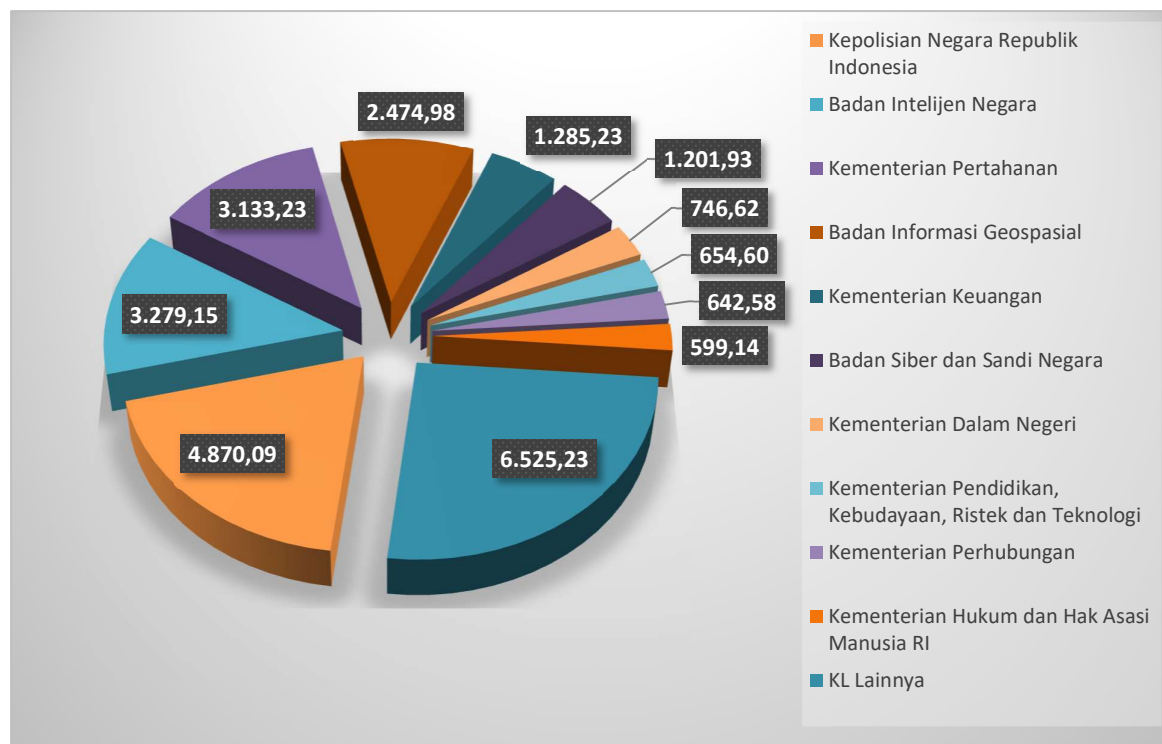
No	Uraian	Nilai Amortisasi
1	Akumulasi Amortisasi per 1 Januari 2021	18.600.680.081.496
2	Beban Amortisasi	4.796.891.584.149
3	Koreksi Amortisasi	1.993.512.278.985
4	Penyesuaian ke Neraca	21.693.208.512
Akumulasi Amortisasi		25.412.777.153.142

Sebaran nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud K/L berdasarkan urutan nilai terbesar adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Nilai Akumulasi Amortisasi ATB per K/L

BA	K/L	Akum. Amortisasi	%
060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.870.092.376.172	19,16%
050	Badan Intelijen Negara	3.279.146.175.640	12,90%
012	Kementerian Pertahanan	3.133.232.864.791	12,33%
083	Badan Informasi Geospasial	2.474.975.893.037	9,74%
015	Kementerian Keuangan	1.285.232.058.190	5,06%
051	Badan Siber dan Sandi Negara	1.201.932.429.637	4,73%
010	Kementerian Dalam Negeri	746.616.967.074	2,94%
023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	654.603.598.175	2,58%
022	Kementerian Perhubungan	642.578.824.551	2,53%
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	599.136.912.664	2,36%
---	KL Lainnya	6.525.229.053.211	25,68%
Jumlah		25.412.777.153.142	

Grafik 12
Nilai Akumulasi Amortisasi ATB per K/L
(dalam milyar rupiah)



Rincian amortisasi aset tak berwujud BMN pada 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang yang telah memiliki Bagian Anggaran Definitif dan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L dapat dilihat pada Ikhtisar 08b.

7. 8. Perbandingan Nilai BMN pada LBMN dan LKPP

Dalam rangka penyandingan antara nilai aset tetap pada LKPP dengan LBMN, akun-akun yang dibandingkan adalah akun aset tetap BMN di Neraca berupa:

- 1) Aset Lancar berupa Persediaan;
- 2) Aset Tetap berupa: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan; dan
- 3) Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud, (termasuk Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan), serta Akumulasi Amortisasi.

Rekapitulasi perbandingan antara nilai BMN Intrakomptabel pada LBMN dan LKPP per 31 Desember 2021 terdapat selisih sebesar Rp3.914.998,1 juta. Selisih pada perkiraan neraca tersebut terdiri dari:

- 1) selisih nilai Persediaan sebesar Rp416.491,11 juta (lebih besar LKPP dibandingkan LBMN),
- 2) selisih nilai Aset Tetap termasuk penyusutan sebesar Rp4.280.005,93 juta (lebih besar LBMN dibandingkan LKPP).
- 3) selisih nilai Aset Tak Berwujud termasuk amortisasi sebesar Rp51.483,27 juta (lebih besar LKPP dibandingkan LBMN).

Tabel 15
Perbandingan Nilai BMN pada LBMN dan LKPP

No.	Akun Neraca	Nilai BMN Periode TA 2021 (<i>Unaudited</i>)		
		LKPP	LBMN	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
A	ASET LANCAR	199.150.378.100.687	198.733.886.994.432	(416.491.106.255)
1	Persediaan	199.150.378.100.687	198.733.886.994.432	(416.491.106.255)
B	ASET TETAP	5.953.006.751.071.340	5.957.286.757.001.590	4.280.005.930.259
1	Tanah	4.547.684.898.848.400	4.548.424.513.326.920	739.614.478.520
2	Peralatan dan Mesin	784.676.725.241.744	786.168.250.494.630	1.491.525.252.886
3	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(521.839.788.422.307)	(522.296.182.453.446)	(456.394.031.139)
4	Gedung dan Bangunan	420.147.571.518.921	421.505.116.954.734	1.357.545.435.813
5	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(67.304.393.541.826)	(67.430.068.298.504)	(125.674.756.678)
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.011.741.986.090.570	1.011.791.844.299.160	49.858.208.590
7	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(417.088.579.049.664)	(417.107.134.032.834)	(18.554.983.170)
8	Aset Tetap Lainnya	65.009.747.686.862	65.100.816.075.779	91.068.388.917
9	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(21.734.814.547.746)	(21.736.100.363.558)	(1.285.815.812)
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.713.397.246.386	152.865.700.998.719	1.152.303.752.333
C	ASET LAINNYA	25.585.601.092.878	25.637.084.367.524	51.483.274.646
1	Aset Tidak Berwujud	50.941.205.843.715	51.048.463.188.479	107.257.344.764
2	<i>Amortisasi Aset Tidak Berwujud</i>	(25.355.604.750.837)	(25.411.378.820.955)	(55.774.070.118)
D	TOTAL NILAI BMN (Intrakomptabel)	6.177.742.730.264.900	6.181.657.728.363.550	3.914.998.098.650

Catatan: Nilai BMN untuk Otorita Asahan tidak diperbandingkan karena terdapat perbedaan penyajian dalam LBMN dan LKPP

Nilai BMN berupa Tanah pada kolom LBMN belum termasuk nilai aset hasil pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada Kementerian PUPR Rp1,609,869,457,773,00 dan dikurangi nilai aset yang tercatat ganda oleh BPS dan Kemhan sebesar Rp 104.278.709.000,00, oleh TVRI dan Setneg sebesar Rp 5.701.893.036.000,00, oleh Polri dan Kemsetneg sebesar Rp 1.496.393.822.000,00, dan oleh Kemhan dan BI sebesar Rp 42.259.875.000,00.

Rincian Perbandingan nilai BMN per K/L antara nilai BMN pada LBMN dan LKPP Tahunan Tahun 2021 dapat dilihat pada Ikhtisar 04.

Perbedaan-perbedaan tersebut di atas diharapkan dapat diminimalisir dengan dilakukannya rekonsiliasi antara Pengguna Barang dan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dengan Pengelola Barang, Pengguna Anggaran dengan Pengelola Anggaran, dan rekonsiliasi antara Pengelola Barang dengan Pengelola Anggaran pada setiap jenjang pelaporan yang sudah dilakukan mulai TA 2010. Dengan dilakukannya rekonsiliasi sesuai ketentuan, diharapkan nilai BMN yang disajikan dalam LBMN dengan nilai BMN yang disajikan dalam LKPP dapat selaras.

7. 9. Penggunaan BMN dalam Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sampai dengan 31 Desember 2021

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diatur bahwa Barang Milik Negara (BMN) dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN, baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan. Jenis, nilai, dan spesifikasi BMN yang akan digunakan sebagai aset SBSN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.08/2021, BMN yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN harus memenuhi persyaratan paling tidak yaitu memiliki nilai ekonomis, dalam kondisi layak, bukan merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak sedang dalam sengketa, dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN. BMN tersebut merupakan BMN yang belum pernah diajukan sebagai aset SBSN atau BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai aset SBSN pada periode sebelumnya.

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pembayaran semua kewajiban, imbalan, dan nilai nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud, serta BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN. Proses penggunaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN dimulai dengan adanya permintaan Usulan Daftar Nominasi Aset (DNA) atau kebutuhan BMN yang akan digunakan dalam rangka

penerbitan SBSN. Adapun total BMN *underlying assets* SBSN selama tahun 2021 adalah sebesar Rp668,312 triliun.

Penggunaan BMN memiliki peran penting dalam penerbitan SBSN, yang dapat dilihat dari besarnya nilai BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN. *Outstanding* SBSN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.139.086.917.000.000 (menggunakan kurs saat penerbitan) atau sebesar Rp1.157.057.117.000.000 (menggunakan kurs 31 Desember 2021). *Outstanding* penerbitan SBSN sampai dengan 31 Desember 2021 yang menggunakan BMN sebagai dasar penerbitannya adalah sebesar Rp556,842 triliun

Selain penggunaan BMN sebagai aset SBSN, keterkaitan lain BMN dalam penerbitan SBSN yaitu digunakannya proyek pengadaan BMN sebagai dasar penerbitan SBSN atau disebut dengan *project underlying*. Output berupa BMN yang dihasilkan dari proyek pengadaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN tidak akan digunakan sebagai aset SBSN selama *project underlying* belum selesai. Adapun *outstanding asset* per 31 Desember 2021 yang terdiri dari *project underlying* adalah sebesar Rp571,483 triliun.

Dalam rangka memitigasi risiko adanya *double underlying asset* antara *underlying asset* berupa proyek dengan *underlying asset* berupa BMN, sejak tahun 2020 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset*, khususnya untuk BMN dengan perolehan setelah tahun 2011. Sementara itu untuk menghindari penggunaan BMN yang tidak layak digunakan sebagai *underlying asset* SBSN, secara reguler dilakukan penggantian atas BMN yang sudah tidak layak digunakan sesuai dengan prinsip Syariah (sengketa, kondisi rusak berat dan terdapat pemindahtanganan/penghapusan BMN).

Rincian nilai BMN sebagai *underlying asset* dalam penerbitan SBSN dapat dilihat pada Ikhtisar 05.

8. BMN DARI BA BUN PENGELOLA BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

Laporan Barang Pengguna atas BA 999.08 berasal dari pencatatan atas transaksi terkait dengan BMN yang diperoleh dari BA 999.08. Bagi K/L yang telah memiliki BA definitif, pencatatan BMN dilakukan secara terpisah dari laporan BMN K/L bersangkutan. Hal ini dilakukan mengingat status satker BA 999.08 pada K/L merupakan satker Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang BA 999.08. Pencatatan BMN yang diperoleh dari BA 999.08 ke dalam laporan BMN K/L dilakukan apabila telah dilakukan penyerahan dari Pengguna Barang 999.08 kepada K/L bersangkutan selaku Pengguna Barang melalui DJKN selaku Pengelola Barang.

Untuk pelaporan BMN Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Laporan Barang Pengguna BA BUN Belanja Lain-Lain (LBP BA 999.08) yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, terdapat 4 (empat) satker yang telah melakukan pencatatan BMN yang berasal dari BA 999.08 melalui aplikasi SIMAK-BMN dengan total nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) sebesar Rp1.766.704.559.717,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

No	Kode Satker	Daftar Satker	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	984469	OJK	456,822,251,035.00	70,560,662.00	456,892,811,697.00
2	962450	Istana Kepresidenan Jakarta	59,400,000.00	-	59,400,000.00
3	984223	BP Batam	1,048,252,895,439.00		1,048,252,895,439.00
4	999975	SKK Migas	261,191,245,249.00	308,207,332.00	261,499,452,581.00
Total			1,766,325,791,723.00	378,767,994.00	1,766,704,559,717.00

9. BMN *IDLE*

Dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik yang terjadi serta guna meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

BMN eks BMN *idle* adalah BMN *idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang. BMN eks BMN *idle* merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN *idle* dapat diakui sebagai BMN, disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus. Dokumen sumber untuk penatausahaan BMN Eks BMN *idle* adalah Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL. BMN eks BMN *idle* disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Saldo awal BMN eks BMN *idle* per tanggal 1 Januari 2021 adalah Rp70.754,30 juta (setelah penyusutan). Pada periode Tahun Anggaran 2021 terdapat mutasi tambah atas BMN eks BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang di KPKNL Lhokseumawe, KPKNL Batam, KPKNL Jakarta V, KPKNL Purwokerto, KPKNL Jambi, KPKNL Palembang, KPKNL Medan, dan KPKNL Padang sebesar Rp21.469,78 juta dan terdapat mutasi kurang sebagai tindak lanjut atas penyerahan BMN Eks BMN *idle* pada KPKNL Surabaya, KPKNL Medan, KPKNL Semarang, dan KPKNL

Yogyakarta sebesar Rp2.332,00 juta sehingga Nilai BMN Eks BMN *idle* per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp88.840,94 juta (setelah penyusutan).

BMN eks BMN *idle* yang diserahkan oleh Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

Tanah	Rp 1.921.802.602,00
Gedung dan Bangunan	<u>Rp 410.199.437,00</u>
Total	<i>Rp2.332.002.039,00</i>

Rincian BMN eks BMN *idle* yang diserahkan oleh Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

BMN *Idle* yang Diserahkan oleh Pengelola Barang TA 2021

No	Akun Neraca	Uraian	Nilai Perolehan
A. Tanah			
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	KPKNL Surabaya	1.001.000.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	KPKNL Medan	93.112.602
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Semarang	423.690.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Yogyakarta	404.000.000
B. Gedung dan Bangunan			
1	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Surabaya	6.314.000
2	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	KPKNL Medan	45.804.437
3	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Semarang	245.468.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	KPKNL Yogyakarta	112.613.000
Total			<i>2.332.002.039</i>

BMN eks BMN *idle* yang diterima oleh Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tanah	Rp 17.475.685.000,00
Gedung dan Bangunan	<u>Rp 3.994.104.000,00</u>
Total	<i>Rp 21.469.789.000,00</i>

Rincian BMN eks BMN *idle* yang diterima oleh Pengelola Barang pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

BMN *Idle* yang diterima oleh Pengelola Barang TA 2021

No	Akun Neraca	Uraian	Nilai Perolehan
A. Tanah			
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Lhokseumawe	8.664.912.000
2	Tanah Untuk Jalan Lainnya	KPKNL Lhokseumawe	181.855.000
3	Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu)	KPKNL Lhokseumawe	160.473.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	KPKNL Lhokseumawe	1.890.408.000
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Batam	476.054.000
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Jakarta V	1.987.200.000
7	Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	KPKNL Purwokerto	803.368.000
8	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Jambi	647.112.000
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Jambi	130.023.000
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Palembang	589.875.000
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Medan	1.760.428.000
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Medan	157.000.000
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Padang	26.977.000

B. Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Batam	1.040.500.000
2	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	KPKNL Batam	42.877.000
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Jakarta V	173.700.000
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Purwokerto	25.600.000
5	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KPKNL Purwokerto	11.700.000
6	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	KPKNL Palembang	1.769.625.000
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Medan	95.491.000
8	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KPKNL Medan	789.396.000
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Padang	45.215.000
Total			21.469.789.000

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014, maka mulai Semester I tahun 2013 diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN eks BMN *Idle* yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahun Anggaran 2021 :

A. BMN <i>Idle</i>	Rp 94.180.013.291,00
B. Akumulasi Penyusutan BMN <i>Idle</i>	(Rp 5.339.065.554,00)
Nilai Buku BMN <i>Idle</i>	Rp88.840.947.737,00

Rincian BMN *Idle* yang telah diserahkan ke DJKN dapat dilihat pada Ikhtisar 10.

10. PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN BMN BERUPA TANAH TAHUN 2021

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertifikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut dan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, maka Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai Pengelola Barang bersama dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertifikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2013.

Kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain:

- a. Penyusunan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 yaitu sebanyak 27.560 bidang tanah dg jumlah target setelah revisi sebanyak 26.790 bidang.
- b. Mengkoordinasikan daftar nominatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 dengan satuan kerja dan Kantor Pertanahan setempat.
- c. Proses pengajuan permohonan pensertipikatan BMN berupa tanah oleh satuan Kerja ke Kantor Pertanahan setempat.
- d. Proses penerbitan sertifikat BMN berupa tanah oleh Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan dari satuan kerja.
- e. Penyusunan daftar usulan indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2022.

Capaian kinerja Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa tanah tahun 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 27.983 bidang (104,45%) dari target tahunan setelah revisi sebanyak 26.790 bidang.

Dalam rangka kegiatan pensertipikatan BMN tahun 2022, Kementerian Keuangan telah menyusun usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2022 sebanyak 26.414 bidang tanah.

11. PENYELESAIAN ANOMALI DATA

Pada tahun 2020, terdapat permasalahan terkait pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap yang berdampak terhadap kevalidan dan keakuratan data berupa anomali data BMN pada SIMAK BMN terkait nilai aset tetap sebanyak 543.341 NUP.

Atas permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya, antara lain melalui rapat koordinasi termasuk one on one meeting bersama dengan KL, dengan melibatkan juga Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar KL dapat melakukan langkah tindak lanjut secara efektif dan menciptakan peningkatan kualitas pengelolaan BMN. Selain itu, juga dilakukan update progres secara rutin (triwulanan) atas penyelesaian anomali data BMN pada KL, sehingga KL dapat segera merumuskan dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas permasalahan anomali data BMN yang terjadi.

Pada Tahun 2021, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 yang menyatakan pelaksanaan Sistem SAKTI pada Kementerian/Lembaga akan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. Pelaksanaan penyelesaian data anomali BMN sekaligus dilakukan sebagai upaya dalam rangka persiapan migrasi penggunaan aplikasi pelaporan keuangan menjadi aplikasi SAKTI, sehingga dapat menghasilkan data dan nilai BMN yang andal.

Sebagai bentuk komitmen penyelesaian anomali data BMN, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk tim gugus tugas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-200/PB/2021 tentang Tim *Task Force* Persiapan Migrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahun 2021.

Penyelesaian atas permasalahan anomali data BMN di tahun 2021 sampai dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2021 unaudited dilakukan dengan mekanisme normalisasi melalui aplikasi SIMAK-BMN. Mekanisme ini dilakukan hanya terhadap data BMN yang tidak normal.

Dalam rangka penyelesaian atas data anomali BMN, ditemukan kondisi bahwa anomali data BMN ternyata tidak hanya disebabkan karena data BMN yang tidak normal, tetapi juga disebabkan oleh adanya selisih data antar aplikasi serta data satker inaktif bersaldo. Selanjutnya dilakukan perluasan kategori penyelesaian melalui mekanisme Kertas Kerja Konfirmasi (K3) yang dilakukan dengan cara melakukan penyandingan atas data BMN yang tersaji dalam aplikasi e-rekon&LK dan data BMN yang tersaji pada aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA pada masing-masing Satker.

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui mekanisme K3 atas data BMN pada LKPP Tahun 2020 Audited, ditemukan

kondisi sebanyak 3.825.631 NUP dengan total nilai sebesar Rp123,12 triliun yang terindikasi sebagai data anomali. Selama tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian permasalahan anomali data BMN tersebut, untuk posisi unaudited 2021 data anomali BMN sebanyak 2.723.908 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp21,61 triliun dan untuk posisi audited 2021 sebanyak 556.359 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp1,26 triliun dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Data Anomali BMN	Perkembangan nilai BMN data anomali		
	Jumlah NUP	Nilai	% Anomali terhadap total
2020 Audited	3.825.631	123.115.631.887.917	1,961%
2021 Unaudited	2.723.908	(21.607.188.047.547)	-0,319%
2021 Audited	556.359	(1.259.109.132.198)	-0,019%

Untuk data intrakomptabel hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui mekanisme K3 atas data BMN pada data LKPP Tahun 2020 Audited, ditemukan kondisi sebanyak 1.572.856 NUP dengan total nilai sebesar Rp95,32 triliun yang terindikasi sebagai data anomali. Selama tahun 2021 telah dilakukan penyelesaian permasalahan anomali data BMN tersebut, untuk posisi unaudited 2021 data anomali BMN sebanyak 680.599 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp4,85 triliun dan untuk posisi audited 2021 sebanyak 103.358 NUP dengan total nilai sebesar minus Rp621,32 miliar, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Data Anomali BMN	Perkembangan nilai BMN data anomaly		
	Jumlah NUP	Nilai	% Anomali terhadap total
2020 Audited	1.572.856	95.323.540.141.310	1
2021 Unaudited	680.599	(4.853.233.251.980)	-
2021 Audited	103.358	621.315.586.626	0

Data BMN yang anomali sebanyak 103.358 NUP dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 Audited sesuai tabel di atas akan dilakukan perbaikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.

Secara umum terdapat dua mekanisme perbaikan selama tahun 2021 sebagai tindak lanjut hasil identifikasi data BMN yang anomali, yaitu perbaikan melalui mekanisme penyajian antar aplikasi dan mekanisme yang dilakukan melalui koreksi data aset.

Pelaksanaan perbaikan melalui mekanisme penyajian antar aplikasi dilakukan dengan mensinkronkan penyajian data BMN sebagai pendukung data laporan keuangan yang menghasilkan perbaikan semu, sehingga tidak berdampak/berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan perbaikan melalui koreksi data BMN dilakukan dengan cara memperbaiki variabel data pembentuk transaksi BMN baik yang bersifat data pelengkap seperti koreksi atas kesalahan penyajian masa manfaat aset dan kuantitas aset yang tidak berpengaruh terhadap penyajian nilai dalam Laporan Keuangan, maupun dengan cara melakukan normalisasi nilai data BMN dan selanjutnya melakukan koreksi atas nilai dan penggantian NUP atas data BMN yang mengandung anomali.

Selama tahun 2021, koreksi data BMN melalui normalisasi dilakukan atas 1.369.678 NUP dengan nilai sebesar minus Rp104.711.603.887.213. Selanjutnya telah dilakukan perbaikan atas 713.998 NUP dengan nilai sebesar Rp83.939.953.236.32, sedangkan sisanya 655.680 NUP dengan nilai sebesar minus Rp20.771.622.882.422 dalam proses identifikasi untuk memastikan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Perbaikan Anomali	Total Perbaikan	
	Jumlah NUP	Nilai
Normalisasi	1.369.686	(104.711.601.954.055)
Tindak Lanjut Normalisasi	713.998	83.939.953.236.321
Dalam proses identifikasi Tindak	655.688	(20.771.622.882.422)

Data BMN yang telah di normalisasi namun belum teridentifikasi tindak lanjut perbaikannya sebanyak 655.680 NUP dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* sesuai tabel di atas akan dipastikan kembali tindak lanjut perbaikannya dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.

Akun-akun pada Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* yang terpengaruh oleh perbaikan data BMN yang anomali meliputi antara lain: aset, akumulasi penyusutan, beban, dan ekuitas, sebagai berikut:

1. Akun-akun Aset terkait pada Neraca berkurang sebesar Rp4.293.918.737.527;
2. Akun-akun Beban pada Laporan Operasional bertambah sebesar Rp1.744.313.534.436; dan
3. Akun-akun Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas bertambah sebesar Rp5.099.210.406.182.

Rincian penyelesaian data anomali BMN per Kementerian/ Lembaga dapat dilihat pada Ikhtisar 11.

12. IMPLEMENTASI APLIKASI SIMAK-BMN DAN E-REKON&LK

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang didukung dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada tingkat UAKPB dan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan dalam Penyusunan LBP tingkat K/L.

Dalam rangka implementasi Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan dalam Penyusunan LBP dan LKKL, telah dilaksanakan integrasi Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan sejak penyusunan LBP Tahun 2017 secara bertahap.

LBMN Tahun 2021 *Audited* ini disusun dari LBP yang dihasilkan melalui Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan. Sampai dengan posisi per 31 Desember 2021, sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Pengguna Barang telah menggunakan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan sebagai alat bantu dalam melakukan pembukuan dan pelaporan BMN, sedangkan 1 (satu) Pengguna Barang selaku entitas yang diperlakukan seperti K/L, yaitu Otorita Asahan tidak menggunakan Aplikasi E-Rekon & Laporan Keuangan.

13. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN

Permasalahan ini disarikan dari permasalahan-permasalahan K/L yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi/Pemutakhiran data LBP TA 2021, beberapa permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penyusunan LBMN Tahun 2021 *Audited* ini, antara lain :

- 1) Masalah koordinasi antara Unit Penatausahaan/Akuntansi pada bagian Barang dan Unit Penatausahaan/Akuntansi pada bagian Keuangan pada masing-masing K/L.

Masih ditemukan adanya koordinasi yang belum optimal antara Unit Penatausahaan/Akuntansi pada bagian Barang dan Unit Penatausahaan/Akuntansi pada bagian Keuangan masih menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan sampai saat ini, hal tersebut ditunjukkan dengan masih terjadinya selisih pencatatan BMN antara yang dilaporkan oleh Bagian Barang melalui LBP dengan Bagian Keuangan melalui Laporan Keuangan K/L.

- 2) Masalah Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM pada beberapa K/L mengenai kebijakan dan peraturan tentang penatausahaan BMN dan kebijakan akuntansi BMN serta mengenai aplikasi SIMAK-BMN. Akibat dari masalah ini adalah :

- a. Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan BMN.
 - b. Masih adanya penyajian saldo awal laporan yang belum konsisten.
 - c. Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan BMN menjadi kurang lengkap, kurang akurat, dan tidak tepat waktu.
- 3) Masalah Penatausahaan BMN eks Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama

Masih terdapat K/L yang belum melakukan penatausahaan BMN eks DK/TP. Pada umumnya masalah ini muncul disebabkan antara lain:

- a. UPPB tidak memperoleh informasi realisasi Belanja Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama dari Bagian Keuangan pada masing-masing K/L.
 - b. Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemda selaku satker DK/TP dalam melakukan penatausahaan BMN.
 - c. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dari Pemda selaku satker DK/TP mengenai penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK-BMN.
- 4) Masalah Disharmonisasi Penganggaran dan Penatausahaan

Masih belum sinkronnya pelaksanaan/realisasi dengan perencanaan anggaran, khususnya terkait dengan pembelanjaan BMN yang dilakukan oleh K/L. Beberapa contoh dari permasalahan ini adalah realisasi Belanja Modal bukan untuk membeli aset tetap, realisasi Non Belanja Modal untuk membeli aset tetap, dan pencatatan BMN secara paket (tidak dirinci per masing-masing BMN). Akibat dari masalah ini adalah timbulnya selisih/perbedaan pencatatan nilai realisasi Belanja Modal dan penambahan BMN pada periode yang sama.

- 5) Masalah Kelengkapan Transaksi yang dilaporkan

Terdapat K/L yang belum melaporkan seluruh BMN yang berada di K/L dimaksud yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kesulitan dalam melakukan inventarisasi, kesulitan dalam memperoleh dokumen sumber seperti SPM/SP2D, dan dokumen kontrak, tidak memiliki SDM yang memadai, kekurangan perhatian dari pimpinan K/L, dan lain sebagainya.

- 6) Masalah Penyusutan

Kebijakan penyusutan telah diimplementasikan sejak periode TA 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pihak yang mengelola barang dan aparat pengawas internal pada K/L. Namun demikian masih terdapat Satker yang tidak secara tertib/terlewat melakukan proses penyusutan reguler. Hal ini mengakibatkan masih ditemukan adanya data BMN yang tidak akurat dalam menyajikan penyusutan dalam Laporan Keuangan.

14. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan LBMN

Langkah yang dilakukan oleh Pengelola Barang dalam rangka meminimalisir perbedaan dan meningkatkan keakuratan dan keandalan data BMN K/L dalam penyusunan LBMN antara lain melalui pelaksanaan rekonsiliasi laporan BMN, yang meliputi :

- a) Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMN antara DJKN dengan K/L (PMK Nomor 118/PMK.06/2018 dan KMK Nomor 385/KM.6/2016).

Rekonsiliasi/pemutakhiran data dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan data dan nilai BMN yang disepakati oleh para pihak di setiap jenjang pelaporan sehingga dapat menyajikan data dan informasi BMN yang dapat diyakini kewajarannya, baik pada laporan keuangan maupun laporan barang.

Sejak implementasi Aplikasi E-Rekon Dan Laporan Keuangan, rekonsiliasi/pemutakhiran data yang dilakukan yaitu:

- antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada jenjang pelaporan (internal K/L);
- antara Pengguna Barang dan DJKN;
- antara DJKN dan DJPB, mulai dari tingkat KPKNL dan KPPN, serta Kantor Pusat K/L dan Kantor Pusat DJKN.

Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana tersebut di atas mulai berlaku pada tahun anggaran 2010.

- b) Penyelesaian Selisih atas Rekonsiliasi antara LKKL dengan LBP

Penyelesaian selisih yang terjadi antara data BMN yang disajikan dalam LKKL dengan data BMN yang disajikan dalam LBP dilakukan melalui pertemuan segitiga antara K/L (bagian keuangan dan bagian barang), DJKN, dan DJPB.

2) Penyediaan Infrastruktur yang memadai dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan BMN

Salah satu permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penatausahaan BMN antara lain dikarenakan kurangnya infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu diperlukan peningkatan infrastruktur berupa *hardware* di tingkat Pengelola Barang maupun Pengguna Barang

serta pembangunan aplikasi rekonsiliasi dan aplikasi penyusunan LBMN di semua level penatausahaan BMN.

3) Pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM

Pengembangan kapabilitas SDM perlu dilakukan terus menerus, hal ini antara lain dilakukan melalui :

- Sosialisasi atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, kebijakan akuntansi BMN, serta pelatihan atas aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan baik di lingkungan internal Pengelola Barang maupun di lingkungan K/L selaku Pengguna Barang.
- Mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis oleh DJKN selaku Pengelola Barang terkait dengan seluruh aspek penatausahaan BMN mulai tingkat satuan kerja/Koordinator Wilayah/Kantor Pusat K/L oleh KPKNL/Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN.
- Membangun komunikasi dengan K/L pada tataran pengambil kebijakan.

4) Meningkatkan koordinasi antara K/L dan Kanwil/KPKNL terkait pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan BMN

Sebagai upaya dalam memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan penatausahaan BMN oleh K/L, maka perlu diselenggarakan rapat koordinasi BMN baik dengan K/L maupun dengan Kanwil/KPKNL. Hal ini dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan aturan terkait dengan BMN.

5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Penatausahaan BMN

Guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan BMN yang disampaikan oleh K/L, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan terus-menerus, hal ini antara lain dilakukan melalui penyediaan perangkat monitoring dalam aplikasi erekon&LK yang dapat dimonitor setiap saat dari masing-masing jenjang pelaporan, sehingga data ketaatan pada aturan pelaksanaan terkait BMN dapat terus meningkat. Disamping itu, perlu dilakukan langkah-langkah lain sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan penatausahaan BMN, antara lain dengan dilakukannya pemeringkatan atas laporan BMN yang disampaikan oleh K/L serta adanya sistem *reward and punishment*.

IKHTISAR LAPORAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01A
MUTASI BMN PER K/L INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF							
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.323.778.503.073	339.655.243.117	328.558.149.297	1.334.875.596.893	204.845.173.219	1.130.030.423.674
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.206.220.751.108	69.062.093.896.632	68.561.173.710.473	4.707.140.937.267	1.705.687.015.898	3.001.453.921.369
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	11.244.818.963.719	553.398.710.391	379.742.771.224	11.418.474.902.886	2.627.033.312.764	8.791.441.590.122
4	005	Mahkamah Agung	32.966.328.820.255	4.430.374.652.534	3.009.765.776.424	34.386.937.696.365	4.847.752.350.403	29.539.185.345.962
5	006	Kejaksaan Agung	29.949.200.445.363	18.999.445.631.768	5.830.987.554.848	43.117.658.522.283	5.105.432.923.005	38.012.225.599.278
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	640.258.080.299.133	47.282.393.952.702	46.804.021.417.426	640.736.452.834.409	4.763.893.371.216	635.972.559.463.193
7	010	Kementerian Dalam Negeri	19.727.753.192.806	871.448.458.676	856.767.929.646	19.742.433.721.836	4.323.439.984.409	15.418.993.737.427
8	011	Kementerian Luar Negeri	51.432.185.162.820	3.927.952.510.846	2.713.417.799.160	52.646.719.874.506	3.981.174.871.833	48.665.545.002.673
9	012	Kementerian Pertahanan	1.921.966.611.081.680	314.414.521.901.820	263.905.690.859.818	1.972.475.442.123.680	222.537.147.822.905	1.749.938.294.300.770
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	76.471.831.513.878	9.719.839.776.056	7.934.233.630.495	78.257.437.659.439	10.022.128.908.561	68.235.308.750.878
11	015	Kementerian Keuangan	130.327.808.273.454	6.687.638.965.524	5.078.316.747.009	131.937.130.491.969	17.324.912.908.022	114.612.217.583.947
12	018	Kementerian Pertanian	87.238.447.893.525	9.178.330.638.488	9.351.181.797.177	87.065.596.734.836	6.770.119.352.670	80.295.477.382.166
13	019	Kementerian Perindustrian	15.693.202.303.101	2.919.920.231.299	2.848.297.378.839	15.764.825.155.561	3.672.965.700.665	12.091.859.454.896
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	33.037.649.548.515	5.139.243.598.442	4.807.363.778.837	33.369.529.368.120	6.696.473.427.262	26.673.055.940.858
15	022	Kementerian Perhubungan	613.252.145.189.023	128.170.111.208.459	111.390.442.410.075	630.031.813.987.407	119.384.118.614.939	510.647.695.372.468
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	451.370.225.580.000	53.673.080.733.049	46.424.295.129.960	458.619.011.183.089	33.789.263.683.817	424.829.747.499.272
17	024	Kementerian Kesehatan	142.672.443.571.547	38.724.589.343.053	25.638.146.105.579	155.758.886.809.021	34.249.561.848.786	121.509.324.960.235
18	025	Kementerian Agama	122.430.598.258.865	15.970.410.402.547	10.037.333.688.651	128.363.674.972.761	14.014.700.235.172	114.348.974.737.589
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	14.228.591.230.527	2.838.986.846.050	2.761.292.670.278	14.306.285.406.299	3.104.848.184.973	11.201.437.221.326
20	027	Kementerian Sosial	23.490.799.636.355	1.678.557.706.552	1.211.792.786.691	23.957.564.556.216	2.386.649.087.662	21.570.915.468.554
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.768.909.310.850	1.781.038.767.436	1.587.646.773.274	20.962.301.305.012	4.152.415.210.798	16.809.886.094.214
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	32.555.769.054.932	6.443.135.767.698	6.443.925.231.064	32.554.979.591.566	7.649.088.223.445	24.905.891.368.121
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.217.816.480.187.940	557.957.279.133.819	445.331.542.509.432	2.330.442.216.812.320	370.601.822.407.643	1.959.840.394.404.680
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	181.261.455.219	57.224.938.968	43.644.989.293	194.841.404.894	112.383.920.149	82.457.484.745
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	108.672.057.420	34.848.738.618	34.614.158.611	108.906.637.427	84.877.456.709	24.029.180.718
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	245.412.112.771	48.194.704.396	34.918.918.206	258.687.898.961	90.732.479.189	167.955.419.772
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	10.412.992.947.384	2.071.522.372.861	977.583.191.243	11.506.932.129.002	846.068.233.038	10.660.863.895.964
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.129.684.034.784	83.737.742.026	105.700.004.311	2.107.721.772.499	141.012.045.903	1.966.709.726.596



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01A
MUTASI BMN PER K/L INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	14.119.256.582.420	209.991.445.114	61.918.488.892	14.267.329.538.642	1.048.018.057.552	13.219.311.481.090
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	4.667.442.517.719	723.429.363.748	735.232.037.260	4.655.639.844.207	567.173.739.493	4.088.466.104.714
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.414.258.213	58.519.055.584	59.138.344.101	296.794.969.696	123.006.047.936	173.788.921.760
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	246.658.872.754	19.597.866.117	11.952.872.292	254.303.866.579	116.236.048.373	138.067.818.206
33	050	Badan Intelijen Negara	24.544.184.783.388	13.393.312.957.450	9.537.952.967.795	28.399.544.773.043	14.525.272.275.138	13.874.272.497.905
34	051	Lembaga Sandi Negara	12.255.191.196.140	5.606.143.757.370	5.042.512.511.811	12.818.822.441.699	8.330.043.478.885	4.488.778.962.814
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	280.441.955.429	10.728.782.152	10.023.993.152	281.146.744.429	260.888.847.460	20.257.896.969
36	054	Badan Pusat Statistik	8.208.242.014.336	969.880.639.610	1.234.673.286.792	7.943.449.367.154	2.546.187.349.275	5.397.262.017.879
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	2.983.480.398.917	159.189.568.095	110.920.595.187	3.031.749.371.825	435.831.962.999	2.595.917.408.826
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	17.255.598.429.290	1.531.974.606.434	933.195.267.818	17.854.377.767.906	3.337.946.571.467	14.516.431.196.439
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3.761.759.927.333	170.088.171.340	27.380.580.977	3.904.467.517.696	660.575.067.227	3.243.892.450.469
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.956.073.766.206	12.165.594.262.906	2.802.916.915.848	18.318.751.113.264	2.401.372.094.896	15.917.379.018.368
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	407.919.638.665.291	104.533.895.476.772	77.373.633.471.549	435.079.900.670.514	123.289.538.435.646	311.790.362.234.868
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	5.626.342.469.851	728.416.337.670	487.838.949.214	5.866.919.858.307	2.221.342.583.042	3.645.577.275.265
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.303.804.430.650	312.134.031.102	315.867.473.140	2.300.070.988.612	616.549.386.578	1.683.521.602.034
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.631.031.620.089	166.700.164.725	95.296.598.850	2.702.435.185.964	406.191.536.269	2.296.243.649.695
45	066	Badan Narkotika Nasional	4.015.299.431.365	494.880.570.369	416.180.744.922	4.093.999.256.812	2.155.402.670.259	1.938.596.586.553
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4.206.958.090.972	2.263.795.997.473	2.150.380.417.544	4.320.373.670.901	1.553.168.281.762	2.767.205.389.139
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.710.900.835.911	92.410.938.582	269.770.031.327	3.533.541.743.166	606.970.561.319	2.926.571.181.847
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	45.792.374.968	20.015.846.079	16.333.763.039	49.474.458.008	29.126.794.975	20.347.663.033
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	11.286.954.749.554	1.692.579.354.874	791.707.668.026	12.187.826.436.402	5.213.377.151.488	6.974.449.284.914
50	076	Komisi Pemilihan Umum	3.473.433.016.561	307.652.263.735	261.018.185.280	3.520.067.095.016	1.394.710.970.152	2.125.356.124.864
51	077	Mahkamah Konstitusi	1.186.331.747.728	28.512.315.047	15.783.813.091	1.199.060.249.684	349.997.065.000	849.063.184.684
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	691.779.673.979	17.744.044.178	18.779.277.583	690.744.440.574	192.582.765.311	498.161.675.263
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	34.168.651.515.170	8.816.048.437.492	1.813.519.906.274	41.171.180.046.388	1.752.011.545.682	39.419.168.500.706
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	16.016.956.150.333	5.576.459.160.957	5.545.876.785.467	16.047.538.525.823	1.390.493.827.178	14.657.044.698.645
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	10.053.346.037.133	514.664.486.685	255.030.637.129	10.312.979.886.689	3.165.942.286.776	7.147.037.599.913
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5.171.914.052.777	5.128.595.552.185	4.946.447.908.400	5.354.061.696.562	1.600.896.328.423	3.753.165.368.139



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01A
MUTASI BMN PER K/L INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
57	083	Badan Informasi Geospasial	4.621.812.153.328	463.202.344.635	294.348.534.992	4.790.665.962.971	3.514.441.202.672	1.276.224.760.299
58	084	Badan Standarisasi Nasional	448.783.379.393	106.985.945.581	72.429.325.525	483.339.999.449	257.347.403.192	225.992.596.257
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	301.377.378.135	8.861.611.265	1.243.027.693	308.995.961.707	136.423.628.983	172.572.332.724
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.944.696.542.512	67.659.595.622	22.874.216.755	3.989.481.921.379	282.412.265.613	3.707.069.655.766
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.509.427.693.639	117.382.853.757	64.786.877.745	1.562.023.669.651	325.600.477.041	1.236.423.192.610
62	088	Badan Kepegawaian Negara	3.949.012.125.670	272.684.515.721	208.998.278.879	4.012.698.362.512	843.227.402.012	3.169.470.960.500
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5.800.542.987.584	266.578.537.404	113.413.752.459	5.953.707.772.529	637.815.173.065	5.315.892.599.464
64	090	Kementerian Perdagangan	7.633.106.451.204	398.305.843.757	1.329.299.403.687	6.702.112.891.274	1.116.471.806.748	5.585.641.084.526
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.722.405.752.945	236.735.124.043	280.916.246.700	2.678.224.630.288	612.494.666.055	2.065.729.964.233
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	4.130.606.807.625	172.538.303.296	238.943.656.735	4.064.201.454.186	766.745.432.543	3.297.456.021.643
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	425.609.923.235	22.094.578.104	24.543.508.450	423.160.992.889	147.887.970.092	275.273.022.797
68	100	Komisi Yudisial RI	429.556.234.801	4.781.225.457	3.571.941.801	430.765.518.457	65.648.893.751	365.116.624.706
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3.934.386.953.249	424.384.965.119	1.160.313.825.509	3.198.458.092.859	1.641.462.790.270	1.556.995.302.589
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	549.057.473.672	32.915.886.897	32.523.731.722	549.449.628.847	199.901.645.238	349.547.983.609
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	943.945.733.245	51.673.662.863	8.468.559.143	987.150.836.965	363.353.407.001	623.797.429.964
72	107	Badan SAR Nasional	12.646.345.108.868	3.212.388.122.061	2.681.343.569.596	13.177.389.661.333	7.472.118.140.414	5.705.271.520.919
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	39.637.437.000	15.467.186.331	8.092.005.206	47.012.618.125	26.640.174.706	20.372.443.419
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1.231.327.501.919	(503.154.555)	1.230.824.347.364	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	103.214.760.621	14.372.993.870	1.721.521.554	115.866.232.937	44.703.085.224	71.163.147.713
76	111	Badan Nasional Pengeloa Perbatasan	2.617.750.117.288	159.876.907.066	232.426.737.106	2.545.200.287.248	490.998.302.254	2.054.201.984.994
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	59.511.556.872.804	4.466.430.492.571	3.481.590.301.811	60.496.397.063.564	6.887.173.785.216	53.609.223.278.348
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	931.734.909.089	963.558.941.468	246.627.798.398	1.648.666.052.159	573.988.052.798	1.074.677.999.361
79	114	Sekretariat Kabinet	62.450.222.164	42.233.461.300	24.050.735.962	80.632.947.502	48.366.690.054	32.266.257.448
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	682.307.208.786	71.391.488.224	89.943.429.181	663.755.267.829	361.512.081.442	302.243.186.387
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	15.127.219.666.800	1.412.510.007.746	973.972.751.063	15.565.756.923.483	1.542.322.883.252	14.023.434.040.231
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	15.760.801.438.289	786.309.880.126	576.731.460.171	15.970.379.858.244	2.607.979.794.072	13.362.400.064.172
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	3.717.108.602.407	111.389.742.140	63.584.486.459	3.764.913.858.088	362.827.452.329	3.402.086.405.759
84	119	Badan Keamanan Laut	2.755.323.757.003	319.886.970.009	106.996.717.090	2.968.214.009.922	1.321.658.223.554	1.646.555.786.368
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	136.602.731.979	53.774.308.855	6.754.936.006	183.622.104.828	104.583.776.968	79.038.327.860
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	51.405.011.792	3.358.780.373	1.532.283.762	53.231.508.403	20.641.216.161	32.590.292.242



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01A
MUTASI BMN PER K/L INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	226.208.245.386	1.020.591.943	225.187.653.443	49.295.059.737	175.892.593.706
88	199	Otorita Asahan	6.602.379.162	-	-	6.602.379.162	2.532.738.803	4.069.640.359
Sub Jumlah (1)			7.474.318.496.260.730	1.483.277.371.394.160	1.203.357.569.920.570	7.754.238.297.734.320	1.098.309.978.106.880	6.655.928.319.627.450
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPerti K/L							
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	1.614.548.736.091	607.767.272.256	456.050.388.624	1.766.265.619.723	880.021.967.750	886.243.651.973
Sub Jumlah (2)			1.614.548.736.091	607.767.272.256	456.050.388.624	1.766.265.619.723	880.021.967.750	886.243.651.973
TOTAL NILAI BMN			7.475.933.044.996.820	1.483.885.138.666.420	1.203.813.620.309.190	7.756.004.563.354.050	1.099.190.000.074.630	6.656.814.563.279.420



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01B
MUTASI BMN PER K/L EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF							
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.035.309.422	18.070.800	27.186.500	1.026.193.722	730.315.084	295.878.638
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	8.890.047.831	30.028.472	37.228.412	8.882.847.891	4.644.816.485	4.238.031.406
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	6.067.554.261	2.968.348.281	508.572.335	8.527.330.207	3.869.369.262	4.657.960.945
4	005	Mahkamah Agung	19.862.340.510	9.374.484.092	6.807.164.852	22.429.659.750	16.402.757.657	6.026.902.093
5	006	Kejaksaan Agung	17.220.780.618	3.442.924.219	1.918.803.355	18.744.901.482	11.615.593.842	7.129.307.640
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	10.517.731.510	4.752.085.071	4.018.351.754	11.251.464.827	2.094.498.060	9.156.966.767
7	010	Kementerian Dalam Negeri	29.177.751.774	3.173.760.789	2.148.815.672	30.202.696.891	11.430.753.078	18.771.943.813
8	011	Kementerian Luar Negeri	9.162.775.871	1.722.833.306	1.910.455.018	8.975.154.159	6.011.211.514	2.963.942.645
9	012	Kementerian Pertahanan	1.435.373.142.741	406.961.600.070	1.134.166.210.623	708.168.532.188	415.408.371.583	292.760.160.605
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	34.497.634.071	5.574.898.930	4.373.739.848	35.698.793.153	23.535.046.823	12.163.746.330
11	015	Kementerian Keuangan	49.872.003.981	12.722.783.145	9.959.463.966	52.635.323.160	31.774.060.130	20.861.263.030
12	018	Kementerian Pertanian	250.544.418.173	22.476.666.553	31.451.753.577	241.569.331.149	27.281.563.811	214.287.767.338
13	019	Kementerian Perindustrian	14.610.014.945	2.506.354.932	2.812.308.097	14.304.061.780	10.161.646.911	4.142.414.869
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9.721.791.958	266.440.314	293.060.996	9.695.171.276	7.848.180.002	1.846.991.274
15	022	Kementerian Perhubungan	170.659.637.021	52.999.273.680	38.719.392.813	184.939.517.888	83.747.027.484	101.192.490.404
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	446.411.060.926	101.590.214.827	73.595.503.205	474.405.772.548	283.885.363.164	190.520.409.384
17	024	Kementerian Kesehatan	195.497.003.118	21.855.840.210	25.251.454.647	192.101.388.681	113.381.275.739	78.720.112.942
18	025	Kementerian Agama	472.464.595.493	66.111.474.171	29.056.322.742	509.519.746.922	377.651.395.310	131.868.351.612
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	31.419.024.413	14.818.401.452	13.218.931.501	33.018.494.364	22.861.206.685	10.157.287.679
20	027	Kementerian Sosial	12.517.016.118	3.759.640.764	1.029.705.459	15.246.951.423	7.303.061.372	7.943.890.051
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	24.471.458.840	4.860.557.379	6.130.276.337	23.201.739.882	12.478.945.843	10.722.794.039
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	43.881.387.381	6.434.958.788	6.980.893.554	43.335.452.615	13.464.197.651	29.871.254.964
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	68.300.434.958	53.249.387.607	39.988.149.675	81.561.672.890	31.558.329.164	50.003.343.726
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	189.486.535	48.054.685	49.060.000	188.481.220	98.573.313	89.907.907
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	115.905.600	76.206.356	5.543.450	186.568.506	103.968.608	82.599.898
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	96.576.861	6.437.475	-	103.014.336	57.790.212	45.224.124
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	7.609.812.472	5.947.960.213	1.760.115.251	11.797.657.434	4.236.959.265	7.560.698.169
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	159.462.150	83.319.379	104.471.550	138.309.979	50.457.123	87.852.856



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01B
MUTASI BMN PER K/L EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	2.962.224.836	1.700.000	-	2.963.924.836	365.938.851	2.597.985.985
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	792.203.813	22.835.364.942	22.784.629.000	842.939.755	489.150.861	353.788.894
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42.198.618	2.009.263	4.018.526	40.189.355	32.684.427	7.504.928
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	543.644.426	139.837.823	134.362.823	549.119.426	280.715.099	268.404.327
33	050	Badan Intelijen Negara	1.297.701.152	709.081.810	9.099.440	1.997.683.522	661.220.762	1.336.462.760
34	051	Lembaga Sandi Negara	1.471.668.349	138.813.100	-	1.610.481.449	1.141.791.402	468.690.047
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	71.181.920	-	-	71.181.920	70.410.520	771.400
36	054	Badan Pusat Statistik	14.085.882.785	4.780.504.468	871.731.761	17.994.655.492	8.290.606.803	9.704.048.689
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	891.241.720	89.215.452	73.748.984	906.708.188	591.948.161	314.760.027
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	51.747.057.692	12.682.402.763	12.363.099.056	52.066.361.399	18.806.917.224	33.259.444.175
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	19.695.710.855	712.581.960	617.917.950	19.790.374.865	13.070.949.806	6.719.425.059
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.801.326.621	889.193.025	445.893.963	3.244.625.683	2.264.237.353	980.388.330
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	477.002.277.196	113.071.038.771	79.705.642.988	510.367.672.979	279.642.228.042	230.725.444.937
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	3.815.155.262	1.889.797.950	1.457.360.408	4.247.592.804	2.492.925.415	1.754.667.389
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.885.170.344	28.793.144	1.108.919	2.912.854.569	2.347.490.924	565.363.645
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	78.295.605	-	2	78.295.603	66.639.853	11.655.750
45	066	Badan Narkotika Nasional	19.366.871.168	995.551.283	468.041.657	19.894.380.794	2.929.215.586	16.965.165.208
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6.433.859.471	1.687.927.514	1.636.513.640	6.485.273.345	2.572.249.605	3.913.023.740
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.508.101.781	227.669.297	262.804.796	3.472.966.282	2.500.692.922	972.273.360
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	295.667.824	26.317.990	35.247.970	286.737.844	205.531.905	81.205.939
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.973.799.844	211.335.600	67.832.885	2.117.302.559	1.046.956.642	1.070.345.917
50	076	Komisi Pemilihan Umum	79.318.696.289	5.598.448.643	46.620.884.963	38.296.259.969	16.217.385.159	22.078.874.810
51	077	Mahkamah Konstitusi	365.444.402	1.584.000	979.000	366.049.402	236.888.572	129.160.830
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	369.816.500	992.000	992.000	369.816.500	207.188.045	162.628.455
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6.548.163.815	1.843.908.800	2.109.631.385	6.282.441.230	3.789.552.843	2.492.888.387
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.451.215.456	129.908.830	98.891.000	1.482.233.286	1.004.798.100	477.435.186
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.827.481.534	102.756.821	65.095.731	2.865.142.624	2.394.199.002	470.943.622
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.189.677.600	1.349.411.978	1.286.501.044	1.252.588.534	783.522.480	469.066.054



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01B
MUTASI BMN PER K/L EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
57	083	Badan Informasi Geospasial	1.683.228.150	273.016.884	60.988.349	1.895.256.685	637.958.230	1.257.298.455
58	084	Badan Standarisasi Nasional	235.965.817	10.260.000	-	246.225.817	113.387.625	132.838.192
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	145.555.013	55.739.238	-	201.294.251	143.952.364	57.341.887
60	086	Lembaga Administrasi Negara	4.822.461.423	512.323.275	16.664.388	5.318.120.310	4.055.120.862	1.262.999.448
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	477.444.495	114.448.312	11.650.500	580.242.307	353.722.805	226.519.502
62	088	Badan Kepegawaian Negara	1.757.580.964	368.965.044	28.833.435	2.097.712.573	1.386.084.699	711.627.874
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.297.818.080	569.137.126	210.152.597	2.656.802.609	2.033.146.396	623.656.213
64	090	Kementerian Perdagangan	1.752.532.003	154.231.696	183.377.228	1.723.386.471	986.182.092	737.204.379
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	882.053.060	395.032.606	316.697.480	960.388.186	599.436.370	360.951.816
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	773.250.799	11.468.592	17.722.581	766.996.810	578.750.996	188.245.814
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	627.330.411	108.099.140	14.342.900	721.086.651	397.235.562	323.851.089
68	100	Komisi Yudisial RI	262.157.070	4.709.300	9.418.600	257.447.770	230.895.631	26.552.139
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3.574.743.250	65.160.340	19.714.015	3.620.189.575	3.465.864.238	154.325.337
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	593.870.931	170.550.247	41.587.365	722.833.813	474.438.822	248.394.991
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	71.171.503	-	-	71.171.503	56.396.615	14.774.888
72	107	Badan SAR Nasional	8.068.603.022	2.096.761.155	178.166.313	9.987.197.864	6.768.863.337	3.218.334.527
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	135.640.651	1.364.000	1.188.000	135.816.651	111.464.961	24.351.690
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	542.508.221	-	542.508.221	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	513.120.304	80.673.298	-	593.793.602	249.988.673	343.804.929
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	117.391.976	63.818.250	-	181.210.226	66.707.202	114.503.024
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	8.588.867.659	5.634.265.563	132.389.284	14.090.743.938	2.760.472.071	11.330.271.867
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	531.174.131	15.935.553	6.063.552	541.046.132	283.122.708	257.923.424
79	114	Sekretariat Kabinet	260.806.720	70.461.060	96.685.120	234.582.660	83.645.540	150.937.120
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	7.933.134.838	1.523.854.077	1.365.700.141	8.091.288.774	4.859.153.516	3.232.135.258
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5.509.530.248	309.792.010	283.537.074	5.535.785.184	3.519.244.352	2.016.540.832
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2.132.739.886	96.148.718	38.784.074	2.190.104.530	1.297.048.633	893.055.897
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	544.174.894	91.139.724	69.577.862	565.736.756	357.253.563	208.483.193
84	119	Badan Keamanan Laut	516.298.561	148.627.609	-	664.926.170	302.524.215	362.401.955
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	42.856.460	2.660.000	-	45.516.460	26.761.601	18.754.859



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01B
MUTASI BMN PER K/L EKSTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	30.043.500	4.719.800	-	34.763.300	13.016.670	21.746.630
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	153.731.288	37.400	153.693.888	95.976.429	57.717.459
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah (1)			4.129.601.950.470	991.086.247.092	1.611.090.751.559	3.509.597.446.003	1.924.498.588.317	1.585.098.857.686
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L							
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	344.182.103	98.757.891	4.000.000	438.939.994	226.311.809	212.628.185
Sub Jumlah (2)			344.182.103	98.757.891	4.000.000	438.939.994	226.311.809	212.628.185
TOTAL NILAI BMN			4.129.946.132.573	991.185.004.983	1.611.094.751.559	3.510.036.385.997	1.924.724.900.126	1.585.311.485.871



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01C
MUTASI BMN PER K/L GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF							
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.324.813.812.495	339.673.313.917	328.585.335.797	1.335.901.790.615	205.575.488.303	1.130.326.302.312
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.215.110.798.939	69.062.123.925.104	68.561.210.938.885	4.716.023.785.158	1.710.331.832.383	3.005.691.952.775
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	11.250.886.517.980	556.367.058.672	380.251.343.559	11.427.002.233.093	2.630.902.682.026	8.796.099.551.067
4	005	Mahkamah Agung	32.986.191.160.765	4.439.749.136.626	3.016.572.941.276	34.409.367.356.115	4.864.155.108.060	29.545.212.248.055
5	006	Kejaksaan Agung	29.966.421.225.981	19.002.888.555.987	5.832.906.358.203	43.136.403.423.765	5.117.048.516.847	38.019.354.906.918
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	640.268.598.030.643	47.287.146.037.773	46.808.039.769.180	640.747.704.299.236	4.765.987.869.276	635.981.716.429.960
7	010	Kementerian Dalam Negeri	19.756.930.944.580	874.622.219.465	858.916.745.318	19.772.636.418.727	4.334.870.737.487	15.437.765.681.240
8	011	Kementerian Luar Negeri	51.441.347.938.691	3.929.675.344.152	2.715.328.254.178	52.655.695.028.665	3.987.186.083.347	48.668.508.945.318
9	012	Kementerian Pertahanan	1.923.401.984.224.420	314.821.483.501.890	265.039.857.070.441	1.973.183.610.655.870	222.952.556.194.488	1.750.231.054.461.380
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	76.506.329.147.949	9.725.414.674.986	7.938.607.370.343	78.293.136.452.592	10.045.663.955.384	68.247.472.497.208
11	015	Kementerian Keuangan	130.377.680.277.435	6.700.361.748.669	5.088.276.210.975	131.989.765.815.129	17.356.686.968.152	114.633.078.846.977
12	018	Kementerian Pertanian	87.488.992.311.698	9.200.807.305.041	9.382.633.550.754	87.307.166.065.985	6.797.400.916.481	80.509.765.149.504
13	019	Kementerian Perindustrian	15.707.812.318.046	2.922.426.586.231	2.851.109.686.936	15.779.129.217.341	3.683.127.347.576	12.096.001.869.765
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	33.047.371.340.473	5.139.510.038.756	4.807.656.839.833	33.379.224.539.396	6.704.321.607.264	26.674.902.932.132
15	022	Kementerian Perhubungan	613.422.804.826.044	128.223.110.482.139	111.429.161.802.888	630.216.753.505.295	119.467.865.642.423	510.748.887.862.872
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	451.816.636.640.926	53.774.670.947.876	46.497.890.633.165	459.093.416.955.637	34.073.149.046.981	425.020.267.908.656
17	024	Kementerian Kesehatan	142.867.940.574.665	38.746.445.183.263	25.663.397.560.226	155.950.988.197.702	34.362.943.124.525	121.588.045.073.177
18	025	Kementerian Agama	122.903.062.854.358	16.036.521.876.718	10.066.390.011.393	128.873.194.719.683	14.392.351.630.482	114.480.843.089.201
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	14.260.010.254.940	2.853.805.247.502	2.774.511.601.779	14.339.303.900.663	3.127.709.391.658	11.211.594.509.005
20	027	Kementerian Sosial	23.503.316.652.473	1.682.317.347.316	1.212.822.492.150	23.972.811.507.639	2.393.952.149.034	21.578.859.358.605
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.793.380.769.690	1.785.899.324.815	1.593.777.049.611	20.985.503.044.894	4.164.894.156.641	16.820.608.888.253
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	32.599.650.442.313	6.449.570.726.486	6.450.906.124.618	32.598.315.044.181	7.662.552.421.096	24.935.762.623.085
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.217.884.780.622.890	558.010.528.521.426	445.371.530.659.107	2.330.523.778.485.210	370.633.380.736.807	1.959.890.397.748.410
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	181.450.941.754	57.272.993.653	43.694.049.293	195.029.886.114	112.482.493.462	82.547.392.652
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	108.787.963.020	34.924.944.974	34.619.702.061	109.093.205.933	84.981.425.317	24.111.780.616
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	245.508.689.632	48.201.141.871	34.918.918.206	258.790.913.297	90.790.269.401	168.000.643.896
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	10.420.602.759.856	2.077.470.333.074	979.343.306.494	11.518.729.786.436	850.305.192.303	10.668.424.594.133
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2.129.843.496.934	83.821.061.405	105.804.475.861	2.107.860.082.478	141.062.503.026	1.966.797.579.452



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01C
MUTASI BMN PER K/L GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	14.122.218.807.256	209.993.145.114	61.918.488.892	14.270.293.463.478	1.048.383.996.403	13.221.909.467.075
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	4.668.234.721.532	746.264.728.690	758.016.666.260	4.656.482.783.962	567.662.890.354	4.088.819.893.608
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	297.456.456.831	58.521.064.847	59.142.362.627	296.835.159.051	123.038.732.363	173.796.426.688
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	247.202.517.180	19.737.703.940	12.087.235.115	254.852.986.005	116.516.763.472	138.336.222.533
33	050	Badan Intelijen Negara	24.545.482.484.540	13.394.022.039.260	9.537.962.067.235	28.401.542.456.565	14.525.933.495.900	13.875.608.960.665
34	051	Lembaga Sandi Negara	12.256.662.864.489	5.606.282.570.470	5.042.512.511.811	12.820.432.923.148	8.331.185.270.287	4.489.247.652.861
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	280.513.137.349	10.728.782.152	10.023.993.152	281.217.926.349	260.959.257.980	20.258.668.369
36	054	Badan Pusat Statistik	8.222.327.897.121	974.661.144.078	1.235.545.018.553	7.961.444.022.646	2.554.477.956.078	5.406.966.066.568
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	2.984.371.640.637	159.278.783.547	110.994.344.171	3.032.656.080.013	436.423.911.160	2.596.232.168.853
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	17.307.345.486.982	1.544.657.009.197	945.558.366.874	17.906.444.129.305	3.356.753.488.691	14.549.690.640.614
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	3.781.455.638.188	170.800.753.300	27.998.498.927	3.924.257.892.561	673.646.017.033	3.250.611.875.528
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	8.958.875.092.827	12.166.483.455.931	2.803.362.809.811	18.321.995.738.947	2.403.636.332.249	15.918.359.406.698
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	408.396.640.942.487	104.646.966.515.543	77.453.339.114.537	435.590.268.343.493	123.569.180.663.688	312.021.087.679.805
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	5.630.157.625.113	730.306.135.620	489.296.309.622	5.871.167.451.111	2.223.835.508.457	3.647.331.942.654
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.306.689.600.994	312.162.824.246	315.868.582.059	2.302.983.843.181	618.896.877.502	1.684.086.965.679
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.631.109.915.694	166.700.164.725	95.296.598.852	2.702.513.481.567	406.258.176.122	2.296.255.305.445
45	066	Badan Narkotika Nasional	4.034.666.302.533	495.876.121.652	416.648.786.579	4.113.893.637.606	2.158.331.885.845	1.955.561.751.761
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4.213.391.950.443	2.265.483.924.987	2.152.016.931.184	4.326.858.944.246	1.555.740.531.367	2.771.118.412.879
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.714.408.937.692	92.638.607.879	270.032.836.123	3.537.014.709.448	609.471.254.241	2.927.543.455.207
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	46.088.042.792	20.042.164.069	16.369.011.009	49.761.195.852	29.332.326.880	20.428.868.972
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	11.288.928.549.398	1.692.790.690.474	791.775.500.911	12.189.943.738.961	5.214.424.108.130	6.975.519.630.831
50	076	Komisi Pemilihan Umum	3.552.751.712.850	313.250.712.378	307.639.070.243	3.558.363.354.985	1.410.928.355.311	2.147.434.999.674
51	077	Mahkamah Konstitusi	1.186.697.192.130	28.513.899.047	15.784.792.091	1.199.426.299.086	350.233.953.572	849.192.345.514
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	692.149.490.479	17.745.036.178	18.780.269.583	691.114.257.074	192.789.953.356	498.324.303.718
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	34.175.199.678.985	8.817.892.346.292	1.815.629.537.659	41.177.462.487.618	1.755.801.098.525	39.421.661.389.093
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	16.018.407.365.789	5.576.589.069.787	5.545.975.676.467	16.049.020.759.109	1.391.498.625.278	14.657.522.133.831
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	10.056.173.518.667	514.767.243.506	255.095.732.860	10.315.845.029.313	3.168.336.485.778	7.147.508.543.535
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5.173.103.730.377	5.129.944.964.163	4.947.734.409.444	5.355.314.285.096	1.601.679.850.903	3.753.634.434.193



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01C
MUTASI BMN PER K/L GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
57	083	Badan Informasi Geospasial	4.623.495.381.478	463.475.361.519	294.409.523.341	4.792.561.219.656	3.515.079.160.902	1.277.482.058.754
58	084	Badan Standarisasi Nasional	449.019.345.210	106.996.205.581	72.429.325.525	483.586.225.266	257.460.790.817	226.125.434.449
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	301.522.933.148	8.917.350.503	1.243.027.693	309.197.255.958	136.567.581.347	172.629.674.611
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.949.519.003.935	68.171.918.897	22.890.881.143	3.994.800.041.689	286.467.386.475	3.708.332.655.214
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.509.905.138.134	117.497.302.069	64.798.528.245	1.562.603.911.958	325.954.199.846	1.236.649.712.112
62	088	Badan Kepegawaian Negara	3.950.769.706.634	273.053.480.765	209.027.112.314	4.014.796.075.085	844.613.486.711	3.170.182.588.374
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	5.802.840.805.664	267.147.674.530	113.623.905.056	5.956.364.575.138	639.848.319.461	5.316.516.255.677
64	090	Kementerian Perdagangan	7.634.858.983.207	398.460.075.453	1.329.482.780.915	6.703.836.277.745	1.117.457.988.840	5.586.378.288.905
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.723.287.806.005	237.130.156.649	281.232.944.180	2.679.185.018.474	613.094.102.425	2.066.090.916.049
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	4.131.380.058.424	172.549.771.888	238.961.379.316	4.064.968.450.996	767.324.183.539	3.297.644.267.457
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	426.237.253.646	22.202.677.244	24.557.851.350	423.882.079.540	148.285.205.654	275.596.873.886
68	100	Komisi Yudisial RI	429.818.391.871	4.785.934.757	3.581.360.401	431.022.966.227	65.879.789.382	365.143.176.845
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3.937.961.696.499	424.450.125.459	1.160.333.539.524	3.202.078.282.434	1.644.928.654.508	1.557.149.627.926
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	549.651.344.603	33.086.437.144	32.565.319.087	550.172.462.660	200.376.084.060	349.796.378.600
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	944.016.904.748	51.673.662.863	8.468.559.143	987.222.008.468	363.409.803.616	623.812.204.852
72	107	Badan SAR Nasional	12.654.413.711.890	3.214.484.883.216	2.681.521.735.909	13.187.376.859.197	7.478.887.003.751	5.708.489.855.446
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	39.773.077.651	15.468.550.331	8.093.193.206	47.148.434.776	26.751.639.667	20.396.795.109
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1.231.870.010.140	(503.154.555)	1.231.366.855.585	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	103.727.880.925	14.453.667.168	1.721.521.554	116.460.026.539	44.953.073.897	71.506.952.642
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2.617.867.509.264	159.940.725.316	232.426.737.106	2.545.381.497.474	491.065.009.456	2.054.316.488.018
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	59.520.145.740.463	4.472.064.758.134	3.481.722.691.095	60.510.487.807.502	6.889.934.257.287	53.620.553.550.215
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	932.266.083.220	963.574.877.021	246.633.861.950	1.649.207.098.291	574.271.175.506	1.074.935.922.785
79	114	Sekretariat Kabinet	62.711.028.884	42.303.922.360	24.147.421.082	80.867.530.162	48.450.335.594	32.417.194.568
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	690.240.343.624	72.915.342.301	91.309.129.322	671.846.556.603	366.371.234.958	305.475.321.645
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	15.132.729.197.048	1.412.819.799.756	974.256.288.137	15.571.292.708.667	1.545.842.127.604	14.025.450.581.063
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	15.762.934.178.175	786.406.028.844	576.770.244.245	15.972.569.962.774	2.609.276.842.705	13.363.293.120.069
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	3.717.652.777.301	111.480.881.864	63.654.064.321	3.765.479.594.844	363.184.705.892	3.402.294.888.952
84	119	Badan Keamanan Laut	2.755.840.055.564	320.035.597.618	106.996.717.090	2.968.878.936.092	1.321.960.747.769	1.646.918.188.323
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	136.645.588.439	53.776.968.855	6.754.936.006	183.667.621.288	104.610.538.569	79.057.082.719
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	51.435.055.292	3.363.500.173	1.532.283.762	53.266.271.703	20.654.232.831	32.612.038.872



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 01C
MUTASI BMN PER K/L GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Saldo Awal per 1 Januari 2021	Mutasi Tahun Anggaran 2021		Saldo Akhir per 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku per 31 Desember 2021
				Mutasi Tambah	Mutasi Kurang			
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	226.361.976.674	1.020.629.343	225.341.347.331	49.391.036.166	175.950.311.165
88	199	Otorita Asahan	6.602.379.162	-	-	6.602.379.162	2.532.738.803	4.069.640.359
Sub Jumlah (1)			7.478.448.098.211.200	1.484.268.457.641.260	1.204.968.660.672.130	7.757.747.895.180.330	1.100.234.476.695.190	6.657.513.418.485.130
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPerti K/L							
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	1.614.892.918.194	607.866.030.147	456.054.388.624	1.766.704.559.717	880.248.279.559	886.456.280.158
Sub Jumlah (2)			1.614.892.918.194	607.866.030.147	456.054.388.624	1.766.704.559.717	880.248.279.559	886.456.280.158
TOTAL NILAI BMN			7.480.062.991.129.390	1.484.876.323.671.400	1.205.424.715.060.750	7.759.514.599.740.040	1.101.114.724.974.750	6.658.399.874.765.290



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02A
NILAI BMN INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF													
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	17.113.071.035	831.081.432.496	191.126.324.585	231.209.932.045	13.646.277.700	6.137.683.938	49.500.000	-	8.316.311.920	-	36.195.063.174	1.334.875.596.893
	001	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(159.863.791.222)	(35.062.850.845)	(4.610.555.848)	-	-	-	(4.708.466.634)	-	(599.508.670)	(204.845.173.219)
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	36.453.112.504	1.145.127.861.259	2.160.285.178.537	1.001.299.844.496	100.600.270.146	9.772.786.045	131.145.787.885	-	88.865.928.191	-	33.590.168.204	4.707.140.937.267
	002	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.446.559.432.884)	(149.206.199.896)	(47.801.566.094)	(76.489.433)	-	-	(35.562.314.925)	-	(26.481.012.666)	(1.705.687.015.898)
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	15.230.502.361	5.954.117.599.963	2.228.452.577.791	2.586.655.009.353	396.232.320.663	17.878.342.009	8.560.897.430	-	197.781.459.838	-	13.566.193.478	11.418.474.902.886
	004	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.902.154.625.787)	(319.807.493.988)	(252.870.195.342)	(955.261.071)	-	-	(138.185.125.460)	-	(13.060.611.116)	(2.627.033.312.764)
4	005	Mahkamah Agung	21.944.823.818	19.805.288.980.810	3.808.622.153.369	9.582.390.434.389	258.176.969.852	68.004.058.842	617.396.614.572	-	65.269.905.024	-	159.843.755.689	34.386.937.696.365
	005	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.026.372.270.835)	(1.527.389.549.925)	(104.373.646.230)	(1.578.389.216)	-	-	(41.616.943.338)	-	(146.421.550.859)	(4.847.752.350.403)
5	006	Kejaksaan Agung	10.539.069.818.723	17.467.403.850.542	7.048.852.525.219	6.005.453.930.542	69.480.660.858	11.971.527.313	1.114.530.378.007	-	339.257.298.652	-	521.638.532.427	43.117.658.522.283
	006	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.583.050.712.756)	(810.404.585.126)	(22.785.777.686)	(401.550.395)	-	-	(191.231.094.395)	-	(497.559.202.647)	(5.105.432.923.005)
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	748.828.058.735	603.480.295.483.953	4.269.371.194.680	6.950.648.273.382	881.042.380.288	3.195.478.268.472	4.525.694.850	20.879.540.836.000	63.715.449.352	-	263.007.194.697	640.736.452.834.409
	007	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.975.409.540.624)	(1.016.451.092.065)	(388.282.135.591)	(4.484.392.373)	-	(248.936.681.454)	-	-	(79.868.047.747)	(4.763.893.371.216)
7	010	Kementerian Dalam Negeri	277.326.163.445	11.995.626.099.493	3.319.378.729.878	2.789.720.379.051	277.089.315.888	137.143.289.683	61.214.356.904	-	766.947.084.645	-	117.988.302.849	19.742.433.721.836
	010	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.960.556.333.233)	(330.630.295.794)	(113.949.108.660)	(94.523.461.278)	-	-	(717.375.384.460)	-	(106.396.400.984)	(4.323.439.984.409)
8	011	Kementerian Luar Negeri	83.004.445.096	39.725.292.314.176	2.636.225.829.409	9.206.998.929.999	24.731.852.402	101.080.865.594	263.874.679.531	191.360.231.428	79.896.496.119	-	334.254.230.752	52.646.719.874.506
	011	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.018.942.424.435)	(1.794.710.840.036)	(19.787.609.965)	(7.693.138.224)	-	-	(61.227.770.246)	-	(78.813.088.927)	(3.981.174.871.833)
9	012	Kementerian Pertahanan	63.884.963.195.524	1.455.327.002.274.300	312.079.213.563.614	87.642.104.825.381	15.153.019.561.976	7.717.447.864.051	4.635.010.597.715	12.507.857.457.641	7.428.803.994.832	32.936.565.000	6.067.082.223.644	1.972.475.442.123.680
	012	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(182.825.085.973.375)	(23.006.246.843.248)	(8.386.945.346.922)	(932.898.834.429)	-	-	(3.123.939.277.492)	-	(4.262.031.547.439)	(222.537.147.822.905)
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	604.873.054.596	54.300.058.612.024	8.395.567.596.182	13.128.613.611.314	92.560.917.102	29.800.588.859	494.150.574.573	-	489.713.047.685	-	722.099.657.104	78.257.437.659.439
	013	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(6.719.680.429.742)	(2.215.790.244.601)	(55.545.419.383)	(4.620.128.283)	-	-	(382.866.604.352)	-	(643.626.082.200)	(10.022.128.908.561)
11	015	Kementerian Keuangan	469.738.276.496	95.091.326.332.450	15.581.678.125.279	17.181.672.299.753	481.897.553.384	45.095.921.809	359.745.403.043	-	1.889.162.946.522	247.522.467.334	589.291.165.899	131.937.130.491.969
	015	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(12.819.619.934.046)	(2.501.593.690.065)	(168.770.553.489)	(864.657.419)	-	-	(1.279.508.944.320)	-	(554.555.128.683)	(17.324.912.908.022)
12	018	Kementerian Pertanian	892.779.249.159	71.619.884.633.074	6.357.372.261.104	6.287.233.015.326	674.655.845.687	87.560.141.560	344.088.554.771	-	131.299.836.996	-	670.723.197.159	87.065.596.734.836
	018	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(5.180.411.382.363)	(981.830.481.038)	(267.298.591.537)	(2.838.298.309)	-	-	(31.358.580.469)	-	(306.382.018.954)	(6.770.119.352.670)
13	019	Kementerian Perindustrian	190.128.895.447	8.710.026.811.390	3.387.240.140.775	2.564.595.755.667	84.362.679.383	24.257.118.164	11.687.642.050	-	61.693.951.072	-	730.832.161.613	15.764.825.155.561
	019	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.524.744.205.220)	(458.770.326.180)	(55.505.929.691)	(982.999.100)	-	-	(37.750.814.122)	-	(595.211.426.347)	(3.672.965.700.665)
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	815.831.664.740	15.404.277.731.426	5.732.079.432.476	2.686.442.343.156	7.517.644.105.164	319.590.239.254	224.807.688.800	-	256.035.421.127	1.166.561.028	411.654.180.954	33.369.529.368.120
	020	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.802.498.490.387)	(424.859.626.075)	(1.038.851.782.764)	(1.918.072.350)	-	-	(154.915.123.628)	-	(273.430.332.058)	(6.696.473.427.262)
15	022	Kementerian Perhubungan	9.718.253.417.892	309.532.832.185.545	56.436.648.269.102	31.433.348.474.321	164.048.192.127.498	2.848.293.517.447	33.668.678.869.868	15.166.870.901.518	2.627.734.446.365	151.433.848.624	4.399.527.929.227	630.031.813.987.407
	022	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(37.745.410.731.489)	(3.698.625.450.393)	(71.115.958.178.982)	(61.731.932.340)	-	(4.128.013.165.621)	(638.226.979.566)	-	(1.996.152.176.548)	(119.384.118.614.939)
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	2.437.351.905.483	363.706.225.939.234	32.546.837.757.808	49.202.386.569.524	1.914.781.562.363	1.491.614.194.566	5.250.589.266.201	-	981.985.036.347	393.750.000	1.086.845.201.563	458.619.011.183.089
	023	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(25.459.567.506.261)	(5.866.111.917.722)	(824.892.645.430)	(78.452.092.993)	-	-	(622.996.343.041)	-	(937.243.178.370)	(33.789.263.683.817)
17	024	Kementerian Kesehatan	26.609.591.637.166	66.433.731.551.886	28.190.524.805.020	18.984.854.361.796	627.993.556.373	183.759.771.489	2.316.380.078.407	2.121.420.000	313.336.268.428	-	12.096.593.358.456	155.758.886.809.021
	024	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(20.652.306.225.995)	(2.758.684.139.700)	(273.431.324.565)	(3.739.628.934)	-	(763.711.200)	(247.047.589.242)	-	(10.313.589.229.150)	(34.249.561.848.786)
18	025	Kementerian Agama	113.255.966.853	68.759.813.593.490	11.364.738.319.236	41.266.275.051.146	631.910.191.977	1.615.869.378.315	3.836.788.746.516	-	261.507.518.593	-	513.516.206.635	128.363.674.972.761
	025	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(8.760.601.147.825)	(4.396.677.623.645)	(257.465.944.506)	(79.633.922.770)	-	-	(137.758.674.752)	-	(382.562.921.674)	(14.014.700.235.172)
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.020.485.307	7.802.710.812.354	2.912.094.165.511	2.557.764.093.831	98.026.954.843	9.457.697.800	495.800.068.361	-	49.592.984.719	-	376.818.143.573	14.306.285.406.299
	026	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.216.178.064.314)	(424.503.961.219)	(57.953.249.326)	(381.285.045)	-	-	(42.946.248.126)	-	(362.885.376.943)	(3.104.848.184.973)
20	027	Kementerian Sosial	642.676.968.115	18.583.223.996.792	2.149.751.272.920	2.254.814.593.219	105.768.717.353	16.996.959.333	6.762.136.189	-	96.170.048.408	-	101.399.863.887	23.957.564.556.216
	027	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.777.862.813.433)	(387.413.884.350)	(49.778.123.504)	(3.529.709.917)	-	-	(69.450.385.557)	-	(98.614.170.901)	(2.386.649.087.662)
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	543.533.386.411	9.993.102.760.376	3.572.287.591.378	3.895.519.488.811	525.979.806.667	59.197.990.564	92.321.203.995	140.477.822.000	154.288.812.415	29.850.000	1.985.562.592.395	20.962.301.305.012



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02A
NILAI BMN INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF													
029		Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.804.664.953.302)	(483.278.250.072)	(234.859.492.421)	(2.386.526.952)	-	-	(106.960.604.866)	-	(520.265.383.185)	(4.152.415.210.798)
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	96.322.800.358	16.054.931.927.147	6.006.896.288.158	5.440.171.337.664	3.878.542.550.254	85.220.182.496	141.231.266.251	214.231.398.172	176.944.584.439	894.437.500	459.592.819.127	32.554.979.591.566
	032	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.742.496.159.096)	(702.240.908.516)	(1.725.412.821.362)	(7.473.993.731)	-	(27.755.303.785)	(73.992.744.984)	-	(369.716.291.971)	(7.649.088.223.445)
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	67.649.313.937.161	875.110.207.644.521	15.271.207.336.687	20.150.498.180.358	795.137.238.043.985	37.179.384.571.861	83.440.143.793.078	406.761.606.349.379	7.265.894.316.882	211.606.245.148	22.265.116.393.264	2.330.442.216.812.320
	033	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(11.049.137.881.314)	(1.984.161.459.548)	(324.493.963.030.416)	(20.368.369.963.163)	-	(5.287.362.019.925)	(98.044.807.449)	-	(7.320.783.245.828)	(370.601.822.407.643)
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	40.999.571	-	129.859.253.161	11.363.005.584	2.558.164.233	37.589.360.920	-	-	7.649.769.964	-	5.780.851.461	194.841.404.894
	034	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(97.430.691.956)	(1.028.955.526)	(743.868.104)	-	-	-	(7.429.490.602)	-	(5.750.913.961)	(112.383.920.149)
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	469.769.511	-	83.623.800.130	-	2.092.285.347	547.639.287	-	-	9.028.538.427	-	13.144.604.725	108.906.637.427
	035	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(64.799.286.588)	-	(857.736.919)	-	-	-	(7.035.058.477)	-	(12.185.374.725)	(84.877.456.709)
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.260.369.051	-	94.773.775.220	156.082.498.155	144.386.000	1.019.395.742	98.560.000	-	4.860.734.393	-	448.180.400	258.687.898.961
	036	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(73.544.119.692)	(15.352.206.335)	(44.000.275)	(137.445.000)	-	-	(1.206.527.487)	-	(448.180.400)	(90.732.479.189)
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Berekraf	22.182.323.241	6.639.038.800.799	877.672.935.970	2.249.474.926.396	47.870.761.074	18.626.042.440	719.459.120.326	804.837.530.000	60.562.800.114	-	67.206.888.642	11.506.932.129.002
	040	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(554.830.190.155)	(211.033.421.446)	(20.772.238.690)	(1.835.612.225)	-	-	(38.869.760.672)	-	(18.727.009.850)	(846.068.233.038)
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.058.158.602	1.468.058.953.000	137.776.726.404	468.773.597.003	7.706.388.680	1.066.410.162	-	-	19.389.526.163	-	3.892.012.485	2.107.721.772.499
	041	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(83.715.709.822)	(35.944.615.706)	(1.502.865.980)	-	-	-	(16.047.632.207)	-	(3.801.222.188)	(141.012.045.903)
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	46.741.577.647	12.058.461.798.500	886.253.537.132	1.047.236.703.955	88.049.950.534	35.022.206.857	198.657.800	-	56.587.302.312	-	48.777.803.905	14.267.329.538.642
	042	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(691.241.167.921)	(227.034.288.709)	(46.165.530.215)	(2.345.296.965)	-	-	(49.714.343.420)	-	(31.517.430.322)	(1.048.018.057.552)
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	7.274.213.173	3.282.411.957.000	437.012.308.393	826.979.765.897	37.463.058.944	3.874.864.685	212.226.000	-	41.704.880.172	3.087.474.000	15.619.095.943	4.655.639.844.207
	044	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(400.219.101.522)	(124.130.487.781)	(15.841.806.107)	(2.006.250)	-	-	(23.761.830.818)	-	(3.218.507.015)	(567.173.739.493)
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.720.341.425	2.358.220.000	96.558.993.922	172.632.001.000	5.152.456.725	332.318.245	-	-	16.040.638.379	-	-	296.794.969.696
	047	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(85.906.132.455)	(16.528.595.841)	(5.149.744.225)	(15.000.000)	-	-	(15.406.575.415)	-	-	(123.006.047.936)
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.694.790.111	32.784.833.000	134.174.751.396	77.320.672.347	1.395.216.550	1.149.495.125	-	-	5.011.171.570	-	772.936.480	254.303.866.579
	048	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(102.048.988.417)	(9.035.889.620)	(738.049.759)	-	-	-	(3.653.692.178)	-	(759.428.399)	(116.236.048.373)
33	050	Badan Intelijen Negara	105.345.187.665	5.694.085.829.289	15.764.221.877.327	1.488.477.578.930	183.856.225.843	14.603.354.367	-	-	5.148.954.719.622	-	-	28.399.544.773.043
	050	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(10.992.504.688.348)	(182.191.625.975)	(70.338.485.175)	(1.091.300.000)	-	-	(3.279.146.175.640)	-	-	(14.525.272.275.138)
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	2.125.045.976	1.176.735.206.680	5.566.701.115.516	1.392.134.706.056	45.322.813.320	8.200.564.404	97.710.474.497	-	1.141.153.443.365	-	3.388.739.071.885	12.818.822.441.699
	051	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.396.517.092.729)	(127.690.562.096)	(15.854.643.960)	(360.285.277)	-	-	(539.401.690.009)	-	(3.250.219.204.814)	(8.330.043.478.885)
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	1.859.000	-	158.063.291.358	-	-	568.097.704	-	-	109.090.037.970	-	13.423.458.397	281.146.744.429
	052	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(150.641.024.836)	-	-	-	-	-	(96.906.145.782)	-	(13.341.676.842)	(260.888.847.460)
36	054	Badan Pusat Statistik	65.161.759.926	3.073.624.926.935	2.207.559.149.104	1.965.638.353.882	-	51.420.017.676	1.201.034.560	-	393.320.447.281	-	185.523.677.790	7.943.449.367.154
	054	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.816.604.408.948)	(267.837.216.496)	-	(214.333.997)	-	-	(304.637.848.754)	-	(156.893.541.080)	(2.546.187.349.275)
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	4.700.405.446	1.541.450.676.000	494.470.079.873	161.997.391.722	6.197.314.170	106.960.367.956	19.016.500.000	490.209.375.000	101.310.171.102	-	105.437.090.556	3.031.749.371.825
	055	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(340.544.423.882)	(34.581.422.631)	(3.493.032.813)	-	-	-	(18.753.465.763)	-	(38.459.617.910)	(435.831.962.999)
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	99.991.252.773	9.110.445.705.918	3.227.062.792.189	2.967.906.202.230	25.770.699.633	1.951.181.089.510	14.893.967.829	-	297.068.130.792	-	160.057.927.032	17.854.377.767.906
	056	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.576.922.723.659)	(400.683.121.919)	(12.239.640.099)	(1.864.069.915)	-	-	(196.979.634.036)	-	(149.257.381.839)	(3.337.946.571.467)
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15.326.547.452	1.866.606.161.000	694.233.911.022	641.358.289.003	54.724.368.942	238.173.743.548	90.684.000	-	301.945.782.317	-	92.008.030.412	3.904.467.517.696
	057	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(522.206.239.925)	(68.682.385.239)	(4.647.641.876)	(476.506.723)	-	-	(44.051.684.621)	-	(20.510.808.843)	(660.575.067.227)
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.985.475.548	5.621.024.930.981	3.244.313.212.858	941.169.699.741	28.319.142.932	58.035.716.726	7.438.138.760.356	-	914.885.642.155	-	65.878.531.967	18.318.751.113.264



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02A
NILAI BMN INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF													
	059	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.787.221.212.199)	(162.404.791.110)	(12.519.532.487)	(626.719.745)	-	-	(374.844.739.903)	-	(63.755.099.452)	(2.401.372.094.896)
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.458.607.415.578	210.515.340.924.203	163.606.756.216.104	38.435.473.731.017	1.129.711.149.165	72.528.191.118	3.310.078.932.016	-	9.179.254.241.279	-	1.372.149.870.034	435.079.900.670.514
	060	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(111.304.775.173.620)	(5.358.019.291.196)	(533.694.783.324)	(18.325.787.154)	-	-	(4.825.104.932.173)	-	(1.249.618.468.179)	(123.289.538.435.646)
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	156.719.090.372	1.667.202.395.506	2.885.702.695.448	866.064.361.520	30.299.554.744	19.628.282.267	92.005.978.861	-	126.151.751.328	-	23.145.748.261	5.866.919.858.307
	063	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.021.757.969.860)	(101.774.986.369)	(8.773.943.391)	(249.966.659)	-	-	(66.891.083.650)	-	(21.894.633.113)	(2.221.342.583.042)
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.484.969.116	1.378.951.719.000	375.146.808.680	302.230.984.481	10.888.276.247	11.917.337.823	-	-	213.898.975.503	-	5.551.917.762	2.300.070.988.612
	064	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(339.363.524.042)	(57.847.601.003)	(3.806.016.621)	(886.617.168)	-	-	(209.401.274.682)	-	(5.244.353.062)	(616.549.386.578)
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.564.994.335	1.959.546.919.000	313.233.277.193	272.099.590.044	9.022.115.183	852.077.649	-	-	140.116.212.560	-	-	2.702.435.185.964
	065	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(257.068.909.110)	(51.718.920.869)	(4.247.519.477)	(444.976.050)	-	-	(92.711.210.763)	-	-	(406.191.536.269)
45	066	Badan Narkotika Nasional	36.673.378.482	641.167.499.386	2.241.991.005.973	805.513.824.156	58.266.070.433	31.177.833.123	1.341.631.000	-	162.546.975.390	-	115.321.038.869	4.093.999.256.812
	066	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.807.983.823.720)	(75.433.791.790)	(22.488.336.748)	(2.380.786.794)	-	-	(135.545.266.399)	-	(111.570.664.808)	(2.155.402.670.259)
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	185.453.337.428	701.074.345.474	401.001.026.934	603.103.929.447	858.354.389.797	115.537.418.571	17.670.622.284	-	9.304.684.004	-	1.428.873.916.962	4.320.373.670.901
	067	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(333.415.331.973)	(68.547.830.901)	(314.596.997.955)	(8.738.769.742)	-	-	(6.875.195.022)	-	(820.994.156.169)	(1.553.168.281.762)
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	224.358.326.249	2.089.005.681.616	482.926.203.980	633.791.662.342	29.815.206.492	2.836.183.260	11.496.214.080	-	52.027.212.089	-	7.285.053.058	3.533.541.743.166
	068	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(423.739.195.708)	(119.914.634.950)	(16.725.439.883)	(134.926.656)	-	-	(39.276.795.568)	-	(7.179.568.554)	(606.970.561.319)
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	879.348.875	-	27.362.935.922	13.663.103.000	-	1.579.355.498	602.183.000	-	1.166.001.200	-	4.221.530.513	49.474.458.008
	074	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(21.657.641.674)	(2.595.989.570)	-	(9.918.000)	-	-	(660.176.825)	-	(4.203.068.906)	(29.126.794.975)
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	143.131.972.657	3.440.624.315.637	5.909.643.454.880	1.419.047.084.129	198.210.786.296	12.802.678.395	553.205.958.640	-	446.373.520.219	-	64.786.665.549	12.187.826.436.402
	075	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.452.734.416.152)	(182.080.060.360)	(89.353.713.064)	(892.477.950)	-	-	(426.917.067.218)	-	(61.399.416.744)	(5.213.377.151.488)
50	076	Komisi Pemilihan Umum	40.311.568.156	1.113.746.138.933	1.550.201.028.243	660.475.742.640	1.714.761.860	6.573.128.755	-	-	25.378.663.282	-	121.666.063.147	3.520.067.095.016
	076	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.190.581.662.017)	(67.770.698.994)	(577.826.257)	(527.218.763)	-	-	(19.322.182.131)	-	(115.931.381.990)	(1.394.710.970.152)
51	077	Mahkamah Konstitusi	2.578.001.790	506.815.456.000	288.913.012.038	285.934.282.327	45.415.834.050	23.974.333.069	991.819.950	-	22.785.340.246	-	21.652.170.214	1.199.060.249.684
	077	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(258.432.676.917)	(28.442.598.547)	(25.192.619.914)	(111.714.721)	-	-	(18.789.955.887)	-	(19.027.499.014)	(349.997.065.000)
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	1.824.303.405	235.129.908.040	178.166.152.464	227.373.200.215	235.602.000	467.893.068	-	-	36.163.407.777	-	11.383.973.605	690.744.403.574
	078	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(131.990.210.717)	(23.225.838.053)	(97.199.622)	(37.113.750)	-	-	(25.853.789.589)	-	(11.378.613.580)	(192.582.765.311)
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.029.829.810	29.463.534.813.117	1.999.557.806.486	1.939.441.609.338	266.224.825.548	6.565.749.587.875	503.369.859.648	-	216.449.400.357	-	213.822.314.209	41.171.180.046.388
	079	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.291.261.690.283)	(155.405.351.684)	(114.151.008.576)	(10.335.000)	-	-	(63.505.970.893)	-	(127.677.189.246)	(1.752.011.545.682)
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	72.292.737.801	13.034.026.829.000	1.271.746.320.779	1.162.017.622.786	417.085.079.793	26.430.068.006	6.751.257.380	-	47.130.354.944	-	10.058.255.334	16.047.538.525.823
	080	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(872.052.261.604)	(314.919.486.026)	(155.694.874.867)	(31.200.000)	-	-	(37.955.557.844)	-	(9.840.446.837)	(1.390.493.827.178)
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	12.390.766.304	4.697.952.218.202	3.830.855.549.889	1.113.254.100.237	122.411.482.262	36.556.660.234	67.029.616.500	-	230.225.045.037	-	202.304.448.024	10.312.979.886.689
	081	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.608.371.078.831)	(178.191.186.247)	(40.819.177.620)	(457.659.469)	-	-	(147.219.703.761)	-	(190.883.480.848)	(3.165.942.286.776)
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	62.294.606.398	1.539.852.297.363	1.913.095.957.639	412.029.614.310	60.884.776.649	18.674.642.680	496.544.873.857	-	654.258.715.119	19.900.870.910	176.525.341.637	5.354.061.696.562
	082	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.139.943.487.958)	(69.054.138.761)	(27.713.811.103)	(22.270.000)	-	-	(351.468.616.649)	-	(12.694.003.952)	(1.600.896.328.423)
57	083	Badan Informasi Geospasial	13.215.338.947	195.151.853.800	1.228.622.201.768	75.289.674.961	10.940.202.750	14.141.052.902	6.560.074.798	-	3.233.480.421.049	2.809.039.884	-	4.790.665.962.971
	083	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.016.028.718.240)	(13.546.076.420)	(4.893.315.070)	(36.400.000)	-	-	(2.469.759.045.237)	-	(10.177.647.705)	(3.514.441.202.672)
58	084	Badan Standarisasi Nasional	573.901.430	-	342.840.639.559	117.725.861.900	500.500.000	1.179.655.700	-	-	12.851.376.200	-	7.668.064.660	483.339.999.449
	084	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(235.324.202.637)	(3.555.652.535)	(161.613.310)	-	-	-	(10.742.675.490)	-	(7.563.259.220)	(257.347.403.192)
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.388.744.413	112.976.306.000	159.399.371.875	14.660.420.614	2.356.628.189	1.287.829.861	2.596.788.000	-	12.098.032.635	-	1.231.840.120	308.995.961.707
	085	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(121.982.827.978)	(1.695.436.833)	(1.650.613.570)	(3.000.000)	-	-	(9.859.910.482)	-	(1.231.840.120)	(136.423.628.983)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02A
NILAI BMN INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A		DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF												
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.547.885.091	3.039.780.652.774	217.139.018.282	700.343.464.440	11.419.215.041	6.952.878.406	-	-	6.426.865.700	-	3.871.941.645	3.989.481.921.379
	086	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(179.910.008.632)	(85.815.064.494)	(6.519.361.549)	(143.990.165)	-	-	(6.170.623.330)	-	(3.853.217.443)	(282.412.265.613)
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.346.583.401	805.561.648.718	265.069.905.094	367.489.805.847	62.881.974.526	26.872.634.444	2.399.298.000	-	22.227.611.637	-	7.174.207.984	1.562.023.669.651
	087	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(203.155.557.039)	(61.619.440.610)	(37.502.937.841)	(60.483.100)	-	-	(16.125.550.272)	-	(7.136.508.179)	(325.600.477.041)
62	088	Badan Kepegawaian Negara	10.159.232.764	2.309.435.980.187	607.409.829.240	841.376.833.975	23.958.841.060	19.534.460.093	1.470.688.262	-	142.393.801.295	-	56.958.695.632	4.012.698.362.512
	088	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(518.712.514.901)	(112.362.111.392)	(17.172.759.840)	(1.848.182.709)	-	-	(137.067.785.127)	-	(56.064.048.043)	(843.227.402.012)
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan	12.049.894.530	4.071.464.328.850	541.014.495.477	1.109.527.806.162	17.080.889.443	8.680.594.735	120.547.191.365	-	44.300.034.694	1.223.176.745	27.819.360.528	5.953.707.772.529
	089	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(405.657.565.384)	(163.654.954.907)	(9.700.448.197)	(905.117.060)	-	-	(33.067.285.827)	-	(24.829.801.690)	(637.815.173.065)
64	090	Kementerian Perdagangan	1.655.085.212.532	2.893.596.228.751	950.795.149.848	924.537.676.659	26.502.013.121	8.428.546.066	63.288.420.285	-	65.910.614.588	-	113.969.029.424	6.702.112.891.274
	090	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(752.282.170.989)	(203.552.708.321)	(22.029.344.842)	(375.806.403)	-	-	(43.980.473.905)	-	(94.251.302.288)	(1.116.471.806.748)
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	152.527.302.249	618.688.640.000	512.954.209.104	331.073.828.669	6.422.702.736	13.635.203.764	-	-	934.839.752.668	91.750.000	107.991.241.098	2.678.224.630.288
	092	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(473.943.135.305)	(71.250.713.513)	(3.939.375.237)	(930.129.834)	-	-	(16.333.135.886)	-	(46.098.176.280)	(612.494.666.055)
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	963.674.594.121	1.736.548.733.375	571.899.444.087	422.539.972.809	129.488.001.499	3.702.650.928	37.957.608.653	-	93.848.687.779	-	104.541.760.935	4.064.201.454.186
	093	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(486.613.545.984)	(61.743.176.060)	(50.492.078.121)	-	-	-	(63.360.048.318)	-	(104.536.584.060)	(766.745.432.543)
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	523.476.730	204.962.293.509	152.631.313.343	44.509.287.811	2.316.491.000	3.727.168.443	5.304.624.372	-	5.491.590.152	-	3.694.747.529	423.160.992.889
	095	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(134.641.750.892)	(4.073.858.803)	(221.791.689)	(167.101.352)	-	-	(5.091.485.777)	-	(3.691.981.579)	(147.887.970.092)
68	100	Komisi Yudisial RI	2.319.735.591	272.460.683.000	50.442.519.447	95.414.717.599	3.588.869.628	2.466.563.964	216.234.730	-	2.655.488.940	-	1.200.705.558	430.765.518.457
	100	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(47.588.679.276)	(10.173.011.904)	(3.480.798.096)	(826.687.271)	-	-	(2.420.221.572)	-	(1.159.495.632)	(65.648.893.751)
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	371.144.648.211	279.632.984.000	1.807.272.969.240	414.513.767.230	1.190.429.000	14.202.140.840	-	-	249.315.366.957	-	61.185.787.381	3.198.458.092.859
	103	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.390.197.117.245)	(37.601.490.601)	(261.894.380)	-	-	-	(152.574.473.636)	-	(60.827.814.408)	(1.641.462.790.272)
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	1.882.318.185	238.470.921.000	172.142.387.389	84.288.325.302	5.650.807.800	9.328.871.392	2.999.691.573	-	11.220.047.008	-	23.466.259.198	549.449.628.847
	104	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(152.996.830.508)	(10.162.630.685)	(3.647.041.624)	(276.955.250)	-	-	(9.476.900.185)	-	(23.341.286.986)	(199.901.645.238)
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	543.974.558	369.821.075.000	320.885.212.340	217.886.911.673	1.144.947.820	696.058.235	779.154.758	-	58.536.089.008	1.455.816.192	15.401.597.381	987.150.836.965
	106	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(290.882.331.915)	(19.009.680.129)	(350.509.564)	(49.737.000)	-	-	(37.843.111.529)	-	(15.218.036.864)	(363.353.407.001)
72	107	Badan SAR Nasional	153.855.668.777	975.551.847.173	10.301.628.951.873	1.126.420.075.635	63.879.865.210	21.306.687.951	148.130.060.953	-	184.844.102.690	-	201.772.401.071	13.177.389.661.333
	107	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(7.064.421.543.846)	(108.409.645.513)	(16.591.543.152)	(1.869.041.000)	-	-	(132.822.763.999)	-	(148.003.602.904)	(7.472.118.140.414)
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	640.534.960	-	38.974.285.799	-	-	5.583.219.402	-	-	1.814.577.964	-	-	47.012.618.125
	108	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(25.530.989.205)	-	-	(13.543.750)	-	-	(1.095.641.751)	-	-	(26.640.174.706)
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	109	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	284.853.070	55.863.617.012	52.153.473.141	1.106.963.489	28.551.000	4.263.144.485	-	-	1.310.069.234	-	855.561.506	115.866.232.937
	110	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(41.047.817.324)	(875.731.388)	(9.480.862)	(1.147.070.566)	-	-	(864.137.984)	-	(758.847.100)	(44.703.085.224)
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	66.692.846.155	73.613.154.691	401.636.005.721	1.418.566.821.260	428.307.269.190	19.493.717.272	1.317.728.350	-	132.040.131.653	-	3.532.612.956	2.545.200.287.248
	111	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(247.374.225.930)	(88.109.088.252)	(141.919.820.268)	(200.009.455)	-	-	(9.898.605.106)	-	(3.496.553.243)	(490.998.302.254)
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	16.847.704.623	41.907.260.224.875	1.874.091.635.480	3.509.429.070.007	11.506.196.976.816	9.637.618.122	767.370.239.040	72.437.831.953	600.459.430.707	27.094.239.651	205.572.092.290	60.496.397.063.564
	112	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.204.858.087.325)	(777.290.335.679)	(4.662.469.225.998)	(588.392.000)	-	-	(25.620.102.602)	-	(167.791.499.939)	(6.887.173.785.216)
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	473.346.735	695.921.837.000	411.708.986.375	220.347.506.368	78.380.837.756	3.600.000	785.702.500	-	229.008.200.728	-	12.036.034.697	1.648.666.052.159
	113	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(348.302.764.810)	(17.265.333.276)	(14.742.279.667)	-	-	-	(190.264.979.237)	-	(3.412.695.808)	(573.988.052.798)
79	114	Sekretariat Kabinet	3.001.206.033	-	58.300.728.108	-	-	11.100.265.179	-	-	4.210.800.182	-	4.019.948.000	80.632.947.502



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02A
NILAI BMN INTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF														
	114	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(40.868.942.285)	-	-	-	-	-	(3.477.799.769)	-	(4.019.948.000)	(48.366.690.054)
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	363.324	95.122.003.081	467.441.998.435	42.726.283.165	784.486.000	11.159.085.269	-	-	20.422.400.469	-	26.098.648.086	663.755.267.829
	115	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(318.931.244.472)	(4.880.792.208)	(363.055.949)	(197.600.000)	-	-	(13.577.547.012)	-	(23.561.841.801)	(361.512.081.442)
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2.967.514.713	12.818.757.640.104	1.443.034.131.813	1.107.210.304.207	28.544.415.698	14.043.519.228	94.511.562.194	-	12.153.625.629	-	44.534.209.897	15.565.756.923.483
	116	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.208.915.624.677)	(263.989.706.321)	(13.224.168.617)	(5.900.642.897)	-	-	(9.084.457.339)	-	(41.208.283.401)	(1.542.322.883.252)
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.033.659.491	11.375.315.379.856	3.149.878.514.244	1.217.043.932.452	65.878.717.545	5.922.805.903	578.356.250	-	15.730.465.657	-	135.998.027.846	15.970.379.858.244
	117	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.164.637.961.254)	(270.277.871.664)	(31.071.376.866)	(1.333.102.627)	-	-	(6.515.386.214)	-	(134.144.095.447)	(2.607.979.794.072)
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5.747.508.398	1.753.754.999.824	75.965.637.889	200.979.949.454	1.587.356.330.093	39.249.465.449	91.526.684.537	4.106.350.000	390.209.000	-	5.836.723.444	3.764.913.858.088
	118	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(52.237.665.976)	(13.565.724.610)	(292.035.941.282)	(136.874.651)	-	(4.106.350.000)	(73.389.125)	-	(671.506.685)	(362.827.452.329)
84	119	Badan Keamanan Laut	37.919.328.139	19.700.586.774	2.132.786.081.912	32.630.544.326	13.432.024.000	12.560.296.966	615.940.044.666	-	71.023.773.834	-	32.221.329.305	2.968.214.009.922
	119	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.218.674.937.279)	(2.929.091.702)	(4.762.059.590)	-	-	-	(68.402.558.358)	-	(26.889.576.625)	(1.321.658.223.554)
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	41.743.431.609	5.675.945.000	119.380.089.693	904.530.000	-	9.765.095.736	395.000.000	-	5.758.012.790	-	-	183.622.104.828
	120	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(97.525.479.255)	(9.045.300)	-	(2.877.921.484)	-	-	(4.171.330.929)	-	-	(104.583.776.968)
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	1.122.721.446	-	45.004.588.680	-	-	4.524.345.577	-	-	2.579.852.700	-	-	53.231.508.403
	122	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(19.326.963.378)	-	-	(376.905.395)	-	-	(937.347.388)	-	-	(20.641.216.161)
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	190.398.260	88.179.767.280	44.516.926.155	89.457.290.306	8.690.792	82.720.632	-	-	1.744.988.575	-	1.006.871.443	225.187.653.443
	123	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(38.440.439.691)	(8.396.076.903)	(8.690.792)	-	-	-	(1.445.142.742)	-	(1.004.709.609)	(49.295.059.737)
88	199	Otorita Asahan	-	1.357.387.247	257.193.339	4.975.039.276	12.759.300	-	-	-	-	-	-	6.602.379.162
	199	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(257.193.339)	(2.269.718.852)	(5.826.612)	-	-	-	-	-	-	(2.532.738.803)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi			198.732.783.487.785	4.548.399.276.607.160	785.674.360.297.095	421.483.707.234.010	1.010.846.990.802.260	65.040.201.213.153	152.836.267.883.867	457.235.657.503.091	50.165.093.807.120	701.646.092.016	63.122.312.806.758	7.754.238.297.734.320
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (1)			-	-	(521.846.479.124.149)	(67.431.637.874.672)	(416.869.162.467.405)	(21.722.029.735.667)	-	(9.722.557.334.587)	(23.278.537.332.828)	-	(37.439.574.237.568)	(1.098.309.978.106.880)
Sub Jumlah (1)			198.732.783.487.785	4.548.399.276.607.160	263.827.881.172.946	354.052.069.359.338	593.977.828.334.860	43.318.171.477.486	152.836.267.883.867	447.513.100.168.504	26.886.556.474.292	701.646.092.016	25.682.738.569.190	6.655.928.319.627.450
B DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L														
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain	1.103.506.647	26.594.107.000	494.147.390.874	26.384.760.000	944.866.256.194	60.614.862.626	29.433.114.852	-	183.121.621.530	-	-	1.766.265.619.723
	999	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(449.960.522.636)	(700.142.684)	(237.977.392.041)	(14.070.627.891)	-	-	(177.313.282.498)	-	-	(880.021.967.750)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi			1.103.506.647	26.594.107.000	494.147.390.874	26.384.760.000	944.866.256.194	60.614.862.626	29.433.114.852	-	183.121.621.530	-	-	1.766.265.619.723
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (2)			-	-	(449.960.522.636)	(700.142.684)	(237.977.392.041)	(14.070.627.891)	-	-	(177.313.282.498)	-	-	(880.021.967.750)
Sub Jumlah (2)			1.103.506.647	26.594.107.000	44.186.868.238	25.684.617.316	706.888.864.153	46.544.234.735	29.433.114.852	-	5.808.339.032	-	-	886.243.651.973
TOTAL NILAI BMN SEBELUM PENYUSUTAN			198.733.886.994.432	4.548.425.870.714.160	786.168.507.687.969	421.510.091.994.010	1.011.791.857.058.460	65.100.816.075.779	152.865.700.998.719	457.235.657.503.091	50.348.215.428.650	701.646.092.016	63.122.312.806.758	7.756.004.563.354.050
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN			-	-	(522.296.439.646.785)	(67.432.338.017.356)	(417.107.139.859.446)	(21.736.100.363.558)	-	(9.722.557.334.587)	(23.455.850.615.326)	-	(37.439.574.237.568)	(1.099.190.000.074.630)
T O T A L			198.733.886.994.432	4.548.425.870.714.160	263.872.068.041.184	354.077.753.976.654	594.684.717.199.013	43.364.715.712.221	152.865.700.998.719	447.513.100.168.504	26.892.364.813.324	701.646.092.016	25.682.738.569.190	6.656.814.563.279.420



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02B
NILAI BMN EKSTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

														(rupiah)	
No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total	
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF														
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	-	1.015.831.722	9.900.000	-	-	-	-	-	-	462.000	1.026.193.722	
	001	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(729.358.084)	(495.000)	-	-	-	-	-	-	(462.000)	(730.315.084)	
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	6.325.485.278	1.494.499.158	-	1.001.696.305	-	-	-	-	61.167.150	8.882.847.891	
	002	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.382.377.540)	(201.271.795)	-	-	-	-	-	-	(61.167.150)	(4.644.816.485)	
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	7.919.149.118	435.847.659	-	142.841.540	-	-	-	-	29.491.890	8.527.330.207	
	004	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.794.743.050)	(45.854.322)	-	-	-	-	-	-	(28.771.890)	(3.869.369.262)	
4	005	Mahkamah Agung	-	-	18.160.539.099	2.529.767.532	-	182.273.499	-	-	-	-	1.557.079.620	22.429.659.750	
	005	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(14.240.303.038)	(618.498.548)	-	(286.000)	-	-	-	-	(1.543.670.071)	(16.402.757.657)	
5	006	Kejaksaan Agung	-	-	16.404.525.994	1.350.317.946	-	36.553.960	-	-	-	-	953.503.582	18.744.901.482	
	006	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(10.389.865.392)	(274.230.716)	-	-	-	-	-	-	(951.497.734)	(11.615.593.842)	
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	-	-	2.581.448.644	108.537.770	-	8.236.159.375	-	113.407.000	-	-	211.912.038	11.251.464.827	
	007	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.886.211.019)	(17.358.093)	-	-	-	(24.826.610)	-	-	(166.102.338)	(2.094.498.060)	
7	010	Kementerian Dalam Negeri	-	-	8.937.366.951	19.796.165.200	-	94.378.700	-	-	-	-	1.374.786.040	30.202.696.891	
	010	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(5.522.023.592)	(4.547.340.318)	-	-	-	-	-	-	(1.361.389.168)	(11.430.753.078)	
8	011	Kementerian Luar Negeri	-	-	8.739.718.221	54.771.161	-	80.190.846	-	-	-	-	100.473.931	8.975.154.159	
	011	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(5.905.732.396)	(8.959.934)	-	(1.587.131)	-	-	-	-	(94.932.053)	(6.011.211.514)	
9	012	Kementerian Pertahanan	-	-	608.367.036.118	13.709.252.085	-	76.478.458.082	-	-	-	-	9.613.785.903	708.168.532.188	
	012	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(405.614.790.234)	(1.666.981.349)	-	-	-	-	-	-	(8.126.600.000)	(415.408.371.583)	
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	24.554.751.783	5.971.536.251	-	132.187.711	-	-	-	-	5.040.317.408	35.698.793.153	
	013	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(17.224.319.455)	(1.408.560.132)	-	(770.000)	-	-	-	-	(4.901.397.236)	(23.535.046.823)	
11	015	Kementerian Keuangan	-	-	37.168.596.690	4.276.899.614	-	8.352.866.519	-	-	-	-	2.836.960.337	52.635.323.160	
	015	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(27.795.453.300)	(1.361.247.328)	-	(1.150.000)	-	-	-	-	(2.616.209.502)	(31.774.060.130)	
12	018	Kementerian Pertanian	-	-	29.881.206.543	7.996.368.217	-	170.855.581.054	-	-	-	-	32.836.175.335	241.569.331.149	
	018	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(23.516.217.750)	(1.959.950.213)	-	-	-	-	-	-	(1.805.395.848)	(27.281.563.811)	
13	019	Kementerian Perindustrian	-	-	13.287.885.877	127.503.100	-	188.230.023	-	-	-	-	700.442.780	14.304.061.780	
	019	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(9.459.814.177)	(27.413.511)	-	(2.021.000)	-	-	-	-	(672.398.223)	(10.161.646.911)	
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	8.985.570.700	340.285.494	-	237.703.350	-	-	-	-	131.611.732	9.695.171.276	
	020	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(7.644.309.001)	(72.259.269)	-	-	-	-	-	-	(131.611.732)	(7.848.180.002)	
15	022	Kementerian Perhubungan	-	-	140.698.928.609	32.849.209.281	-	8.861.996.094	-	658.677.176	-	-	1.870.706.728	184.939.517.888	
	022	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(77.635.914.691)	(4.088.943.404)	-	(26.492.400)	-	(336.542.054)	-	-	(1.659.134.935)	(83.747.027.484)	
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	-	-	438.286.080.772	5.034.832.561	-	26.570.741.872	-	-	-	-	4.514.117.343	474.405.772.548	
	023	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(278.517.337.375)	(902.538.331)	-	(17.790.750)	-	-	-	-	(4.447.696.708)	(283.885.363.164)	
17	024	Kementerian Kesehatan	-	-	83.490.130.574	32.711.365.451	225.000	648.462.185	-	-	-	-	75.251.205.471	192.101.388.681	
	024	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(61.771.084.702)	(3.147.331.069)	(56.250)	(552.000)	-	-	-	-	(48.462.251.718)	(113.381.275.739)	
18	025	Kementerian Agama	-	-	444.682.544.493	45.615.641.133	-	2.083.857.191	-	-	-	-	17.137.704.105	509.519.746.922	
	025	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(351.466.670.004)	(9.259.747.340)	-	(209.557.536)	-	-	-	-	(16.715.420.430)	(377.651.395.310)	
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-	32.041.566.316	300.582.895	-	86.832.245	-	-	-	-	589.512.908	33.018.494.364	
	026	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(22.254.882.185)	(21.483.479)	-	-	-	-	-	-	(584.841.021)	(22.861.206.685)	
20	027	Kementerian Sosial	-	-	6.952.866.008	5.663.543.440	-	2.106.435.400	-	-	-	-	524.106.575	15.246.951.423	
	027	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(5.985.174.149)	(794.228.197)	-	(665.000)	-	-	-	-	(522.994.026)	(7.303.061.372)	
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	12.586.646.707	7.173.604.653	-	799.789.530	-	-	-	-	2.641.698.992	23.201.739.882	
	029	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(9.315.667.847)	(1.104.105.842)	-	(400.000)	-	-	-	-	(2.058.772.154)	(12.478.945.843)	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02B
NILAI BMN EKSTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

															(rupiah)	
No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total		
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF															
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	15.250.678.898	3.540.328.651	-	3.297.112.699	-	-	-	-	21.247.332.367	43.335.452.615		
	032	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(11.419.013.304)	(651.127.412)	-	(5.085.000)	-	-	-	-	(1.388.971.935)	(13.464.197.651)		
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	44.186.048.039	25.147.832.160	-	10.112.448.730	-	19.740.000	-	-	2.095.603.961	81.561.672.890		
	033	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(25.360.215.401)	(4.165.495.441)	-	-	-	(1.381.800)	-	-	(2.031.236.522)	(31.558.329.164)		
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	-	-	188.481.220	-	-	-	-	-	-	-	-	188.481.220		
	034	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(98.573.313)	-	-	-	-	-	-	-	-	(98.573.313)		
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	186.568.506	-	-	-	-	-	-	-	-	186.568.506		
	035	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(103.968.608)	-	-	-	-	-	-	-	-	(103.968.608)		
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	103.014.336	-	-	-	-	-	-	-	-	103.014.336		
	036	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(57.790.212)	-	-	-	-	-	-	-	-	(57.790.212)		
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Berekraf	-	-	7.423.293.361	32.365.000	-	4.272.217.360	-	-	-	-	69.781.713	11.797.657.434		
	040	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.167.833.802)	(2.226.450)	-	-	-	-	-	-	(66.899.013)	(4.236.959.265)		
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	-	-	138.309.979	-	-	-	-	-	-	-	-	138.309.979		
	041	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(50.457.123)	-	-	-	-	-	-	-	-	(50.457.123)		
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	-	520.380.614	6.547.662	-	1.509.785.000	-	-	-	-	927.211.560	2.963.924.836		
	042	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(337.107.145)	(1.518.542)	-	-	-	-	-	-	(27.313.164)	(365.938.851)		
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	-	-	579.730.755	-	-	238.620.000	-	-	-	-	24.589.000	842.939.755		
	044	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(488.469.830)	-	-	-	-	-	-	-	(681.031)	(489.150.861)		
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	39.949.355	-	-	-	-	-	-	-	240.000	40.189.355		
	047	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(32.444.427)	-	-	-	-	-	-	-	(240.000)	(32.684.427)		
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	415.971.426	18.648.000	-	114.500.000	-	-	-	-	-	549.119.426		
	048	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(280.155.659)	(559.440)	-	-	-	-	-	-	-	(280.715.099)		
33	050	Badan Intelijen Negara	-	-	1.533.995.522	8.088.000	-	455.600.000	-	-	-	-	-	1.997.683.522		
	050	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(659.102.202)	(2.118.560)	-	-	-	-	-	-	-	(661.220.762)		
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	-	-	1.550.326.449	60.155.000	-	-	-	-	-	-	-	1.610.481.449		
	051	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.136.748.952)	(5.042.450)	-	-	-	-	-	-	-	(1.141.791.402)		
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	-	-	66.326.000	-	-	-	-	-	-	-	4.855.920	71.181.920		
	052	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(65.554.600)	-	-	-	-	-	-	-	(4.855.920)	(70.410.520)		
36	054	Badan Pusat Statistik	-	-	16.891.584.896	498.315.572	-	17.231.000	-	-	-	-	587.524.024	17.994.655.492		
	054	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(7.703.029.603)	(40.184.053)	-	-	-	-	-	-	(547.393.147)	(8.290.606.803)		
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	-	-	906.708.188	-	-	-	-	-	-	-	-	906.708.188		
	055	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(591.948.161)	-	-	-	-	-	-	-	-	(591.948.161)		
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	-	-	14.207.368.268	31.437.058.996	-	5.250.000	-	-	-	-	6.416.684.135	52.066.361.399		
	056	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(10.077.179.230)	(6.258.928.740)	-	-	-	-	-	-	(2.470.809.254)	(18.806.917.224)		
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	-	-	19.732.902.090	-	-	56.860.300	-	-	-	-	612.475	19.790.374.865		
	057	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(13.070.337.331)	-	-	-	-	-	-	-	(612.475)	(13.070.949.806)		
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	2.948.933.506	90.824.753	-	35.125.000	-	-	-	-	169.742.424	3.244.625.683		
	059	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.078.507.311)	(17.017.570)	-	-	-	-	-	-	(168.712.472)	(2.264.237.353)		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02B
NILAI BMN EKSTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

															(rupiah)	
No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total		
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF															
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	354.539.760.598	26.445.347.633	-	112.297.861.928	-	-	-	-	17.084.702.820	510.367.672.979		
	060	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(269.183.052.696)	(7.670.003.560)	-	(4.605.000)	-	-	-	-	(2.784.566.786)	(279.642.228.042)		
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-	-	3.862.338.120	298.107.588	-	48.400.000	-	-	-	-	38.747.096	4.247.592.804		
	063	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.422.713.193)	(35.320.485)	-	-	-	-	-	-	(34.891.737)	(2.492.925.415)		
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	-	-	2.904.907.220	-	-	7.652.349	-	-	-	-	295.000	2.912.854.569		
	064	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.347.195.924)	-	-	-	-	-	-	-	(295.000)	(2.347.490.924)		
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	78.295.603	-	-	-	-	-	-	-	-	78.295.603		
	065	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(66.639.853)	-	-	-	-	-	-	-	-	(66.639.853)		
45	066	Badan Narkotika Nasional	-	-	4.464.114.877	655.588.518	-	14.523.292.287	-	-	-	-	251.385.112	19.894.380.794		
	066	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.642.688.521)	(40.278.013)	-	-	-	-	-	-	(246.249.052)	(2.929.215.586)		
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	-	1.895.939.597	1.307.832.500	-	506.847.900	-	-	-	-	2.774.653.348	6.485.273.345		
	067	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.319.159.073)	(376.453.318)	-	-	-	-	-	-	(876.637.214)	(2.572.249.605)		
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-	-	3.400.756.363	6.930.000	-	-	-	-	-	-	65.279.919	3.472.966.282		
	068	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.434.792.603)	(620.400)	-	-	-	-	-	-	(65.279.919)	(2.500.692.922)		
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	-	268.568.834	-	-	-	-	-	-	-	18.169.010	286.737.844		
	074	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(187.362.895)	-	-	-	-	-	-	-	(18.169.010)	(205.531.905)		
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-	-	1.150.229.910	940.876.149	-	-	-	-	-	-	26.196.500	2.117.302.559		
	075	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(843.572.887)	(178.787.255)	-	-	-	-	-	-	(24.596.500)	(1.046.956.642)		
50	076	Komisi Pemilihan Umum	-	-	34.946.786.158	256.051.522	-	20.882.038	-	-	-	-	3.072.540.251	38.296.259.969		
	076	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(14.502.640.603)	(21.494.736)	-	-	-	-	-	-	(1.693.249.820)	(16.217.385.159)		
51	077	Mahkamah Konstitusi	-	-	309.572.326	-	-	55.997.076	-	-	-	-	480.000	366.049.402		
	077	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(236.408.572)	-	-	-	-	-	-	-	(480.000)	(236.888.572)		
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	368.824.500	-	-	-	-	-	-	-	992.000	369.816.500		
	078	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(206.196.045)	-	-	-	-	-	-	-	(992.000)	(207.188.045)		
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	-	-	5.025.845.748	1.007.656.244	-	241.861.358	-	-	-	-	7.077.880	6.282.441.230		
	079	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.610.484.256)	(171.990.707)	-	-	-	-	-	-	(7.077.880)	(3.789.552.843)		
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	-	-	1.420.208.286	9.518.000	-	29.964.000	-	-	-	-	22.543.000	1.482.233.286		
	080	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(981.588.840)	(666.260)	-	-	-	-	-	-	(22.543.000)	(1.004.798.100)		
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	2.570.107.354	186.086.670	-	59.510.000	-	-	-	-	49.438.600	2.865.142.624		
	081	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.308.357.338)	(36.721.734)	-	-	-	-	-	-	(49.119.930)	(2.394.199.002)		
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	-	1.055.404.440	139.527.784	-	38.000.000	-	-	-	-	19.656.310	1.252.588.534		
	082	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(757.911.131)	(13.380.639)	-	-	-	-	-	-	(12.230.710)	(783.522.480)		
57	083	Badan Informasi Geospasial	-	-	278.580.660	1.616.676.025	-	-	-	-	-	-	-	1.895.256.685		
	083	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(206.934.615)	(431.023.615)	-	-	-	-	-	-	-	(637.958.230)		
58	084	Badan Standardisasi Nasional	-	-	214.915.450	-	-	31.310.367	-	-	-	-	-	246.225.817		
	084	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(113.387.625)	-	-	-	-	-	-	-	-	(113.387.625)		
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-	-	200.139.251	1.155.000	-	-	-	-	-	-	-	201.294.251		
	085	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(143.802.214)	(150.150)	-	-	-	-	-	-	-	(143.952.364)		
60	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	5.282.079.155	3.857.425	-	-	-	-	-	-	32.183.730	5.318.120.310		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02B
NILAI BMN EKSTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

															(rupiah)	
No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total		
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUYAI BA DEFINITIF															
	086	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.024.264.807)	(1.264.875)	-	-	-	-	-	-	(29.591.180)	(4.055.120.862)		
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	-	-	494.505.407	84.086.900	-	-	-	-	-	-	1.650.000	580.242.307		
	087	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(349.101.278)	(2.971.527)	-	-	-	-	-	-	(1.650.000)	(353.722.805)		
62	088	Badan Kepegawaian Negara	-	-	2.091.162.573	5.850.000	-	-	-	-	-	-	700.000	2.097.712.573		
	088	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.384.681.199)	(913.500)	-	-	-	-	-	-	(490.000)	(1.386.084.699)		
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	-	2.373.174.186	89.150.550	-	17.495.700	-	-	-	-	176.982.173	2.656.802.609		
	089	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.842.253.242)	(13.910.981)	-	-	-	-	-	-	(176.982.173)	(2.033.146.396)		
64	090	Kementerian Perdagangan	-	-	1.106.858.805	459.619.123	-	-	-	-	-	-	156.908.543	1.723.386.471		
	090	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(775.296.519)	(70.126.730)	-	-	-	-	-	-	(140.758.843)	(986.182.092)		
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-	-	731.979.946	2.013.000	-	144.055.000	-	-	-	-	82.340.240	960.388.186		
	092	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(675.091.544)	(583.770)	-	-	-	-	-	-	(23.761.056)	(599.436.370)		
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	-	728.362.185	32.340.000	-	-	-	-	-	-	6.294.625	766.996.810		
	093	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(570.839.371)	(1.617.000)	-	-	-	-	-	-	(6.294.625)	(578.750.996)		
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	-	-	654.695.601	-	-	63.103.150	-	-	-	-	3.287.900	721.086.651		
	095	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(393.947.662)	-	-	-	-	-	-	-	(3.287.900)	(397.235.562)		
68	100	Komisi Yudisial RI	-	-	248.190.500	9.257.270	-	-	-	-	-	-	-	257.447.770		
	100	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(228.951.606)	(1.944.025)	-	-	-	-	-	-	-	(230.895.631)		
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-	357.836.120	-	-	-	-	-	-	-	3.262.353.455	3.620.189.575		
	103	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(203.510.783)	-	-	-	-	-	-	-	(3.262.353.455)	(3.465.864.238)		
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	-	-	640.814.608	40.231.000	-	-	-	-	-	-	41.788.205	722.833.813		
	104	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(427.829.669)	(4.820.948)	-	-	-	-	-	-	(41.788.205)	(474.438.822)		
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	67.556.753	-	-	3.614.750	-	-	-	-	-	71.171.503		
	106	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(56.396.615)	-	-	-	-	-	-	-	-	(56.396.615)		
72	107	Badan SAR Nasional	-	-	9.752.144.500	89.810.096	-	6.000.000	-	-	-	-	139.243.268	9.987.197.864		
	107	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(6.617.831.958)	(12.510.041)	-	-	-	-	-	-	(138.521.338)	(6.768.863.337)		
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	-	135.816.651	-	-	-	-	-	-	-	-	135.816.651		
	108	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(111.464.961)	-	-	-	-	-	-	-	-	(111.464.961)		
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	109	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	-	-	593.793.602	-	-	-	-	-	-	-	-	593.793.602		
	110	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(249.988.673)	-	-	-	-	-	-	-	-	(249.988.673)		
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	133.532.250	47.677.976	-	-	-	-	-	-	-	181.210.226		
	111	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(64.725.161)	(1.982.041)	-	-	-	-	-	-	-	(66.707.202)		
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	3.523.274.861	930.178.989	-	9.579.134.859	-	-	-	-	58.155.229	14.090.743.938		
	112	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.561.497.356)	(142.323.686)	-	-	-	-	-	-	(56.651.029)	(2.760.472.071)		
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	-	-	512.532.577	6.063.552	-	22.450.003	-	-	-	-	-	541.046.132		
	113	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(282.940.800)	(181.908)	-	-	-	-	-	-	-	(283.122.708)		
79	114	Sekretariat Kabinet	-	-	234.582.660	-	-	-	-	-	-	-	-	234.582.660		
	114	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(83.645.540)	-	-	-	-	-	-	-	-	(83.645.540)		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02B
NILAI BMN EKSTRAKOMPTABEL BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF													
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	7.116.240.647	-	-	-	-	-	-	-	975.048.127	8.091.288.774
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(4.225.907.201)	-	-	-	-	-	-	-	(633.246.315)	(4.859.153.516)
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	-	-	3.458.414.309	1.949.723.368	-	8.280.000	-	-	-	-	119.367.507	5.535.785.184
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(2.944.139.635)	(453.125.060)	-	(3.380.000)	-	-	-	-	(118.599.657)	(3.519.244.352)
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	-	-	2.087.835.574	84.519.978	-	4.239.730	-	-	-	-	13.509.248	2.190.104.530
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(1.266.936.172)	(13.830.483)	-	(2.772.730)	-	-	-	-	(13.509.248)	(1.297.048.633)
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	-	382.948.894	18.152.000	-	143.620.000	-	-	-	-	21.015.862	565.736.756
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(354.080.705)	(1.701.747)	-	-	-	-	-	-	(1.471.111)	(357.253.563)
84	119	Badan Keamanan Laut	-	-	655.812.777	8.830.393	-	-	-	-	-	-	283.000	664.926.170
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(300.662.496)	(1.677.769)	-	-	-	-	-	-	(183.950)	(302.524.215)
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	-	-	45.516.460	-	-	-	-	-	-	-	-	45.516.460
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(26.761.601)	-	-	-	-	-	-	-	-	(26.761.601)
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	-	-	34.763.300	-	-	-	-	-	-	-	-	34.763.300
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(13.016.670)	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.016.670)
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	-	153.656.488	-	-	-	-	-	-	-	37.400	153.693.888
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(95.939.029)	-	-	-	-	-	-	-	(37.400)	(95.976.429)
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi (1)			-	-	2.540.491.824.309	285.123.309.648	225.000	465.145.558.065	-	791.824.176	-	-	218.044.704.805	3.509.597.446.003
b Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (1)			-	-	(1.757.377.276.332)	(52.375.393.811)	(56.250)	(277.114.547)	-	(362.750.464)	-	-	(114.105.996.913)	(1.924.498.588.317)
Sub Jumlah (1)			-	-	783.114.547.977	232.747.915.837	168.750	464.868.443.518	-	429.073.712	-	-	103.938.707.892	1.585.098.857.686
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L													
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain	-	-	438.939.994	-	-	-	-	-	-	-	-	438.939.994
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	(226.311.809)	-	-	-	-	-	-	-	-	(226.311.809)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi			-	-	438.939.994	-	-	-	-	-	-	-	-	438.939.994
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (2)			-	-	(226.311.809)	-	-	-	-	-	-	-	-	(226.311.809)
Sub Jumlah (2)			-	-	212.628.185	-	-	-	-	-	-	-	-	212.628.185
TOTAL NILAI BMN SEBELUM PENYUSUTAN			-	-	2.540.930.764.303	285.123.309.648	225.000	465.145.558.065	-	791.824.176	-	-	218.044.704.805	3.510.036.385.997
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN			-	-	(1.757.603.588.141)	(52.375.393.811)	(56.250)	(277.114.547)	-	(362.750.464)	-	-	(114.105.996.913)	(1.924.724.900.126)
TOTAL			-	-	783.327.176.162	232.747.915.837	168.750	464.868.443.518	-	429.073.712	-	-	103.938.707.892	1.585.311.485.871



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02C
NILAI BMN GABUNGAN BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A		DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF												
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	17.113.071.035	831.081.432.496	192.142.156.307	231.219.832.045	13.646.277.700	6.137.683.938	49.500.000	-	8.316.311.920	-	36.195.525.174	1.335.901.790.615
	001	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(160.593.149.306)	(35.063.345.845)	(4.610.555.848)	-	-	-	(4.708.466.634)	-	(599.970.670)	(205.575.488.303)
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	36.453.112.504	1.145.127.861.259	2.166.610.663.815	1.002.794.343.654	100.600.270.146	10.774.482.350	131.145.787.885	-	88.865.928.191	-	33.651.335.354	4.716.023.785.158
	002	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.450.941.810.424)	(149.407.471.691)	(47.801.566.094)	(76.489.433)	-	-	(35.562.314.925)	-	(26.542.179.816)	(1.710.331.832.383)
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	15.230.502.361	5.954.117.599.963	2.236.371.726.909	2.587.090.857.012	396.232.320.663	18.021.183.549	8.560.897.430	-	197.781.459.838	-	13.595.685.368	11.427.002.233.093
	004	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.905.949.368.837)	(319.853.348.310)	(252.870.195.342)	(955.261.071)	-	-	(138.185.125.460)	-	(13.089.383.006)	(2.630.902.682.026)
4	005	Mahkamah Agung	21.944.823.818	19.805.288.980.810	3.826.782.692.468	9.584.920.201.921	258.176.969.852	68.186.332.341	617.396.614.572	-	65.269.905.024	-	161.400.835.309	34.409.367.356.115
	005	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.040.612.573.873)	(1.528.008.048.473)	(104.373.646.230)	(1.578.675.216)	-	-	(41.616.943.338)	-	(147.965.220.930)	(4.864.155.108.060)
5	006	Kejaksaan Agung	10.539.069.818.723	17.467.403.850.542	7.065.257.051.213	6.006.804.248.488	69.480.660.858	12.008.081.273	1.114.530.378.007	-	339.257.298.652	-	522.592.036.009	43.136.403.423.765
	006	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(3.593.440.578.148)	(810.678.815.842)	(22.785.777.686)	(401.550.395)	-	-	(191.231.094.395)	-	(498.510.700.381)	(5.117.048.516.847)
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	748.828.058.735	603.480.295.483.953	4.271.952.643.324	6.950.756.811.152	881.042.380.288	3.203.714.427.847	4.525.694.850	20.879.654.243.000	63.715.449.352	-	263.219.106.735	640.747.704.299.236
	007	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.977.295.751.643)	(1.016.468.450.158)	(388.282.135.591)	(4.484.392.373)	-	(248.961.508.064)	(50.461.481.362)	-	(80.034.150.085)	(4.765.987.869.276)
7	010	Kementerian Dalam Negeri	277.326.163.445	11.995.626.099.493	3.328.316.096.829	2.809.516.544.251	277.089.315.888	137.237.668.383	61.214.356.904	-	766.947.084.645	-	119.363.088.889	19.772.636.418.727
	010	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.966.087.356.825)	(335.177.636.112)	(113.949.108.660)	(94.523.461.278)	-	-	(717.375.384.460)	-	(107.757.790.152)	(4.334.870.737.487)
8	011	Kementerian Luar Negeri	83.004.445.096	39.725.292.314.176	2.644.965.547.630	9.207.053.701.160	24.731.852.402	101.161.056.440	263.874.679.531	191.360.231.428	79.896.496.119	-	334.354.704.683	52.655.695.028.665
	011	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.024.848.156.831)	(1.794.719.799.970)	(19.787.609.965)	(7.694.725.355)	-	-	(61.227.770.246)	-	(78.908.020.980)	(3.987.186.083.347)
9	012	Kementerian Pertahanan	63.884.963.195.524	1.455.327.002.274.300	312.687.580.599.732	87.655.814.077.466	15.153.019.561.976	7.793.926.322.133	4.635.010.597.715	12.507.857.457.641	7.428.803.994.832	32.936.565.000	6.076.696.009.547	1.973.183.610.655.870
	012	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(183.230.700.763.609)	(23.007.913.824.597)	(8.386.945.346.922)	(932.898.834.429)	-	-	(3.123.939.277.492)	-	(4.270.158.147.439)	(222.952.556.194.488)
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	604.873.054.596	54.300.058.612.024	8.420.122.347.965	13.134.585.147.565	92.560.917.102	29.932.776.570	494.150.574.573	-	489.713.047.685	-	727.139.974.512	78.293.136.452.592
	013	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(6.736.904.749.197)	(2.217.198.804.733)	(55.545.419.383)	(4.620.898.283)	-	-	(382.866.604.352)	-	(648.527.479.436)	(10.045.663.955.384)
11	015	Kementerian Keuangan	469.738.276.496	95.091.326.332.450	15.618.846.721.969	17.185.949.199.367	481.897.553.384	53.448.788.328	359.745.403.043	-	1.889.162.946.522	#####	592.128.126.236	131.989.765.815.129
	015	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(12.847.415.387.346)	(2.502.954.937.393)	(168.770.553.489)	(865.807.419)	-	-	(1.279.508.944.320)	-	(557.171.338.185)	(17.356.686.968.152)
12	018	Kementerian Pertanian	892.779.249.159	71.619.884.633.074	6.387.253.467.647	6.295.229.383.543	674.655.845.687	258.415.722.614	344.088.554.771	-	131.299.836.996	-	703.559.372.494	87.307.166.065.985
	018	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(5.203.927.600.113)	(983.790.431.251)	(267.298.591.537)	(2.838.298.309)	-	-	(31.358.580.469)	-	(308.187.414.802)	(6.797.400.916.481)
13	019	Kementerian Perindustrian	190.128.895.447	8.710.026.811.390	3.400.528.026.652	2.564.723.258.767	84.362.679.383	24.445.348.187	11.687.642.050	-	61.693.951.072	-	731.532.604.393	15.779.129.217.341
	019	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.534.204.019.397)	(458.797.739.691)	(55.505.929.691)	(985.020.100)	-	-	(37.750.814.127)	-	(595.883.824.570)	(3.683.127.347.576)
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	815.831.664.740	15.404.277.731.426	5.741.065.003.176	2.686.782.628.650	7.517.644.105.164	319.827.942.604	224.807.688.800	-	256.035.421.122	1.166.561.028	411.785.792.686	33.379.224.539.396
	020	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.810.142.799.388)	(424.931.885.344)	(1.038.851.782.764)	(1.918.072.350)	-	-	(154.915.123.628)	-	(273.561.943.790)	(6.704.321.607.264)
15	022	Kementerian Perhubungan	9.718.253.417.892	309.532.832.185.545	56.577.347.197.711	31.466.197.683.602	164.048.192.127.498	2.857.155.513.541	33.668.678.869.868	15.167.529.578.694	2.627.734.446.365	#####	4.401.398.635.955	630.216.753.505.295
	022	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(37.823.046.646.180)	(3.702.714.393.797)	(71.115.958.178.982)	(61.758.424.740)	-	(4.128.349.707.675)	(638.226.979.566)	-	(1.997.811.311.483)	(119.467.865.642.423)
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	2.437.351.905.483	363.706.225.939.234	32.985.123.838.580	49.207.421.402.085	1.914.781.562.363	1.518.184.936.438	5.250.589.266.201	-	981.985.036.347	393.750.000	1.091.359.318.906	459.093.416.955.637
	023	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(25.738.084.843.636)	(5.867.014.456.053)	(824.892.645.430)	(78.469.883.743)	-	-	(622.996.343.041)	-	(941.690.875.078)	(34.073.149.046.981)
17	024	Kementerian Kesehatan	26.609.591.637.166	66.433.731.551.886	28.274.014.935.594	19.017.565.727.247	627.993.781.373	184.408.233.674	2.316.380.078.407	2.121.420.000	313.336.268.428	-	12.171.844.563.927	155.950.988.197.702
	024	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(20.714.077.310.697)	(2.761.831.470.769)	(273.431.380.815)	(3.740.180.934)	-	(763.711.200)	(247.047.589.242)	-	(10.362.051.480.868)	(34.362.943.124.525)
18	025	Kementerian Agama	113.255.966.853	68.759.813.593.490	11.809.420.863.729	41.311.890.692.279	631.910.191.977	1.617.953.235.506	3.836.788.746.516	-	261.507.518.593	-	530.653.910.740	128.873.194.719.683
	025	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(9.112.067.817.829)	(4.405.937.370.985)	(257.465.944.506)	(79.843.480.306)	-	-	(137.758.674.752)	-	(399.278.342.104)	(14.392.351.630.482)
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.020.485.307	7.802.710.812.354	2.944.135.731.827	2.558.064.676.726	98.026.954.843	9.544.530.045	495.800.068.361	-	49.592.984.719	-	377.407.656.481	14.339.303.900.663
	026	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.238.432.946.499)	(424.525.444.698)	(57.953.249.352)	(381.285.045)	-	-	(42.946.248.126)	-	(363.470.217.964)	(3.127.709.391.658)
20	027	Kementerian Sosial	642.676.968.115	18.583.223.996.792	2.156.704.138.928	2.260.478.136.659	105.768.717.353	19.103.394.733	6.762.136.189	-	96.170.048.408	-	101.923.970.462	23.972.811.507.639
	027	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.783.847.987.582)	(388.208.112.547)	(49.778.123.504)	(3.530.374.917)	-	-	(69.450.385.557)	-	(99.137.164.927)	(2.393.952.149.034)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02C
NILAI BMN GABUNGAN BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF													
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	543.533.386.411	9.993.102.760.376	3.584.874.238.085	3.902.693.093.464	525.979.806.667	59.997.780.094	92.321.203.995	140.477.822.000	154.288.812.415	29.850.000	1.988.204.291.387	20.985.503.044.894
	029	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.813.980.621.149)	(484.382.355.914)	(234.859.492.421)	(2.386.926.952)	-	-	(106.960.604.866)	-	(522.324.155.339)	(4.164.894.156.641)
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	96.322.800.358	16.054.931.927.147	6.022.146.967.056	5.443.711.666.315	3.878.542.550.254	88.517.295.195	141.231.266.251	214.231.398.172	176.944.584.439	894.437.500	480.840.151.494	32.598.315.044.181
	032	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.753.915.172.400)	(702.892.035.928)	(1.725.412.821.362)	(7.479.078.731)	-	(27.755.303.785)	(73.992.744.984)	-	(371.105.263.906)	(7.662.552.421.096)
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	67.649.313.937.161	875.110.207.644.521	15.315.393.384.726	20.175.646.012.518	795.137.238.043.985	37.189.497.020.591	83.440.143.793.078	406.761.626.089.379	7.265.894.316.882	#####	22.267.211.997.225	2.330.523.778.485.210
	033	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(11.074.498.096.715)	(1.988.326.954.989)	(324.493.963.030.416)	(20.368.369.963.163)	-	(5.287.363.401.725)	(98.044.807.449)	-	(7.322.814.482.350)	(370.633.380.736.807)
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	40.999.571	-	130.047.734.381	11.363.005.584	2.558.164.233	37.589.360.920	-	-	7.649.769.964	-	5.780.851.461	195.029.886.114
	034	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(97.529.265.269)	(1.028.955.526)	(743.868.104)	-	-	-	(7.429.490.602)	-	(5.750.913.961)	(112.482.493.462)
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	469.769.511	-	83.810.368.636	-	2.092.285.347	547.639.287	-	-	9.028.538.427	-	13.144.604.725	109.093.205.933
	035	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(64.903.255.196)	-	(857.736.919)	-	-	-	(7.035.058.477)	-	(12.185.374.725)	(84.981.425.317)
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.260.369.051	-	94.876.789.556	156.082.498.155	144.386.000	1.019.395.742	98.560.000	-	4.860.734.393	-	448.180.400	258.790.913.297
	036	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(73.601.909.904)	(15.352.206.335)	(44.000.275)	(137.445.000)	-	-	(1.206.527.487)	-	(448.180.400)	(90.790.269.401)
27	040	Kementerian Pariwisata	22.182.323.241	6.639.038.800.799	885.096.229.331	2.249.507.291.396	47.870.761.074	22.898.259.800	719.459.120.326	804.837.530.000	60.562.800.114	-	67.276.670.355	11.518.729.786.436
	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Berekraf	-	-	(558.998.023.957)	(211.035.647.896)	(20.772.238.690)	(1.835.612.225)	-	-	(38.869.760.672)	-	(18.793.908.863)	(850.305.192.303)
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.058.158.602	1.468.058.953.000	137.915.036.383	468.773.597.003	7.706.388.680	1.066.410.162	-	-	19.389.526.163	-	3.892.012.485	2.107.860.082.478
	041	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(83.766.166.945)	(35.944.615.706)	(1.502.865.980)	-	-	-	(16.047.632.207)	-	(3.801.222.188)	(141.062.503.026)
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	46.741.577.647	12.058.461.798.500	886.773.917.746	1.047.243.251.617	88.049.950.534	36.531.991.857	198.657.800	-	56.587.302.312	-	49.705.015.465	14.270.293.463.478
	042	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(691.578.275.066)	(227.035.807.251)	(46.165.530.215)	(2.345.296.965)	-	-	(49.714.343.420)	-	(31.544.743.486)	(1.048.383.996.403)
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	7.274.213.173	3.282.411.957.000	437.592.039.148	826.979.765.897	37.463.058.944	4.113.484.685	212.226.000	-	41.704.880.172	3.087.474.000	15.643.684.943	4.656.482.783.962
	044	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(400.707.571.352)	(124.130.487.781)	(15.841.806.107)	(2.006.250)	-	-	(23.761.830.818)	-	(3.219.188.046)	(567.662.890.354)
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.720.341.425	2.358.220.000	96.598.943.277	172.632.001.000	5.152.456.725	332.318.245	-	-	16.040.638.379	-	240.000	296.835.159.051
	047	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(85.938.576.882)	(16.528.595.841)	(5.149.744.225)	(15.000.000)	-	-	(15.406.575.415)	-	(240.000)	(123.038.732.363)
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.694.790.111	32.784.833.000	134.590.722.822	77.339.320.347	1.395.216.550	1.263.995.125	-	-	5.011.171.570	-	772.936.480	254.852.986.005
	048	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(102.329.144.076)	(9.036.449.060)	(738.049.759)	-	-	-	(3.653.692.178)	-	(759.428.399)	(116.516.763.472)
33	050	Badan Intelijen Negara	105.345.187.665	5.694.085.829.289	15.765.755.872.849	1.488.485.666.930	183.856.225.843	15.058.954.367	-	-	5.148.954.719.622	-	-	28.401.542.456.565
	050	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(10.993.163.790.550)	(182.193.744.535)	(70.338.485.175)	(1.091.300.000)	-	-	(3.279.146.175.640)	-	-	(14.525.933.495.900)
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	2.125.045.976	1.176.735.206.680	5.568.251.441.965	1.392.194.861.056	45.322.813.320	8.200.564.404	97.710.474.497	-	1.141.153.443.365	-	3.388.739.071.885	12.820.432.923.148
	051	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.397.653.841.681)	(127.695.604.546)	(15.854.643.960)	(360.285.277)	-	-	(539.401.690.009)	-	(3.250.219.204.814)	(8.331.185.270.287)
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	1.859.000	-	158.129.617.358	-	-	568.097.704	-	-	109.090.037.970	-	13.428.314.317	281.217.926.349
	052	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(150.706.579.436)	-	-	-	-	-	(96.906.145.782)	-	(13.346.532.762)	(260.959.257.980)
36	054	Badan Pusat Statistik	65.161.759.926	3.073.624.926.935	2.224.450.734.000	1.966.136.669.454	-	51.437.248.676	1.201.034.560	-	393.320.447.281	-	186.111.201.814	2.961.444.022.646
	054	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.824.307.438.551)	(267.877.400.549)	-	(214.333.997)	-	-	(304.637.848.754)	-	(157.440.934.227)	(2.554.477.956.078)
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	4.700.405.446	1.541.450.676.000	495.376.788.061	161.997.391.722	6.197.314.170	106.960.367.956	19.016.500.000	490.209.375.000	101.310.171.102	-	105.437.090.556	3.032.656.080.013
	055	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(341.136.372.043)	(34.581.422.631)	(3.493.032.813)	-	-	-	(18.753.465.763)	-	(38.459.617.910)	(436.423.911.160)
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	99.991.252.773	9.110.445.705.918	3.241.270.160.457	2.999.343.261.226	25.770.699.633	1.951.186.339.510	14.893.967.829	-	297.068.130.792	-	166.474.611.167	17.906.444.129.305
	056	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.586.999.902.889)	(406.942.050.659)	(12.239.640.099)	(1.864.069.915)	-	-	(196.979.634.036)	-	(151.728.191.093)	(3.356.753.488.691)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02C
NILAI BMN GABUNGAN BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A		DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF												
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15.326.547.452	1.866.606.161.000	713.966.813.112	641.358.289.003	54.724.368.942	238.230.603.848	90.684.000	-	301.945.782.317	-	92.008.642.887	3.924.257.892.561
	057	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(535.276.577.256)	(68.682.385.239)	(4.647.641.876)	(476.506.723)	-	-	(44.051.684.621)	-	(20.511.221.318)	(673.646.017.033)
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.985.475.548	5.621.024.930.981	3.247.262.146.364	941.260.524.494	28.319.142.932	58.070.841.726	7.438.138.760.356	-	914.885.642.155	-	66.048.274.391	18.321.995.738.947
	059	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.789.299.719.510)	(162.421.808.680)	(12.519.532.487)	(626.719.745)	-	-	(374.844.739.903)	-	(63.923.811.924)	(2.403.636.332.249)
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.458.607.415.578	210.515.340.924.203	163.961.295.976.702	38.461.919.078.650	1.129.711.149.165	184.826.053.046	3.310.078.932.016	-	9.179.254.241.279	-	1.389.234.572.854	435.590.268.343.493
	060	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(111.573.958.226.316)	(5.365.689.294.756)	(533.694.783.324)	(18.330.392.154)	-	-	(4.825.104.932.173)	-	(1.252.403.034.965)	(123.569.180.663.688)
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	156.719.090.372	1.667.202.395.506	2.889.565.033.568	866.362.469.108	30.299.554.744	19.676.682.267	92.005.978.861	-	126.151.751.328	-	23.184.495.357	5.871.167.451.111
	063	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.024.180.683.053)	(101.810.306.854)	(8.773.943.391)	(249.966.659)	-	-	(66.891.083.650)	-	(21.929.524.850)	(2.223.835.508.457)
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.484.969.116	1.378.951.719.000	378.051.715.900	302.230.984.481	10.888.276.247	11.924.990.172	-	-	213.898.975.503	-	5.552.212.762	2.302.983.843.181
	064	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(341.710.719.966)	(57.847.601.003)	(3.806.016.621)	(886.617.168)	-	-	(209.401.274.682)	-	(5.244.648.062)	(618.896.877.502)
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.564.994.335	1.959.546.919.000	313.311.572.796	272.099.590.044	9.022.115.183	852.077.649	-	-	140.116.212.560	-	-	2.702.513.481.567
	065	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(257.135.548.963)	(51.718.920.869)	(4.247.519.477)	(444.976.050)	-	-	(92.711.210.763)	-	-	(406.258.176.122)
45	066	Badan Narkotika Nasional	36.673.378.482	641.167.499.386	2.246.455.120.850	806.169.412.674	58.266.070.433	45.701.125.410	1.341.631.000	-	162.546.975.390	-	115.572.423.981	4.113.893.637.606
	066	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.810.626.512.241)	(75.474.069.803)	(22.488.336.748)	(2.380.786.794)	-	-	(135.545.266.399)	-	(111.816.913.860)	(2.158.331.885.845)
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	185.453.337.428	701.074.345.474	402.896.966.531	604.411.761.947	858.354.389.797	116.044.266.471	17.670.622.284	-	9.304.684.004	-	1.431.648.570.310	4.268.858.944.246
	067	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(334.734.491.046)	(68.924.284.219)	(314.596.997.955)	(8.738.769.742)	-	-	(6.875.195.022)	-	(821.870.793.383)	(1.555.740.531.367)
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	224.358.326.249	2.089.005.681.616	486.326.960.343	633.798.592.342	29.815.206.492	2.836.183.260	11.496.214.080	-	52.027.212.089	-	7.350.332.977	3.537.014.709.448
	068	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(426.173.988.311)	(119.915.255.350)	(16.725.439.883)	(134.926.656)	-	-	(39.276.795.568)	-	(7.244.848.473)	(609.471.254.241)
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	879.348.875	-	27.631.504.756	13.663.103.000	-	1.579.355.498	602.183.000	-	1.166.001.200	-	4.239.699.523	49.761.195.852
	074	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(21.845.004.569)	(2.595.989.570)	-	(9.918.000)	-	-	(660.176.825)	-	(4.221.237.916)	(29.332.326.880)
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	143.131.972.657	3.440.624.315.637	5.910.793.684.790	1.419.987.960.278	198.210.786.296	12.802.678.395	553.205.958.640	-	446.373.520.219	-	64.812.862.049	12.189.943.738.961
	075	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(4.453.577.989.039)	(182.258.847.615)	(89.353.713.064)	(892.477.950)	-	-	(426.917.067.218)	-	(61.424.013.244)	(5.214.424.108.130)
50	076	Komisi Pemilihan Umum	40.311.568.156	1.113.746.138.933	1.585.147.814.401	660.731.794.162	1.714.761.860	6.594.010.793	-	-	25.378.663.282	-	124.738.603.398	3.558.363.354.985
	076	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.205.084.302.620)	(67.792.193.730)	(577.826.257)	(527.218.763)	-	-	(19.322.182.131)	-	(117.624.631.810)	(1.410.928.355.311)
51	077	Mahkamah Konstitusi	2.578.001.790	506.815.456.000	289.222.584.364	285.934.282.327	45.415.834.050	24.030.330.145	991.819.950	-	22.785.340.246	-	21.652.650.214	1.199.426.299.086
	077	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(258.669.085.489)	(28.442.598.547)	(25.192.619.914)	(111.714.721)	-	-	(18.789.955.887)	-	(19.027.979.014)	(350.233.953.572)
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1.824.303.405	235.129.908.040	178.534.976.964	227.373.200.215	235.602.000	467.893.068	-	-	36.163.407.777	-	11.384.965.605	691.114.257.074
	078	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(132.196.406.762)	(23.225.838.053)	(97.199.622)	(37.113.750)	-	-	(25.853.789.589)	-	(11.379.605.580)	(192.789.953.356)
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.029.829.810	29.463.534.813.117	2.004.583.652.234	1.940.449.265.582	266.224.825.548	6.565.991.449.233	503.369.859.648	-	216.449.400.357	-	213.829.392.089	41.177.462.487.618
	079	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.294.872.174.539)	(155.577.342.391)	(114.151.008.576)	(10.335.000)	-	-	(63.505.970.893)	-	(127.684.267.126)	(1.755.801.098.525)
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	72.292.737.801	13.034.026.829.000	1.273.166.529.065	1.162.027.140.786	417.085.079.793	26.460.032.006	6.751.257.380	-	47.130.354.944	-	10.080.798.334	16.049.020.759.190
	080	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(873.033.850.444)	(314.920.152.286)	(155.694.874.867)	(31.200.000)	-	-	(37.955.557.844)	-	(9.862.989.837)	(1.391.496.625.278)
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	12.390.766.304	4.697.952.218.202	3.833.425.657.243	1.113.440.186.907	122.411.482.262	36.616.170.234	67.029.616.500	-	230.225.045.037	-	202.353.886.624	10.315.845.029.313
	081	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.610.679.436.169)	(178.227.907.981)	(40.819.177.620)	(457.659.469)	-	-	(147.219.703.761)	-	(190.932.600.778)	(3.168.336.485.778)
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	62.294.606.398	1.539.852.297.363	1.914.151.362.079	412.169.142.094	60.884.776.649	18.712.642.680	496.544.873.857	-	654.258.715.119	19.900.870.910	176.544.997.947	5.355.314.285.096
	082	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.140.701.399.089)	(69.067.519.400)	(27.713.811.103)	(22.270.000)	-	-	(351.468.616.649)	-	(12.706.234.662)	(1.601.679.850.903)
57	083	Badan Informasi Geospasial	13.215.338.947	195.151.853.800	1.228.900.782.428	76.906.350.986	10.940.202.750	14.141.052.902	6.560.074.798	-	3.233.480.421.049	2.809.039.884	10.456.102.112	4.792.561.219.656
	083	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.016.235.652.855)	(13.977.100.035)	(4.893.315.070)	(36.400.000)	-	-	(2.469.759.045.237)	-	(10.177.647.705)	(3.515.079.160.902)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02C
NILAI BMN GABUNGAN BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A		DAFTAR K/L YANG MEMPUYAI BA DEFINITIF												
58	084	Badan Standardisasi Nasional	573.901.430	-	343.055.555.009	117.725.861.900	500.500.000	1.210.966.067	-	-	12.851.376.200	-	7.668.064.660	483.586.225.266
	084	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(235.437.590.262)	(3.555.652.535)	(161.613.310)	-	-	-	(10.742.675.490)	-	(7.563.259.220)	(257.460.790.817)
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.388.744.413	112.976.306.000	159.599.511.126	14.661.575.614	2.356.628.189	1.287.829.861	2.596.788.000	-	12.098.032.635	-	1.231.840.120	309.197.255.958
	085	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(122.126.630.192)	(1.695.586.983)	(1.650.613.570)	(3.000.000)	-	-	(9.859.910.482)	-	(1.231.840.120)	(136.567.581.347)
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.547.885.091	3.039.780.652.774	222.421.097.437	700.347.321.865	11.419.215.041	6.952.878.406	-	-	6.426.865.700	-	3.904.125.375	3.994.800.041.689
	086	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(183.934.273.439)	(85.816.329.369)	(6.519.361.549)	(143.990.165)	-	-	(6.170.623.330)	-	(3.882.808.623)	(286.467.386.475)
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.346.583.401	805.561.648.718	265.564.410.501	367.573.892.747	62.881.974.526	26.872.634.444	2.399.298.000	-	22.227.611.637	-	7.175.857.984	1.562.603.911.958
	087	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(203.504.658.317)	(61.622.412.137)	(37.502.937.841)	(60.483.100)	-	-	(16.125.550.272)	-	(7.138.158.179)	(325.954.199.846)
62	088	Badan Kepegawaian Negara	10.159.232.764	2.309.435.980.187	609.500.991.813	841.382.683.975	23.958.841.060	19.534.460.093	1.470.688.262	-	142.393.801.295	-	56.959.395.636	4.014.796.075.085
	088	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(520.097.196.100)	(112.363.024.892)	(17.172.759.840)	(1.848.182.709)	-	-	(137.067.785.127)	-	(56.064.538.043)	(844.613.486.711)
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	12.049.894.530	4.071.464.328.850	543.387.669.663	1.109.616.956.712	17.080.889.443	8.698.090.435	120.547.191.365	-	44.300.034.694	1.223.176.745	27.996.342.701	5.956.364.575.138
	089	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(407.499.818.626)	(163.668.865.888)	(9.700.448.197)	(905.117.060)	-	-	(33.067.285.827)	-	(25.008.783.863)	(639.848.319.461)
64	090	Kementerian Perdagangan	1.655.085.212.532	2.893.596.228.751	951.902.008.653	924.997.295.782	26.502.013.121	8.428.546.066	63.288.420.285	-	65.910.614.588	-	114.125.937.967	6.703.836.277.745
	090	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(753.057.467.508)	(203.622.835.051)	(22.029.344.842)	(375.806.403)	-	-	(43.980.473.905)	-	(94.392.061.131)	(1.117.457.988.840)
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	152.527.302.249	618.688.640.000	513.686.189.050	331.075.841.669	6.422.702.736	13.779.258.764	-	-	934.839.752.668	91.750.000	108.073.581.338	2.679.185.018.474
	092	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(474.518.226.849)	(71.251.297.283)	(3.939.375.237)	(930.129.834)	-	-	(16.333.135.886)	-	(46.121.937.336)	(613.094.102.425)
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	963.674.594.121	1.736.548.733.375	572.627.806.272	422.572.312.809	129.488.001.499	3.702.650.928	37.957.608.653	-	93.848.687.779	-	104.548.055.560	4.064.968.450.996
	093	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(487.184.385.355)	(61.744.793.060)	(50.492.078.121)	-	-	-	(63.360.048.318)	-	(104.542.878.685)	(767.324.183.539)
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	523.476.730	204.962.293.509	153.286.008.944	44.509.287.811	2.316.491.000	3.790.271.593	5.304.624.372	-	5.491.590.152	-	3.698.035.429	423.882.079.540
	095	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(135.035.698.554)	(4.073.858.803)	(221.791.689)	(167.101.352)	-	-	(5.091.485.777)	-	(3.695.269.479)	(148.285.205.654)
68	100	Komisi Yudisial RI	2.319.735.591	272.460.683.000	50.690.709.947	95.423.974.869	3.588.869.628	2.466.563.964	216.234.730	-	2.655.488.940	-	1.200.705.558	431.022.966.227
	100	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(47.817.630.882)	(10.174.955.929)	(3.480.798.096)	(826.687.271)	-	-	(2.420.221.572)	-	(1.159.495.632)	(65.879.789.382)
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	371.144.648.211	279.632.984.000	1.807.630.805.360	414.513.767.230	1.190.429.000	14.202.140.840	-	-	249.315.366.957	-	64.448.140.836	3.202.078.282.434
	103	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.390.400.628.028)	(37.601.490.601)	(261.894.380)	-	-	-	(152.574.473.636)	-	(64.090.167.863)	(1.644.928.654.508)
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	1.882.318.185	238.470.921.000	172.783.201.997	84.328.556.302	5.650.807.800	9.328.871.392	2.999.691.573	-	11.220.047.008	-	23.508.047.403	550.172.462.660
	104	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(153.424.660.177)	(10.167.451.633)	(3.647.041.624)	(276.955.250)	-	-	(9.476.900.185)	-	(23.383.075.191)	(200.376.084.060)
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan	543.974.558	369.821.075.000	320.952.769.093	217.886.911.673	1.144.947.820	699.672.985	779.154.758	-	58.536.089.008	1.455.816.192	15.401.597.381	987.222.008.468
	106	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(290.938.728.530)	(19.009.680.129)	(350.509.564)	(49.737.000)	-	-	(37.843.111.529)	-	(15.218.036.864)	(363.409.803.616)
72	107	Badan SAR Nasional	153.855.668.777	975.551.847.173	10.311.381.096.373	1.126.509.885.731	63.879.865.210	21.312.687.951	148.130.060.953	-	184.844.102.690	-	201.911.644.339	13.187.376.859.197
	107	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(7.071.039.375.804)	(108.422.155.554)	(16.591.543.152)	(1.869.041.000)	-	-	(132.822.763.999)	-	(148.142.124.242)	(7.478.887.003.751)
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	640.534.960	-	39.110.102.450	-	-	5.583.219.402	-	-	1.814.577.964	-	-	47.148.434.776
	108	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(25.642.454.166)	-	-	(13.543.750)	-	-	(1.095.641.751)	-	-	(26.751.639.667)
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	109	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	284.853.070	55.863.617.012	52.747.266.743	1.106.963.489	28.551.000	4.263.144.485	-	-	1.310.069.234	-	855.561.506	116.460.026.539
	110	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(41.297.805.997)	(875.731.388)	(9.480.862)	(1.147.070.566)	-	-	(864.137.984)	-	(758.847.100)	(44.953.073.897)
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	66.692.846.155	73.613.154.691	401.769.537.971	1.418.614.499.236	428.307.269.190	19.493.717.272	1.317.728.350	-	132.040.131.653	-	3.532.612.956	2.545.381.497.474
	111	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(247.438.951.091)	(88.111.070.293)	(141.919.820.268)	(200.009.455)	-	-	(9.898.605.106)	-	(3.496.553.243)	(491.065.009.456)
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	16.847.704.623	41.907.260.224.875	1.877.614.910.341	3.510.359.248.996	11.506.196.976.816	19.216.752.981	767.370.239.040	72.437.831.953	600.459.430.707	27.094.239.651	205.630.247.519	60.510.487.807.502
	112	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.207.419.584.681)	(777.432.659.365)	(4.662.469.225.998)	(588.392.000)	-	(25.620.102.602)	(48.556.141.673)	-	(167.848.150.968)	(6.889.934.257.287)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 02C
NILAI BMN GABUNGAN BERDASARKAN AKUN NERACA PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No.	Kode BA	Uraian	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tak Berwujud	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan	Total
A DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF														
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	473.346.735	695.921.837.000	412.221.518.952	220.353.569.920	78.380.837.756	26.050.003	785.702.500	-	229.008.200.728	-	12.036.034.697	1.649.207.098.291
	113	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(348.585.705.610)	(17.265.515.184)	(14.742.279.667)	-	-	-	(190.264.979.237)	-	(3.412.695.808)	(574.271.175.506)
79	114	Sekretariat Kabinet	3.001.206.033	-	58.535.310.768	-	-	11.100.265.179	-	-	4.210.800.182	-	4.019.948.000	80.867.530.162
	114	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(40.952.587.825)	-	-	-	-	-	(3.477.799.769)	-	(4.019.948.000)	(48.450.335.594)
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	363.324	95.122.003.081	474.558.239.082	42.726.283.165	784.486.000	11.159.085.269	-	-	20.422.400.469	-	27.073.696.213	671.846.556.603
	115	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(323.157.151.673)	(4.880.792.208)	(363.055.949)	(197.600.000)	-	-	(13.577.547.012)	-	(24.195.088.116)	(366.371.234.958)
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2.967.514.713	12.818.757.640.104	1.446.492.546.122	1.109.160.027.575	28.544.415.698	14.051.799.228	94.511.562.194	-	12.153.625.629	-	44.653.577.404	15.571.292.708.667
	116	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.211.859.764.312)	(264.442.831.381)	(13.224.168.617)	(5.904.022.897)	-	-	(9.084.457.339)	-	(41.326.883.058)	(1.545.842.127.604)
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.033.659.491	11.375.315.379.856	3.151.966.349.818	1.217.128.452.430	65.878.717.545	5.927.045.633	578.355.250	-	15.730.465.657	-	136.011.537.094	15.972.569.962.774
	117	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(2.165.904.897.426)	(270.291.702.147)	(31.071.376.866)	(1.335.875.357)	-	-	(6.515.386.214)	-	(134.157.604.695)	(2.609.276.842.705)
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5.747.508.398	1.753.754.999.824	76.348.586.783	200.998.101.454	1.587.356.330.093	39.393.085.449	91.526.684.537	4.106.350.000	390.209.000	-	5.857.739.306	3.765.479.594.844
	118	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(52.591.746.681)	(13.567.426.357)	(292.035.941.282)	(136.874.651)	-	(4.106.350.000)	(73.389.125)	-	(672.977.796)	(363.184.705.892)
84	119	Badan Keamanan Laut	37.919.328.139	19.700.586.774	2.133.441.894.689	32.639.374.719	13.432.024.000	12.560.296.966	615.940.044.666	-	71.023.773.834	-	32.221.612.305	2.968.878.936.092
	119	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(1.218.975.599.775)	(2.930.769.471)	(4.762.059.590)	-	-	-	(68.402.558.358)	-	(26.889.760.575)	(1.321.960.747.769)
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	41.743.431.609	5.675.945.000	119.425.606.153	904.530.000	-	9.765.095.736	395.000.000	-	5.758.012.790	-	-	183.667.621.288
	120	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(97.552.240.856)	(9.045.300)	-	(2.877.921.484)	-	-	(4.171.330.929)	-	-	(104.610.538.569)
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	1.122.721.446	-	45.039.351.980	-	-	4.524.345.577	-	-	2.579.852.700	-	-	53.266.271.703
	122	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(19.339.980.048)	-	-	(376.905.395)	-	-	(937.347.388)	-	-	(20.654.232.831)
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	190.398.260	88.179.767.280	44.670.582.643	89.457.290.306	8.690.792	82.720.632	-	-	1.744.988.575	-	1.006.908.843	225.341.347.331
	123	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(38.536.378.720)	(8.396.076.903)	(8.690.792)	-	-	-	(1.445.142.742)	-	(1.004.747.009)	(49.391.036.166)
88	199	Otorita Asahan	-	1.357.387.247	257.193.339	4.975.039.276	12.759.300	-	-	-	-	-	-	6.602.379.162
	199	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(257.193.339)	(2.269.718.852)	(5.826.612)	-	-	-	-	-	-	(2.532.738.803)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi			198.732.783.487.785	4.548.399.276.607.160	788.214.852.121.404	421.768.830.543.658	1.010.846.991.027.260	65.505.346.771.218	152.836.267.883.867	457.236.449.327.267	50.165.093.807.120	#####	63.340.357.511.563	7.757.747.895.180.330
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (1)			-	-	(523.603.856.400.481)	(67.484.013.268.483)	(416.869.162.523.655)	(21.722.306.850.214)	-	(9.722.920.085.051)	(23.278.537.332.828)	-	(37.553.680.234.481)	(1.100.234.476.695.190)
Sub Jumlah (1)			198.732.783.487.785	4.548.399.276.607.160	264.610.995.720.923	354.284.817.275.175	593.977.828.503.610	43.783.039.921.004	152.836.267.883.867	447.513.529.242.216	26.886.556.474.292	#####	25.786.677.277.082	6.657.513.418.485.130
B DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLUKUKAN SEPERTI K/L														
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain	1.103.506.647	26.594.107.000	494.586.330.868	26.384.760.000	944.866.256.194	60.614.862.626	29.433.114.852	-	183.121.621.530	-	-	1.766.704.559.717
	999	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-	-	(450.186.834.445)	(700.142.684)	(237.977.392.041)	(14.070.627.891)	-	-	(177.313.282.498)	-	-	(880.248.279.559)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan dan Amortisasi			1.103.506.647	26.594.107.000	494.586.330.868	26.384.760.000	944.866.256.194	60.614.862.626	29.433.114.852	-	183.121.621.530	-	-	1.766.704.559.717
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi (2)			-	-	(450.186.834.445)	(700.142.684)	(237.977.392.041)	(14.070.627.891)	-	-	(177.313.282.498)	-	-	(880.248.279.559)
Sub Jumlah (2)			1.103.506.647	26.594.107.000	44.399.496.423	25.684.617.316	706.888.864.153	46.544.234.735	29.433.114.852	-	5.808.339.032	-	-	886.456.280.158
TOTAL NILAI BMN SEBELUM PENYUSUTAN			198.733.886.994.432	4.548.425.870.714.160	788.709.438.452.272	421.795.215.303.658	1.011.791.857.283.460	65.565.961.633.844	152.865.700.998.719	457.236.449.327.267	50.348.215.428.650	#####	63.340.357.511.563	7.759.514.599.740.040
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN			-	-	(524.054.043.234.926)	(67.484.713.411.167)	(417.107.139.915.696)	(21.736.377.478.105)	-	(9.722.920.085.051)	(23.455.850.615.326)	-	(37.553.680.234.481)	(1.101.114.724.974.750)
TOTAL			198.733.886.994.432	4.548.425.870.714.160	264.655.395.217.346	354.310.501.892.491	594.684.717.367.763	43.829.584.155.739	152.865.700.998.719	447.513.529.242.216	26.892.364.813.324	#####	25.786.677.277.082	6.658.399.874.765.290



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03A
NILAI PENYUSUTAN BMN INTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI ATB PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN dan AMORTISASI				
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF						
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	188.079.272.192	22.737.109.265	(5.971.208.238)	-	204.845.173.219
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.461.726.818.452	7.069.600.619.506	(6.825.640.422.060)	-	1.705.687.015.898
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.431.802.786.567	224.062.831.777	(28.832.305.580)	-	2.627.033.312.764
4	005	Mahkamah Agung	4.184.171.816.788	618.091.035.170	45.486.815.045	2.683.400	4.847.752.350.403
5	006	Kejaksaan Agung	3.853.058.576.078	1.161.662.149.480	90.712.197.447	-	5.105.432.923.005
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	3.872.355.492.416	710.010.822.208	181.527.056.592	-	4.763.893.371.216
7	010	Kementerian Dalam Negeri	4.204.948.710.426	256.960.491.382	(138.469.217.399)	-	4.323.439.984.409
8	011	Kementerian Luar Negeri	3.352.371.521.774	772.354.160.966	(143.675.916.911)	125.106.004	3.981.174.871.833
9	012	Kementerian Pertahanan	173.434.466.087.948	42.145.450.007.080	6.952.747.573.202	4.484.154.675	222.537.147.822.905
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	8.335.320.098.461	1.438.650.873.963	248.535.167.879	(377.231.742)	10.022.128.908.561
11	015	Kementerian Keuangan	16.095.524.423.671	1.874.866.351.391	(645.477.867.040)	-	17.324.912.908.022
12	018	Kementerian Pertanian	6.186.685.928.354	659.426.934.041	(75.993.509.725)	-	6.770.119.352.670
13	019	Kementerian Perindustrian	3.599.353.316.288	389.368.956.882	(315.955.972.505)	199.400.000	3.672.965.700.665
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	6.068.325.571.845	696.168.510.735	(68.020.655.318)	-	6.696.473.427.262
15	022	Kementerian Perhubungan	97.219.803.587.212	20.135.967.691.263	2.026.667.047.792	1.680.288.672	119.384.118.614.939
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	29.710.715.768.885	4.151.441.156.348	(77.224.127.646)	4.330.886.230	33.789.263.683.817
17	024	Kementerian Kesehatan	34.077.695.658.176	3.215.873.134.182	(3.044.006.943.572)	-	34.249.561.848.786
18	025	Kementerian Agama	12.126.007.306.564	2.114.150.394.934	(225.603.836.328)	146.370.002	14.014.700.235.172
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	2.725.472.322.380	371.744.914.038	7.630.948.555	-	3.104.848.184.973
20	027	Kementerian Sosial	2.132.292.642.122	244.780.932.197	9.575.513.343	-	2.386.649.087.662
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.898.771.429.785	449.793.320.103	(196.308.485.840)	158.946.750	4.152.415.210.798
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.885.974.607.527	894.385.458.589	(131.271.842.671)	-	7.649.088.223.445
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	279.830.955.983.629	71.866.493.660.911	18.857.278.049.030	47.094.714.073	370.601.822.407.643
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	117.594.184.210	12.411.175.139	(17.621.439.200)	-	112.383.920.149
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	82.369.982.524	10.252.582.040	(7.745.107.855)	-	84.877.456.709
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	81.859.757.772	10.488.205.048	(1.615.483.631)	-	90.732.479.189
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	680.430.769.341	185.353.329.956	(19.715.866.259)	-	846.068.233.038
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	161.347.028.209	28.597.849.849	(48.932.832.155)	-	141.012.045.903
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	877.822.520.837	109.324.748.329	60.870.788.386	-	1.048.018.057.552
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	519.400.982.246	46.828.007.300	944.749.947	-	567.173.739.493
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.337.976.817	8.680.849.732	(4.012.778.613)	-	123.006.047.936
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	102.578.496.494	17.434.249.093	(3.776.697.214)	-	116.236.048.373
33	050	Badan Intelijen Negara	10.475.412.784.089	2.422.680.292.367	1.627.179.198.682	-	14.525.272.275.138
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	7.813.259.184.475	951.732.555.662	(434.948.261.252)	-	8.330.043.478.885
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	242.049.533.222	19.556.958.238	(717.644.000)	-	260.888.847.460
36	054	Badan Pusat Statistik	2.674.160.939.346	302.343.120.259	(430.316.710.330)	-	2.546.187.349.275
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	365.721.598.991	88.364.895.849	(18.254.531.841)	-	435.831.962.999
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.964.973.802.521	403.429.724.984	(31.754.239.953)	1.297.283.915	3.337.946.571.467
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	542.726.803.515	115.736.694.929	2.111.568.783	-	660.575.067.227
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.047.035.121.411	401.084.350.307	(46.747.376.822)	-	2.401.372.094.896
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	98.574.851.461.596	23.896.073.117.596	818.613.856.454	-	123.289.538.435.646
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.036.523.860.859	269.787.119.608	(84.968.397.425)	-	2.221.342.583.042
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	557.499.815.158	35.486.062.143	23.563.509.277	-	616.549.386.578
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	354.880.547.564	51.192.113.705	118.875.000	-	406.191.536.269
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.896.328.794.970	251.268.753.620	7.805.121.669	-	2.155.402.670.259
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.452.377.833.432	138.810.422.745	(38.019.974.415)	-	1.553.168.281.762
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	559.116.257.463	62.178.815.797	(14.324.511.941)	-	606.970.561.319
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4.252.791.541.051	2.228.079.901	874.795.878	(4.226.767.621.855)	29.126.794.975
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4.689.590.934.591	528.441.180.661	(4.654.963.764)	-	5.213.377.151.488
50	076	Komisi Pemilihan Umum	1.211.022.700.082	203.800.127.930	(20.111.857.860)	-	1.394.710.970.152
51	077	Mahkamah Konstitusi	327.610.636.030	24.731.520.289	(3.040.748.569)	695.657.250	349.997.065.000
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	170.356.593.157	32.679.733.884	(10.453.561.730)	-	192.582.765.311
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.578.524.584.494	250.499.656.879	(77.012.695.691)	-	1.752.011.545.682
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.198.872.044.123	179.236.168.479	12.385.614.576	-	1.390.493.827.178
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.803.998.356.537	398.964.732.516	(37.020.802.277)	-	3.165.942.286.776
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.361.824.181.111	126.200.457.723	112.871.689.589	-	1.600.896.328.423
57	083	Badan Informasi Geospasial	3.125.785.300.561	385.861.389.079	2.794.513.032	-	3.514.441.202.672
58	084	Badan Standardisasi Nasional	233.654.513.148	26.053.641.517	(2.360.751.473)	-	257.347.403.192
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	119.666.638.520	16.803.415.103	(46.424.640)	-	136.423.628.983
60	086	Lembaga Administrasi Negara	246.856.309.485	34.918.898.744	637.057.384	-	282.412.265.613
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	291.104.165.319	38.284.837.802	(3.788.526.080)	-	325.600.477.041
62	088	Badan Kepegawaian Negara	782.239.837.828	78.499.159.484	(17.511.595.300)	-	843.227.402.012
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	553.905.910.311	95.335.779.213	(11.426.516.459)	-	637.815.173.065



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03A
NILAI PENYUSUTAN BMN INTRAKOMPTABEL DAN AMORTISASI ATB PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN dan AMORTISASI				
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
64	090	Kementerian Perdagangan	1.017.591.422.507	107.849.181.215	(14.214.716.474)	5.245.919.500	1.116.471.806.748
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	563.163.091.250	36.979.622.657	12.351.952.148	-	612.494.666.055
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	678.554.317.316	101.788.967.783	(13.597.852.556)	-	766.745.432.543
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	140.149.054.494	8.839.386.035	(1.100.470.437)	-	147.887.970.092
68	100	Komisi Yudisial RI	61.811.284.049	5.075.779.301	(1.238.169.599)	-	65.648.893.751
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.430.167.618.178	176.204.001.427	35.091.170.665	-	1.641.462.790.270
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	194.431.363.824	11.439.754.920	(5.969.473.506)	-	199.901.645.238
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	307.020.729.200	37.402.970.713	18.929.707.088	-	363.353.407.001
72	107	Badan SAR Nasional	6.652.808.368.299	807.851.947.110	5.948.480.230	5.509.344.775	7.472.118.140.414
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	25.191.531.429	4.326.626.473	(2.877.983.196)	-	26.640.174.706
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	63.666.696.886	-	(63.666.696.886)	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	38.296.060.692	4.274.182.214	2.132.842.318	-	44.703.085.224
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	344.161.610.164	144.853.341.819	1.983.350.271	-	490.998.302.254
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	6.160.994.087.188	883.131.803.264	(156.952.105.236)	-	6.887.173.785.216
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	430.709.683.609	57.776.027.409	85.502.341.780	-	573.988.052.798
79	114	Sekretariat Kabinet	46.066.512.280	6.249.422.022	(3.949.244.248)	-	48.366.690.054
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	300.878.275.635	79.848.669.720	(19.214.863.913)	-	361.512.081.442
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.457.936.198.376	119.415.484.242	(35.028.799.366)	-	1.542.322.883.252
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2.265.001.799.624	326.990.774.963	15.987.219.485	-	2.607.979.794.072
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	282.469.735.185	82.393.827.401	(2.129.534.908)	93.424.651	362.827.452.329
84	119	Badan Keamanan Laut	1.124.125.890.334	184.309.380.712	13.222.952.508	-	1.321.658.223.554
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	89.556.268.414	16.280.644.962	(1.253.136.408)	-	104.583.776.968
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	11.929.050.090	8.851.634.534	(139.468.463)	-	20.641.216.161
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	5.636.703.291	43.658.356.446	-	49.295.059.737
88	199	Otorita Asahan	2.334.760.156	197.978.647	-	-	2.532.738.803
SUB TOTAL (1)			887.811.359.420.129	196.963.644.402.744	17.691.054.957.703	(4.156.080.673.700)	1.098.309.978.106.880
B DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L							
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	696.378.183.617	125.355.688.033	58.288.096.100	-	880.021.967.750
SUB TOTAL (2)			696.378.183.617	125.355.688.033	58.288.096.100	-	880.021.967.750
TOTAL			888.507.737.603.746	197.089.000.090.777	17.749.343.053.803	(4.156.080.673.700)	1.099.190.000.074.630



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03B
NILAI PENYUSUTAN BMN EKSTRAKOMPABEL PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN			
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAH PENYUSUTAN	KOREKSI	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF					
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	640.918.534	118.478.550	(29.082.000)	730.315.084
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	3.812.867.881	845.436.749	(13.488.145)	4.644.816.485
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.729.569.559	1.172.684.798	(32.885.095)	3.869.369.262
4	005	Mahkamah Agung	15.250.169.354	1.273.607.531	(121.019.228)	16.402.757.657
5	006	Kejaksaan Agung	9.954.982.045	2.043.570.786	(382.958.989)	11.615.593.842
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	1.747.806.219	313.514.349	33.177.492	2.094.498.060
7	010	Kementerian Dalam Negeri	10.058.708.468	1.590.827.054	(218.782.444)	11.430.753.077
8	011	Kementerian Luar Negeri	6.042.807.437	1.089.646.731	(1.121.242.654)	6.011.211.514
9	012	Kementerian Pertahanan	481.251.606.012	79.128.660.648	(144.971.895.077)	415.408.371.583
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	21.382.282.877	2.970.566.299	(817.802.353)	23.535.046.823
11	015	Kementerian Keuangan	31.750.859.176	3.710.225.940	(3.687.024.986)	31.774.060.130
12	018	Kementerian Pertanian	24.872.133.215	2.849.387.834	(439.957.238)	27.281.563.811
13	019	Kementerian Perindustrian	9.117.691.212	1.550.937.033	(506.981.334)	10.161.646.911
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	7.512.181.576	482.937.143	(146.938.717)	7.848.180.002
15	022	Kementerian Perhubungan	65.517.289.186	19.798.927.391	(1.569.189.093)	83.747.027.484
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	232.601.484.519	59.227.329.097	(7.943.450.452)	283.885.363.164
17	024	Kementerian Kesehatan	138.853.708.269	10.064.047.948	(35.536.480.478)	113.381.275.739
18	025	Kementerian Agama	346.976.673.054	31.523.093.530	(848.371.274)	377.651.395.310
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	19.900.688.212	3.286.807.433	(326.288.960)	22.861.206.685
20	027	Kementerian Sosial	7.004.205.291	488.228.980	(189.372.899)	7.303.061.372
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.641.865.970	1.418.378.099	(2.581.298.226)	12.478.945.843
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.758.952.961	1.604.983.677	(899.738.987)	13.464.197.651
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22.993.934.657	5.647.730.940	2.916.663.567	31.558.329.164
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	89.101.243	34.002.070	(24.530.000)	98.573.313
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	81.639.632	26.051.382	(3.722.406)	103.968.608
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	43.071.273	14.718.939	-	57.790.212
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	4.293.082.573	1.188.984.136	(1.245.107.444)	4.236.959.265
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	131.203.498	23.725.175	(104.471.550)	50.457.123
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	272.121.332	93.817.519	-	365.938.851
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	475.285.301	24.659.623	(10.794.063)	489.150.861
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.541.470	8.407.620	(1.264.663)	32.684.427
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	229.663.607	54.806.806	(3.755.314)	280.715.099
33	050	Badan Intelijen Negara	471.234.202	199.086.000	(9.099.440)	661.220.762
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	1.001.325.938	140.465.464	-	1.141.791.402
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	65.146.720	5.263.800	-	70.410.520
36	054	Badan Pusat Statistik	5.886.154.658	2.676.961.431	(272.509.286)	8.290.606.803
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	468.413.347	139.919.214	(16.384.400)	591.948.161
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	17.520.206.089	2.029.057.906	(742.346.771)	18.806.917.224
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	11.598.722.003	1.476.224.778	(3.996.975)	13.070.949.806
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.082.595.069	325.308.147	(143.665.863)	2.264.237.353
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	236.051.871.706	44.127.654.051	(537.297.715)	279.642.228.042
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.217.487.783	482.136.899	(206.699.267)	2.492.925.415
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.092.013.479	254.539.429	938.016	2.347.490.924
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	60.840.691	5.799.162	-	66.639.853
45	066	Badan Narkotika Nasional	2.215.237.871	728.899.675	(14.921.960)	2.929.215.586
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.467.749.258	262.531.878	(158.031.531)	2.572.249.605
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.237.767.593	393.981.556	(131.056.227)	2.500.692.922
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	179.913.205	34.548.680	(8.929.980)	205.531.905
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	913.405.611	156.982.336	(23.431.305)	1.046.956.642
50	076	Komisi Pemilihan Umum	13.966.407.938	6.784.002.316	(4.533.025.095)	16.217.385.159
51	077	Mahkamah Konstitusi	196.999.653	40.011.294	(122.375)	236.888.572
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	144.064.535	63.123.510	-	207.188.045
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.510.915.661	423.502.101	(144.864.919)	3.789.552.843
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	891.639.986	174.911.825	(61.753.711)	1.004.798.100
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.352.002.804	87.388.692	(45.192.494)	2.394.199.002
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	658.604.029	76.245.050	48.673.401	783.522.480
57	083	Badan Informasi Geospasial	525.361.248	63.168.131	49.428.851	637.958.230
58	084	Badan Standarisasi Nasional	73.155.515	40.232.110	-	113.387.625
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	129.017.109	14.935.255	-	143.952.364
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.659.227.869	383.627.016	12.265.977	4.055.120.862
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	272.750.149	54.427.851	26.544.805	353.722.805
62	088	Badan Kepegawaian Negara	1.111.584.123	278.104.641	(3.604.065)	1.386.084.699
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.903.038.535	139.482.063	(9.374.202)	2.033.146.396
64	090	Kementerian Perdagangan	957.796.562	139.103.585	(110.718.055)	986.182.092
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	462.833.581	107.261.410	29.341.379	599.436.370
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	463.914.491	126.126.734	(11.290.229)	578.750.996



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03B
NILAI PENYUSUTAN BMN EKSTRAKOMPABEL PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN			
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	325.080.199	81.065.363	(8.910.000)	397.235.562
68	100	Komisi Yudisial RI	221.984.851	13.620.080	(4.709.300)	230.895.631
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	3.418.990.347	42.076.434	4.797.457	3.465.864.238
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	390.617.069	78.563.813	5.257.940	474.438.822
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	44.187.795	12.208.820	-	56.396.615
72	107	Badan SAR Nasional	5.900.614.009	1.562.051.153	(693.801.825)	6.768.863.337
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	96.481.934	15.577.027	(594.000)	111.464.961
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	97.342.267	-	(97.342.267)	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	133.673.939	107.226.263	9.088.471	249.988.673
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	25.951.544	18.852.988	21.902.670	66.707.202
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2.393.046.980	411.046.420	(43.621.329)	2.760.472.071
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	203.142.433	85.983.191	(6.002.916)	283.122.708
79	114	Sekretariat Kabinet	84.573.350	44.655.750	(45.583.560)	83.645.540
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.234.682.790	1.617.976.533	6.494.193	4.859.153.516
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	3.375.786.390	306.737.871	(163.279.909)	3.519.244.352
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.039.232.220	283.011.487	(25.195.074)	1.297.048.633
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	(435.024.146)	13.139.446	779.138.263	357.253.563
84	119	Badan Keamanan Laut	178.822.163	123.702.052	-	302.524.215
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	19.104.725	7.656.876	-	26.761.601
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	7.892.466	5.124.204	-	13.016.670
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	30.105.896	65.870.533	95.976.429
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-
SUB TOTAL (1)			1.831.579.677.949	300.964.577.467	(208.045.667.099)	1.924.498.588.317
B DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L						
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	170.276.397	59.635.412	(3.600.000)	226.311.809
SUB TOTAL (2)			170.276.397	59.635.412	(3.600.000)	226.311.809
TOTAL			1.831.749.954.346	301.024.212.879	(208.049.267.099)	1.924.724.900.126



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03C
NILAI PENYUSUTAN BMN GABUNGAN DAN AMORTISASI ATB PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN dan AMORTISASI				
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF						
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	188.720.190.726	22.855.587.815	(6.000.290.238)	-	205.575.488.303
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.465.539.686.333	7.070.446.056.255	(6.825.653.910.205)	-	1.710.331.832.383
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.434.532.356.126	225.235.516.575	(28.865.190.675)	-	2.630.902.682.026
4	005	Mahkamah Agung	4.199.421.986.142	619.364.642.701	45.365.795.817	2.683.400	4.864.155.108.060
5	006	Kejaksaan Agung	3.863.013.558.123	1.163.705.720.266	90.329.238.458	-	5.117.048.516.847
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	3.874.103.298.635	710.324.336.557	181.560.234.084	-	4.765.987.869.276
7	010	Kementerian Dalam Negeri	4.215.007.418.894	258.551.318.436	(138.687.999.843)	-	4.334.870.737.487
8	011	Kementerian Luar Negeri	3.358.414.329.211	773.443.807.697	(144.797.159.565)	125.106.004	3.987.186.083.347
9	012	Kementerian Pertahanan	173.915.717.693.960	42.224.578.667.728	6.807.775.678.125	4.484.154.675	222.952.556.194.488
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	8.356.702.381.338	1.441.621.440.262	247.717.365.526	(377.231.742)	10.045.663.955.384
11	015	Kementerian Keuangan	16.127.275.282.847	1.878.576.577.331	(649.164.892.026)	-	17.356.686.968.152
12	018	Kementerian Pertanian	6.211.558.061.569	662.276.321.875	(76.433.466.963)	-	6.797.400.916.481
13	019	Kementerian Perindustrian	3.608.471.007.500	390.919.893.915	(316.462.953.839)	199.400.000	3.683.127.347.576
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	6.075.837.753.421	696.651.447.878	(68.167.594.035)	-	6.704.321.607.264
15	022	Kementerian Perhubungan	97.285.320.876.398	20.155.766.618.654	2.025.097.858.699	1.680.288.672	119.467.865.642.923
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	29.943.317.253.404	4.210.668.485.445	(85.167.578.098)	4.330.886.230	34.073.149.046.481
17	024	Kementerian Kesehatan	34.216.549.366.445	3.225.937.182.130	(3.079.543.424.050)	-	34.362.943.124.525
18	025	Kementerian Agama	12.472.983.979.618	2.145.673.488.464	(226.452.207.602)	146.370.002	14.392.351.630.482
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	2.745.373.010.592	375.031.721.471	7.304.659.595	-	3.127.709.391.658
20	027	Kementerian Sosial	2.139.296.847.413	245.269.161.177	9.386.140.444	-	2.393.952.149.034
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.912.413.295.755	451.211.698.202	(198.889.784.066)	158.946.750	4.164.894.156.641
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.898.733.560.488	895.990.442.266	(132.171.581.658)	-	7.662.552.421.096
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	279.853.949.918.286	71.872.141.391.851	18.860.194.712.597	47.094.714.073	370.633.380.736.807
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	117.683.285.453	12.445.177.209	(17.645.969.200)	-	112.482.493.462
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	82.451.622.156	10.278.633.422	(7.748.830.261)	-	84.981.425.317
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	81.902.829.045	10.502.923.987	(1.615.483.631)	-	90.790.269.401
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Berekraf	684.723.851.914	186.542.314.092	(20.960.973.703)	-	850.305.192.303
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	161.478.231.707	28.621.575.024	(49.037.303.705)	-	141.062.503.026
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	878.094.642.169	109.418.565.848	60.870.788.386	-	1.048.383.996.403
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	519.876.267.547	46.852.666.923	933.955.884	-	567.662.890.354
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	118.363.518.287	8.689.257.352	(4.014.043.276)	-	123.038.732.363
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	102.808.160.101	17.489.055.899	(3.780.452.528)	-	116.516.763.472
33	050	Badan Intelijen Negara	10.475.884.018.291	2.422.879.378.367	1.627.170.099.242	-	14.525.933.495.900
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	7.814.260.510.413	951.873.021.126	(434.948.261.252)	-	8.331.185.270.287
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	242.114.679.942	19.562.222.038	(717.644.000)	-	260.959.257.980
36	054	Badan Pusat Statistik	2.680.047.094.004	305.020.081.690	(430.589.219.616)	-	2.554.477.956.078
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	366.190.012.338	88.504.815.063	(18.270.916.241)	-	436.423.911.160
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.982.494.008.610	405.458.782.890	(32.496.586.724)	1.297.283.915	3.356.753.488.691
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	554.325.525.518	117.212.919.707	2.107.571.808	-	673.646.017.033
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.049.117.716.480	401.409.658.454	(46.891.042.685)	-	2.403.636.332.249
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	98.810.903.333.302	23.940.200.771.647	818.076.558.739	-	123.569.180.663.688
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.038.741.348.642	270.269.256.507	(85.175.096.692)	-	2.223.835.508.457
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	559.591.828.637	35.740.601.572	23.564.447.293	-	618.896.877.502
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	354.941.388.255	51.197.912.867	118.875.000	-	406.258.176.122
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.898.544.032.841	251.997.653.295	7.790.199.709	-	2.158.331.885.845
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.454.845.582.690	139.072.954.623	(38.178.005.946)	-	1.555.740.531.367
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	561.354.025.056	62.572.797.353	(14.455.568.168)	-	609.471.254.241
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4.252.971.454.256	2.262.628.581	865.865.898	(4.226.767.621.855)	29.332.326.880
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	4.690.504.340.202	528.598.162.997	(4.678.395.069)	-	5.214.424.108.130
50	076	Komisi Pemilihan Umum	1.224.989.108.020	210.584.130.246	(24.644.882.955)	-	1.410.928.355.311
51	077	Mahkamah Konstitusi	327.807.635.683	24.771.531.583	(3.040.870.944)	695.657.250	350.233.953.572
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	170.500.657.692	32.742.857.394	(10.453.561.730)	-	192.789.953.356
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.582.035.500.155	250.923.158.980	(77.157.560.610)	-	1.755.801.098.525
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.199.763.684.109	179.411.080.304	12.323.860.865	-	1.391.498.625.278
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	2.806.350.359.341	399.052.121.208	(37.065.994.771)	-	3.168.336.485.778
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.362.482.785.140	126.276.702.773	112.920.362.990	-	1.601.679.850.903
57	083	Badan Informasi Geospasial	3.126.310.661.809	385.924.557.210	2.843.941.883	-	3.515.079.160.902
58	084	Badan Standarisasi Nasional	233.727.668.663	26.093.873.627	(2.360.751.473)	-	257.460.790.817
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	119.795.655.629	16.818.350.358	(46.424.640)	-	136.567.581.347
60	086	Lembaga Administrasi Negara	250.515.537.354	35.302.525.760	649.323.361	-	286.467.386.475
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	291.376.915.468	38.339.265.653	(3.761.981.275)	-	325.954.199.846
62	088	Badan Kepegawaian Negara	783.351.421.951	78.777.264.125	(17.515.199.365)	-	844.613.486.711
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	555.808.948.846	95.475.261.276	(11.435.890.661)	-	639.848.319.461
64	090	Kementerian Perdagangan	1.018.549.219.069	107.988.284.800	(14.325.434.529)	5.245.919.500	1.117.457.988.840
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	563.625.924.831	37.086.884.067	12.381.293.527	-	613.094.102.425



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 03C
NILAI PENYUSUTAN BMN GABUNGAN DAN AMORTISASI ATB PER K/L
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PENYUSUTAN dan AMORTISASI				
			AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	679.018.231.807	101.915.094.517	(13.609.142.785)	-	767.324.183.539
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	140.474.134.693	8.920.451.398	(1.109.380.437)	-	148.285.205.654
68	100	Komisi Yudisial RI	62.033.268.900	5.089.399.381	(1.242.878.899)	-	65.879.789.382
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.433.586.608.525	176.246.077.861	35.095.968.122	-	1.644.928.654.508
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	194.821.980.893	11.518.318.733	(5.964.215.566)	-	200.376.084.060
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	307.064.916.995	37.415.179.533	18.929.707.088	-	363.409.803.616
72	107	Badan SAR Nasional	6.658.708.982.308	809.413.998.263	5.254.678.405	5.509.344.775	7.478.887.003.751
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	25.288.013.363	4.342.203.500	(2.878.577.196)	-	26.751.639.667
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	63.764.039.153	-	(63.764.039.153)	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	38.429.734.631	4.381.408.477	2.141.930.789	-	44.953.073.897
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	344.187.561.708	144.872.194.807	2.005.252.941	-	491.065.009.456
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	6.163.387.134.168	883.542.849.684	(156.995.726.565)	-	6.889.934.257.287
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	430.912.826.042	57.862.010.600	85.496.338.864	-	574.271.175.506
79	114	Sekretariat Kabinet	46.151.085.630	6.294.077.772	(3.994.827.808)	-	48.450.335.594
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	304.112.958.425	81.466.646.253	(19.208.369.720)	-	366.371.234.958
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.461.311.984.766	119.722.222.113	(35.192.079.275)	-	1.545.842.127.604
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2.266.041.031.844	327.273.786.450	15.962.024.411	-	2.609.276.842.705
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	282.034.711.039	82.406.966.847	(1.350.396.645)	93.424.651	363.184.705.892
84	119	Badan Keamanan Laut	1.124.304.712.497	184.433.082.764	13.222.952.508	-	1.321.960.747.769
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	89.575.373.139	16.288.301.838	(1.253.136.408)	-	104.610.538.569
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	11.936.942.556	8.856.758.738	(139.468.463)	-	20.654.232.831
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	5.666.809.187	43.724.226.979	-	49.391.036.166
88	199	Otorita Asahan	2.334.760.156	197.978.647	-	-	2.532.738.803
SUB TOTAL (1)			889.642.939.098.078	197.264.608.980.211	17.483.009.290.604	(4.156.080.673.700)	1.100.234.476.695.190
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L						
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	696.548.460.014	125.415.323.445	58.284.496.100	-	880.248.279.559
SUB TOTAL (2)			696.548.460.014	125.415.323.445	58.284.496.100	-	880.248.279.559
TOTAL			890.339.487.558.092	197.390.024.303.656	17.541.293.786.704	(4.156.080.673.700)	1.101.114.724.974.750



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 04
REKAP PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LBMN DAN LKPP
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERSEDIAAN			ASET TETAP			ASET TAK BERWUJUD		
			LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	17.113.071.035	17.113.071.035	-	1.073.713.952.849	1.073.713.952.849	-	3.415.363.686	3.415.363.686	-
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	36.453.112.504	36.453.112.504	-	2.904.588.040.061	2.904.588.040.061	-	53.303.613.266	53.303.613.266	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	15.230.502.361	15.230.502.361	-	8.716.109.171.021	8.716.109.171.021	-	59.565.644.908	59.565.644.908	-
4	005	Mahkamah Agung	21.944.823.818	21.944.823.818	-	29.480.165.355.628	29.480.165.355.628	-	21.978.753.036	21.978.753.036	-
5	006	Kejaksaan Agung	10.539.069.818.723	10.539.069.818.723	-	27.301.050.246.518	27.301.050.246.518	-	(253.887.355.897)	(253.887.355.897)	-
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	748.714.166.154	748.828.058.735	113.892.581	614.396.537.554.195	614.396.734.134.972	196.580.777	13.253.967.990	13.253.967.990	-
7	010	Kementerian Dalam Negeri	277.326.163.445	277.326.163.445	-	15.084.508.537.841	15.080.503.971.932	(4.004.565.909)	20.330.117.571	20.330.117.571	-
8	011	Kementerian Luar Negeri	83.004.445.096	83.004.445.096	-	48.117.070.458.451	48.117.070.458.451	-	18.522.975.873	18.522.975.873	-
9	012	Kementerian Pertahanan	64.298.048.906.464	63.884.963.195.524	(413.085.710.940)	1.666.509.738.681.980	1.667.402.621.689.060	892.883.007.081	4.328.300.639.241	4.328.507.695.041	207.055.800
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	604.873.054.596	604.873.054.596	-	67.445.115.678.045	67.445.115.678.045	-	(109.423.864.979)	(109.423.864.979)	-
11	015	Kementerian Keuangan	469.738.276.496	469.738.276.496	0	113.250.566.775.699	113.250.566.800.699	25.000	851.453.355.666	851.453.355.666	-
12	018	Kementerian Pertanian	892.779.249.159	892.779.249.159	-	78.938.213.195.795	78.938.415.698.275	202.502.480	94.940.361.277	94.940.361.277	-
13	019	Kementerian Perindustrian	190.128.895.447	190.128.895.447	-	11.742.166.687.238	11.742.166.687.238	-	22.890.237.449	22.890.237.449	-
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	815.831.664.740	815.831.664.740	-	25.616.713.568.700	25.616.713.568.700	-	30.146.616.059	30.146.616.059	-
15	022	Kementerian Perhubungan	9.718.253.417.892	9.718.253.417.892	-	485.346.267.150.577	485.346.267.150.577	-	2.136.589.470.438	2.136.589.470.438	-
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	2.437.351.905.483	2.437.351.905.483	-	420.494.380.261.883	421.883.411.127.290	1.389.030.865.407	320.762.540.508	327.775.188.172	7.012.647.664
17	024	Kementerian Kesehatan	26.613.307.662.376	26.609.591.637.166	(3.716.025.210)	91.892.157.318.809	93.049.082.805.777	1.156.925.486.968	57.118.014.137	57.118.014.137	-
18	025	Kementerian Agama	113.201.233.670	113.255.966.853	54.733.183	113.597.153.219.177	113.981.016.641.934	383.963.422.757	121.418.164.182	121.364.306.807	(53.857.375)
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.020.485.307	4.020.485.307	-	11.176.837.232.796	11.176.837.232.796	-	6.547.892.053	6.547.892.053	-
20	027	Kementerian Sosial	642.676.968.115	642.676.968.115	-	20.898.733.144.602	20.898.733.144.602	-	(4.696.397.529)	(4.696.397.529)	-
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	543.533.386.411	543.533.386.411	-	14.613.219.619.044	14.613.219.619.044	-	33.225.109.310	33.225.109.310	-
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	96.322.856.358	96.322.800.358	(56.000)	24.429.369.669.265	24.429.369.669.265	-	46.789.263.474	46.789.263.474	-
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	67.649.313.937.161	67.649.313.937.161	-	1.468.393.047.204.790	1.468.393.047.236.050	31.263	7.312.271.213.994	7.312.271.213.994	-
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	40.999.571	40.999.571	-	82.166.268.312	82.166.268.312	-	(5.530.634.599)	(5.530.634.599)	-
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	469.769.511	469.769.511	-	20.606.701.257	20.606.701.257	-	(5.489.546.065)	(5.489.546.065)	-
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.260.369.051	1.260.369.051	-	163.040.843.815	163.040.843.815	-	3.654.206.906	3.654.206.906	-
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	22.182.323.241	22.182.323.241	-	9.763.671.124.489	9.763.671.124.489	-	19.189.904.817	19.189.904.817	-
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.058.158.602	1.058.158.602	-	1.962.218.883.741	1.962.218.883.741	-	(411.235.737)	(411.235.737)	-
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	46.751.424.857	46.741.577.647	(9.847.210)	13.148.436.570.968	13.148.436.570.968	-	6.872.958.892	6.872.958.892	-
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	7.274.213.173	7.274.213.173	-	4.052.578.478.059	4.047.760.779.259	(4.817.698.800)	19.801.705.224	19.801.705.224	-
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.594.280.625	3.720.341.425	126.060.800	169.434.517.371	169.434.517.371	-	634.062.964	634.062.964	-
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1.694.790.111	1.694.790.111	-	135.002.040.622	135.002.040.622	-	1.133.795.017	1.133.795.017	-
33	050	Badan Intelijen Negara	105.345.187.665	105.345.187.665	-	11.899.118.766.258	11.899.118.766.258	-	1.869.808.543.982	1.869.808.543.982	-
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	2.125.045.976	2.125.045.976	-	3.746.382.296.411	3.746.382.296.411	-	(60.778.986.272)	(60.778.986.272)	-
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	1.859.000	1.859.000	-	7.990.364.226	7.990.364.226	-	2.974.314.805	2.974.314.805	-
36	054	Badan Pusat Statistik	65.161.832.426	65.161.759.926	(72.500)	5.215.196.751.679	5.214.787.522.716	(409.228.963)	85.647.378.573	85.647.378.573	-
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	4.700.405.446	4.700.405.446	-	1.951.473.450.395	1.951.473.450.395	-	53.321.733.050	53.321.733.050	-
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	99.991.252.773	99.991.252.773	-	14.305.550.901.717	14.305.550.901.717	-	99.404.301.254	99.404.301.254	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 04
REKAP PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LBMN DAN LKPP
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERSEDIAAN			ASET TETAP			ASET TAK BERWUJUD		
			LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	15.341.841.014	15.326.547.452	(15.293.562)	2.900.813.404.037	2.899.174.383.752	(1.639.020.285)	173.193.463.343	244.416.771.678	71.223.308.335
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	6.985.475.548	6.985.475.548	-	15.368.204.356.201	15.368.229.208.053	24.851.852	534.176.032.151	534.176.032.151	-
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.458.267.630.891	7.458.607.415.578	339.784.687	299.480.490.292.348	299.855.074.108.329	374.583.815.981	4.309.161.865.107	4.309.161.865.107	-
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	156.719.090.372	156.719.090.372	-	3.428.346.402.067	3.428.346.402.067	-	57.011.065.291	57.011.065.291	-
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	1.484.969.116	1.484.969.116	-	1.677.231.367.397	1.677.231.367.397	-	(665.730.241)	(665.730.241)	-
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7.564.994.335	7.564.994.335	-	2.241.273.653.563	2.241.273.653.563	-	47.405.001.797	47.405.001.797	-
45	066	Badan Narkotika Nasional	36.673.378.482	36.673.378.482	-	1.871.171.125.019	1.871.171.125.019	-	26.818.659.575	26.818.659.575	-
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	185.453.337.428	185.453.337.428	-	1.971.067.943.029	1.971.442.801.936	374.858.907	2.400.488.982	2.400.488.982	-
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	224.358.326.249	224.358.326.249	-	2.689.356.954.573	2.689.356.954.573	-	12.115.930.905	12.115.930.905	-
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	879.348.875	879.348.875	-	18.944.028.176	18.944.028.176	-	(2.039.614.067)	(2.039.614.067)	-
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	143.131.972.657	143.131.972.657	-	6.808.473.610.451	6.808.473.610.451	-	(4.517.606.725)	(4.517.606.725)	-
50	076	Komisi Pemilihan Umum	40.311.568.156	40.311.568.156	-	2.073.253.394.400	2.073.253.394.400	-	5.884.088.651	5.884.088.651	-
51	077	Mahkamah Konstitusi	2.578.001.790	2.578.001.790	-	839.865.127.335	839.865.127.335	-	639.976.015	639.976.015	-
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1.824.303.405	1.824.303.405	-	486.022.393.644	486.022.393.645	1	10.309.618.188	10.309.618.188	-
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.029.829.810	3.029.829.810	-	39.083.737.607.027	39.177.050.116.469	93.312.509.442	151.504.198.511	151.509.544.511	5.346.000
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	72.293.985.801	72.292.737.801	(1.248.000)	14.575.359.355.247	14.575.359.355.247	-	8.840.424.600	8.955.924.600	115.500.000
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	12.390.766.304	12.390.766.304	-	7.040.220.525.157	7.040.220.525.157	-	80.217.613.643	80.217.613.643	-
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	62.294.606.398	62.294.606.398	-	3.204.348.454.676	3.204.348.454.676	-	320.978.995.621	320.978.995.621	-
57	083	Badan Informasi Geospasial	13.215.338.947	13.215.338.947	-	496.200.551.249	496.200.551.249	-	761.313.567.896	761.313.567.896	-
58	084	Badan Standarisasi Nasional	573.901.430	573.901.430	-	223.205.188.677	223.205.188.677	-	1.365.279.321	1.365.279.321	-
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2.388.744.413	2.388.744.413	-	167.945.466.158	167.945.466.158	-	2.228.862.153	2.228.862.153	-
60	086	Lembaga Administrasi Negara	3.547.885.091	3.547.885.091	-	3.703.246.804.103	3.703.246.804.103	-	236.242.370	236.242.370	-
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.346.583.401	2.346.583.401	-	1.227.936.848.039	1.227.936.848.039	-	6.102.061.365	6.102.061.365	-
62	088	Badan Kepegawaian Negara	10.159.232.764	10.159.232.764	-	3.153.091.063.975	3.153.091.063.975	-	(41.362.839.072)	(41.362.839.072)	-
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	12.049.894.530	12.049.894.530	-	5.288.397.220.484	5.288.397.220.484	-	(798.427.831)	(798.427.831)	-
64	090	Kementerian Perdagangan	1.655.085.234.196	1.655.085.212.532	(21.664)	3.888.906.852.175	3.888.908.004.175	1.152.000	(18.742.614.551)	(18.742.614.551)	-
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	152.585.366.249	152.527.302.249	(58.064.000)	932.711.230.384	932.711.230.384	-	916.254.473.782	916.254.473.782	-
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	963.674.594.121	963.674.594.121	-	2.303.287.611.186	2.303.287.611.186	-	30.488.639.461	30.488.639.461	-
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	523.476.730	523.476.730	-	274.346.675.742	274.346.675.742	-	400.104.375	400.104.375	-
68	100	Komisi Yudisial RI	2.319.735.591	2.319.735.591	-	362.520.411.821	362.520.411.821	-	(495.616.738)	(495.616.738)	-
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	371.144.648.211	371.144.648.211	-	1.088.751.788.084	1.088.751.788.084	-	94.848.063.228	94.848.063.228	-
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	1.882.318.185	1.882.318.185	-	345.797.546.389	345.797.546.389	-	(4.141.518.240)	(4.141.518.240)	-
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	543.974.558	543.974.558	-	600.921.101.218	600.921.101.218	-	16.529.299.980	16.529.299.980	-
72	107	Badan SAR Nasional	153.855.668.777	153.855.668.777	-	5.445.625.715.284	5.445.625.715.284	-	13.466.778.636	13.466.778.636	-
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	640.534.960	640.534.960	-	19.012.972.246	19.012.972.246	-	718.936.213	718.936.213	-
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	275.178.070	284.853.070	9.675.000	70.335.648.987	70.335.648.987	-	247.157.410	247.157.410	-
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	66.692.846.155	66.692.846.155	-	1.865.854.218.279	1.865.331.552.547	(522.665.700)	122.141.526.547	122.141.526.547	-
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	16.847.704.623	16.847.704.623	-	52.928.779.723.338	52.928.779.723.338	-	578.650.020.585	578.650.020.585	-
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	473.346.735	473.346.735	-	1.026.838.092.246	1.026.838.092.246	-	38.743.221.491	38.743.221.491	-



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 04
REKAP PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LBMN DAN LKPP
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERSEDIAAN			ASET TETAP			ASET TAK BERWUJUD		
			LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH	LKPP (DJPB)	LBMN (DJKN)	SELISIH
79	114	Sekretariat Kabinet	3.001.206.033	3.001.206.033	-	28.532.051.002	28.532.051.002	-	733.000.413	733.000.413	-
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	249.276.744	363.324	(248.913.420)	292.861.163.321	292.861.163.321	-	6.740.528.457	6.740.528.457	-
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2.967.514.713	2.967.514.713	-	14.014.071.430.732	14.014.071.430.732	-	2.979.516.146	2.979.516.146	-
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.033.659.491	4.033.659.491	-	13.347.297.392.839	13.347.297.392.839	-	9.170.315.443	9.170.315.443	-
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5.747.508.398	5.747.508.398	-	3.390.856.860.727	3.390.856.860.727	-	316.819.875	316.819.875	-
84	119	Badan Keamanan Laut	37.919.328.139	37.919.328.139	-	1.600.683.490.073	1.600.683.490.073	-	2.620.926.476	2.620.926.476	-
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	41.743.431.609	41.743.431.609	-	35.708.214.390	35.708.214.390	-	1.586.681.861	1.586.681.861	-
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	1.122.721.446	1.122.721.446	-	29.825.065.484	29.825.065.484	-	1.642.505.312	1.642.505.312	-
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	190.398.260	190.398.260	-	175.400.187.779	175.400.187.779	-	299.845.833	299.845.833	-
88	999	Belanja Lain-lain	1.103.506.647	1.103.506.647	-	879.331.806.294	879.331.806.294	-	32.835.064.810	5.808.339.032	(27.026.725.778)
TOTAL			199.150.378.100.687	198.733.886.994.432	(416.491.106.255)	5.953.006.751.071.340	5.957.286.757.001.590	4.280.005.930.259	25.585.601.092.878	25.637.084.367.524	51.483.274.646

Catatan :

- Nilai BMN yang diperbandingkan antara LBMN dan LKPP pada TA 2020 hanya meliputi Persediaan, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, ATB dalam Pengerjaan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan Amortisasi ATB.
- Aset Tetap meliputi Tanah, Peralatan Mesin dan penyusutannya, Gedung Bangunan dan penyusutannya, JIJ dan penyusutannya, Aset Tetap Lainnya dan penyusutannya, dan KDP.
- Aset Tak Berwujud meliputi Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 05
RESUME PENGGUNAAN BMN SEBAGAI *UNDERLYING ASSET* PENERBITAN SBSN
PER 31 DESEMBER 2021

No	Seri SBSN	Jatuh Tempo	Nominal SBSN	BMN	Proyek	Jasa	Total Aset SBSN	Selisih	Tahun
1	IFR-0006	15/03/2030	2.175.000.000.000	2.175.409.647.259	-	-	2.175.409.647.259	409.647.259	2030
2	IFR-0007	15/01/2025	1.547.000.000.000	1.547.443.873.000	-	-	1.547.443.873.000	443.873.000	2025
3	IFR-0010	15/02/2036	4.110.000.000.000	4.110.000.629.265	-	-	4.110.000.629.265	629.265	2036
4	PBS-002	15/01/2022	63.660.857.000.000	22.073.988.730.928	41.608.544.910.889	-	63.682.533.641.817	21.676.641.817	2022
5	PBS-003	15/01/2027	20.386.000.000.000	7.634.002.458.954	12.788.076.531.183	-	20.422.078.990.137	36.078.990.137	2027
6	PBS-004	15/02/2037	41.957.277.000.000	13.828.060.112.590	28.129.220.016.173	-	41.957.280.128.763	3.128.763	2037
7	PBS-005	15/04/2043	34.324.000.000.000	12.410.979.535.153	21.945.649.337.264	-	34.356.628.872.417	32.628.872.417	2043
8	PBS-007	15/09/2040	10.375.000.000.000	1.396.500.442.816	8.987.971.397.380	-	10.384.471.840.196	9.471.840.196	2040
9	PBS-011	15/08/2023	21.750.000.000.000	4.100.884.815.732	18.393.445.917.628	-	22.494.330.733.360	744.330.733.360	2023
10	PBS-012	15/11/2031	47.680.694.000.000	9.385.492.084.134	38.296.078.724.317	-	47.681.570.808.451	876.808.451	2031
11	PBS-015	15/07/2047	23.043.000.000.000	10.897.167.023.139	12.145.833.187.115	-	23.043.000.210.254	210.254	2047
12	PBS-017	15/10/2025	63.086.476.000.000	31.631.361.948.820	31.455.200.939.022	-	63.086.562.887.842	86.887.842	2025
13	PBS-018	15/05/2028	7.500.000.000.000	3.493.740.320.059	4.006.260.040.108	-	7.500.000.360.167	360.167	2028
14	PBS-019	15/09/2023	43.040.000.000.000	16.830.094.778.009	26.209.905.818.717	-	43.040.000.596.726	596.726	2023
16	PBS-021	15/11/2026	13.185.000.000.000	4.597.949.815.413	8.587.054.374.614	-	13.185.004.190.027	4.190.027	2026
17	PBS-022	15/04/2034	16.330.000.000.000	7.732.960.926.975	8.597.039.924.540	-	16.330.000.851.515	851.515	2034
18	PBS-023	15/05/2030	10.875.000.000.000	5.462.681.663.260	5.412.318.752.634	-	10.875.000.415.894	415.894	2030
19	PBS-024	15/05/2032	3.000.000.000.000	1.469.968.892.854	1.530.031.160.281	-	3.000.000.053.135	53.135	2032
20	PBS-025	15/05/2033	24.735.000.000.000	17.793.624.317.429	6.941.375.760.499	-	24.735.000.077.928	77.928	2033
21	PBS-026	15/10/2024	60.395.000.000.000	35.067.661.122.931	25.327.340.488.819	-	60.395.001.611.750	1.611.750	2024
22	PBS-027	15/05/2023	64.115.368.000.000	40.384.948.594.759	23.730.427.296.879	-	64.115.375.891.638	7.891.638	2023
23	PBS-028	15/10/2046	75.503.418.000.000	57.215.517.146.776	18.287.908.611.893	-	75.503.425.758.669	7.758.669	2046
24	PBS-029	15/03/2034	43.116.794.000.000	22.537.081.082.187	20.579.719.355.100	-	43.116.800.437.287	6.437.287	2034
25	PBS-030	15/07/2028	4.250.000.000.000	2.200.000.937.096	2.050.000.704.000	-	4.250.001.641.096	1.641.096	2028
26	PBS-031	15/07/2024	16.450.000.000.000	7.779.501.170.409	8.670.519.257.100	-	16.450.020.427.509	20.427.509	2024
27	PBS-032	15/07/2026	15.500.000.000.000	6.800.501.799.022	8.699.504.606.700	-	15.500.006.405.722	6.405.722	2026
28	PBSNTQ01	27/08/2030	3.000.000.000.000	2.346.924.898.562	653.075.430.761	-	3.000.000.329.323	329.323	2030
30	PBSNT002	23/06/2036	2.000.000.000.000	1.200.000.086.000	800.000.019.900	-	2.000.000.105.900	105.900	2036
31	SR-011	10/03/2022	21.117.570.000.000	7.391.151.355.823	13.726.422.236.810	-	21.117.573.592.633	3.592.633	2022
32	SR012	10/03/2023	12.142.572.000.000	4.290.447.307.735	7.852.128.604.120	-	12.142.575.911.855	3.911.855	2023
33	SR013	10/09/2023	25.665.971.000.000	18.016.614.864.440	7.649.386.230.636	-	25.666.001.095.076	30.095.076	2023
34	SR014	10/03/2024	16.705.080.000.000	8.185.525.914.213	8.519.590.990.800	-	16.705.116.905.013	36.905.013	2024
35	SR015	10/09/2024	27.000.639.000.000	13.230.338.625.679	13.770.326.147.400	-	27.000.664.773.079	25.773.079	2024
36	SPN-S 14012022	14/01/2022	2.000.000.000.000	2.000.000.274.500	-	-	2.000.000.274.500	274.500	2022
37	SPN-S 12022022	12/02/2022	500.000.000.000	500.000.233.000	-	-	500.000.233.000	233.000	2022
38	SPN-S 06042022	06/04/2022	1.200.000.000.000	1.200.000.125.000	-	-	1.200.000.125.000	125.000	2022
39	SPN-S 08032022	08/03/2022	1.000.000.000.000	1.000.000.121.565	-	-	1.000.000.121.565	121.565	2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 05
RESUME PENGGUNAAN BMN SEBAGAI *UNDERLYING ASSET* PENERBITAN SBSN
PER 31 DESEMBER 2021

No	Seri SBSN	Jatuh Tempo	Nominal SBSN	BMN	Proyek	Jasa	Total Aset SBSN	Selisih	Tahun
40	SPN-S 03052022	03/05/2022	300.000.000.000	300.000.168.500	-	-	300.000.168.500	168.500	2022
41	ST007	10/11/2022	5.379.199.000.000	2.697.431.353.300	2.700.449.886.247	-	5.397.881.239.547	18.682.239.547	2022
42	ST008		5.000.000.000.000	2.500.213.335.000	2.500.223.488.500	-	5.000.436.823.500	436.823.500	
43	SW001	10/03/2025	50.849.000.000	26.267.303.400	25.425.761.868	-	51.693.065.268	844.065.268	2025
44	SWR001	10/11/2022	14.912.000.000	7.756.456.096	7.630.851.553	-	15.387.307.649	475.307.649	2022
45	SWR002	09/06/2023	24.141.000.000	12.081.454.000	12.070.722.600	-	24.152.176.600	11.176.600	2023
53	SNI-0322	29/03/2022	13.300.000.000.000	7.083.359.777.262	6.216.652.411.731	-	13.300.012.188.993	12.188.993	2022
54	SNI-0323	01/03/2023	16.750.000.000.000	8.547.793.088.667	8.207.545.029.054	-	16.755.338.117.721	5.338.117.721	2023
55	SNI-0327	29/03/2027	26.600.000.000.000	13.566.001.710.414	13.034.385.408.583	-	26.600.387.118.997	387.118.997	2027
56	SNI-0328	01/03/2028	23.450.000.000.000	11.970.494.303.333	11.490.533.972.090	-	23.461.028.275.423	11.028.275.423	2028
57	SNI-0824	15/08/2024	10.541.250.000.000	5.737.556.793.000	5.512.509.247.170	-	11.250.066.040.170	708.816.040.170	2024
58	SNI-0229	15/02/2029	17.568.750.000.000	9.010.167.883.580	9.187.501.132.461	-	18.197.669.016.041	628.919.016.041	2029
59	SNI-22	21/11/2022	9.643.000.000.000	9.753.293.971.085		-	9.753.293.971.085	110.293.971.085	2022
60	SNI-24	10/09/2024	17.400.000.000.000	8.874.082.920.308	8.526.013.620.000	-	17.400.096.540.308	96.540.308	2024
61	SNI-25	28/05/2025	25.000.000.000.000	12.754.319.489.598	12.246.065.132.000	-	25.000.384.621.598	384.621.598	2025
62	SNI-26	29/03/2026	24.325.000.000.000	12.405.752.579.315	11.919.250.316.800	-	24.325.002.896.115	2.896.115	2026
63	SNI0625	23/06/2025	10.698.750.000.000	5.508.069.013.620	6.155.417.340.110	-	11.663.486.353.730	964.736.353.730	2025
64	SNI0630	23/06/2030	14.265.000.000.000	7.344.025.175.300	7.047.621.287.415	-	14.391.646.462.715	126.646.462.715	2030
65	SNI0650	23/06/2050	10.698.750.000.000	5.508.003.408.650	5.202.936.466.445	-	10.710.939.875.095	12.189.875.095	2050
66	SNI0626	09/06/2026	18.250.000.000.000	9.314.201.250.000	8.943.199.425.000	-	18.257.400.675.000	7.400.675.000	2026
67	SNI0631	09/06/2031	14.600.000.000.000	7.532.231.437.000	7.152.901.931.700	-	14.685.133.368.700	85.133.368.700	2031
68	SNI0651	09/06/2051	10.950.000.000.000	5.970.250.000.000	5.365.664.413.200	-	11.335.914.413.200	385.914.413.200	2051
69	USDPBS-002	11/01/2022	1.407.600.000.000	500.502.068.205	929.500.467.452	-	1.430.002.535.657	22.402.535.657	2022
	TOTAL		1.139.086.917.000.000	556.842.382.615.119	571.483.855.189.680	14.697.000.000.000	1.143.023.237.804.800		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 06
PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
A		DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF									
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Akumulasi Penyusutan	488.862.667.478 (149.701.470.885)	508.002.673.849 (120.487.576.053)	530.633.117.762 (137.218.473.073)	782.122.830.626 (155.414.616.596)	1.382.612.404.329 (130.298.265.650)	1.415.665.537.088 (145.801.064.063)	1.318.523.162.966 (166.009.662.654)	1.324.813.812.495 (188.720.190.726)	1.335.901.790.615 (205.575.488.303)
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat Akumulasi Penyusutan	2.125.171.040.780 (801.993.530.211)	1.841.268.540.043 (651.926.833.678)	2.196.262.744.508 (776.355.158.702)	2.308.284.290.497 (905.256.445.624)	3.287.906.414.991 (1.231.371.323.082)	3.435.635.122.622 (1.383.693.208.518)	3.918.069.899.537 (1.250.239.479.202)	4.215.110.798.939 (1.465.539.686.333)	4.716.023.785.158 (1.710.331.832.383)
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan Akumulasi Penyusutan	5.185.939.044.958 (1.094.681.791.444)	5.477.011.185.350 (1.248.968.930.283)	5.985.635.923.181 (1.511.667.593.895)	6.568.072.049.517 (1.809.983.257.200)	10.504.381.263.929 (1.856.548.751.655)	10.599.617.654.352 (2.116.019.040.406)	11.081.565.894.218 (2.208.282.533.041)	11.250.886.517.980 (2.434.532.356.126)	11.427.002.233.093 (2.630.902.682.026)
4	005	Mahkamah Agung Akumulasi Penyusutan	12.144.277.555.942 (2.790.831.910.747)	13.002.950.069.919 (2.740.932.628.627)	14.063.481.560.536 (3.069.697.940.717)	15.108.060.055.021 (3.326.182.355.776)	25.379.819.183.554 (2.988.429.953.749)	30.399.329.389.388 (3.052.017.658.816)	32.155.273.745.363 (3.638.198.422.690)	32.986.191.160.765 (4.199.424.669.542)	34.409.367.356.115 (4.864.155.108.060)
5	006	Kejaksaan Agung Akumulasi Penyusutan	8.567.620.030.462 (2.066.260.393.874)	8.890.482.064.738 (1.940.520.355.204)	9.802.604.298.078 (2.685.831.559.752)	9.723.350.060.838 (2.541.282.301.463)	22.680.062.787.361 (2.181.717.632.378)	25.197.610.049.290 (2.750.299.415.287)	29.216.612.150.473 (3.553.114.048.153)	29.966.421.225.981 (3.863.013.558.123)	43.136.403.423.765 (5.117.048.516.847)
6	007	Kementerian Sekretariat Negara Akumulasi Penyusutan	94.954.436.049.646 (3.174.217.831.021)	95.780.720.446.177 (2.908.066.104.374)	96.189.627.429.824 (3.159.209.016.339)	96.553.349.486.812 (3.762.863.004.092)	380.132.277.035.218 (3.518.393.753.353)	570.999.031.412.297 (2.873.955.872.943)	579.500.303.386.359 (3.267.585.959.383)	640.268.598.030.643 (3.874.103.298.635)	640.747.704.299.236 (4.765.987.869.276)
7	010	Kementerian Dalam Negeri Akumulasi Penyusutan	10.084.941.806.374 (2.077.523.191.960)	10.484.793.075.730 (2.445.500.987.053)	10.682.728.554.300 (2.911.607.069.343)	10.358.217.574.078 (4.118.637.476.525)	12.820.042.410.199 (3.921.807.948.330)	18.774.690.939.897 (3.997.012.889.555)	19.463.998.781.782 (4.154.166.937.592)	19.756.930.944.580 (4.215.007.418.894)	19.772.636.418.727 (4.334.870.737.487)
8	011	Kementerian Luar Negeri Akumulasi Penyusutan	17.482.703.459.690 (4.799.725.385.130)	17.701.510.276.782 (4.191.123.478.913)	17.917.882.028.472 (4.443.167.214.909)	19.775.570.324.798 (4.976.697.005.783)	23.815.565.969.418 (4.989.547.313.887)	49.464.620.375.616 (2.224.626.806.006)	50.837.469.605.432 (2.632.329.303.687)	51.441.347.938.691 (3.358.539.435.215)	52.655.695.028.665 (3.987.186.083.347)
9	012	Kementerian Pertahanan Akumulasi Penyusutan	458.427.918.705.751 (73.117.028.651.346)	503.835.884.458.396 (86.562.978.649.900)	540.635.121.049.338 (88.293.608.546.221)	585.522.440.304.308 (102.538.789.770.129)	939.658.819.112.847 (113.058.127.216.307)	1.860.134.950.512.490 (127.133.759.802.133)	1.874.128.380.746.560 (149.839.539.116.308)	1.923.401.984.224.420 (173.920.201.848.635)	1.973.183.610.655.870 (222.952.556.194.488)
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Akumulasi Penyusutan	23.476.921.024.800 (3.966.338.804.201)	24.881.202.206.037 (3.658.587.109.680)	26.536.240.667.740 (4.262.937.565.554)	28.775.946.321.849 (5.491.263.940.295)	56.082.959.447.027 (5.196.099.132.543)	66.220.112.058.773 (5.757.500.831.773)	75.681.547.337.237 (6.991.616.431.142)	76.506.329.147.949 (8.356.325.149.596)	78.293.136.452.592 (10.045.663.955.384)
11	015	Kementerian Keuangan Akumulasi Penyusutan	42.912.989.105.112 (10.449.826.422.089)	44.317.687.943.406 (10.352.750.213.435)	48.135.745.109.619 (11.949.698.927.159)	49.368.161.431.162 (14.093.594.100.215)	123.156.992.951.883 (12.510.852.253.942)	124.550.495.967.191 (14.151.043.772.230)	130.595.638.899.629 (15.193.431.291.495)	130.377.680.277.435 (16.127.275.282.847)	131.989.765.815.129 (17.356.686.968.152)
12	018	Kementerian Pertanian Akumulasi Penyusutan	21.889.536.883.854 (3.846.166.713.986)	22.310.205.699.266 (4.132.704.748.195)	24.374.963.908.547 (4.701.630.456.129)	23.546.151.533.337 (5.215.241.660.329)	59.352.830.402.028 (5.202.193.602.964)	95.472.727.434.007 (5.474.655.088.972)	94.469.040.588.440 (6.182.189.343.574)	87.488.992.311.698 (6.211.558.061.569)	87.307.166.065.985 (6.797.400.916.481)
13	019	Kementerian Perindustrian Akumulasi Penyusutan	6.380.551.848.300 (1.816.930.028.955)	7.035.567.827.132 (2.028.524.351.007)	8.435.398.930.605 (2.381.996.068.809)	8.356.614.851.718 (2.719.480.380.963)	14.542.637.722.422 (2.587.293.015.654)	14.786.268.103.135 (2.983.663.985.436)	15.707.809.502.046 (3.337.206.877.656)	15.779.129.217.341 (3.608.667.591.500)	15.779.129.217.341 (3.683.127.347.576)
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Akumulasi Penyusutan	26.807.442.268.783 (3.292.006.318.927)	20.846.304.488.338 (3.666.733.974.175)	22.338.475.072.653 (4.319.185.401.344)	22.051.529.158.075 (5.175.454.577.792)	26.756.864.791.830 (5.267.264.203.835)	30.683.691.955.986 (5.010.595.395.226)	32.747.778.932.536 (5.936.093.170.913)	33.047.371.340.473 (6.075.837.753.421)	33.379.224.539.396 (6.704.321.607.264)
15	022	Kementerian Perhubungan Akumulasi Penyusutan	191.814.718.989.849 (44.332.792.094.945)	212.458.240.780.125 (49.503.838.997.861)	244.696.413.585.163 (53.678.698.854.417)	262.147.098.387.479 (59.386.818.377.784)	385.088.438.760.349 (63.828.192.321.246)	577.205.004.302.091 (62.271.994.938.302)	590.093.753.745.816 (79.044.072.298.742)	613.422.804.826.044 (97.325.980.161.618)	630.216.753.505.295 (119.467.865.642.423)
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Akumulasi Penyusutan	126.241.701.988.028 (19.159.457.299.174)	134.068.243.731.774 (20.075.904.199.576)	25.278.859.787.390 (3.060.616.469.715)	13.444.293.342.287 (4.027.803.461.601)	28.786.976.059.072 (3.027.729.097.921)	31.178.743.870.233 (3.527.800.471.299)	29.655.843.790.284 (3.912.955.023.572)	451.816.636.640.926 (29.948.091.162.559)	459.093.416.955.637 (34.073.149.046.981)
17	024	Kementerian Kesehatan Akumulasi Penyusutan	61.159.366.387.678 (20.248.018.486.333)	64.922.961.229.448 (23.623.253.069.258)	71.582.386.040.118 (27.976.217.307.802)	76.952.978.889.208 (31.704.680.398.556)	124.653.558.613.616 (32.916.674.267.090)	133.657.346.312.224 (33.655.116.445.763)	140.455.247.276.721 (33.834.611.519.011)	142.867.940.574.665 (34.216.590.671.445)	155.950.988.197.702 (34.362.943.124.525)
18	025	Kementerian Agama Akumulasi Penyusutan	35.406.564.468.138 (7.397.577.484.227)	42.115.797.984.579 (7.122.430.987.604)	46.190.238.221.248 (8.280.365.262.160)	49.086.393.121.309 (9.429.629.227.509)	87.483.700.624.812 (9.214.715.744.736)	105.144.891.209.053 (8.736.791.987.870)	109.707.613.322.479 (10.493.327.698.870)	122.903.062.854.358 (12.473.031.098.761)	128.873.194.719.683 (14.392.351.630.482)
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan (d.h. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Akumulasi Penyusutan	8.473.634.113.897 (1.932.298.175.578)	9.351.590.289.082 (2.246.341.769.620)	5.840.347.348.831 (1.667.018.280.353)	5.851.685.382.428 (1.984.877.706.365)	10.067.588.237.566 (1.995.161.846.198)	13.168.972.579.645 (2.166.071.462.780)	13.614.969.088.823 (2.421.122.884.225)	14.260.010.254.940 (2.745.373.010.592)	14.339.303.900.663 (3.127.709.391.658)
20	027	Kementerian Sosial	5.755.875.471.645	5.773.650.895.020	7.193.556.001.468	7.450.458.203.911	22.499.049.518.529	22.477.785.626.195	22.953.620.680.718	23.503.316.652.473	23.972.811.507.639



IKHTISAR NO. 06
PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
21	029	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(993.260.032.098)	(1.014.035.506.790)	(1.206.160.449.671)	(1.473.931.642.411)	(1.424.003.154.829)	(1.658.400.509.784)	(1.891.046.037.520)	(2.139.296.847.413)	(2.393.952.149.034)
		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d.h. Kementerian Kehutanan)	6.639.553.473.280	7.033.520.648.891	8.204.687.779.716	8.445.815.788.012	16.078.862.772.790	19.527.555.331.689	20.766.157.006.780	20.793.380.769.690	20.985.503.044.894
22	032	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.808.242.036.560)	(1.927.615.337.128)	(2.502.789.342.332)	(2.899.463.292.587)	(2.955.588.580.515)	(3.166.079.892.988)	(3.548.138.414.220)	(3.913.089.082.505)	(4.164.894.156.641)
		Kementerian Kelautan dan Perikanan	11.607.702.792.009	12.391.862.725.886	15.390.633.340.669	15.773.255.557.649	22.331.285.358.230	28.509.289.205.709	31.720.188.314.065	32.599.650.442.313	32.598.315.044.181
23	033	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(3.313.922.043.881)	(3.679.769.812.932)	(4.273.180.258.709)	(4.902.048.549.471)	(5.080.437.152.766)	(5.043.352.183.666)	(5.865.496.305.567)	(6.898.733.560.488)	(7.662.552.421.096)
		Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (d.h. Kementerian Pekerjaan Umum)	815.282.994.086.351	873.572.777.265.291	983.103.394.148.541	1.038.032.562.158.820	1.437.108.411.455.420	2.102.346.899.273.890	2.080.256.722.628.750	2.217.884.780.622.890	2.330.523.778.485.210
24	034	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(136.043.663.938.799)	(137.511.522.860.562)	(172.489.465.555.889)	(211.799.757.221.873)	(164.975.395.743.795)	(188.371.532.505.600)	(204.491.549.112.553)	(280.151.542.175.348)	(370.633.380.736.807)
		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan	848.153.856.382	886.064.425.435	1.256.456.599.239	1.274.760.452.189	173.976.224.130	178.450.753.194	181.203.448.470	181.450.941.754	195.029.886.114
25	035	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(290.070.122.118)	(345.242.585.132)	(429.470.074.295)	(594.718.276.799)	(95.647.622.628)	(106.408.507.919)	(115.771.450.416)	(117.683.285.453)	(112.482.493.462)
		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	75.021.077.029	74.486.911.046	77.567.066.940	79.485.525.367	103.965.454.618	112.933.535.741	120.032.263.235	108.787.963.020	109.093.205.933
26	036	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(39.991.856.739)	(43.874.888.466)	(49.720.057.351)	(48.900.719.753)	(50.232.060.262)	(59.748.950.391)	(70.644.222.604)	(82.451.622.156)	(84.981.425.317)
		Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (d.h. Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat)	237.831.164.548	225.235.609.085	242.304.794.040	248.572.817.386	237.319.568.176	234.340.717.027	235.368.756.263	245.508.689.632	258.790.913.297
27	040	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(32.107.296.297)	(41.473.733.434)	(52.912.892.031)	(67.194.096.264)	(59.659.675.105)	(63.635.624.983)	(71.756.738.068)	(81.902.829.045)	(90.790.269.401)
		Kementerian Pariwisata	3.030.489.653.068	2.960.678.432.260	3.082.457.468.091	3.047.140.710.451	8.088.016.336.841	9.160.120.483.690	9.864.600.625.926	10.420.602.759.856	11.518.729.786.436
28	041	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(379.501.182.009)	(344.967.522.410)	(400.004.777.112)	(506.734.020.169)	(361.010.469.515)	(435.345.462.546)	(532.150.095.611)	(684.723.851.914)	(850.305.192.303)
		Kementerian Badan Usaha Milik Negara	574.757.353.491	582.628.897.530	605.565.562.814	610.280.476.886	1.740.651.286.339	1.843.516.182.875	2.000.987.697.440	2.129.843.496.934	2.107.860.082.478
29	042	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(107.526.937.767)	(104.339.478.487)	(117.183.618.306)	(135.040.025.323)	(105.266.724.091)	(122.323.507.264)	(138.634.875.113)	(161.478.231.707)	(141.062.503.026)
		Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (d.h. Kementerian Riset dan Teknologi)	3.048.339.116.409	3.097.531.976.126	114.408.926.013.930	119.852.664.789.601	306.348.242.428.933	409.210.943.702.451	426.774.450.828.161	14.122.218.807.256	14.270.293.463.478
30	043	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(500.049.121.730)	(473.049.744.599)	(17.066.958.514.438)	(20.666.681.654.064)	(17.853.545.585.233)	(20.276.558.634.292)	(23.113.685.577.471)	(878.094.642.169)	(1.048.383.996.403)
		Kementerian Lingkungan Hidup	463.840.717.406	481.013.932.069	-	-	-	-	-	-	-
31	044	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(233.019.633.253)	(241.861.701.648)	-	-	-	-	-	-	-
		Kementerian Koperasi dan UKM	2.284.019.134.322	2.408.247.476.222	2.351.757.919.162	2.475.714.630.414	4.828.027.754.327	4.743.801.153.774	4.736.197.289.731	4.668.234.721.532	4.656.482.783.962
32	047	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(325.004.241.059)	(363.288.449.308)	(414.035.806.355)	(496.383.542.101)	(414.337.256.570)	(457.793.337.962)	(498.532.999.883)	(519.876.267.547)	(567.662.890.354)
		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan	94.805.897.272	171.641.920.346	177.710.635.630	246.373.007.871	253.000.272.104	243.425.465.182	300.252.715.405	297.456.456.831	296.835.159.051
33	048	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(27.789.882.583)	(30.459.944.841)	(42.338.364.528)	(60.144.339.835)	(68.141.050.736)	(89.905.458.925)	(109.826.663.296)	(118.363.518.287)	(123.038.732.363)
		Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	103.644.018.308	102.395.759.667	114.600.269.793	125.175.932.670	157.405.640.805	179.921.079.234	193.843.212.808	247.202.517.180	254.852.986.005
34	050	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(48.362.392.509)	(52.003.582.333)	(56.944.851.478)	(64.488.209.889)	(65.775.541.893)	(77.543.917.856)	(89.711.560.238)	(102.808.160.101)	(116.516.763.472)
		Badan Intelijen Negara	4.459.762.327.691	5.082.245.335.696	5.880.582.349.839	6.650.131.394.901	16.647.085.129.671	19.732.336.645.315	22.006.294.029.461	24.545.482.484.540	28.401.542.456.565
35	051	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.802.262.181.912)	(2.026.876.694.338)	(2.415.174.977.116)	(3.331.316.285.458)	(4.508.838.705.837)	(6.251.865.434.436)	(8.248.116.059.891)	(10.475.884.018.291)	(14.525.933.495.900)
		Lembaga Sandi Negara	7.506.785.020.724	8.358.799.996.333	9.568.234.398.285	10.818.496.408.623	8.932.721.044.996	9.474.641.748.179	11.578.362.847.683	12.256.662.864.489	12.820.432.923.148
36	052	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(4.457.411.849.667)	(5.167.826.186.520)	(6.066.582.455.709)	(7.363.964.541.642)	(5.011.712.110.209)	(5.804.511.071.616)	(6.818.802.885.599)	(7.814.260.510.413)	(8.331.185.270.287)
		Dewan Ketahanan Nasional	26.063.429.898	25.509.986.037	121.214.572.949	200.032.549.634	287.787.446.171	287.318.153.246	280.352.182.849	280.513.137.349	281.217.926.349
37	054	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(16.107.996.189)	(17.047.587.693)	(26.329.415.536)	(57.690.339.324)	(104.009.245.274)	(161.177.441.585)	(205.388.365.981)	(242.114.679.942)	(260.959.257.980)
		Badan Pusat Statistik	3.649.879.825.554	4.120.671.397.585	4.924.140.931.394	4.956.491.126.283	7.132.106.826.511	7.508.502.363.097	8.149.945.328.420	8.222.327.897.121	7.961.444.022.646
38	055	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(986.908.747.722)	(1.037.266.925.723)	(1.276.701.803.065)	(1.888.551.688.733)	(1.864.004.290.165)	(2.143.157.123.325)	(2.389.089.838.849)	(2.680.047.094.004)	(2.554.477.956.078)
		Kementerian Koperasi dan UKM	103.644.018.308	102.395.759.667	114.600.269.793	125.175.932.670	157.405.640.805	179.921.079.234	193.843.212.808	247.202.517.180	254.852.986.005



IKHTISAR NO. 06
PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
38	055	Kementerian PPN/Bappenas <i>Akumulasi Penyusutan</i>	602.952.854.057 (130.934.691.903)	639.756.905.940 (126.407.322.058)	707.434.008.724 (149.108.720.615)	759.642.897.625 (207.289.954.324)	2.876.496.554.710 (204.163.417.665)	3.468.759.771.303 (273.396.523.263)	2.886.981.384.460 (301.926.838.037)	2.984.371.640.637 (366.190.012.338)	3.032.656.080.013 (436.423.911.160)
39	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang (d.h. Badan Pertanahan Nasional) <i>Akumulasi Penyusutan</i>	5.292.470.772.597 (1.218.595.793.757)	5.806.316.224.552 (1.316.740.304.689)	6.529.018.317.888 (1.529.164.382.789)	7.383.928.085.279 (1.847.778.878.847)	14.545.689.314.648 (1.941.760.393.054)	15.817.180.272.048 (2.229.117.601.522)	16.880.752.565.255 (2.585.358.286.673)	17.307.345.486.982 (2.983.885.283.525)	17.906.444.129.305 (3.356.753.488.691)
40	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia <i>Akumulasi Penyusutan</i>	1.013.207.710.877 (222.368.579.840)	1.078.001.042.459 (201.330.096.577)	1.310.293.043.906 (213.812.259.136)	1.683.684.046.492 (261.596.403.140)	3.409.282.584.132 (284.568.210.091)	3.523.314.983.073 (323.513.081.504)	3.724.564.130.108 (425.738.546.891)	3.781.455.638.188 (554.325.525.518)	3.924.257.892.561 (673.646.017.033)
41	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika <i>Akumulasi Penyusutan</i>	3.767.945.626.821 (1.252.017.987.644)	3.716.805.807.607 (1.171.580.747.967)	4.426.246.021.878 (1.247.299.772.174)	4.758.360.551.640 (1.659.110.310.186)	8.767.257.897.490 (1.626.390.252.398)	8.441.721.171.411 (1.787.856.864.670)	8.874.396.404.950 (1.939.023.049.232)	8.958.875.092.827 (2.049.117.716.480)	18.321.995.738.947 (2.403.636.332.249)
42	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>Akumulasi Penyusutan</i>	90.849.475.293.047 (21.642.211.778.465)	94.572.909.914.775 (23.821.346.840.774)	104.411.665.269.020 (28.318.092.388.556)	125.990.068.694.815 (35.792.969.971.751)	304.280.483.843.173 (43.983.568.328.644)	355.862.991.063.421 (59.540.950.050.213)	382.868.555.755.938 (77.973.608.482.210)	408.396.640.942.487 (98.810.903.333.302)	435.590.268.343.493 (123.569.180.663.688)
43	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan <i>Akumulasi Penyusutan</i>	2.611.306.751.391 (741.025.363.560)	2.645.931.151.055 (867.405.626.854)	2.869.148.708.916 (1.032.814.597.562)	3.199.360.377.367 (1.246.940.807.234)	4.369.903.452.090 (1.309.718.929.783)	4.932.668.130.243 (1.551.434.404.135)	5.416.258.813.132 (1.809.923.626.611)	5.630.157.625.113 (2.038.741.348.642)	5.871.167.451.111 (2.223.835.508.457)
44	064	Lembaga Ketahanan Nasional <i>Akumulasi Penyusutan</i>	563.578.815.690 (101.112.074.510)	642.274.876.748 (132.451.469.297)	816.717.191.651 (161.718.536.311)	832.167.100.353 (362.509.603.384)	2.277.426.051.228 (405.240.840.561)	2.375.875.318.363 (467.274.366.809)	2.285.352.666.729 (512.499.240.799)	2.306.689.600.994 (559.591.828.637)	2.302.983.843.181 (618.896.877.502)
45	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal <i>Akumulasi Penyusutan</i>	893.548.578.019 (202.215.265.800)	881.901.960.561 (180.757.630.156)	923.401.251.379 (209.254.041.636)	875.765.253.791 (209.254.041.636)	2.584.540.665.863 (286.029.547.871)	2.591.986.102.059 (322.154.575.785)	2.607.998.401.174 (354.941.388.255)	2.631.109.915.694 (406.258.176.122)	2.702.513.481.567 (411.893.637.606)
46	066	Badan Narkotika Nasional <i>Akumulasi Penyusutan</i>	1.650.052.490.960 (414.301.977.131)	1.693.520.816.682 (517.548.633.978)	1.844.053.376.343 (620.479.994.017)	2.530.433.782.362 (875.983.834.793)	3.048.512.358.898 (1.013.022.776.993)	3.567.538.683.356 (1.294.184.761.654)	3.770.385.108.174 (1.582.997.293.529)	4.034.666.302.533 (1.898.544.032.841)	4.113.893.637.606 (2.158.331.885.845)
47	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (d.h. Kementerian <i>Akumulasi Penyusutan</i>)	688.224.821.483 (37.153.871.573)	1.457.552.338.475 (39.465.869.555)	8.997.596.464.507 (1.157.675.104.549)	9.026.905.106.855 (1.781.143.686.256)	5.300.788.385.812 (1.441.939.018.863)	5.017.556.460.935 (1.350.267.125.051)	4.916.610.337.365 (1.467.277.866.785)	4.213.391.950.443 (1.454.845.582.690)	4.326.858.944.246 (1.555.740.531.367)
48	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional <i>Akumulasi Penyusutan</i>	1.585.317.983.484 (375.253.941.865)	1.522.509.453.756 (352.797.832.281)	1.777.416.728.117 (394.892.685.698)	2.202.456.241.161 (453.676.670.267)	3.698.104.866.057 (394.043.625.048)	3.762.610.119.294 (453.822.594.614)	3.784.671.581.855 (505.123.406.416)	3.714.408.937.692 (561.354.025.056)	3.537.014.709.448 (609.471.254.241)
49	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia <i>Akumulasi Penyusutan</i>	43.360.006.049 (13.321.984.366)	45.000.019.539 (15.091.622.529)	40.108.217.087 (17.636.272.022)	42.602.569.995 (22.831.394.508)	45.403.904.329 (24.524.531.151)	47.111.348.343 (26.822.506.534)	44.343.632.337 (25.902.775.695)	46.088.042.792 (26.203.832.401)	49.761.195.852 (29.332.326.880)
50	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika <i>Akumulasi Penyusutan</i>	4.701.898.550.409 (1.512.846.933.539)	5.167.276.752.660 (1.741.724.491.062)	5.839.215.010.866 (2.143.856.927.892)	6.083.930.845.462 (2.823.743.588.920)	8.574.412.249.302 (3.156.577.523.354)	9.524.656.747.097 (3.697.022.249.915)	10.633.054.334.251 (4.189.172.111.171)	11.288.928.549.398 (4.690.504.340.850)	12.189.943.738.961 (5.214.424.108.130)
51	076	Komisi Pemilihan Umum <i>Akumulasi Penyusutan</i>	1.627.121.426.375 (409.580.046.976)	1.589.165.139.864 (493.947.504.459)	1.667.380.594.546 (575.677.604.593)	1.716.015.099.118 (655.073.798.482)	2.828.040.495.224 (694.809.179.315)	4.058.927.621.156 (822.615.464.900)	3.353.587.946.359 (1.009.785.694.893)	3.552.751.712.850 (1.224.989.108.020)	3.558.363.354.985 (1.410.928.355.311)
52	077	Mahkamah Konstitusi <i>Akumulasi Penyusutan</i>	594.792.114.652 (205.744.403.682)	608.119.146.877 (222.899.994.369)	647.959.412.202 (241.841.348.454)	671.645.079.656 (275.077.247.074)	962.517.619.611 (249.261.324.062)	992.149.438.270 (271.351.465.304)	1.131.810.308.053 (301.806.689.569)	1.186.697.192.130 (328.503.292.933)	1.199.426.299.086 (350.233.953.572)
53	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan <i>Akumulasi Penyusutan</i>	218.986.752.103 (51.464.253.683)	240.073.555.932 (59.795.390.459)	247.744.731.779 (68.215.533.397)	357.573.915.982 (94.312.882.496)	678.229.956.285 (97.368.912.604)	687.771.965.715 (114.932.825.060)	648.767.548.126 (140.098.378.151)	692.149.490.479 (170.500.657.692)	691.114.257.074 (192.789.953.356)
54	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia <i>Akumulasi Penyusutan</i>	8.183.149.469.475 (851.019.614.378)	8.688.510.328.818 (880.965.576.248)	8.917.901.065.545 (1.025.831.221.160)	9.312.898.854.179 (1.161.372.988.412)	32.052.852.756.534 (1.160.660.141.513)	33.389.098.792.877 (1.341.077.786.885)	33.677.002.927.383 (1.353.285.571.135)	34.175.199.678.985 (1.582.035.500.155)	41.177.462.487.618 (1.755.801.098.525)
55	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional <i>Akumulasi Penyusutan</i>	3.153.467.148.545 (542.120.873.648)	3.199.849.530.654 (556.002.786.178)	3.403.105.597.133 (634.857.101.316)	3.517.312.477.315 (716.852.203.840)	15.708.551.924.967 (628.431.514.745)	15.971.776.773.594 (783.485.895.284)	15.960.397.598.538 (1.004.107.510.483)	16.018.407.365.789 (1.199.763.684.109)	16.049.020.759.109 (1.391.498.625.278)
56	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi <i>Akumulasi Penyusutan</i>	3.616.554.842.173 (1.150.403.953.630)	3.722.831.042.748 (1.230.383.224.711)	4.002.662.894.964 (1.451.241.840.400)	4.095.199.565.449 (1.783.753.164.578)	8.541.979.036.655 (1.892.590.480.643)	8.785.643.967.470 (2.216.109.029.304)	9.672.195.877.433 (2.517.778.117.773)	10.056.173.518.667 (2.806.350.359.341)	10.315.845.029.313 (3.168.336.485.778)



IKHTISAR NO. 06
PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
57	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.336.923.653.403	1.606.602.418.235	1.945.367.131.834	2.223.939.416.129	4.132.245.528.459	4.607.327.806.818	4.918.782.074.232	5.173.103.730.377	5.355.314.285.096
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(418.118.822.850)	(460.509.722.269)	(508.353.228.711)	(670.358.752.847)	(740.534.408.958)	(963.018.784.006)	(1.133.590.885.714)	(1.362.482.785.140)	(1.601.679.850.903)
58	083	Badan Informasi Geospasial	1.686.008.179.969	2.286.849.404.932	2.660.107.711.015	3.031.409.032.918	3.697.974.601.874	4.116.283.199.141	4.493.326.362.561	4.623.495.381.478	4.792.561.219.656
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(279.639.194.931)	(287.524.076.899)	(476.242.416.412)	(738.470.010.440)	(836.967.127.346)	(2.313.105.497.251)	(2.714.235.395.112)	(3.126.310.661.809)	(3.515.079.160.902)
59	084	Badan Standarisasi Nasional	32.577.682.767	36.206.481.713	53.337.813.864	56.041.550.961	64.022.795.366	103.574.607.607	354.641.779.362	449.019.345.210	483.586.225.266
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(18.694.294.953)	(21.411.491.588)	(22.090.496.166)	(28.693.670.512)	(32.951.710.778)	(39.599.318.952)	(215.365.932.751)	(233.727.668.663)	(257.460.790.817)
60	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	135.223.786.227	137.138.966.578	145.002.240.951	148.458.525.629	225.353.766.405	272.293.573.114	305.880.111.106	301.522.933.148	309.197.255.958
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(46.353.948.629)	(58.207.162.645)	(67.117.888.271)	(69.365.186.234)	(75.457.691.379)	(85.278.945.537)	(104.536.040.752)	(119.795.655.629)	(136.567.581.347)
61	086	Lembaga Administrasi Negara	1.094.279.323.467	1.116.288.674.922	1.140.746.904.633	1.155.561.018.633	4.686.178.058.161	4.700.497.372.321	3.916.254.823.564	3.949.519.003.935	3.994.800.041.689
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(194.403.587.197)	(181.519.856.488)	(201.290.414.881)	(224.289.867.545)	(162.553.237.090)	(192.602.573.306)	(217.163.697.623)	(250.515.537.354)	(286.467.386.475)
62	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	615.120.887.079	608.007.245.778	631.744.200.668	634.725.409.113	1.371.527.287.896	1.393.106.934.044	1.501.842.553.687	1.509.905.138.134	1.562.603.911.958
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(201.615.782.470)	(170.869.862.443)	(187.001.815.193)	(212.002.389.801)	(216.154.478.181)	(214.502.379.648)	(255.211.456.855)	(291.376.915.468)	(325.954.199.846)
63	088	Badan Kepegawaian Negara	1.493.803.535.770	1.541.270.605.287	1.648.207.854.899	1.722.321.018.855	3.991.605.216.755	4.132.204.607.112	4.187.534.478.904	3.950.769.706.634	4.014.796.075.085
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(371.437.315.688)	(342.317.309.642)	(393.752.039.712)	(608.696.705.182)	(655.951.529.680)	(713.174.131.177)	(783.351.421.951)	(844.613.486.711)	(844.613.486.711)
64	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.034.046.024.814	2.082.884.505.387	2.253.823.336.623	2.316.262.549.423	5.491.969.953.087	5.555.702.421.817	5.683.002.813.335	5.802.840.805.664	5.956.364.575.138
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(433.377.613.906)	(339.669.831.400)	(378.948.410.701)	(438.235.111.615)	(319.921.210.603)	(392.208.122.696)	(476.030.106.537)	(555.808.948.846)	(639.848.319.461)
65	090	Kementerian Perdagangan	4.840.104.087.440	5.076.182.192.573	5.938.672.672.230	6.638.853.055.038	7.121.894.190.350	8.241.090.198.605	8.077.331.881.373	7.634.858.983.207	6.703.836.277.745
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(763.470.132.133)	(874.532.264.567)	(942.695.795.970)	(1.138.961.511.419)	(945.000.968.821)	(837.049.527.138)	(939.095.009.408)	(1.018.549.219.069)	(1.117.457.988.840)
66	091	Kementerian Perumahan Rakyat	6.967.357.655.511	8.475.729.385.706	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(259.395.055.245)	(344.143.502.910)	-	-	-	-	-	-	-
67	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.899.050.924.366	1.981.228.684.618	2.154.255.898.054	2.203.656.662.847	2.771.273.227.543	3.518.074.442.884	3.002.706.528.284	2.723.287.806.005	2.679.185.018.474
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(324.935.701.586)	(406.605.563.765)	(473.649.786.218)	(518.901.816.727)	(499.601.894.585)	(581.132.319.466)	(573.186.560.231)	(563.625.924.831)	(613.094.102.425)
68	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	579.483.065.344	701.853.927.661	1.617.981.211.871	1.971.278.731.162	3.656.044.346.828	4.094.655.995.728	4.219.171.147.187	4.131.380.058.424	4.064.968.450.996
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(182.103.122.707)	(207.777.943.474)	(250.693.460.126)	(319.836.367.128)	(373.132.863.422)	(471.423.912.072)	(575.106.872.135)	(679.018.231.807)	(767.324.183.539)
69	094	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Nias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	156.053.334.656	186.672.382.009	295.268.122.876	312.546.020.410	402.860.661.940	422.185.071.006	451.320.454.532	426.237.253.646	423.882.079.540
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(74.921.735.619)	(86.539.655.971)	(100.232.608.628)	(118.794.445.948)	(128.351.586.064)	(132.706.288.399)	(140.070.094.547)	(140.474.134.693)	(148.285.205.654)
71	100	Komisi Yudisial	160.601.570.478	162.605.077.847	170.956.055.712	173.274.931.703	376.365.830.984	380.669.739.650	429.853.054.549	429.818.391.871	431.022.966.227
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(36.150.799.614)	(41.794.497.331)	(46.438.083.830)	(52.758.050.530)	(47.071.411.830)	(52.646.430.863)	(58.444.931.643)	(62.033.268.900)	(65.879.789.382)
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.152.319.064.433	3.065.498.755.389	3.846.651.612.284	2.873.173.931.434	2.666.685.376.167	2.540.162.012.622	2.455.875.301.643	3.937.961.696.499	3.202.078.282.434
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(553.059.849.512)	(906.719.856.438)	(1.336.849.071.661)	(1.030.817.549.801)	(1.017.529.268.065)	(1.163.693.654.942)	(1.319.690.394.257)	(1.433.586.608.525)	(1.644.928.654.508)
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	261.618.296.578	290.818.029.531	310.480.504.125	325.132.569.123	586.324.401.620	591.311.822.351	592.281.461.681	549.651.344.603	550.172.462.660
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(66.618.146.631)	(87.463.352.749)	(107.869.558.403)	(136.825.089.684)	(180.217.608.733)	(179.878.377.461)	(184.360.200.142)	(194.821.980.893)	(200.376.084.060)
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	4.577.291.037.957	4.748.452.523.165	4.850.994.579.904	4.203.142.617.442	4.295.081.738.943	-	-	-	-
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(159.370.434.724)	(204.154.737.495)	(281.893.268.236)	(155.222.794.652)	(215.259.766.661)	-	-	-	-
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	218.891.489.580	314.572.320.641	481.182.098.299	489.097.726.183	725.921.556.391	747.248.473.719	908.548.225.118	944.016.904.748	987.222.008.468
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(30.279.564.671)	(36.040.355.970)	(44.267.740.756)	(82.437.115.213)	(112.580.519.801)	(155.095.357.359)	(234.616.992.631)	(307.064.916.995)	(363.409.803.616)
76	107	Badan SAR Nasional	3.952.744.107.382	5.079.829.321.298	6.733.518.833.138	8.088.474.441.498	10.288.564.501.669	11.384.112.282.069	12.150.565.115.351	12.654.413.711.890	13.187.376.859.197



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 06
PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.065.342.603.901)	(1.605.765.547.641)	(2.302.488.590.546)	(3.123.883.180.244)	(3.929.204.974.368)	(4.872.991.898.476)	(5.786.569.060.245)	(6.664.218.327.083)	(7.478.887.003.751)
77	108	Komis Pengawas Persaingan Usaha	33.594.679.849	33.739.882.298	30.111.842.447	30.297.607.704	28.824.854.768	33.486.861.347	35.435.684.149	39.773.077.651	47.148.434.776
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(17.128.125.622)	(18.175.164.558)	(20.814.157.551)	(19.755.410.368)	(19.501.668.752)	(20.992.354.373)	(22.560.661.224)	(25.288.013.363)	(26.751.639.667)
78	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	147.927.558.903	362.939.453.605	599.785.994.873	706.310.928.603	1.021.664.301.680	1.063.418.031.484	1.203.662.875.068	1.231.870.010.140	-
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(11.006.234.031)	(17.404.041.657)	(23.677.109.889)	(32.066.234.532)	(27.721.829.215)	(37.640.824.029)	(49.006.210.884)	(63.764.039.153)	-
79	110	Ombudsman Republik Indonesia	24.076.146.681	33.065.970.185	37.355.423.641	47.279.080.300	53.378.418.407	73.920.262.248	77.835.759.556	103.727.880.925	116.460.026.539
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(9.276.757.666)	(13.603.015.793)	(17.990.614.682)	(23.184.539.323)	(28.428.588.418)	(31.106.848.372)	(34.397.165.576)	(38.429.734.631)	(44.953.073.897)
80	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	354.576.463.611	385.443.573.999	457.639.668.784	451.627.024.797	436.403.629.412	445.152.825.402	1.519.537.988.087	2.617.867.509.264	2.545.381.497.474
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(42.077.293.151)	(68.548.672.581)	(99.606.484.468)	(106.629.693.223)	(112.194.952.994)	(99.952.065.009)	(205.810.769.659)	(344.187.561.708)	(491.065.009.456)
81	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	15.081.505.636.208	29.456.699.343.437	31.167.980.550.650	31.544.490.568.561	55.845.019.588.422	55.170.011.154.645	56.840.164.622.420	59.520.145.740.463	60.510.487.807.502
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(4.852.267.317.344)	(3.858.687.796.618)	(4.200.551.871.084)	(4.518.338.420.513)	(2.616.094.054.216)	(3.625.368.279.833)	(4.550.789.752.020)	(6.163.387.134.168)	(6.889.934.257.287)
82	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	178.074.434.276	192.399.718.551	199.901.928.634	531.468.472.419	700.439.665.380	789.441.972.073	925.143.662.457	932.266.083.220	1.649.207.098.291
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(12.287.924.140)	(24.211.399.486)	(35.263.038.730)	(67.191.586.158)	(115.077.214.713)	(199.279.326.019)	(283.677.899.898)	(430.912.826.042)	(574.271.175.506)
83	114	Sekretariat Kabinet	59.055.078.988	60.230.965.984	62.831.086.222	61.427.675.325	66.692.539.392	67.699.238.006	90.258.345.912	62.711.028.884	80.867.530.162
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(30.631.240.201)	(37.527.961.151)	(42.183.690.877)	(48.574.636.949)	(51.051.694.083)	(52.335.964.035)	(55.929.775.933)	(46.151.085.630)	(48.450.335.594)
84	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	89.881.455.401	130.887.209.955	145.168.663.955	164.541.932.925	214.523.452.289	399.405.349.551	566.073.536.656	690.240.343.624	671.846.556.603
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(15.717.103.835)	(35.585.901.304)	(56.517.159.054)	(85.298.147.304)	(112.376.373.192)	(156.676.869.607)	(224.416.273.110)	(304.112.958.425)	(366.371.234.958)
85	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	4.677.909.591.738	4.703.371.344.794	4.746.351.021.584	4.773.440.599.375	14.336.753.332.281	14.446.726.806.551	14.889.479.972.945	15.132.729.197.048	15.571.292.708.667
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.126.552.401.469)	(1.123.494.524.181)	(1.125.102.763.940)	(1.243.601.888.748)	(1.198.326.811.793)	(1.277.533.913.852)	(1.347.153.384.101)	(1.461.311.984.766)	(1.545.842.127.604)
86	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.745.841.114.663	5.102.526.028.099	5.229.074.697.311	5.472.100.336.514	14.704.996.365.949	15.662.223.364.392	15.478.975.358.246	15.762.934.178.175	15.972.569.962.774
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(1.215.132.821.272)	(1.301.399.062.018)	(1.406.201.315.883)	(1.516.428.598.608)	(1.454.171.464.559)	(1.723.593.329.371)	(2.011.397.442.712)	(2.266.041.031.844)	(2.609.276.842.705)
87	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2.274.661.415.471	2.546.910.083.126	2.713.612.838.155	2.810.200.667.667	2.878.908.393.644	4.227.567.967.318	3.714.145.619.684	3.717.652.777.301	3.765.479.594.844
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	(84.481.221.219)	(140.296.051.128)	(219.326.864.554)	(277.224.013.636)	(281.011.573.157)	(258.039.040.551)	(216.023.705.443)	(282.128.135.690)	(363.184.705.892)
88	119	Badan Keamanan Laut	-	-	-	458.473.923.857	2.057.505.912.605	2.394.870.281.993	2.535.388.019.742	2.755.840.055.564	2.968.878.936.092
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	-	-	-	(610.106.348.402)	(735.682.894.311)	(896.189.914.495)	(1.124.304.712.497)	(1.321.960.747.769)
89	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	-	40.500.531.919	114.361.958.047	149.247.050.651	181.887.445.270	194.793.425.866	136.645.588.439	183.667.621.288
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	-	(2.342.427.020)	(10.274.177.465)	(21.420.500.834)	(45.065.838.825)	(66.378.495.563)	(89.575.373.139)	(104.610.538.569)
90	121	Badan Ekonomi Kreatif	-	-	-	19.327.627.466	47.782.878.070	50.795.748.506	69.635.415.680	-	-
		<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-	-	-	(1.838.447.683)	(7.382.640.165)	(12.684.689.003)	(19.879.344.377)	-	-
91	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	-	-	-	-	-	-	36.895.430.392	51.435.055.292	53.266.271.703
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	-	-	-	-	(2.830.652.944)	(11.936.942.556)	(20.654.232.831)
92	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	-	-	-	-	-	-	-	225.341.347.331
		<i>Akumulasi Penyusutan/Amortisasi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	(49.391.036.166)
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan (1)			2.213.232.829.146.120	2.387.604.599.047.700	2.619.804.516.168.020	2.777.360.379.022.970	4.762.226.456.051.440	7.032.887.632.805.290	7.145.480.772.349.130	7.478.441.493.016.040	7.757.741.292.801.160
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan (1)			(401.888.117.014.738)	(430.875.240.653.201)	(494.717.602.884.744)	(589.649.733.495.199)	(558.646.211.239.402)	(624.111.861.001.450)	(721.848.890.476.327)	(885.769.747.376.325)	(1.100.231.943.956.390)
Sub Jumlah (1)			1.811.344.712.131.390	1.956.729.358.394.500	2.125.086.913.283.270	2.187.710.645.527.770	4.203.580.244.812.030	6.408.775.771.803.840	6.423.631.881.872.800	6.592.671.745.639.710	6.657.509.348.844.770
B	DAFTAR K/L YANG BELUM MEMILIKI BA DEFINITIF										

IKHTISAR NO. 06
**PERKEMBANGAN NILAI BARANG MILIK NEGARA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**
TAHUN ANGGARAN 2013 S.D. 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai BMN (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel)								
			31 Desember 2013 (Audited)	31 Desember 2014 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	31 Desember 2020 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	999.07	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	999.08	BUN Pengelola Belanja Lainnya	4.925.857.314.665	3.805.678.279.769	2.514.252.379.841	929.861.798.715	2.921.622.703.736	1.146.561.179.295	1.366.802.403.911	1.614.892.918.194	1.766.704.559.717
		Akumulasi Penyusutan	(24.157.565.619)	(80.722.908.337)	(158.002.087.912)	(288.390.934.185)	(364.406.008.045)	(465.850.730.152)	(568.783.700.646)	(696.548.460.014)	(880.248.279.559)
3	399	LPP TVRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	599	Lembaga Penyiaran Publik RRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	699	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan (2)			4.925.857.314.665	3.805.678.279.769	2.514.252.379.841	929.861.798.715	2.921.622.703.736	1.146.561.179.295	1.366.802.403.911	1.614.892.918.194	1.766.704.559.717
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan (2)			(24.157.565.619)	(80.722.908.337)	(158.002.087.912)	(288.390.934.185)	(364.406.008.045)	(465.850.730.152)	(568.783.700.646)	(696.548.460.014)	(880.248.279.559)
Sub Jumlah (2)			4.901.699.749.046	3.724.955.371.432	2.356.250.291.929	641.470.864.530	2.557.216.695.691	680.710.449.143	798.018.703.265	918.344.458.180	886.456.280.158
C	DAFTAR K/L YANG DIPERLAKUKAN SBG INV PERMAN										
1	499	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	199	Otorita Asahan	447.433.201	6.182.293.986	6.258.294.748	7.188.080.058	5.945.378.113	6.602.379.162	6.602.379.162	6.602.379.162	6.602.379.162
		Akumulasi Penyusutan	(331.392.480)	(282.384.192)	(351.042.118)	(292.775.715)	(1.740.824.214)	(1.938.802.862)	(2.136.781.509)	(2.334.760.156)	(2.532.738.803)
3	299	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Nilai Sebelum Penyusutan (3)			447.433.201	6.182.293.986	6.258.294.748	7.188.080.058	5.945.378.113	6.602.379.162	6.602.379.162	6.602.379.162	6.602.379.162
Sub Jumlah Akumulasi Penyusutan (3)			(331.392.480)	(282.384.192)	(351.042.118)	(292.775.715)	(1.740.824.214)	(1.938.802.862)	(2.136.781.509)	(2.334.760.156)	(2.532.738.803)
Sub Jumlah (3)			116.040.721	5.899.909.794	5.907.252.630	6.895.304.343	4.204.553.899	4.663.576.300	4.465.597.653	4.267.619.006	4.069.640.359
TOTAL NILAI BMN SEBELUM PENYUSUTAN			2.218.159.133.893.990	2.391.416.459.621.460	2.622.325.026.842.610	2.778.297.428.901.740	4.765.154.024.133.280	7.034.040.796.363.750	7.146.854.177.132.200	7.480.062.988.313.390	7.759.514.599.740.040
TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN			(401.912.605.972.837)	(430.956.245.945.730)	(494.875.956.014.774)	(589.938.417.205.099)	(559.012.358.071.661)	(624.579.650.534.464)	(722.419.810.958.482)	(886.468.630.596.495)	(1.101.114.724.974.750)
T O T A L			1.816.246.527.921.150	1.960.460.213.675.730	2.127.449.070.827.830	2.188.359.011.696.640	4.206.141.666.061.620	6.409.461.145.829.280	6.424.434.366.173.720	6.593.594.357.716.900	6.658.399.874.765.290



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No. 07
NILAI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud								Total
			Hak Cipta (162121)	Paten (162141)	Software (162151)	Lisensi (162161)	Hasil Kajian/Penelitian (162171)	Aset Tak Berwujud Lainnya (162191)	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (166113)	ATB Dalam Pengerjaan (162311)	
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF										
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	-	8.316.311.920	-	-	-	192.481.600	-	8.508.793.520
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	44.587.393.873	29.281.301.088	9.499.779.000	5.497.454.230	-	-	88.865.928.191
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	86.227.159.804	107.068.198.154	-	4.486.101.880	33.100.000	-	197.814.559.838
4	005	Mahkamah Agung	-	-	44.985.476.908	18.437.759.516	1.804.868.600	-	1.719.971.150	-	66.948.076.174
5	006	Kejaksaan Agung	-	-	339.257.298.652	-	-	-	412.246.341.822	-	751.503.640.474
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	-	-	57.489.135.771	3.596.359.581	525.000.000	2.104.954.000	-	-	63.715.449.352
7	010	Kementerian Dalam Negeri	-	-	756.313.203.584	2.472.651.811	4.116.484.400	4.044.744.850	36.131.374.039	-	803.078.458.684
8	011	Kementerian Luar Negeri	-	-	56.402.704.900	23.493.791.219	-	-	145.750.000	-	80.042.246.119
9	012	Kementerian Pertahanan	-	-	5.212.446.579.639	703.915.273.437	473.982.454.258	1.038.459.687.498	9.421.087.299	32.936.565.000	7.471.161.647.131
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	-	-	489.713.047.685	-	-	-	216.920.725.411	-	706.633.773.096
11	015	Kementerian Keuangan	-	-	1.134.346.597.952	750.212.195.250	2.892.445.250	1.711.708.070	5.735.851.641	247.522.467.334	2.142.421.265.497
12	018	Kementerian Pertanian	28.025.000	529.681.000	36.235.374.492	8.030.751.290	24.960.236.864	61.515.768.350	7.886.083.178	-	139.185.920.174
13	019	Kementerian Perindustrian	-	-	51.788.484.429	391.694.322	-	9.513.772.321	1.092.171.496	-	62.786.122.568
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	189.573.580.714	35.788.413.408	30.567.327.000	106.100.000	72.638.683.963	1.166.561.028	329.840.666.113
15	022	Kementerian Perhubungan	181.447.000	50.000.000	741.927.053.327	24.196.204.594	1.138.752.713.509	722.627.027.935	630.237.889.947	151.433.848.624	3.409.406.184.936
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi	97.443.772.900	3.237.257.698	530.914.666.787	276.388.120.014	8.615.099.600	65.386.119.348	38.013.935.674	393.750.000	1.020.392.722.021
17	024	Kementerian Kesehatan	11.508.279.000	269.500.000	288.080.606.087	9.107.149.808	2.188.909.299	2.016.824.234	29.804.307.115	-	342.975.575.543
18	025	Kementerian Agama	-	-	186.060.723.068	4.397.681.929	40.475.158.591	30.573.955.005	2.385.015.460	-	263.892.534.053
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-	48.150.481.519	1.304.603.200	-	137.900.000	98.844.540	-	49.691.829.259
20	027	Kementerian Sosial	-	-	74.383.220.358	17.872.818.000	-	3.914.010.050	31.534.847.880	-	127.704.896.288
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.726.547.000	577.729.538	98.834.183.397	653.737.250	1.924.166.768	50.572.448.462	20.879.797.140	29.850.000	175.198.459.555
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	25.000.000	12.540.841.776	70.336.133.073	4.707.962.195	-	89.334.647.395	57.904.112.481	894.437.500	235.743.134.420
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	99.174.475	-	132.846.221.901	4.269.005.900	5.440.669.528.108	1.688.010.386.498	1.834.651.208.320	211.606.245.148	9.312.151.770.350
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	-	-	7.450.945.414	-	-	198.824.550	5.780.851.461	-	13.430.621.425
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	8.923.350.927	105.187.500	-	-	8.442.256.015	-	17.470.794.442
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	4.144.084.393	-	-	716.650.000	-	-	4.860.734.393
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	-	-	48.251.124.224	5.524.259.700	-	6.787.416.190	16.313.154.000	-	76.875.954.114
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	-	-	12.303.971.240	7.085.554.923	-	-	3.892.012.485	-	23.281.538.648
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	39.831.401.046	10.734.598.720	3.171.743.896	1.031.778.650	1.817.780.000	-	-	56.587.302.312
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	-	-	30.274.537.327	1.320.461.670	5.356.981.145	4.752.900.030	1.706.251.130	3.087.474.000	46.498.605.302
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	16.040.638.379	-	-	-	-	-	16.040.638.379
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	4.667.811.570	343.360.000	-	-	233.825.000	-	5.244.996.570
33	050	Badan Intelijen Negara	-	-	3.745.827.594.862	1.403.127.124.760	-	-	-	-	5.148.954.719.622



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No. 07
NILAI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud								Total
			Hak Cipta (162121)	Paten (162141)	Software (162151)	Lisensi (162161)	Hasil Kajian/ Penelitian (162171)	Aset Tak Berwujud Lainnya (162191)	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (162311)	ATB Dalam Pengerjaan (166113)	
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	-	-	1.141.153.443.365	-	-	-	801.050.606.699	-	1.942.204.050.064
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	-	-	81.867.252.280	27.222.785.690	-	-	9.279.979.442	-	118.370.017.412
36	054	Badan Pusat Statistik	-	-	296.072.853.238	97.247.594.043	-	-	3.087.916.829	-	396.408.364.110
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	-	-	27.586.623.805	3.723.903.297	69.999.644.000	-	36.463.666.859	-	137.773.837.961
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	-	-	241.971.709.882	28.265.419.971	17.790.992.100	9.032.008.839	692.195.502	-	297.752.326.294
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	350.000.000	-	60.664.274.882	2.944.693.000	-	237.986.814.435	14.853.924.042	-	316.799.706.359
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	454.545.722.683	452.992.156.859	-	7.347.762.613	5.888.926.781	-	920.774.568.936
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	8.039.858.411.053	1.134.286.236.226	900.000.000	4.209.594.000	45.337.638.099	-	9.224.591.879.378
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-	-	78.306.996.843	-	47.654.410.485	190.344.000	2.262.071.137	-	128.413.822.465
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	-	-	211.001.187.894	2.873.768.009	-	24.019.600	5.163.431.062	-	219.062.406.565
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	128.670.048.810	-	8.734.963.900	2.711.199.850	-	-	140.116.212.560
45	066	Badan Narkotika Nasional	-	-	143.669.452.790	18.832.088.600	-	45.434.000	197.758.998	-	162.744.734.388
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	-	8.692.894.004	-	-	611.790.000	29.000.000	-	9.333.684.004
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-	-	33.476.339.544	18.550.872.545	-	-	665.660.116	-	52.692.872.205
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	-	1.166.001.200	-	-	-	2.551.007.192	-	3.717.008.392
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-	-	443.732.186.779	-	-	2.641.333.440	24.115.344.826	-	470.488.865.045
50	076	Komisi Pemilihan Umum	-	-	25.237.601.782	-	-	141.061.500	177.931.500	-	25.556.594.782
51	077	Mahkamah Konstitusi	-	-	19.242.624.148	1.416.465.418	-	2.126.250.680	5.963.533.344	-	28.748.873.590
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	35.156.077.713	81.208.600	-	926.121.464	-	-	36.163.407.777
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	29.780.000	195.772.178.804	18.698.043.528	-	1.449.148.198	481.610.927	3.459.926.648	-	219.890.688.105
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	50.300.000	12.419.229.252	30.889.312.692	2.955.100.000	-	816.413.000	218.872.500	-	47.349.227.444
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	35.100.000	2.803.733.000	203.291.305.720	22.241.900.291	1.484.178.000	368.828.026	3.728.361.199	-	233.953.406.236
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	30.750.000	354.505.000	113.363.157.493	616.172.700	98.183.871.727	441.710.258.199	1.711.973.759	19.900.870.910	675.871.559.788
57	083	Badan Informasi Geospasial	-	-	186.073.579.389	36.114.373.871	-	3.011.292.467.789	5.216.847.800	2.809.039.884	3.241.506.308.733
58	084	Badan Standarisasi Nasional	-	-	12.717.126.200	-	-	134.250.000	743.421.389	-	13.594.797.589
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.446.100	-	10.582.573.323	319.946.000	904.987.492	289.079.720	9.260.000	-	12.107.292.635
60	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	6.426.865.700	-	-	-	20.000.000	-	6.446.865.700
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	-	-	22.227.611.637	-	-	-	-	-	22.227.611.637
62	088	Badan Kepegawaian Negara	500.000	-	142.158.642.445	39.658.850	195.000.000	-	47.350.380.364	-	189.744.181.659
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	-	34.783.596.445	9.516.438.249	-	-	15.269.706.753	1.223.176.745	60.792.918.192
64	090	Kementerian Perdagangan	-	-	40.026.433.667	2.510.314.600	409.475.000	22.964.391.321	57.700.539.311	-	123.611.153.899
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-	-	18.341.878.400	44.086.519	-	916.453.787.749	14.547.354.000	91.750.000	949.478.856.668
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	-	46.933.365.378	46.104.186.084	-	811.136.317	-	-	93.848.687.779
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	-	-	5.491.590.152	-	-	-	-	-	5.491.590.152
68	100	Komisi Yudisial RI	-	-	2.351.339.020	304.149.920	-	-	772.094.032	-	3.427.582.972
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-	229.359.343.853	-	7.904.375.554	12.051.647.550	1.892.830.093	-	251.208.197.050
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	-	-	11.220.047.008	-	-	-	5.974.306.030	-	17.194.353.038
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	41.962.729.440	16.573.359.568	-	-	5.787.202.937	1.455.816.192	65.779.108.137
72	107	Badan SAR Nasional	-	-	114.788.713.486	33.202.956.554	-	36.852.432.650	41.343.699.805	-	226.187.802.495
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	-	1.814.577.964	-	-	-	-	-	1.814.577.964



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No. 07
NILAI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA
MENURUT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud								Total
			Hak Cipta (162121)	Paten (162141)	Software (162151)	Lisensi (162161)	Hasil Kajian/Penelitian (162171)	Aset Tak Berwujud Lainnya (162191)	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (166113)	ATB Dalam Pengerjaan (162311)	
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	-	-	1.265.069.234	-	-	45.000.000	294.697.400	-	1.604.766.634
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	10.691.538.680	-	121.266.752.973	81.840.000	-	-	132.040.131.653
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	47.629.170.247	10.506.041.760	24.449.711.277	517.874.507.423	352.008.100	27.094.239.651	627.905.678.458
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	-	-	228.153.072.228	-	-	855.128.500	-	-	229.008.200.728
79	114	Sekretariat Kabinet	-	-	3.632.286.182	578.514.000	-	-	-	-	4.210.800.182
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	18.883.695.969	1.375.854.500	162.850.000	-	104.325.000	-	20.526.725.469
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	-	-	12.153.625.629	-	-	-	89.652.144	-	12.243.277.773
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	-	-	14.555.294.891	25.829.650	1.149.341.116	-	44.764.000	-	15.775.229.657
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	-	129.359.000	-	-	260.850.000	-	-	390.209.000
84	119	Badan Keamanan Laut	-	-	68.768.868.834	-	810.000.000	1.444.905.000	289.000	-	71.024.062.834
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	-	-	5.758.012.790	-	-	-	-	-	5.758.012.790
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	-	-	2.477.173.700	102.679.000	-	-	-	-	2.579.852.700
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	-	1.744.988.575	-	-	-	-	-	1.744.988.575
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (1)			111.510.121.475	268.386.057.114	27.749.249.988.490	5.417.832.118.789	7.590.812.632.864	9.027.069.449.488	4.610.455.034.939	701.646.092.016	55.476.961.495.175
B DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L											
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	-	-	125.698.843.262	51.631.738.008	4.675.607.750	1.115.432.510	-	-	183.121.621.530
SUB TOTAL (2)			-	-	125.698.843.262	51.631.738.008	4.675.607.750	1.115.432.510	-	-	183.121.621.530
TOTAL			111.510.121.475	268.386.057.114	27.874.948.831.752	5.469.463.856.797	7.595.488.240.614	9.028.184.881.998	4.610.455.034.939	701.646.092.016	55.660.083.116.705



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 08a
NILAI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA MENURUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud					Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (169318)	Penyesuaian Ke Neraca	Total Amortisasi
			Hak Cipta (169312)	Paten (169314)	Software (169315)	Lisensi (169316)	Aset Tak Berwujud Lainnya (169317)			
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF									
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	-	-	4.708.466.634	-	-	192.481.600	-	4.900.948.234
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	-	-	28.692.422.314	6.869.892.611	-	-	-	35.562.314.925
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	79.581.268.775	58.603.856.685	-	30.689.470	-	138.215.814.930
4	005	Mahkamah Agung	-	-	39.418.705.685	2.198.237.653	-	1.674.208.650	-	43.291.151.988
5	006	Kejaksaan Agung	-	-	191.231.094.395	-	-	401.913.560.154	-	593.144.654.549
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	-	-	48.464.465.676	1.977.215.686	19.800.000	-	-	50.461.481.362
7	010	Kementerian Dalam Negeri	-	-	716.998.320.312	377.064.148	-	29.241.582.614	-	746.616.967.074
8	011	Kementerian Luar Negeri	-	-	50.476.208.784	10.751.561.462	-	145.750.000	-	61.373.520.246
9	012	Kementerian Pertahanan	-	-	3.048.956.412.382	70.361.286.585	137.423.850	9.293.587.299	4.484.154.675	3.133.232.864.791
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	-	-	382.866.604.352	-	-	216.270.308.312	-	599.136.912.664
11	015	Kementerian Keuangan	-	-	989.131.389.265	290.377.555.055	-	5.723.113.870	-	1.285.232.058.190
12	018	Kementerian Pertanian	3.290.364	352.199.511	29.115.141.300	1.791.975.278	95.974.016	5.000.895.250	-	36.359.475.719
13	019	Kementerian Perindustrian	-	-	37.410.569.275	140.844.852	-	1.052.899.496	199.400.000	38.803.713.623
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	146.030.341.354	8.884.782.274	-	72.140.242.463	-	227.055.366.091
15	022	Kementerian Perhubungan	23.641.585	7.647.059	624.848.451.933	12.307.353.994	116.955.663	4.351.844.985	922.929.332	642.578.824.551
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	17.444.773.571	482.966.114	435.631.293.874	167.222.696.732	137.209.450	29.353.772.204	4.330.886.230	654.603.598.175
17	024	Kementerian Kesehatan	1.455.714.030	252.748.750	241.080.287.310	4.243.509.825	15.329.327	9.170.665.049	-	256.218.254.291
18	025	Kementerian Agama	-	-	135.467.349.024	2.145.355.728	-	2.384.537.034	145.970.000	140.143.211.786
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-	42.826.647.546	119.600.580	-	98.844.540	-	43.045.092.666
20	027	Kementerian Sosial	-	-	68.502.785.657	947.599.900	-	31.416.060.380	-	100.866.445.937
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	110.992.302	259.978.297	73.971.190.657	472.499.540	31.986.997.320	14.132.948.239	158.946.750	121.093.553.105
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.571.423	6.132.270.820	64.315.697.454	3.222.960.871	318.244.416	57.057.013.481	-	131.049.758.465
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15.995.449	-	97.717.609.265	311.202.735	-	67.184.540.587	-	165.229.348.036
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	-	-	7.429.490.602	-	-	5.750.913.961	-	13.180.404.563
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	-	6.966.686.602	68.371.875	-	7.483.026.015	-	14.518.084.492
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	1.206.527.487	-	-	-	-	1.206.527.487
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekras	-	-	35.486.023.858	3.383.736.814	-	2.503.134.625	-	41.372.895.297
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	-	-	12.083.050.843	3.964.581.364	-	3.753.129.693	-	19.800.761.900
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	-	39.831.401.046	8.751.470.614	1.131.471.760	-	-	-	49.714.343.420
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	-	-	23.483.063.734	278.767.084	-	1.228.818.130	-	24.990.648.948
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	15.406.575.415	-	-	-	-	15.406.575.415
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	-	3.584.962.178	68.730.000	-	223.684.375	-	3.877.376.553
33	050	Badan Intelijen Negara	-	-	2.738.480.012.752	540.666.162.888	-	-	-	3.279.146.175.640
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	-	-	539.401.690.009	-	-	662.530.739.628	-	1.201.932.429.637
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	-	-	81.841.997.280	15.064.148.502	-	9.209.577.383	-	106.115.723.165
36	054	Badan Pusat Statistik	-	-	218.984.405.085	85.653.443.669	-	3.035.219.954	-	307.673.068.708
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	-	-	17.968.332.212	785.133.551	-	29.234.972.289	-	47.988.438.052
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	-	-	189.458.278.520	6.978.422.916	542.932.600	684.195.282	-	197.663.829.538
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	67.500.000	-	41.090.565.146	2.893.619.475	-	13.477.326.018	-	57.529.010.639
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	316.413.762.605	58.430.977.298	-	5.864.870.101	-	380.709.610.004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 08a
NILAI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA MENURUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud					Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (169318)	Penyesuaian Ke Neraca	Total Amortisasi
			Hak Cipta (169312)	Paten (169314)	Software (169315)	Lisensi (169316)	Aset Tak Berwujud Lainnya (169317)			
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	4.426.642.113.021	398.462.819.152	-	44.987.443.999	-	4.870.092.376.172
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-	-	66.891.083.650	-	-	2.249.602.387	-	69.140.686.037
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	-	-	208.658.094.087	743.180.595	-	5.163.431.062	-	214.564.705.744
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	-	92.711.210.763	-	-	-	-	92.711.210.763
45	066	Badan Narkotika Nasional	-	-	123.676.787.622	11.868.478.777	-	183.049.416	-	135.728.315.815
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	-	-	6.875.195.022	-	-	29.000.000	-	6.904.195.022
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	-	-	27.951.247.783	11.325.547.785	-	634.485.616	-	39.911.281.184
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	-	660.176.825	-	-	2.545.438.442	-	3.205.615.267
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	-	-	426.917.067.218	-	-	23.974.059.726	-	450.891.126.944
50	076	Komisi Pemilihan Umum	-	-	19.322.182.131	-	-	172.392.500	-	19.494.574.631
51	077	Mahkamah Konstitusi	-	-	17.596.263.173	498.035.464	-	3.355.408.344	695.657.250	22.145.364.231
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	-	25.835.962.439	17.827.150	-	-	-	25.853.789.589
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	2.736.975	48.472.799.270	14.988.596.702	-	41.837.946	1.433.884.953	-	64.939.855.846
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	2.155.715	8.392.581.530	27.445.292.349	1.920.815.000	194.713.250	218.872.500	-	38.174.430.344
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1.788.000	1.307.947.218	135.812.291.658	9.965.758.662	131.918.223	2.787.727.633	-	150.007.431.394
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.183.515	55.201.075	106.515.301.200	526.496.795	244.370.434.064	1.711.973.759	-	353.180.590.408
57	083	Badan Informasi Geospasial	-	-	170.696.205.696	18.963.972.494	2.280.098.867.047	5.216.847.800	-	2.474.975.893.037
58	084	Badan Standarisasi Nasional	-	-	10.742.675.490	-	-	743.421.389	-	11.486.096.879
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	237.582	-	9.718.636.400	141.036.500	-	9.260.000	-	9.869.170.482
60	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	6.170.623.330	-	-	20.000.000	-	6.190.623.330
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	-	-	16.125.550.272	-	-	-	-	16.125.550.272
62	088	Badan Kepegawaian Negara	49.995	-	137.030.059.224	37.675.908	-	46.688.855.240	-	183.756.640.367
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	-	-	31.360.785.378	1.706.500.449	-	13.254.353.443	-	46.321.639.270
64	090	Kementerian Perdagangan	-	-	37.976.713.150	757.841.255	-	40.672.755.234	5.245.919.500	84.653.229.139
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	-	-	16.326.522.908	6.612.978	-	2.343.893.000	-	18.677.028.886
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	-	39.724.327.564	23.635.720.754	-	-	-	63.360.048.318
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	-	-	5.091.485.777	-	-	-	-	5.091.485.777
68	100	Komisi Yudisial RI	-	-	2.159.000.222	261.221.350	-	730.884.106	-	3.151.105.678
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-	152.574.473.636	-	-	1.892.830.093	-	154.467.303.729
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	-	-	9.476.900.185	-	-	5.884.665.063	-	15.361.565.248
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	-	-	28.603.325.399	9.239.786.130	-	5.619.493.691	-	43.462.605.220
72	107	Badan SAR Nasional	-	-	110.766.421.230	16.546.997.994	-	38.554.560.055	5.509.344.775	171.377.324.054
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-	-	1.095.641.751	-	-	-	-	1.095.641.751
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	-	-	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	-	-	864.137.984	-	-	198.773.840	-	1.062.911.824
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	9.898.605.106	-	-	-	-	9.898.605.106
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	43.182.449.021	5.373.692.652	-	347.508.100	-	48.903.649.773
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	-	-	190.264.979.237	-	-	-	-	190.264.979.237
79	114	Sekretariat Kabinet	-	-	3.270.274.369	207.525.400	-	-	-	3.477.799.769
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	13.363.362.037	214.184.975	-	104.325.000	-	13.681.872.012
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	-	-	9.084.457.339	-	-	89.652.144	-	9.174.109.483



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 08a
NILAI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD PER AKUN NERACA MENURUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

No	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Jenis Aset Tak Berwujud						Penyesuaian Ke Neraca	Total Amortisasi
			Hak Cipta (169312)	Paten (169314)	Software (169315)	Lisensi (169316)	Aset Tak Berwujud Lainnya (169317)	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan (169318)		
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	-	-	6.514.094.731	1.291.483	-	44.764.000	-	6.560.150.214
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	-	73.389.125	-	-	-	-	73.389.125
84	119	Badan Keamanan Laut	-	-	68.402.558.358	-	-	289.000	-	68.402.847.358
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	-	-	4.171.330.929	-	-	-	-	4.171.330.929
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	-	-	925.438.538	11.908.850	-	-	-	937.347.388
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	-	1.445.142.742	-	-	-	-	1.445.142.742
89	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (1)			19.133.630.506	105.547.740.690	18.701.078.050.936	1.875.129.547.942	2.558.208.637.172	1.954.673.054.886	21.693.208.512	25.235.463.870.644
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L									
88	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	-	-	131.095.013.641	46.218.268.857	-	-	-	177.313.282.498
SUB TOTAL (2)			-	-	131.095.013.641	46.218.268.857	-	-	-	177.313.282.498
TOTAL			19.133.630.506	105.547.740.690	18.832.173.064.577	1.921.347.816.799	2.558.208.637.172	1.954.673.054.886	21.693.208.512	25.412.777.153.142



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 08b
RINCIAN NILAI AMORTISASI ATB MENURUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD							
NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	AKUMULASI AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
A	DAFTAR K/L YANG MEMPUNYAI BA DEFINITIF						
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.090.894.741	1.810.053.493	-	-	4.900.948.234
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	29.716.836.078	5.807.916.347	37.562.500		35.562.314.925
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	124.045.584.050	14.926.177.905	(755.947.025)	-	138.215.814.930
4	005	Mahkamah Agung	39.864.904.504	4.691.746.335	(1.265.498.851)	-	43.291.151.988
5	006	Kejaksaan Agung	420.332.532.574	111.281.372.070	61.530.749.905		593.144.654.549
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	43.421.232.704	8.235.470.608	(1.195.221.950)		50.461.481.362
7	010	Kementerian Dalam Negeri	789.809.507.281	22.663.721.826	(65.856.262.033)		746.616.967.074
8	011	Kementerian Luar Negeri	78.037.525.727	7.328.024.007	(23.992.029.488)		61.373.520.246
9	012	Kementerian Pertahanan	1.653.748.270.854	736.975.990.368	738.024.448.894	4.484.154.675	3.133.232.864.791
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	534.115.928.021	60.628.522.975	4.392.461.668		599.136.912.664
11	015	Kementerian Keuangan	1.155.989.423.657	143.610.935.753	(14.368.301.220)	-	1.285.232.058.190
12	018	Kementerian Pertanian	28.816.755.940	6.051.274.283	1.491.445.496	-	36.359.475.719
13	019	Kementerian Perindustrian	29.986.943.752	5.274.971.995	3.342.397.876	199.400.000	38.803.713.623
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	221.573.454.062	33.248.326.311	(27.766.414.282)		227.055.366.091
15	022	Kementerian Perhubungan	515.268.569.456	67.271.439.808	59.115.885.955	922.929.332	642.578.824.551
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	488.174.878.734	89.067.463.283	73.030.369.928	4.330.886.230	654.603.598.175
17	024	Kementerian Kesehatan	229.136.055.520	31.795.004.966	(4.712.806.195)	-	256.218.254.291
18	025	Kementerian Agama	120.975.198.447	16.536.076.416	2.485.966.923	145.970.000	140.143.211.786
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	41.982.216.155	4.790.026.188	(3.727.149.677)		43.045.092.666
20	027	Kementerian Sosial	93.101.330.699	7.876.720.238	(111.605.000)	-	100.866.445.937
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	96.166.212.847	10.787.765.464	13.980.628.044	158.946.750	121.093.553.105
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	116.081.448.428	7.572.599.086	7.395.710.951		131.049.758.465
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	135.151.450.881	22.851.479.613	7.226.417.542		165.229.348.036
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	12.790.365.575	390.038.988	-	-	13.180.404.563
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	13.411.762.992	1.359.016.500	(252.695.000)	-	14.518.084.492
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	780.706.188	425.821.299	-	-	1.206.527.487
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Barekraf	30.205.540.558	11.387.148.497	(219.793.758)	-	41.372.895.297
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	18.850.210.963	1.031.405.137	(80.854.200)	-	19.800.761.900
29	042	Badan Riset dan Inovasi Nasional	47.590.113.424	1.328.167.568	796.062.428	-	49.714.343.420
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	30.470.400.090	2.312.178.647	(7.791.929.789)	-	24.990.648.948
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.321.826.397	278.749.018	(194.000.000)	-	15.406.575.415
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3.053.120.585	821.340.021	2.915.947	-	3.877.376.553
33	050	Badan Intelijen Negara	1.280.428.900.485	540.063.490.199	1.458.653.784.956	-	3.279.146.175.640
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	934.250.252.020	344.192.653.564	(76.510.475.947)	-	1.201.932.429.637
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	97.177.562.484	8.938.160.681	-	-	106.115.723.165
36	054	Badan Pusat Statistik	610.990.192.705	66.716.427.238	(370.033.551.235)	-	307.673.068.708
37	055	Kementerian PPN/Bappenas	43.766.343.969	9.474.309.715	(5.252.215.632)	-	47.988.438.052
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	174.747.385.766	24.478.212.199	(1.561.768.427)	-	197.663.829.538
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	50.342.065.924	7.186.944.715	-	-	57.529.010.639
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	319.667.707.005	61.896.507.736	(854.604.737)	-	380.709.610.004
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.149.540.458.254	1.705.304.811.482	15.247.106.436	-	4.870.092.376.172
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	55.366.784.438	12.829.718.016	944.183.583	-	69.140.686.037
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	212.194.551.476	4.471.649.549	(2.101.495.281)	-	214.564.705.744
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	79.325.168.019	13.267.167.744	118.875.000	-	92.711.210.763
45	066	Badan Narkotika Nasional	123.443.819.028	15.502.789.921	(3.218.293.134)	-	135.728.315.815
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	5.277.788.179	1.350.233.593	276.173.250	-	6.904.195.022
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	36.141.458.527	4.903.917.056	(1.134.094.399)	-	39.911.281.184
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	3.003.066.517	202.548.750	-	-	3.205.615.267
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	439.802.460.057	9.479.848.840	1.608.818.047	-	450.891.126.944
50	076	Komisi Pemilihan Umum	14.120.576.457	5.211.305.908	162.692.266	-	19.494.574.631
51	077	Mahkamah Konstitusi	18.446.215.419	2.993.591.562	9.900.000	695.657.250	22.145.364.231
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	29.361.081.538	5.651.838.055	(9.159.130.004)	-	25.853.789.589
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	46.029.519.260	11.159.491.303	7.750.845.283	-	64.939.855.846
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	33.374.458.857	3.968.850.783	831.120.704	-	38.174.430.344
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	118.521.889.367	28.322.357.384	3.163.184.643	-	150.007.431.394
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	275.051.377.043	41.671.138.769	36.458.074.596	-	353.180.590.408
57	083	Badan Informasi Geospasial	2.182.235.741.724	291.123.404.076	1.616.747.237	-	2.474.975.893.037
58	084	Badan Standarisasi Nasional	10.121.144.024	1.153.012.855	211.940.000	-	11.486.096.879
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	8.373.271.438	1.495.899.044	-	-	9.869.170.482
60	086	Lembaga Administrasi Negara	4.908.938.440	1.233.684.890	48.000.000	-	6.190.623.330
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.899.868.278	2.940.263.464	1.285.418.530	-	16.125.550.272
62	088	Badan Kepegawaian Negara	178.708.987.005	6.112.140.569	(1.064.487.207)	-	183.756.640.367
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	44.783.433.406	6.847.491.424	(5.309.285.560)	-	46.321.639.270
64	090	Kementerian Perdagangan	90.567.791.713	1.893.311.809	(13.053.793.883)	5.245.919.500	84.653.229.139
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	16.294.140.070	2.382.888.816	-	-	18.677.028.886
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	58.991.042.589	11.174.760.386	(6.805.754.657)	-	63.360.048.318
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	4.755.282.217	319.451.477	16.752.083	-	5.091.485.777
68	100	Komisi Yudisial RI	2.721.872.537	429.233.141	-	-	3.151.105.678
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	126.976.341.825	23.625.839.659	3.865.122.245	-	154.467.303.729



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 08b
RINCIAN NILAI AMORTISASI ATB MENURUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

NO	Kode BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD				
			AKUMULASI AMORTISASI PER 1 JANUARI 2021	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	PENYESUAIAN KE NERACA	AKUMULASI AMORTISASI PER 31 DESEMBER 2021
70	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	14.553.125.021	827.580.189	(19.139.962)	-	15.361.565.248
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	33.654.495.652	9.808.113.053	(3.485)	-	43.462.605.220
72	107	Badan SAR Nasional	150.643.473.789	15.166.835.924	57.669.566	5.509.344.775	171.377.324.054
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	878.751.255	216.890.496	-	-	1.095.641.751
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2.779.322.758	-	(2.779.322.758)	-	-
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	887.216.916	135.497.500	40.197.408	-	1.062.911.824
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	10.735.480.473	418.565.633	(1.255.441.000)	-	9.898.605.106
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	44.475.990.373	4.356.034.400	71.625.000	-	48.903.649.773
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	87.048.579.470	18.611.202.455	84.605.197.312	-	190.264.979.237
79	114	Sekretariat Kabinet	3.147.292.553	234.063.211	96.444.005	-	3.477.799.769
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	17.860.067.186	3.706.438.117	(7.884.633.291)	-	13.681.872.012
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	7.251.859.604	1.998.977.504	(76.727.625)	-	9.174.109.483
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	3.555.653.420	2.898.642.419	105.854.375	-	6.560.150.214
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	9.950.000	32.339.750	31.099.375	-	73.389.125
84	119	Badan Keamanan Laut	66.011.469.505	2.391.377.853	-	-	68.402.847.358
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	3.806.997.906	1.181.675.461	(817.342.438)	-	4.171.330.929
86	122	Badan Pembina Ideologi Pancasila	402.241.313	535.106.075	-	-	937.347.388
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	-	183.000.542	1.262.142.200	-	1.445.142.742
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	-
SUB TOTAL (1)			18.500.472.107.138	4.783.088.631.967	1.930.209.923.027	21.693.208.512	25.235.463.870.644
B	DAFTAR ENTITAS YANG DIPERLAKUKAN SEPERTI K/L						
1	999	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	100.207.974.358	13.802.952.182	63.302.355.958	-	177.313.282.498
SUB TOTAL (2)			100.207.974.358	13.802.952.182	63.302.355.958	-	177.313.282.498
TOTAL			18.600.680.081.496	4.796.891.584.149	1.993.512.278.985	21.693.208.512	25.412.777.153.142



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 09
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG PENGGUNA
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021				
			Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal Surat	Tanggal Terima	Ketepatan Waktu Penyampaian (Ya/Tidak)
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	B-1069/PL.06/B-VI/SetjenMPR/04/2022	26/04/2022	Laporan Barang Pengguna MPR RI Audited Tahun Anggaran 2021	28/04/2022	Ya
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	B/8895/KN.03.02/4/2022	26/04/2022	Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, Upload Ulang/Push Data ke Aplikasi e-Rekon & LK, dan Penyampaian LKKL Tahun 2021 Audited	9 Mei 2022	Ya
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	159 /S/X.6/04/2022	25/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Periode Tahunan Tahun 2021 (Audited)	28/04/2022	Ya
4	005	Mahkamah Agung	309/BUA.4/PL.09/5/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung RI Tahunan-Tahun Anggaran 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
5	006	Kejaksaan Agung	B-440/C.6/Cpl.1/05/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kejaksaan RI Tahun 2021 (Audited)	9 Mei 2022	Ya
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	B-04/KSN/S/PB.02/05/2022	11 Mei 2022	Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sekretariat Negara TA 2021 Audited	12 Mei 2022	Tidak
7	010	Kementerian Dalam Negeri	028/2377/SJ	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Dalam Negeri Tahunan Tahun 2021 (Audited)	28/04/2022	Ya
8	011	Kementerian Luar Negeri	0661/KU/05/2022/03	09 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Luar Negeri Tahunan Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
9	012	Kementerian Pertahanan	R/328/09/25/24/III.BARANA HAN	17 Mei 2022	Laporan BMN Tahunan Kemhan dan TNI TA 2021 Audited	27 Mei 2022	Tidak
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	SEK.4-PB.04.06-1612	12 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	15 Mei 2022	Ya
11	015	Kementerian Keuangan	ND-673/SJ.7/2022	14 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	19 Mei 2022	Tidak
12	018	Kementerian Pertanian	B-1835/PL.230/A/02/2022	13 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Tahunan TA 2021 - Audited	16 Mei 2022	Ya
13	019	Kementerian Perindustrian	S/84/M-IND/BMN/IV/2022	28/04/2022	Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Kementerian Perindustrian Tahunan TA 2021 (Audited)	28/04/2022	Ya
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	T-719/BN.10/SJN.A/2022	14 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian ESDM TA 2021 (Audited)	14 Mei 2022	Ya
15	022	Kementerian Perhubungan	KU.204/3/7 PHB 2022	12 Mei 2022	Laporan BMN Pengguna Tahunan Audited TA. 2021 Kementerian Perhubungan	12 Mei 2022	Ya
16	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	30826/A2/LK.01.08/2022	13 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2021 Audited	14 Mei 2022	Ya
17	024	Kementerian Kesehatan	KN.02.06/4/1932/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Kesehatan Tahunan Tahun 2021 Audited	13 Mei 2022	Ya
18	025	Kementerian Agama	0850/B.III.4/KU.00/05/2022	13 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Agama Tahun 2021 Audited	17 Mei 2022	Ya
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	1/1283/UM.03/VI/2022	13 Mei 2022	Surat Pengantar	15 Mei 2022	Ya
20	027	Kementerian Sosial	682/1.5/PL.04.03/5/2022	12 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021 Audited	12 Mei 2022	Ya
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	S.267/SETJEN/ROUM/KAP.2/4/2022	26/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 (Audited) Kementerian LHK	28/04/2022	Ya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 09
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG PENGGUNA
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021				
			Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal Surat	Tanggal Terima	Ketepatan Waktu Penyampaian (Ya/Tidak)
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	B.1539/SJ.2/TU.210/V/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PS0501-Sb/334	16 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2021 Audited	16 Mei 2022	Ya
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	B-1333/PL.03.02/5/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Audited Tahun Anggaran 2021	10 Mei 2022	Ya
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	S.251.1/SES.M.EKON/05/2002	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 (Audited)	11 Mei 2022	Tidak
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	B.1013/ROUMSDM/INV.00/04/2022	28/04/2022	Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited	3 Mei 2022	Ya
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	B/SD/173/PL.02.04/S/2022	09 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	S-104/MBU/S/04/2022	27/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
29	042	Kementerian Riset dan Teknologi	B-2700/II/PL.00.00/4/2022	27/04/2022	Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2021 Audited Tingkat UAPB Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BA042)	10 Mei 2022	Ya
30	044	Kementerian Koperasi dan UKM	B-305/SM/BN.12/IV/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited Kementerian Koperasi dan UKM	9 Mei 2022	Ya
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B-749/Setmen.Birosdmu/KP.08.01/05/2022	11 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara (BMN) Audited TA, 2021	11 Mei 2022	Tidak
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B/12/BN.05/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna BMN Kementerian PANRB Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
33	050	Badan Intelijen Negara	B-06/V/2022	10 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna TA 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	1792/BSSN/SU/PL.03.03/05/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	B/484/PL.05.04/KL.01.09/V/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BMN dan Laporan Barang Pengguna Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
36	054	Badan Pusat Statistik	B-410/02520/PL.530/05/2021	10 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna BPS Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya
37	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	05441/PL.04.03/SES/T/04/2022	9 Mei 2022	Tahun 2021 (Audited)	9 Mei 2022	Ya
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	KU.04.02/839-100.3/V/2022	9 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	9 Mei 2022	Ya
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia					Tidak
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	S-187/SJ/PL.06.06/05/2022	13 Mei 2022	Laporan Barang Milik Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahunan (Audited) Tahun Anggaran 2021	16 Mei 2022	Ya
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	B/793/V/LOG.8.1./2022/Slog	13 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	21 Mei 2022	Tidak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 09
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG PENGGUNA
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021				
			Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal Surat	Tanggal Terima	Ketepatan Waktu Penyampaian (Ya/Tidak)
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	KP.05.03/S-257/SU05/3/2022	9 Mei 2022	Laporan Barang Milik Negara Badan POM RI TA 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	B/1226/04/32/2/SET.	22/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 (Audited) Lemhannas RI	9 Mei 2022	Ya
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	76/B.3/A.3/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
45	066	Badan Narkotika Nasional	B/1427/IV/RO/LG.05/2022/BN	26/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Badan Narkotika Nasional Semester II/Tahunan T.A. 2021 Audited	29/04/2022	Ya
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	107/KEU.09.06/IV/2022	26/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 Audited	9 Mei 2022	Ya
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	847/SP.06/B3/2022	25/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester II Tahun 2021 Audited	28/04/2022	Ya
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	94/Pl.02.08/0.3.1/IV/2022	26/04/2022	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 Audited	28/04/2022	Ya
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	PL.03.04/003/KRU/IV/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Audited Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika TA 2021	28/04/2022	Ya
50	076	Komisi Pemilihan Umum	970/KU.03.2-SD/02/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	3 Mei 2022	Ya
51	077	Mahkamah Konstitusi	1842/PL.06.07/04/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 (audited)	9 Mei 2022	Ya
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	B/73/PW.02N/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	9 Mei 2022	Ya
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	B-2755/II/PL.02.00/5/2022	9 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna LIPI Tahunan Audited TA 2021	10 Mei 2022	Ya
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	B-2665/IV/PL.02.00/4/2022	25/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna BATAN (BA-080) Tahunan Tahun 2021 (Audited)	9 Mei 2022	Ya
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	B-2753/II/PL.00.00/05/2022	9 Mei 2022	Laporan BMN Tahunan (Audited) Tahun Anggaran 2021	10 Mei 2022	Ya
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	B-2767/IV/PL.02.00/4/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna LAPAN Periode Tahunan TA 2021	10 Mei 2022	Ya
57	083	Badan Informasi Geospasial	B-28.1/SESMA-BIG/KU.02/4/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 (Audited)	29/04/2022	Ya
58	084	Badan Standarisasi Nasional	183/BSN/B0-b1/04/2022	28/04/2022	Surat Pengantar Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun 2021 (audited)	30/04/2022	Ya
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1825 /PL 01 01/BOU /IV/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan BMN Tingkat Pengguna Barang Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahunan Tahun 2021 Audited	9 Mei 2022	Ya
60	086	Lembaga Administrasi Negara	2777/S.1.3/RTB.02.2	10 Mei 2022	Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	PL.02.04/1365/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Arsip Nasional Republik Indonesia Audited	10 Mei 2022	Ya
62	088	Badan Kepegawaian Negara	15474/B-PL/03.06/SD/AI/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	KP.05.03/S-257/SU05/3/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 (Audited)	10 Mei 2022	Ya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 09
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG PENGGUNA
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021				
			Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal Surat	Tanggal Terima	Ketepatan Waktu Penyampaian (Ya/Tidak)
64	090	Kementerian Perdagangan	1110/SJ-DAG.3/SD/05/2022	9 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	B-PL.02.04/4.27.2/SET.BIII/IV/2022	27/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Audited)	28/04/2022	Ya
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	B/2541.3/PL.09/50-53/05/2022	11 Mei 2022	Penyampaian Laporan BMN Tahun Anggaran 2021 Audited	13 Mei 2022	Tidak
67	095	Dewan Perwakilan Daerah RI	PL.02.04/1369A/DPDRI/IV/2022	27/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Audited)	9 Mei 2022	Ya
68	100	Komisi Yudisial RI	297/SET/PK.01.05/05/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 (Audited) Tingkat Kementerian/Lembaga	10 Mei 2022	Ya
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	B.1088/BNPB/SU/PR.05.01/05/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan BMN Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
70	104	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	TAR.41/SU.KU/PL.03.10/V/2022	10 Mei 2022	Laporan Barang Milik Negara Tingkat Pengguna Barang BP2MI Tahun Anggaran 2021 (audited)	10 Mei 2022	Ya
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10331/Ses.3/05/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
72	107	Badan SAR Nasional	B/2018/PL.01.02/V/BSN-2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 Audited pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	10 Mei 2022	Ya
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	98/SJ/S/V/2022	9 Mei 2022	Surat Pengantar Laporan BMN Tahun Anggaran 2021 Audited	9 Mei 2022	Ya
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	-	-	-	Ya
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	B/1347/V/2022	9 Mei 2022	Pengantar Rekonsiliasi BMN Tahunan TA 2021 (audited)	10 Mei 2022	Ya
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	PLK.59.04/1134/BNPP/2022	28/04/2022	Laporan Barang Pengguna Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2021 Audited	4 Mei 2022	Ya
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	B-130/A/1/AP.03/4/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	PL.03.05/46/2022	26/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 Audited	28/04/2022	Ya
79	114	Sekretariat Kabinet	B.392/Adm-4/04/2022	26/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 (Audited)	28/04/2022	Ya
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	0108/PL.09/SJ/04/2022	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan T.A. 2021 Audited	9 Mei 2022	Ya
81	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	752/DU/04/2022	26/04/2022	Surat Pengantar	9 Mei 2022	Ya
82	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	94/I.5.1/TVRI/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan BMN (Audited) Tahun 2021	10 Mei 2022	Ya
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	47/BPKS/KEU.V/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) Tahun 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
84	119	Badan Keamanan Laut	B/428/SP.03.07/V/2022	10/05/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahunan T.A. 2021 (Audited) Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	10 Mei 2022	Ya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR NO. 09
REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG PENGGUNA
PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2021

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021				
			Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal Surat	Tanggal Terima	Ketepatan Waktu Penyampaian
							(Ya/Tidak)
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	B-0176/SESMENKO.03/MAR VES/PL.03.04/V/2022	9 Mei 2022	Surat Pengantar Laporan Barang Pengguna (LBP)	9 Mei 2022	Ya
86	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	808/PL/05/2022/SU	28/04/2022	Penyampaian Laporan Barang Pengguna Tahun Anggaran 2021 (Audited) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	10 Mei 2022	Ya
87	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	B-1361/2.3.1.RT/LPSK/05/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Lembaga Perlindungan Saksi dan KorbanTahun Anggaran 2021 Audited	10 Mei 2022	Ya
88	199	Otorita Asahan	-	-	-	-	Ya
89	999,08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain	ND-516/AG.5/2022	10 Mei 2022	Penyampaian Laporan Barang	11 Mei 2022	Ya
		Jumlah K/L Yang Memenuhi Ketepatan Waktu Penyampaian LBP					81
		Jumlah K/L Yang Tidak Memenuhi Ketepatan Waktu Penyampaian LBP					8
		Presentase K/L Yang Memenuhi Ketepatan Waktu Penyampaian LBP					91%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.10
BMN IDLE YANG TELAH DISERAHKAN KE DJKN
PER 31 DESEMBER 2021

(rupiah)

Kode Barang	Uraian	Satuan	Saldo Awal per 1 Januari 2021		Mutasi Tahun Anggaran 2021				Saldo per 31 Desember 2021		Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Nilai Buku per 31 Desember 2021
					Mutasi Tambah		Mutasi Kurang					
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai		
Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN												
	TANAH		343.997	63.478.089.228	27.943	17.475.685.000	1.723	1.921.802.602	370.217	79.031.971.626	-	79.031.971.626
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	6.818	2.550.248.602	-	-	253	93.112.602	6.565	2.457.136.000	-	2.457.136.000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.115	10.052.541.416	7.215	2.480.326.000	1.270	827.690.000	19.060	11.705.177.416	-	11.705.177.416
2010101003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000	-	-	200	1.001.000.000	-	-	-	-
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	17.333	14.602.533.500	12.458	11.959.255.000	-	-	29.791	26.561.788.500	-	26.561.788.500
2010104004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1.380.400.000	-	-	-	-	1.015	1.380.400.000	-	1.380.400.000
2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga	M2	6.508	71.980.550	-	-	-	-	6.508	71.980.550	-	71.980.550
2010199999	Tanah Persil Lainnya	M2	889	7.477.138.000	-	-	-	-	889	7.477.138.000	-	7.477.138.000
2010201001	Tanah Rawa	M2	4.939	1.840.735.160	-	-	-	-	4.939	1.840.735.160	-	1.840.735.160
2010202002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	26.990	107.621.000	-	-	-	-	26.990	107.621.000	-	107.621.000
2010308003	Tanah untuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	M2	266.190	24.393.891.000	-	-	-	-	266.190	24.393.891.000	-	24.393.891.000
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	M2	-	-	8.002	2.693.776.000	-	-	8.002	2.693.776.000	-	2.693.776.000
2010202003	Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu)	M2	-	-	122	160.473.000	-	-	122	160.473.000	-	160.473.000
2010307999	Tanah Untuk Jalan Lainnya	M2	-	-	146	181.855.000	-	-	146	181.855.000	-	181.855.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN		106	11.564.137.102	23	3.994.104.000	8	410.199.437	121	15.148.041.665	5.339.065.554	9.808.976.111
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	16	6.574.972.172	4	1.354.906.000	-	-	20	7.929.878.172	2.673.507.698	5.256.370.474
4010101002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	2	41.673.113	-	-	-	-	2	41.673.113	23.615.517	18.057.596
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	2	59.265.000	-	-	-	-	2	59.265.000	16.932.857	42.332.143
4010104001	Gedung Instalasi Studio	Unit	1	7.562.000	-	-	-	-	1	7.562.000	3.162.291	4.399.709
4010104002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	2	8.694.000	-	-	-	-	2	8.694.000	4.411.288	4.282.712
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2	295.543.000	-	-	-	-	2	295.543.000	104.355.091	191.187.909
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	10.184.248	-	-	-	-	1	10.184.248	4.419.579	5.764.669
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	8	260.634.347	-	-	-	-	8	260.634.347	139.010.516	121.623.831
4010124001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485	-	-	-	-	1	109.116.485	57.038.160	52.078.325
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	118.927.000	-	-	2	118.927.000	-	-	-	-
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	2	120.804.437	-	-	-	-	2	120.804.437	40.116.279	80.688.158
4010201013	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	4	173.936.000	-	-	-	-	4	173.936.000	62.241.800	111.694.200
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692	2	1.769.625.000	-	-	3	2.108.336.692	692.636.712	1.415.699.980
4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	4	580.757.591	-	-	-	-	4	580.757.591	243.905.454	336.852.137
4010202008	Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen	Unit	1	15.317.000	-	-	-	-	1	15.317.000	15.317.000	-
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	43	1.461.328.029	2	25.600.000	6	291.272.437	39	1.195.655.592	757.887.417	437.768.175
4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	5	153.586.134	14	801.096.000	-	-	19	954.682.134	207.516.245	747.165.889
4010202015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Unit	-	-	1	42.877.000	-	-	1	42.877.000	8.575.400	34.301.600
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	Unit	2	398.222.854	-	-	-	-	2	398.222.854	108.046.124	290.176.730
4010299999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	3	703.311.000	-	-	-	-	3	703.311.000	133.063.240	570.247.760
4040101009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	3	91.660.000	-	-	-	-	3	91.660.000	30.528.966	61.131.034
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000	-	-	-	-	1	39.931.000	12.777.920	27.153.080
Total Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN				75.042.226.330		21.469.789.000		2.332.002.039		94.180.013.291	5.339.065.554	88.840.947.737



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11a
DATA ANOMALI BMN INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE_BA	URAIAN BA	2020 AUDITED		2021 UNAUDITED		2021 AUDITED	
			JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	22	1.944.378.640				
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3.232	4.270.671.502				
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	5.269	73.096.700.965	9	(58.694.777)		
4	005	Mahkamah Agung Republik Indonesia	9.963	140.485.784.931	12.716	(75.850.363.217)	6	9.734.942.963
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	2.181	15.926.632.965	129	8.908.390.213		
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	17.113	3.564.914.180.684				
7	010	Kementerian Dalam Negeri	6.386	(9.263.063.207)	8.636	8.560.720.223	24	(23.283.829)
8	011	Kementerian Luar Negeri	14.373	262.220.497.433	56	(770.383.708)		
9	012	Kementerian Pertahanan	475.725	31.565.323.763.597	263.729	(2.987.705.795.956)	20.843	223.122.789.897
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.955	42.637.054.445	1.981	(826.572.799)		
11	015	Kementerian Keuangan	575.805	15.337.202.090.642				
12	018	Kementerian Pertanian	8.059	164.897.981.900	1.549	(2.967.490.113)	408	(1.284.860.074)
13	019	Kementerian Perindustrian	594	73.577.319.506	162	(4.497.058.272)		
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	185	258.486.773.820	111	14.242.288		
15	022	Kementerian Perhubungan	6.378	18.105.012.194.750	9.757	569.787.869.162	119	(173.250.199)
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	12.910	599.265.644.590	144.889	(1.474.882.412.872)	6.287	(91.302.732.789)
17	024	Kementerian Kesehatan	7.193	(13.802.666.891)	22.173	(554.851.274.698)	2.428	(7.814.793.692)
18	025	Kementerian Agama	48.907	800.636.729.243	103.591	(279.995.484.539)	5.632	48.770.689.845
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	556	15.099.081.945	442	17.547.191.911	1	(282.462)
20	027	Kementerian Sosial	638	(20.917.927.908)	97	4.256.317.578	29	(46.694.948)
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.418	(490.873.470.840)	990	(506.893.934.987)	31	289.413.814
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.018	123.937.119.949	5.445	(80.389.031.842)		
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21.357	14.527.205.127.594	5.799	949.116.262.287	2.489	423.634.302.183
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	110	(35.390.395)				
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	26	-			1	13.326.967
26	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.375	33.699.857.922	23	(4.573.485.347)		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11a
DATA ANOMALI BMN INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE_BA	URAIAN BA	2020 AUDITED		2021 UNAUDITED		2021 AUDITED	
			JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU
27	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	148	66.945.180.996	6	(14.672.739)	96	(62.765.234)
28	042	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	1.669	26.922.854.921	2	(772.351.000)	13	-
29	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	198	(45.280.168.871)	105	55.622.233		
30	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56	10.983.750	31	(23.439.577)		
31	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	1.503	20.641.693.851				
32	050	Badan Intelijen Negara	4.260	1.729.776.095.129	1	5.128.182		
33	051	Badan Siber dan Sandi Negara	91	4.461.799.596	13	58.661.001		
34	054	Badan Pusat Statistik	2.683	33.583.744.908	2.873	(31.823.755.796)		
35	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4.234	170.797.938.946				
36	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4.663	66.493.129.858	4.537	16.649.595.676		
37	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	77.773	793.233.403.412	65.923	(66.562.036.767)	63.615	(37.336.056.795)
38	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	822	6.369.679.283	138	14.981.328.698	13	(4.006.931)
39	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	198.592	4.920.270.033.110	16.008	(437.399.968.236)	395	(13.028.496.227)
40	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	293	73.974.898.061	45	10.549.338.850		
41	064	Lembaga Ketahanan Nasional	102	478.333.051				
42	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	6	6.558.491.456				
43	066	Badan Narkotika Nasional	928	40.786.624.909	25	(673.091.866)		
44	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4.237	139.206.996.505	945	(20.765.585.707)	789	(24.096.536.263)
45	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	209	422.773.843	105	(317.957.209)		
46	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	9	477.116.500				
47	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	725	18.778.822.363	171	(1.978.306.777)		
48	076	Komisi Pemilihan Umum	4.420	(2.100.540.975)	638	(2.261.831.645)		
49	077	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	243	180.280.274.359				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11a
DATA ANOMALI BMN INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE_BA	URAIAN BA	2020 AUDITED		2021 UNAUDITED		2021 AUDITED	
			JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU
50	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	6.871	(56.358.680.977)				
51	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8.624	208.375.802.347	2.107	92.002.731.337	2	92.539.003.077
52	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.462	80.370.588.219	118	50.308.413	109	(134.263.250)
53	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	828	6.107.681.710	37	(122.176.112)	20	1.715.886
54	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	944	201.062.330.283	4	(381.900.000)		
55	083	Badan Informasi Geospasial	66	49.775.834.037				
56	084	Badan Standardisasi Nasional	10	911.884.485				
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6	13.850.000				
58	086	Lembaga Administrasi Negara	54	529.422.097	48	-		
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	93	1.356.745.298	2	(16.241.500)		
60	088	Badan Kepegawaian Negara	60	655.627.377	1	(6.837.321)		
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	183	13.188.255.260	74	(576.516.420)	5	(2.936.352)
62	090	Kementerian Perdagangan	1.104	28.775.829.451	3.065	(5.083.728.481)		
63	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4.991	149.028.859.421	792	(692.125.000)		
64	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.399	44.343.584.150				
65	095	Dewan Perwakilan Daerah	28	1.721.597.909	1	987.755		
66	100	Komisi Yudisial Republik Indonesia	20	820.009.771				
67	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	32	38.177.178.205	1	149.099.500		
68	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	480	11.928.068.603	187	(883.034.333)		
69	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	24	-				
70	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	233	10.436.999.497				
71	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1.072	103.404.933.386	138	15.768.847.844		
72	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	16	1.738.112.000	2	(1.476.873.604)	2	(1.476.873.604)
73	110	Ombudsman Republik Indonesia	3	191.133.924	9	16.400.250	1	(2.765.357)
74	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	61	43.239.269.352				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11a
DATA ANOMALI BMN INTRAKOMPTABEL
PER 31 DESEMBER 2021

NO	KODE_BA	URAIAN BA	2020 AUDITED		2021 UNAUDITED		2021 AUDITED	
			JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU	JML_NUP	RPH_BUKU
75	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.134	154.181.420.788	1	(1)		
76	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2.035	89.550.721.409				
77	114	Sekretariat Kabinet	3	10.000.000				
78	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	305	21.821.148.585	119	(56.286.790)		
79	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.078	9.931.410.363	10	11.254.364.281		
80	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.142	208.015.555.218	3	(3.004.416)		
81	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	3.471	19.858.656.064	9	(1.681.895.750)		
82	119	Badan Keamanan Laut	71	346.626.691.945				
83	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	17	265.088.500				
84	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	5	3.144.553.800				
85	999	Bendahara Umum Negara	319	102.302.752.090	21	(25.131.059.488)		
Grand Total			1.572.856	95.323.540.141.310	680.599	(4.853.233.251.980)	103.358	621.315.586.626



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11b
TOTAL DAMPAK APLIKASI KE LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS LK	AKUN_DEBET	URAIAN	DEBET	KREDIT	NET
1	Neraca	132111	Peralatan dan Mesin	4.522.544.667.497	-	4.522.544.667.497
2	Neraca	135121	Aset Tetap Lainnya	2.262.112.817	-	2.262.112.817
3	Neraca	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	284.902.142.390	(84.583.771.200)	369.485.913.590
4	Neraca	162151	Software	93.301.291.070	-	93.301.291.070
5	Neraca	169315	Akumulasi Amortisasi Software	(186.160.803.795)	10.107.278.726	(196.268.082.521)
6	Neraca	133111	Gedung dan Bangunan	75.828.375.921	-	75.828.375.921
7	Neraca	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.397.768.045.918)	124.872.179.873	(2.522.640.225.791)
8	Neraca	162161	Lisensi	(827.702.237)	-	(827.702.237)
9	Neraca	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pememerintah	(590.426.834.967)	-	(590.426.834.967)
10	Neraca	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	658.073.064.648	-	658.073.064.648
11	Neraca	134111	Jalan dan Jembatan	(365.650.636.477)	-	(365.650.636.477)
12	Neraca	134112	Irigasi	(146.952.343.347)	-	(146.952.343.347)
13	Neraca	134113	Jaringan	106.145.968.511	-	106.145.968.511
14	Neraca	135111	Aset Tetap Renovasi	(191.789.718.304)	-	(191.789.718.304)
15	Neraca	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(3.847.823.944.788)	567.157.674.952	(4.414.981.619.740)
16	Neraca	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(777.837.620.397)	450.583.701.173	(1.228.421.321.570)
17	Neraca	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(7.312.057.915)	(3.953.361.845)	(3.358.696.070)
18	Neraca	131111	Tanah	204.146.370.305	-	204.146.370.305
19	Neraca	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.522.714.643)	61.482.718.963	(65.005.433.606)
20	Neraca	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	(95.789.997)	-	(95.789.997)
21	Neraca	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(7.117.358.064)	10.641.291.127	(17.758.649.191)
22	Neraca	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	(15.093.511.772)	-	(15.093.511.772)
23	Neraca	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	12.423.308.715	-	12.423.308.715
24	Neraca	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	(608.078.091.014)	-	(608.078.091.014)
25	Neraca	162171	Hasil Kajian/Penelitian	25.642.229.258	-	25.642.229.258
26	Neraca	162121	Hak Cipta	-	-	-
27	Neraca	162141	Paten	-	-	-
28	Neraca	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(38.440.812)	(4.290.361)	(34.150.451)
29	Neraca	169314	Akumulasi Amortisasi Paten	(231.919.983)	(53.182.060)	(178.737.923)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

IKHTISAR No.11b
TOTAL DAMPAK APLIKASI KE LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

NO	JENIS LK	AKUN_DEBET	URAIAN	DEBET	KREDIT	NET
1	Neraca	132111	Peralatan dan Mesin	4.522.544.667.497	-	4.522.544.667.497
30	Neraca	169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	994.247.925	(21.166.300)	1.015.414.225
31	Neraca	169111	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.780.461.268	-	2.780.461.268
32	Neraca	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	(6.370.374)	-	(6.370.374)
33	LPE	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(2.735.482.429.161)	2.735.482.429.161
34	LPE	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	185.877.226.070	(185.877.226.070)
35	LPE	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(2.735.482.429.161)	2.735.482.429.161
36	LPE	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	185.877.226.070	(185.877.226.070)
37	LO	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(84.583.771.200)	-	(84.583.771.200)
38	LO	592115	Beban Amortisasi Software	10.107.278.726	-	10.107.278.726
39	LO	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	124.872.179.873	-	124.872.179.873
40	LO	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	567.157.674.952	-	567.157.674.952
41	LO	591312	Beban Penyusutan Irigasi	450.583.701.173	-	450.583.701.173
42	LO	591313	Beban Penyusutan Jaringan	(3.953.361.845)	-	(3.953.361.845)
43	LO	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61.482.718.963	-	61.482.718.963
44	LO	592116	Beban Amortisasi Lisensi	10.641.291.127	-	10.641.291.127
45	LO	592114	Beban Amortisasi Paten	(53.182.060)	-	(53.182.060)
46	LO	592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(21.166.300)	-	(21.166.300)
47	LO	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	(4.290.361)	-	(4.290.361)
48	LO	596111	Beban Pelepasan Aset	-	(608.084.461.388)	608.084.461.388



IKHTISAR No.11c
IDENTIFIKASI ANOMALI
PER 31 DESEMBER 2021

NO.	KODE BA	URAIAN BA	DATA NORMALISASI				DATA TINDAK LANJUT NORMALISASI				DALAM PROSES IDENTIFIKASI			
			JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU	JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU	JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo	19	(135.728.470)	(107.960.000)	(27.768.470)	19	-	-	-	-	-	-	-
2	004	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	930	(55.149.546.991)	(8.614.556.989)	(46.534.990.002)	718	50.558.319.556	14.783.049.178	35.775.270.378	212	(5.083.458.559)	(1.024.031.301)	(4.059.427.258)
3	005	Mahkamah Agung Republik Indonesia	7.632	(960.286.144.407)	(84.911.042.608)	(875.375.101.799)	3.857	535.605.153.578	102.884.978.892	432.720.174.686	3.775	(297.683.002.296)	(23.864.658.728)	(273.818.343.568)
4	006	Kejaksaaan Republik Indonesia	3.409	(147.862.964.855)	(38.911.248.398)	(108.951.716.457)	2.016	123.434.139.127	53.419.919.590	70.014.219.537	1.393	(33.238.779.349)	(11.069.348.966)	(22.169.430.383)
5	010	Kementerian Dalam Negeri	1.962	(57.354.103.374)	(15.871.885.437)	(41.482.217.937)	1.117	14.752.274.031	10.981.713.366	3.770.560.665	845	(42.571.682.143)	(6.605.223.002)	(35.966.459.141)
6	011	Kementerian Luar Negeri	1.162	(24.818.453.307)	(5.648.625.114)	(19.169.828.193)	529	21.276.968.259	15.509.769.108	5.767.199.151	633	(7.561.608.476)	(4.748.688.274)	(2.812.920.202)
7	012	Kementerian Pertahanan	626.171	(45.260.438.223.000)	(9.959.596.403.261)	(35.300.841.819.739)	321.965	42.376.973.458.154	14.990.629.383.967	27.386.344.074.187	304.206	(3.039.865.023.153)	(2.381.785.168.981)	(658.079.854.172)
8	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4.546	(5.822.289.277.914)	(146.510.159.952)	(5.675.779.117.962)	3.466	5.710.430.083.442	380.288.531.528	5.330.141.551.914	1.080	(93.189.800.869)	(11.886.924.485)	(81.302.876.384)
9	018	Kementerian Pertanian	28.163	(3.962.904.228.532)	(98.875.739.018)	(3.864.028.489.514)	23.507	3.890.160.007.815	155.221.124.262	3.734.938.883.553	4.656	(36.937.945.880)	(4.965.847.069)	(31.972.098.811)
10	019	Kementerian Perindustrian	42.400	(1.081.477.774.553)	(230.329.321.232)	(851.148.453.321)	21.923	974.407.192.270	226.505.364.198	747.901.828.072	20.477	(107.462.375.481)	(39.805.900.776)	(67.656.474.705)
11	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.024	(398.786.770.074)	(67.868.491.288)	(330.918.278.786)	1.462	395.103.868.460	77.609.098.859	317.494.769.601	562	(3.224.730.982)	(3.021.375.871)	(203.355.111)
12	022	Kementerian Perhubungan	56.027	(11.523.579.313.217)	(1.853.864.676.382)	(9.669.714.636.835)	30.803	10.890.454.878.493	2.976.591.243.669	7.913.863.634.824	25.224	(537.577.187.731)	(145.845.315.232)	(391.731.872.499)
13	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan	182.335	(4.934.568.491.082)	(734.628.722.621)	(4.199.939.768.461)	58.123	4.368.616.601.378	1.159.131.026.391	3.209.485.574.987	124.212	(539.494.825.565)	(208.960.764.014)	(330.534.061.551)
14	024	Kementerian Kesehatan	12.680	(15.848.018.229.840)	(351.330.299.827)	(15.496.687.930.013)	7.889	15.535.832.649.143	337.856.020.505	15.197.976.628.838	4.791	(193.719.030.927)	(64.266.414.090)	(129.452.616.837)
15	025	Kementerian Agama	174.229	(1.043.614.551.966)	(182.497.429.846)	(861.117.122.120)	111.299	867.070.742.500	201.736.780.339	665.333.962.161	62.930	(99.314.109.527)	(47.810.146.127)	(51.503.963.400)
16	026	Kementerian Ketenagakerjaan	8.435	(315.951.960.752)	(136.103.107.174)	(179.848.853.578)	7.031	264.605.225.568	156.096.516.090	108.508.709.478	1.404	(18.813.056.924)	(7.915.894.867)	(10.897.162.057)
17	027	Kementerian Sosial	4.327	(933.413.927.187)	(33.688.844.863)	(899.725.082.324)	2.044	926.939.227.545	60.627.416.737	866.311.810.808	2.283	(4.702.004.707)	(3.495.277.597)	(1.206.727.110)
18	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.549	(226.752.527.190)	(115.195.768.893)	(111.556.758.297)	11.181	182.440.911.093	102.405.261.132	80.035.649.961	7.368	(49.641.272.682)	(24.247.512.606)	(25.393.760.076)
19	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.643	(385.512.122.227)	(75.228.834.888)	(310.283.287.339)	3.205	325.763.861.869	105.184.713.120	220.579.148.749	2.438	(67.540.542.404)	(34.653.085.484)	(32.887.456.920)
20	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	28.131	(18.023.953.910.838)	(4.542.443.345.097)	(13.481.510.565.741)	10.693	17.064.091.866.922	9.175.856.267.151	7.888.235.599.771	17.438	(1.380.299.350.743)	(122.953.683.054)	(1.257.345.622.699)
21	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum	278	(716.046.266)	(738.792.376)	22.746.110	195	560.851.091	52.693.145	508.157.946	83	(159.500.440)	(192.732.985)	33.172.545
22	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	196	(6.290.807.697)	(4.965.855.922)	(1.324.951.775)	152	6.321.490.461	5.053.715.565	1.267.774.896	44	(56.276.994)	(56.276.994)	56.276.994
23	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Ba	2.290	(38.808.065.025)	(25.517.052.414)	(13.291.012.611)	1.406	36.202.127.892	29.435.748.879	6.766.379.013	884	(6.722.532.396)	(2.662.066.178)	(4.160.466.218)
24	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	233	(54.561.067)	(27.324.205)	(27.326.862)	143	54.561.067	24.180.938	30.380.129	90	(48.092.495)	(48.092.495)	48.092.495
25	042	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset d	78	(28.667.381.158)	5.417.087.697	(34.084.448.855)	74	27.636.688.694	9.385.577.133	18.251.111.561	4	(167.952.188)	(39.971.789)	(127.980.399)
26	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Me	399	(7.228.281.125)	(19.347.789.848)	12.119.508.723	286	6.102.134.300	3.327.598.873	2.774.535.427	113	(1.164.817.825)	(16.328.416.167)	15.163.598.342
27	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan P	34	-	(125.000)	125.000	17	-	-	-	17	-	2.068.750	(2.068.750)
28	050	Badan Intelijen Negara	4.260	(1.961.949.374.908)	(231.373.635.402)	(1.730.575.739.506)	4.252	1.959.898.936.308	1.713.694.017.708	246.204.918.600	8	(2.050.438.600)	(497.481.075)	(1.552.957.525)
29	051	Badan Siber dan Sandi Negara	13	(272.980.579)	(108.617.966)	(164.362.613)	13	200.615.283	133.224.716	67.390.567	-	-	-	-
30	052	Dewan Ketahanan Nasional	4	(34.577.000)	(34.577.000)	-	2	34.577.000	34.577.000	-	2	(34.577.000)	(34.577.000)	-
31	054	Badan Pusat Statistik	3.234	(50.211.384.893)	(6.700.115.706)	(43.511.269.187)	1.975	25.544.300.034	8.052.349.831	17.491.950.203	1.259	(26.090.479.127)	(1.719.068.806)	(24.371.410.321)
32	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pe	19.064	(193.309.826.669)	(37.031.076.363)	(156.278.750.306)	7.778	183.028.106.561	51.300.825.486	131.727.281.075	11.286	(14.760.311.992)	(8.136.372.255)	(6.623.939.737)
33	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	9	(14.415.936.138)	(139.748.311)	(14.276.187.827)	1	14.415.936.138	4.757.258.925	9.658.677.213	8	-	(1.110.075)	1.110.075
34	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	468	(6.695.831.964)	(712.808.378)	(5.983.023.586)	346	5.686.996.029	2.571.041.433	3.115.954.596	122	(1.079.154.047)	34.829.928	(1.113.983.975)
35	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	98.502	(10.181.287.139.449)	(1.500.861.143.350)	(8.680.425.996.099)	54.812	10.143.330.115.357	1.912.325.512.636	8.231.004.602.721	43.690	(184.084.480.586)	(285.196.383.529)	101.111.902.943
36	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	516	(33.459.675.900)	(5.942.237.287)	(27.517.438.613)	410	32.972.071.432	7.141.831.783	25.830.239.649	106	(632.921.600)	(92.319.784)	(540.601.816)
37	064	Lembaga Ketahanan Nasional	109	(1.996.761.410)	(1.638.988.833)	(357.772.577)	109	1.996.761.410	1.676.059.452	320.701.958	-	-	-	-
38	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2	(158.500.000)	(39.625.000)	(118.875.000)	1	-	-	-	1	(158.500.000)	(39.625.000)	(118.875.000)
39	066	Badan Narkotika Nasional	873	(64.434.772.466)	(10.821.801.634)	(53.612.970.832)	689	74.838.865.721	32.582.887.444	42.255.978.277	184	(5.116.438.749)	(1.260.825.055)	(3.855.613.694)
40	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tert	3.979	(43.987.564.535)	(35.529.095.353)	(8.458.469.182)	1.607	48.388.333.308	22.040.896.506	26.347.436.802	2.372	(16.274.803.888)	(23.006.602.672)	6.731.798.784
41	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana	2.312	(8.752.549.267)	(1.252.948.118)	(7.499.601.149)	1.066	9.218.547.423	3.288.677.936	5.929.869.487	1.246	(309.496.467)	(294.498.991)	(14.997.476)
42	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	30	(13.679.221.750)	(1.191.439.462)	(12.487.782.288)	30	13.679.221.750	2.475.472.290	11.203.744.460	-	-	-	-
43	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	489	(58.620.262.518)	(4.363.943.601)	(54.256.318.917)	351	57.349.688.128	10.943.332.619	46.406.355.509	138	(1.754.624.740)	(448.500.963)	(1.306.123.777)
44	076	Komisi Pemilihan Umum	2.273	(9.445.122.179)	(6.487.511.656)	(2.957.610.523)	1.237	7.321.709.531	4.661.157.367	2.660.552.164	1.036	(2.962.049.070)	(2.112.517.822)	(849.531.248)
45	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	4.111	(43.273.491.886)	(20.161.921.150)	(23.111.570.736)	2.219	54.642.052.775	37.769.961.096	16.872.091.679	1.892	3.986.305.420	(3.395.694.712)	7.382.000.132
46	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	716	(94.373.621.813)	(11.352.026.093)	(83.385.495.720)	493	96.954.186.134	27.742.430.057	69.211.756.077	223	(2.396.463.373)	(251.305.709)	(2.145.157.664)
47	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	326	(10.934.103.112)	(2.523.711.305)	(8.410.391.807)	169	4.329.961.253	2.827.441.015	1.502.520.238	157	(1.501.687.500)	(713.735.164)	(787.952.336)
48	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.236	(7.996.786.215)	(6.911.970.608)	(1.084.815.607)	998	7.840.270.218	7.259.880.977	5				

IKHTISAR No.11c
 IDENTIFIKASI ANOMALI
 PER 31 DESEMBER 2021

NO.	KODE BA	URAIAN BA	DATA NORMALISASI				DATA TINDAK LANJUT NORMALISASI				DALAM PROSES IDENTIFIKASI			
			JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU	JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU	JUMLAH NUP	RPH_ASET	RPH_SUSUT	RPH_BUKU
58	095	Dewan Perwakilan Daerah	21	(204.600.000)	(148.133.334)	(56.466.666)	21	204.600.000	65.978.000	138.622.000	-	-	-	-
59	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	10	(33.541.292.075)	-	(33.541.292.075)	9	33.344.192.575	3.817.122.245	29.527.070.330	1	(48.000.000)	-	(48.000.000)
60	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan	761	(7.148.698.172)	(3.377.019.994)	(3.771.678.178)	573	5.216.280.072	3.432.299.972	1.783.980.100	188	(273.164.840)	(282.215.100)	9.050.280
61	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2.412	(378.703.504.203)	(103.869.991.946)	(274.833.512.257)	1.641	379.469.200.990	107.551.944.149	271.917.256.841	771	(4.154.185.490)	(2.036.947.070)	(2.117.238.420)
62	110	Ombudsman Republik Indonesia	5	(51.310.000)	(55.201.730)	3.891.730	3	-	-	-	2	(25.500.000)	(25.500.000)	-
63	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	90	(48.198.658.673)	(3.191.133.788)	(45.007.524.885)	90	48.198.658.673	3.743.297.739	44.455.360.934	-	-	-	-
64	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be	3.492	(330.838.163.712)	(105.416.576.533)	(225.421.587.179)	1.557	141.125.894.924	108.487.364.743	32.638.530.181	1.935	(194.375.390.655)	(244.708.647.474)	50.333.256.819
65	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	2.044	(85.225.735.342)	(263.089.802)	(84.962.645.540)	2.042	85.223.690.442	85.014.622.541	209.067.901	2	(2.044.900)	(2.044.900)	-
66	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	810	(10.408.969.488)	(3.909.078.153)	(6.499.891.335)	565	10.125.049.988	4.731.254.336	5.393.795.652	245	(928.487.730)	(550.772.467)	(377.715.263)
67	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indo	762	(138.337.941.672)	(3.248.175.746)	(135.089.765.926)	673	137.811.725.672	16.721.668.798	121.090.056.874	89	(172.396.000)	(153.067.109)	(19.328.891)
68	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Ind	1.082	(291.274.993.083)	(51.685.253.529)	(239.589.739.554)	1.003	248.623.674.761	140.547.419.261	108.076.255.500	79	(38.536.173.539)	(6.667.331.384)	(31.868.842.155)
69	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Be	47	(6.884.667.790)	(1.969.316.563)	(4.915.351.227)	46	6.854.034.025	966.336.850	5.887.697.175	1	(30.633.765)	(6.815.005)	(23.818.760)
70	119	Badan Keamanan Laut	139	(19.783.743.042)	(12.762.354.113)	(7.021.388.929)	92	19.013.893.041	12.789.269.992	6.224.623.049	47	(17.484.021.840)	(10.602.140.012)	(6.881.881.828)
71	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman d	64	(104.180.000)	(60.192.891)	(43.987.109)	5	104.180.000	62.508.000	41.672.000	59	-	-	-
72	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	43.000.000	(43.000.000)
73	999	Bendahara Umum Negara	255	(211.057.752.764)	(50.351.502.124)	(160.706.250.640)	245	124.646.067.692	45.443.641.656	79.202.426.036	10	-	(3.743.783.258)	3.743.783.258
TOTAL	TOTAL		1.369.686	(125.805.257.819.924)	(21.093.655.865.869)	(104.711.601.954.055)	713.998	118.849.423.789.164	34.909.470.552.843	83.939.953.236.321	655.688	(7.184.217.789.511)	(3.785.749.879.619)	(3.398.467.909.892)

LAMPIRAN



DJKN

Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Lantai 11 Utara, Gedung Syafrudin Prawiranegara II
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Ps. Baru
Sawah Besar, Jakarta Pusat
(021) 1500991